RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021-2026



RPJMD
2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo2 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketrentaman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD DAN RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW Provinsi Lampung, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW Kabupaten Lampung Tengah, RPJPD Kabupaten Lampung Tengah, RPJPN dan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas bawah *(top-down)* dan bawah atas *(bottom up)*.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a. holistik-tematik;
b. integratif; dan
c. spasial

BAB IV
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	:	Gambaran Umum Keuangan Daerah
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah
BAB IX	:	Penutup

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) Pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui penjabaran ke dalam RKPD, Renstra PD, Renja PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

(4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan RPJMD Renstra PD.

(3) Kepala PD melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

(4) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG : 04/ 1191 /LTG/2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 ini disusun sebagai penyempurnaan atas dokumen rancangan akhir, rancangan awal, dan rancangan teknokratik yang sebelumnya telah disusun dan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana petunjuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Substansi RPJMD adalah penjabaran visi, misi, janji-janji kampanye, dan program proritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun ke depan serta menyelaraskan dengan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, strategi, arah kebijakan, program strategis, kerangka pendanaan, dan indikator kinerja pembangunan daerah. RPJMD tersebut akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD dan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2016 ini. Kami berharap kerja sama dan dukungan semua pihak akan terus terjalin dan terbangun pada tahap pelaksanaan RPJMD hingga mampu mewujudkan visi yaitu “Rakyat Lampung Tengah Berjaya”.

Gunung Sugih, 4 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH

dto

MUSA AHMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ i
DAFTAR ISI ~ ii
DAFTAR TABEL ~ v
DAFTAR GAMBAR ~ xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ~ 1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ~ 1-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen ~ 1-9
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan ~ 1-10
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah ~ 1-18
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW ~ 1-18
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renstra Perangkat Daerah ~ 1-19
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RKPD ~ 1-20
1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renja Perangkat Daerah ~ 1-21
1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan KLHS RPJMD ~ 1-22
1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya ~ 1-23
1.4 Maksud dan Tujuan ~ 1-23
1.5 Sistematika Penulisan ~ 1-24

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ~ 2-1
2.1.1 Aspek Geografi ~ 2-1
2.1.2 Aspek Demografi ~ 2-26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ~ 2-28
2.2.1 Pertumbuhan PDRB ~ 2-28
2.2.2 Inflasi ~ 2-35
2.2.3 PDRB Perkapita ~ 2-35
2.2.4 Indeks Gini ~ 2-36
2.2.5 Penduduk Miskin ~ 2-38
2.2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia ~ 2-42
2.2.7 Pencapain Kapabilitas Dasar Manusia ~ 2-44
2.2.7.1 Dimensi Pengetahuan. ~ 2-45
2.2.7.2 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat ~ 2-46
2.2.7.3 Pengeluaran Per Kapita ~ 2-48
2.2.8 Angka Melek Huruf ~ 2-50
2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk ~ 2-50
2.2.10 Prevalensi Balita Gizi Kurang ~ 2-51
2.2.11 Cakupan Desa Siaga Aktif ~ 2-51
2.2.12 Angka Partisipasi Angkatan Kerja ~ 2-52
2.2.13 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas ~ 2-52
2.2.14 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I ~ 2-53
2.2.15 Indek Kepuasan Masyarakat ~ 2-54

2.2.16 Presentase PAD terhadap Pendapatan ~ 2-54
2.2.17 Opini BPK ~ 2-55
2.2.18 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) ~ 2-55
2.2.19 Penguatan Cadangan Pangan ~ 2-56
2.2.20 Penanganan Daerah Rawan Pangan ~ 2-56
2.2.21 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kosntan ~ 2-57
2.2.22 Produksi Sektor Pertanian ~ 2-57
2.2.23 Produksi Sektor Perkebunan ~ 2-58
2.2.24 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ~ 2-58
2.2.25 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ~ 2-59
2.2.26 Pertumbuhan Industri ~ 2-59
2.3 Aspek Pelayanan Umum ~ 2-59
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar ~ 2-60
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ~ 2-114
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan ~ 2-174
2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan ~ 2-198
2.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ~ 2-212
2.3.6 Fokus Layanan Umum Kewilayahan ~ 2-212
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ~ 2-213
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ~ 2-213
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ~ 2-214
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ~ 2-215
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ~ 2-215
2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal ~ 2-216
2.6 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2-223
2.7 Pencapaian Kinerja RPJMD Periode 2015-2020 ~ 2-282
2.7.1 Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2016-2020 ~ 2-283
2.7.2 Capaian Kerjasama ~ 2-289

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ~ 3-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ~ 3-2
3.1.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah ~ 3-2
3.1.1.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah ~ 3-4
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah ~ 3-7
3.1.2 Neraca Daerah ~ 3-10
3.1.2.1 Aset ~ 3-10
3.1.2.2 Kewajiban ~ 3-10
3.1.2.3 Ekuitas Dana ~ 3-11
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ~ 3-16
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah ~ 3-16
3.2.2 Analisis Pembiayaan ~ 3-16
3.3 Kerangka Pendanaan ~ 3-20
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja ~ 3-20
3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan ~ 3-20
3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah ~ 3-21
3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah ~ 3-22
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan ~ 3-27

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan ~ 4-1
4.1.1 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ~ 4-1
4.1.1.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar ~ 4-1

4.1.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ~ 4-4
4.1.1.3 Layanan Urusan Pilihan ~ 4-10
4.1.1.4 Layanan Urusan Penunjang ~ 4-12
4.1.1.5 Fungsi Lainnya Pendukung Urusan ~ 4-14
4.1.1.6 Pemerintahan Umum ~ 4-14
4.2 Isu Strategis ~ 4-15
4.2.1 Telaah Isu Strategis Lingkungan Global ~ 4-15
4.2.2 Telaah Isu Strategis Terhadap KLHS ~ 4-17
4.2.3 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJM Nasional ~ 4-19
4.2.4 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ~ 4-21
4.2.5 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Daerah Lain ~ 4-24
4.2.6 Telaah Isu Strategis Terhadap RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 ~ 4-27
4.2.7 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 ~ 4-33
4.2.8 Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ~ 4-40

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1 Visi ~ 5-1
5.2 Misi ~ 5-4
5.3 Tujuan dan Sasaran ~ 5-9

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1 Strategi ~ 6-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan ~ 6-8
6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan ~ 6-8
6.2.2 Isu Strategis dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ~ 6-10
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial ~ 6-15
6.3.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang ~ 6-15
6.4 Program Pembangunan Daerah ~ 6-18
6.4.1 Program Unggulan Kabupaten Lampung Tengah ~ 6-18
6.4.2 Program Rekomendasi KLHS Kabupaten Lampung Tengah ~ 6-37
6.6 Program Pembangunan Daerah ~ 6-44

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan ~ 7-1
7.2 Program Perangkat Daerah ~ 7-5

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama ~ 8-1
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ~ 8-5

BAB IX PENUTUP
9.1 Pedoman Transisi ~ 9-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan ~ 9-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	1-4
Tabel 1.2	Sinkronisasi RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi Lampung	~	1-12
Tabel 2.1	Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	~	2-4
Tabel 2.2	Tutupaan Lahan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	~	2-13
Tabel 2.3	Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempa, Dan Kebakaran Hutan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-25
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dan Tahun 2020	~	2-26
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020	~	2-27
Tabel 2.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015–2020 (Miliar Rupiah)	~	2-29
Tabel 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015–2020 (Miliar Rupiah)	~	2-30
Tabel 2.8	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015–2020 (Miliar Rupiah)	~	2-32
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung TengahTahun 2015–2020	~	2-33
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2015–2020	~	2-34
Tabel 2.11	Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 – 2020	~	2-35
Tabel 2.12	Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020	~	2-36
Tabel 2.13	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PDBT Data 2015-2017 Belum Akurat Karena Belum Terintegrasi Dengan Aplikasi SIKS NG	~	2-42
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	~	2-43
Tabel 2.15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-44
Tabel 2.16	Dimensi Pengetahuan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-46
Tabel 2.17	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Lampung Tengah	~	2-47
Tabel 2.18	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Tengah	~	2-49
Tabel 2.19	Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah	~	2-50

Tabel 2.20	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Tengah	~	2-51
Tabel 2.21	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung Tengah	~	2-51
Tabel 2.22	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Lampung Tengah	~	2-52
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah	~	2-52
Tabel 2.24	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Kerja Ke Atas Kabupaten Lampung Tengah	~	2-53
Tabel 2.25	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Lampung Tengah	~	2-54
Tabel 2.26	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	~	2-54
Tabel 2.27	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-55
Tabel 2.28	Opini BPK Kabupaten Lampung Tengah	~	2-55
Tabel 2.29	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Lampung Tengah	~	2-56
Tabel 2.30	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-56
Tabel 2.31	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-57
Tabel 2.32	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB kosntan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-57
Tabel 2.33	Produksi Sektor Pertanian (PADI/Ton) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-58
Tabel 2.34	Produksi Sektor Perkebunan (Ton) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-58
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah	~	2-58
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah	~	2-59
Tabel 2.37	Pertumbuhan industri Kabupaten Lampung Tengah	~	2-59
Tabel 2.38	Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020	~	2-62
Tabel 2.39	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	~	2-64
Tabel 2.40	Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	~	2-69
Tabel 2.41	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik Per Jumlah Penduduk	~	2-71
Tabel 2.42	Jumlah Tenaga Kesehatan	~	2-73
Tabel 2.43	Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	~	2-75
Tabel 2.44	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	~	2-76
Tabel 2.45	Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan	~	2-77
Tabel 2.46	Pencapain Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan	~	2-81
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	~	2-82
Tabel 2.48	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2020	~	2-91
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-92
Tabel 2.50	Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-95

Tabel 2.51	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pengairan	~	2-96
Tabel 2.52	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2016 – 2020	~	2-100
Tabel 2.53	Perkembangan Jumlah Rumah Sehat (Rumah Layak Huni) Tahun 2016 – 2020	~	2-100
Tabel 2.54	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2016 – 2020	~	2-100
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Pengguna Listrik Tahun 2016–2020	~	2-100
Tabel 2.56	Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2016–2020	~	2-101
Tabel 2.57	Penataan Ruang	~	2-101
Tabel 2.58	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	~	2-103
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	~	2-105
Tabel 2.60	Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	~	2-107
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	~	2-107
Tabel 2.62	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-110
Tabel 2.63	Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	~	2-113
Tabel 2.64	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2015 – 2020	~	2-117
Tabel 2.65	Pencapain Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2020 di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-118
Tabel 2.66	Pencapaian Kinerja Indek Pangarusataaman Gender (IPG)	~	2-122
Tabel 2.67	Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	~	2-123
Tabel 2.68	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2016 – 2020	~	2-127
Tabel 2.69	Perkembangan Ketersediaan Energi, Lemak, Protein Perkapita Perhari Tahun 2016 – 2020	~	2-127
Tabel 2.70	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2020	~	2-128
Tabel 2.71	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Tengah 2015 – 2020	~	2-129
Tabel 2.72	Kebutuhan Pangan di Lampung Tengah 2015-2020	~	2-129
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Pangan 2015-2020	~	2-131
Tabel 2.74	Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2019	~	2-132
Tabel 2.75	Pencapain Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020	~	2-133
Tabel 2.76	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015- 2020	~	2-136
Tabel 2.77	Pencapaian Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah 2016-2020	~	2-137
Tabel 2.78	Klasifikasi Indek Desa Membangun Tahun 2017-2020 di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-139
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tahun 2015-2020	~	2-141

Tabel 2.80	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015- 2020	~	2-143
Tabel 2.81	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020	~	2-144
Tabel 2.82	Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2015-2020	~	2-145
Tabel 2.83	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2020	~	2-153
Tabel 2.84	Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2020	~	2-154
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Dibidang Perhubungan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 – 2020	~	2-155
Tabel 2.86	Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020	~	2-158
Tabel 2.87	Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Tahun 2015-2020	~	2-161
Tabel 2.88	Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2015 – 2020	~	2-162
Tabel 2.89	Perkembangan PMA dan PMDN Tahun 2015 – 2020	~	2-163
Tabel 2.90	Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2015-2020	~	2-164
Tabel 2.91	Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-165
Tabel 2.92	Peringkat PORPROV Lampung Tahun 2015-2020	~	2-166
Tabel 2.93	Pencapaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2020	~	2-166
Tabel 2.94	Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2015-2020	~	2-167
Tabel 2.95	Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015-2020	~	2-168
Tabel 2.96	Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2015-2020	~	2-169
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 2015-2020	~	2-169
Tabel 2.98	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2015-2020	~	2-171
Tabel 2.99	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2015-2020	~	2-173
Tabel 2.100	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020	~	2-175
Tabel 2.101	Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-177
Tabel 2.102	Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-177
Tabel 2.103	Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-178
Tabel 2.104	Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-178
Tabel 2.105	Objek Wisata Air Modern di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-179
Tabel 2.106	Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-179
Tabel 2.107	Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-180
Tabel 2.108	Capaian Kinerja Pembangunan BIdang Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-182

Tabel 2.109	Capaian Kinerja Pembangunan BIdang Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-184
Tabel 2.110	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2020 (Ribu Ha)	~	2-188
Tabel 2.111	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perkebunan Tahun 2015-2020	~	2-189
Tabel 2.112	Populasi Sapi, Kerbau, Kambing Di Lampung Tengah	~	2-190
Tabel 2.113	Populasi Sapi Potong Dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah	~	2-191
Tabel 2.114	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2016 – 2020	~	2-192
Tabel 2.115	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2015- 2020	~	2-193
Tabel 2.116	Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2020	~	2-194
Tabel 2.117	Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Tahun 2015 - 2020	~	2-195
Tabel 2.118	Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2015– 2020	~	2-197
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Tahun 2015 – 2020	~	2-199
Tabel 2.120	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan Tahun 2015 – 2020	~	2-201
Tabel 2.121	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015– 2020	~	2-203
Tabel 2.122	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015– 2020	~	2-204
Tabel 2.123	Persentase Kompetensi Kepegawaian Tahun 2015 – 2020	~	2-204
Tabel 2.124	Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2015– 2020	~	2-205
Tabel 2.125	Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2015 – 2020	~	2-207
Tabel 2.126	Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2015 – 2020	~	2-210
Tabel 2.127	Jumlah Rapat/ Sidang Yang Difasilitasi Tahun 2015– 2020	~	2-210
Tabel 2.128	Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2015– 2020	~	2-211
Tabel 2.129	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015– 2020	~	2-211
Tabel 2.130	Pencapaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 – 2020	~	2-212
Tabel 2.131	Pencapaian Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2015– 2020	~	2-214
Tabel 2.132	Pencapaian Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2015– 2020	~	2-215
Tabel 2.133	Pencapaian Indikator Fokus Iklim Investasi Tahun 2015– 2020	~	2-215
Tabel 2.134	Pencapaian Indikator Fokus Sumberdaya Manusia Tahun 2015– 2020	~	2-216
Tabel 2.135	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	~	2-219
Tabel 2.136	Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2020	~	2-225
Tabel 2.137	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)	~	2-268

Tabel 2.138	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)	~	2-272
Tabel 2.139	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)	~	2-276
Tabel 2.140	Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	~	2-281
Tabel 2.141	Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2020	~	2-283
Tabel 2.142	Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-289
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-2
Tabel 3.2	Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan	~	3-3
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-5
Tabel 3.4	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja	~	3-6
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lampung Tengah	~	3-6
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Lampung Tengah	~	3-7
Tabel 3.7	Rata- Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Lampung Tengah	~	3-8
Tabel 3.8	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Daerah	~	3-12
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015- 2020	~	3-16
Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran 2015-2020	~	3-18
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	~	3-18
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah	~	3-19
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah	~	3-23
Tabel 3.14	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-28
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-30
Tabel 4.1	Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis	~	4-19
Tabel 4.2	Agenda Kerja Utama Berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD Provinsi Lampung	~	4-22
Tabel 4.3	Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi, KLHS, dan Kabupaten Lampung Tengah	~	4-37
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025, Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Misi & Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	~	5-7
Tabel 5.2	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026	~	5-10
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lampung Tengah	~	6-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	6-8
Tabel 6.3	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Sosial	~	6-11
Tabel 6.4	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Ekonomi	~	6-13
Tabel 6.5	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Lingkungan	~	6-13

Tabel 6.6	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	~	6-14
Tabel 6.7	Penjabaran Program Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 Sebagaimana Dimutakhirkan Melalui Kemendagri No. 050-3708 Tahun 2020	~	6-21
Tabel 6.8	Rekomendasi KLHS dan Program Kabupaten Lampung Tengah	~	6-37
Tabel 6.9	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lampung Tengah	~	6-45
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah	~	7-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	7-6
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	8-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	8-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	1-4
Gambar 1.2	RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	~	1-20
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-4
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah		2-7
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-8
Gambar 2.5	Peta Sub Das Way Seputih Kab. Lampung Tengah	~	2-10
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-12
Gambar 2.7	Peta Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	~	2-13
Gambar 2.8	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	~	2-14
Gambar 2.9	Peta Sistem Perkotaan Kab. Lampung Tengah	~	2-20
Gambar 2.10	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir	~	2-22
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor	~	2-24
Gambar 2.12	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah	~	2-25
Gambar 2.13	Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-37
Gambar 2.14	Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-39
Gambar 2.15	Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 – 2020	~	2-39
Gambar 2.16	Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-40
Gambar 2.17	Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-41
Gambar 2.18	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-41
Gambar 2.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-43
Gambar 2.20	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-45
Gambar 2.21	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lampung Tengah		2-46
Gambar 2.22	Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-47
Gambar 2.23	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah	~	2-49
Gambar 2.24	Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)	~	2-267
Gambar 2.25	Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)	~	2-271
Gambar 2.25	Target TPB yang Tidak ada/belum ada Data (NA)	~	2-275
Gambar 4.1	Lingkungan Strategis Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026	~	4-15
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Prioritas Nasional (Nawa Cita II)	~	5-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan bahwa pelaksanakan pembangunan di daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Tujuan tersebut dilakukan melalui upaya sistematis dan terencana berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan salah satu wujud dari berjalannya fungsi pemerintahan yang secara aplikatif dilaksanakan bersamaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, serta pemberdayaan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Tujuan dari SPPN adalah (*i*) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (*ii*) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah; (*iii*) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban; (*iv*) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (*v*) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 dan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah terpilih telah dilantik pada 26 Februari 2021. Berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, daerah diharuskan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

Pada saat yang sama, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung Tengah yang maju, aman, adil, dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Untuk menjaga momentum tersebut, banyak hal baik yang sudah dibangun dan dihasilkan pada tiga tahapan sebelumnya perlu dipertahankan sekaligus perlunya penyempurnaan dan inovasi baru sejalan dengan dinamika masyarakatm perkembangan daerah serta kemajuan yang ingin diwujudkan pada periode ini.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan berdasarkan bidang urusannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam penyusunan RPJMD, diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kampung, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

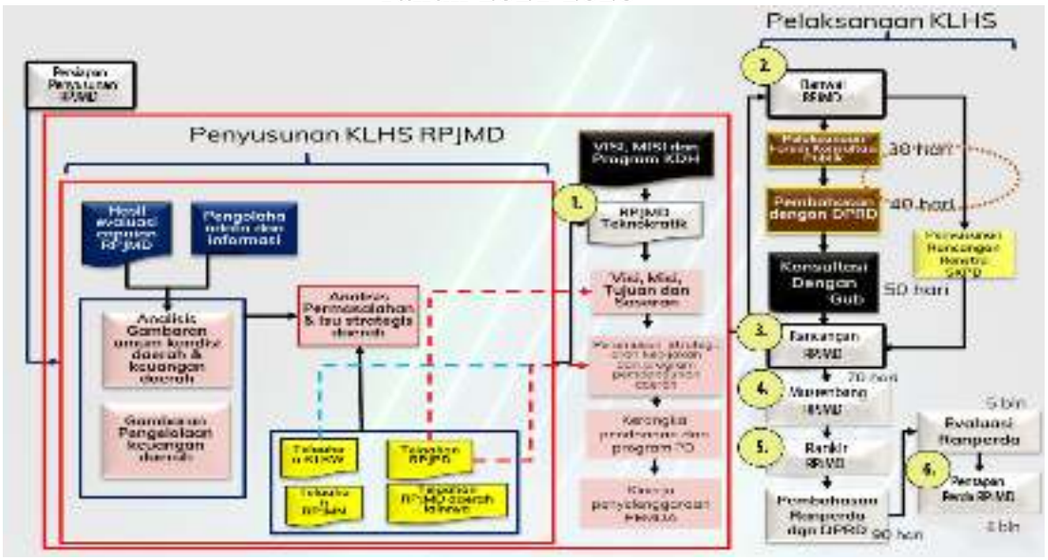
RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi dokumen yang sangat strategis, antara lain sebagai:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 tahap ke empat.
3. Pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah.
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
6. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki.
7. Pedoman penyusunan Rencana Strategis tahun 2021-2026 bagi Perangkat Daerah serta pedoman penyusunan RPJMDes bagi seluruh kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Tengah.

Tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Tabel 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026



Tabel 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Tahapan	Keterangan
Rancangan Teknokratik RPJMD	Proses teknokratik memuat evaluasi indikator kinerja pembangunanpada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah kota dan evaluasi kinerja keuangan periode lalu melalui pendekatan ilmiah, serta merumuskan isu strategis daerah. Penyusunan teknokratik berisi Bab 1hingga Bab 4
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	Pararel dengan penyusunan Teknokratik RPJMD, proses penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memetakan kondisi kinerja indikator-indikator yang terkati dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Indikator yang belum baik menjadi landasan penyusunan isu strategis pembangunan berkelanjutan.Dengan terintegrasinya kajian lingkungan dengan RPJMD diharapkanpembangunan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Rancangan Awal RPJMD	Tahap ini memuat Pengintegrasian proses teknokratik dan proses politik. Permasalahan yang dipetakan dalam teknokratik kemudian diintegrasikan dengan visi-misi-janji Kepala daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Selanjutnya tahap ini juga sudah memetakan program-program serta indikator program dan keuangan indikatif per program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berisi BAB 1 hingga Bab 9. **Konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Rancangan Awal perlu di ajukan ke DPRD, paling lambat 40 hari setelah kepala daerah dilantik. Rancangan Awal perlu di ajukan ke Provinsi paling lambat 50 hari setelah kepala daerah dilantik.**
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Tahap ini dilaksanakan pararel dengan Rancangan awal RPJMD. Tahap ini melakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak berlandaskan kepada keinginan, melainkan berlandaskan pada analisa permasalahan yang perlu diselesaikan. Apa yang dihasilkan dalam Rancangan awal Renstra menjadi masukan Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra Perangkat daerah. Rancangan awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 7.

Tahapan	Keterangan
Rancangan RPJMD	Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi publik-proses pembahasan di DPRD-proses pembahasan di Provinsi. **Setelah tahap penyusunan rancangan RPJMD diselenggarakan Musrenbang, atau paling lambat Musrenbang RPJMD dilaksanakan 75 hari setelah kepala daerah di lantik.**
Rancangan Akhir RPJMD	Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Sumber data: Permendagri No 86/2017; Permendagri No 7/2018 (diolah)

Sebagai dokumen publik, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sekitar di Provinsi Lampung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo2 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketrentaman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 tersebut dengan dokumen lain yang relevan diantaranya

RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan rencana pembangunan sektoral lainnya baik yang berada di Kabupaten Lampung Tengah maupun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman dan memperhatikan RPJMN Nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal pokok yang diperhatikan adalah bahwa arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan akan masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2025 akan memperhatikan sektor prioritas pembangunan daerah dan agenda kerja utama pembangunan daerah Provinsi Lampung. Sektor prioritas pembangunan daerah tersebut adalah (*i*) pembangunan bidang pariwisata dan budaya; (*ii*) reformasi birokrasi; (*iii*) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (*iv*) pembangunan bidang kesehatan; (*v*) pembangunan bidang pendidikan; (*vi*) pembangunan bidang infrastruktur; (*vii*) pembangunan bidang pertanian dan perdesaan; (*viii*) pembangunan bidang industri; dan (*ix*) pembangunan bidang lingkungan hidup. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah juga akan memperhatikan 33 agenda kerja utama pembangunan daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 juga dilakukan dengan memperhatikan RPJMD daerah lain yang berbatasan dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatihan dari RPJMD daerah lain adalah (*i*) visi pembangunan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan dengan penekanan misi pembangunan yaitu peningkatkan kualitas SDM sektor pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan *good governance*; (*ii*) visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan daerah yang aman, mandiri, dan sejahtera dengan penekanan misi pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kerukunan agama dan budaya, layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, perekonomian untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, *good governance,* dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (*iii*) visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, dan berdaya saing dengan penekanan misi pembangunan yaitu mengembangkan SDM produktif, kreatif, dan inovatif; perekonomian daerah yang kokoh, merata, dan berkelanjutan; memperluas cakupan prasarana dan yang terintegrasi antar wilayah; *good governance;* kehidupan masyarakat yang religius, partisipasif, taat hukum, dan mentransformasi budaya daerah sebagai sumber energi sosial pembangunan; dan (*iv*) visi pembangunan kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 1.2 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi Lampung

RPJMD Tahapan ke-IV (RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025)	**Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026**		**RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024**		**RPJMN 2019-2024**	
Visi	Visi	Program Unggulan	Visi	Agenda Kerja Utama	Visi	Agenda Pembangunan
Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera					Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	
	Misi Ke-1: Meningkatkan taraf Kesehatan, Pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat	**Pendidikan Berjaya:** Meningkatkan kualitas tingkat Pendidikan formal melalui beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan atau berprestasi **Kesehatan Berjaya:** Meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat	Misi ke-3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.	1. Smart School: pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan 2. Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota) 3. Anak Muda Berjaya: mendorong kompetensi dan	Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

RPJMD Tahapan ke-IV (RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMN 2019-2024	
		(Layanan Psuling setiap kampung, peningkatan kualitas pustu, mendorong perang kader dan bidan desa dalam peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendirian Rumah Sakit di wilayah Timur dan barat) **Pemuda Milinial Berjaya:** Menciptakan wadah yang menghimpun, menagkomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menujang peningkatan UMKM serta Ekonomi Kreatif		festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja		

RPJMD Tahapan ke-IV (RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMN 2019-2024	
Misi	Misi		Misi		Misi	
Misi ke-4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan serasi	Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa	**Sijalu (Setiap Infrastruktur Jalan Mulus):** Melakukan percepatan perbaikan jalan mulus antar kecamatan dan kampung-kampung serta daerah perbatasan	Misi ke-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.	1. Infrastruktur Lampung Berjaya: konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi	Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan Misi ke-4 :Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 3. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Misi ke-3: Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan Agama, budaya,	Misi ke-3: Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib , aman, damai serta kondusif guna peningkatan	**Keberagaman Umat Berjaya:** Menciptakan kerukunan antar umat beragama, suku, budaya dan semua golongan	Misi ke-4: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	1. Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat	1. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaa

RPJMD Tahapan ke-IV (RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMN 2019-2024	
politik dan hukum secara demokratis dan berkeadilan	investasi daerah			informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan 2. Lampung Kaya Festival: menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan		
	Misi ke-4: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui	**Petani Berjaya:** Meningkatkan produktivitas ubikayu, padi dan jagung sebagai	Misi ke-5: Membangun kekuatan ekonomi	1. Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit,	Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

RPJMD Tahapan ke-IV (RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMN 2019-2024	
	peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan	komoditas unggulan pertanian untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani **BUMKAM Berjaya:** Mendorong terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan	masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas) 2. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)		dan Berkeadilan 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	Misi ke-5: meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public guna mewujudkan tata Kelola kepemerintahan yang baik (good governance)	**Pelayanan Berjaya:** Menjaring dan melayani aspirasi masyarakat serta meningkatkan pelayanan public dan pembuatan perizinan usaha kecil menengah	Misi ke-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem penjenjangan karir berbasis kinerja dan kompetensi (job fit assessment) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Misi ke-6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

RPJMD Tahapan ke-IV (RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMN 2019-2024	
				2. APBD Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 3. Smart Village: meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation 4. Pendampingan Program Pembangunan Desa	Misi ke-9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan	

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan tahap ke-IV dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 telah mengamanatkan bahwa tahap ke-IV pembangunan daerah akan diprioritaskan pada program/kegiatan yang bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada periode lima tahun ketiga sekaligus juga bertujuan untuk memacu dan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pembangunan daerah jangka panjang yang dipedomani dalam rangka RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 adalah (*i*) peningkatkan SDM berdaya saing dan religius; (*ii*) sistem agribisnis yang maju dan tangguh; (*iii*) persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat; (*iv*) pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan serasi; (*v*) pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (*vi*) pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun Kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana program-program pemerintah daerah dengan RPPL yang ditetapkan dalam indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026 akan memuat program/kegiatan rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW. Kebijakan penataan ruang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah adalah pengembangan pertanian modern; pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang; pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan, dan pusat pelayanan secara terpadu; pengembangan minapolitan; pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana; peningkatan SDM unggul dan berdaya saing; dan eningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

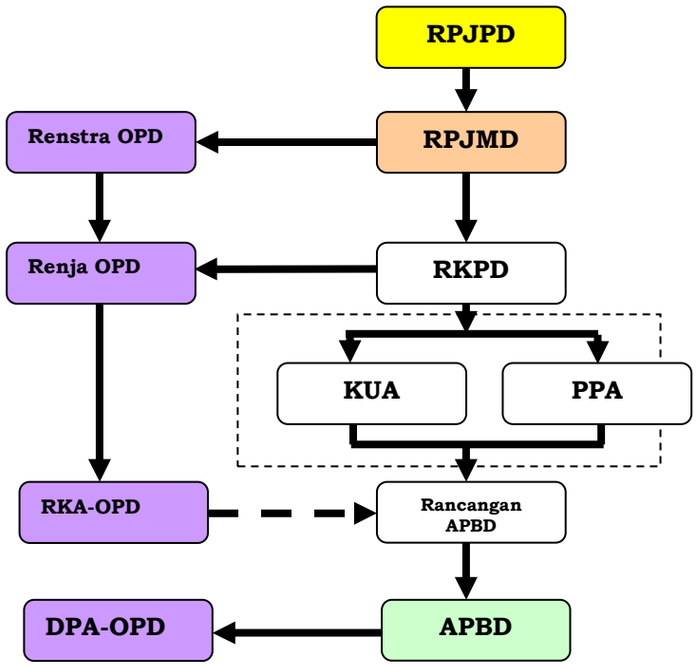
Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah juga sangat berhubungan dengan rencana program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan yang secara otomatis akan menjadi bagian dari kebijakan dan program dalam RPJMD Lampung Tengah 2021-2026.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 akan dan harus mencerminkan upaya pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu *Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya*. Program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada upaya untuk pencapaian misi pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah yaitu setiap infrastruktur jalan mulus (SIJALU) berjaya, keberagaman umat berjaya, pelayanan berjaya, pendidikan berjaya, petani berjaya, dan kesehatan berjaya.

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 juga akan memberikan arahan dan pedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam hal merumuskan tujuan pembangunan daerah. Seluruh program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu (*i*) mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan; (*ii*) mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat; (*iii*) mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas; (*iv*) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu; dan (*v*) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif.



Gambar 1.2. RPJMD Dalam Keranga Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah mulai Tahun Anggaran 2022 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah, maka di dalamnya akan memuat dan menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 setiap tahunnya. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan/kampung, kecamatan, dan kabupaten. Prioritas, sasaran, rencana program, dan kegiatan tahunan pembangunan daerah pada RKPD harus berpedoman, selaras, dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, RPJMD Provinsi Lampung, serta RPJM Nasional.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renja Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD 2021 – 2026 akan bepedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan tahunan dalam Renja OPD 2021 – 2026 bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yaitu *Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya*. Program dan kegiatan tahunan dalam Renja OPD 2021 – 2026 disusun dan dilaksanakan untuk mengimplementasikan misi pembangunanan Kabupaten Lampung Tengah yaitu percepatan infrastruktur, stabilitas keamanan, *good governance,* petani berjaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Renja OPD 2021 – 2026 juga disusun dengan memperhatikan program unggulan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dari visi misi Kepala Daerah yaitu percepatan perbaikan jalan mulus, menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama, menjaring dan melayani aspirasi masyarakat serta

meningkatkan pelayanan publik dan pembuatan perizinan usaha kecil dan menengah, meningkatkan mutu pendidikan guna menciptakan generasi cemerlang, meningkatkan produksi para petani dan mempertahankan stabilitas harga produk pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan ruang dan fasilitas pemberdayaan SDM, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Renja OPD juga disusun dengan memperhatikan tema RKPD tahunan dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Lampung Tengah.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan KLHS RPJMD

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah akan sangat berhubungan dengan isu strategis hasil konsultasi publik pemerintah daerah dalam KLHS, diantaranya, *pertama,* isu strategis pilar sosial yang berkaitan dengan isu kemiskinan, fungsi lembaga kesehatan, layanan dasar bidang sosial, *stunting*, ibu hamil dan bayi, KB, angka harapan hidup, layanan pendidikan, dan kekerasan anak dan perempuan. *Kedua,* isu strategis pilar ekonomi yang berkaitan dengan isu PDB perkapita, infrastruktur destinasi wisata dan potensi wilayah, desa tertinggal, dan PAD. *Ketiga,* isu strategis pilar lingkungan yang berkaitan dengan isu akses rumah tangga terhadap air minum, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), kesiapan menghadapi bencana, pengelolaan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan rehabilitasi lahan kritis. *Keempat,* isu strategis pilar hukum dan tata kelola kelembagaan yang berkaitan dengan isu sosialisasi aturan hukum dan undang-undang, keterwakilan perempuan, dan kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, antara lain:

1) Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG);
3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Lampung Tengah;
7) *Grand Design* Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah;
8) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Lampung;
9) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;
10) RAD Pengurangan Resiko Bencana;
11) Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
12) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
13) Aksi Penanganan Konflik Sosial.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah lima tahun ke depan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan:

a. Arah kebijakan keuangan daerah.
b. Strategi pembangunan daerah.
c. Kebijakan umum daerah; dan

d. Program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Hubungan Antar Dokumen
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Penulisan

BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Layanan Umum Kewilayahan
5. Aspek Daya Saing Daerah
6. Pencapaian Kinerja RPJMD Periode 2015 – 2020

BAB III – GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3. Kerangka Pendanaan

BAB IV - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
2. Penelaahan Isu Strategis
3. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

BAB V - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran
4. Prioritas Pembangunan Daerah 2021-2026 (Program Unggulan)

BAB VI - STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi dan Arah Kebijakan
2. Program Pembangunan Daerah
3. Program Prioritas

BAB VII – KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan

BAB VIII - KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lampung Tengah

BAB IX - PENUTUP

1. Pedoman Transisi
2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam lima tahun terakhir yang mencakup aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta gambaran kinerja pencapaian RPJMD periode sebelumnya (2016-2021) sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta menjadi pijakan perumusan target kinerja pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dalam lima tahun ke depan (2021-2026).

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

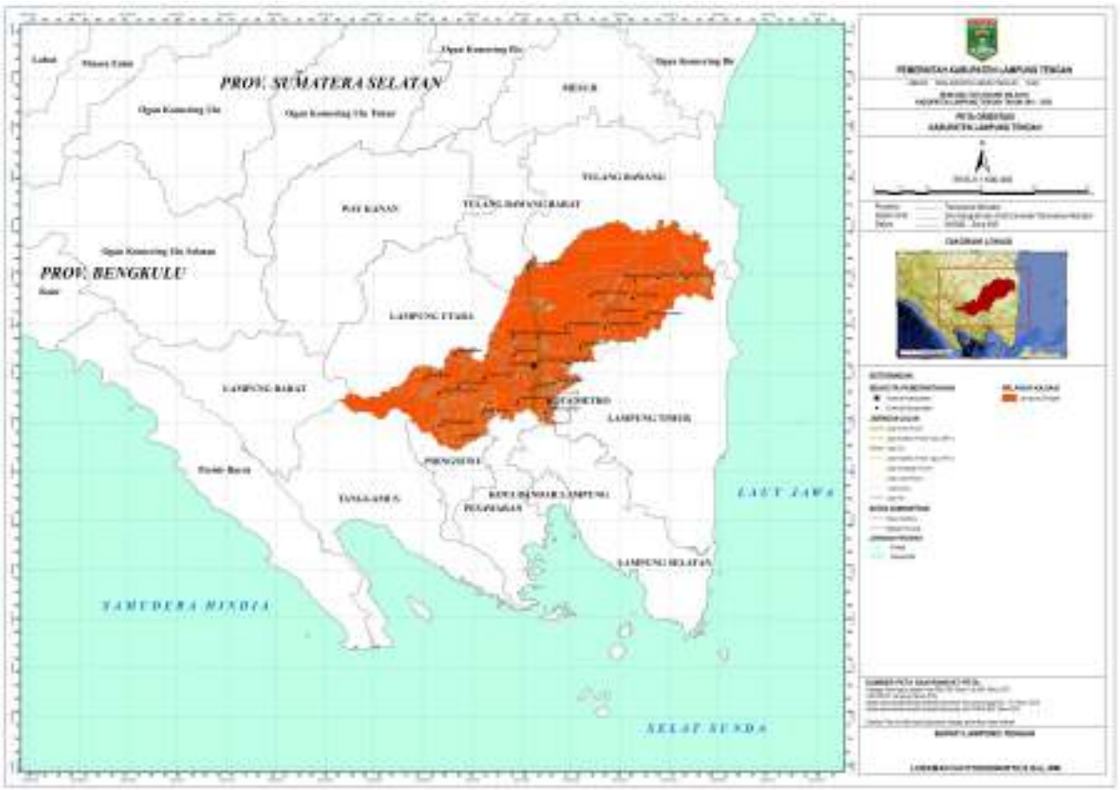
Pada bagian Aspek Geografi dan Demografi disajikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah hingga tingkat kecamatan dan kampung/kelurahan.

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki letak yang sangat strategis. Secara umum Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang dinamis dan berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 ini, luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 Km².

Berdasarkan hasil survey Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 Km². Kemudian berdasarkan hasil survey ulang oleh BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan Sistem Iinformasi Geografis Sumber Daya Alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil survey yang

dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 4.789,82 Km². Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen dan publikasi resmi.

Selanjutnya berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*), disyaratkan penggunaan Peta Batas Administrasi yang bersumber dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan ulang menggunakan *Software* SIG sehingga diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah **454.550,04 Ha** atau **4.545,50 Km²** yang dipakai saat ini sebagai luas administrasi secara resmi.

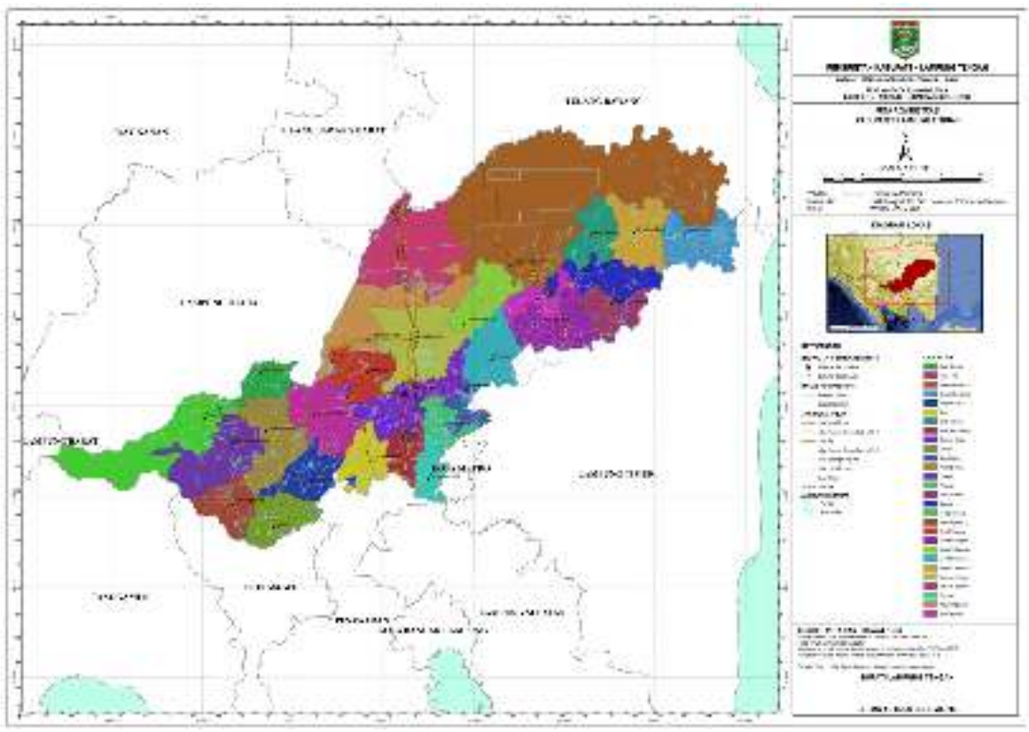
Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35’ sampai dengan 105°50’ Bujur Timur dan 4°30” sampai dengan 4°15’ Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.789,15 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 6.370,67 Ha.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Tabel 2.1
Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km^2	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164,00	3,61	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	Negri Katon	272,63	6,00	14	-
4	Pubian	Negri Kepayungan	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Negara AjiTua	162,68	3,58	12	-
6	Kalirejo	Kalirejo	111,90	2,46	17	-
7	Sendang Agung	Sendang Agung	97,90	2,15	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	17	-
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	**4**
10	Bekri	Kusumadadi	94,15	2,07	8	-
11	BumiRatu	Bulusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	**3**
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	217,15	4,78	7	**3**
17	Seputih Agung	Dono Arum	106,96	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	214,48	4,72	8	-
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	289,69	6,37	7	-
20	Spt. Mataram	Kurnia Mataram	115,96	2,55	12	-

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km²	%	Kampung	Kelurahan
21	Bdr. Mataram	Jati Datar	1.017,89	22,39	9	-
22	Spt. Banyak	Tanjung Harapan	136,62	3,01	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,34	1,37	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	118,39	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97,75	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	93,38	2,05	10	-
27	Spt. Surabaya	Gaya Baru Satu	141,55	3,11	13	-
28	Bdr. Surabaya	Surabaya Ilir	138,09	3,04	10	-
	Jumlah		**4.545,50**	**100,0**	**301**	**10**

Sumber data: Revisi RTRW KAbupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

b. Kondisi Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu :

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.
  Daerah ini terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl.
- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
  Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15%dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
- Daerah Dataran Aluvial.
  Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25-75 mdpl dengan kemiringan 0%-3%.
- Daerah Rawa Pasang Surut.
  Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5-1 mdpl
- Daerah River Basin.
  Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selanggai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, denganpengelompokkan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).

- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu:

- ***Tanah Usaha Khusus I.***

  Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.
- ***Tanah Usaha Utama IA dan B***

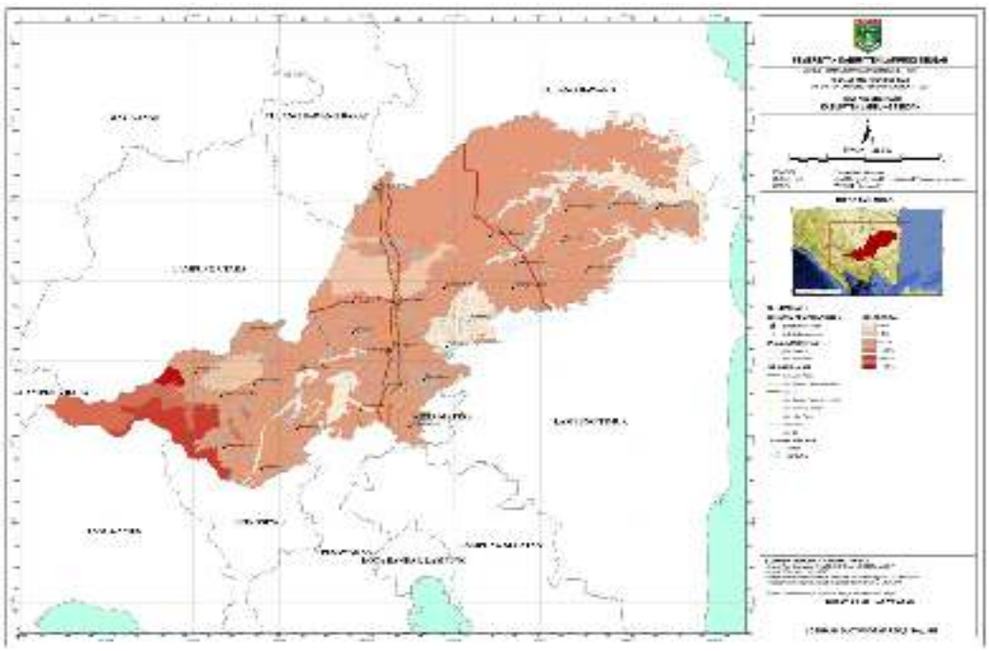
  Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggi-an ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.
- ***Tanah Usaha Utama IC***

  Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif ber-kurang.
- ***Tanah Usaha Utama ID***

  Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.
- ***Tanah Usaha Utama II***

  Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

c. Kondisi Geologi

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi yaitu Luffa Lampung (Latosol) yang hampir meliputi seluruh daerah Lampung Tengah dengan tanah Latosol dan Podsolik. Pada ketinggian 50-500 meter terdapat bahan Luffa Lampung yang semakin ke barat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (Plistosen). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh morfologi dataran rendah, sedangkan bagian barat daya fisiografinya menjadi daerah berbukit dan pegunungan karena masuk Jalur Bukit Barisan.

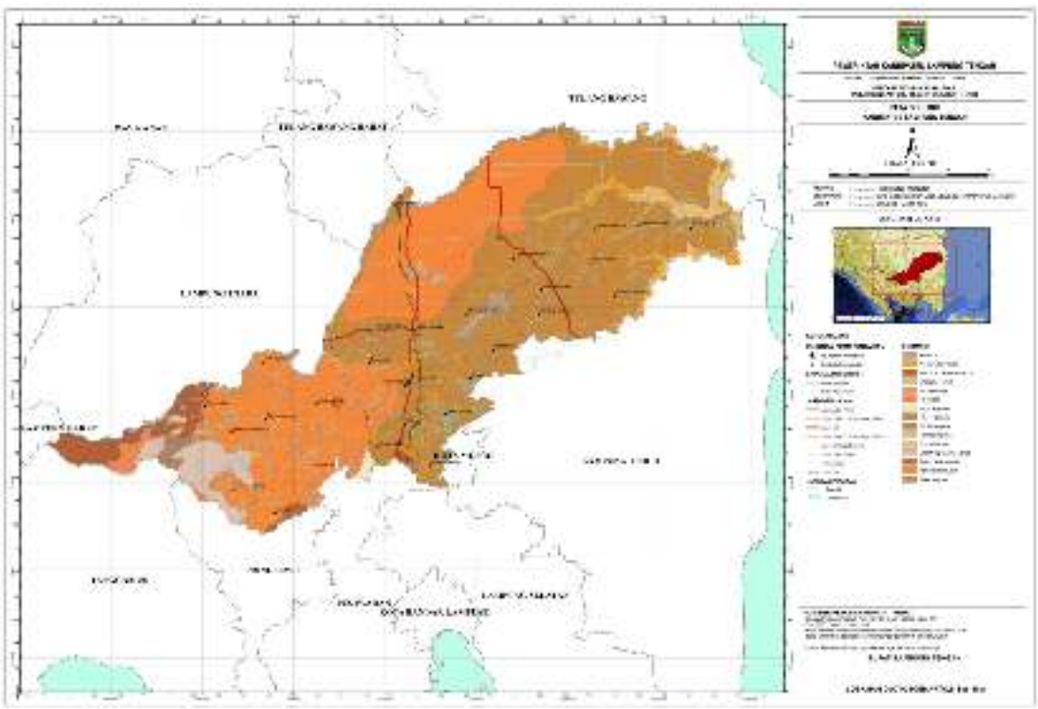
Di wilayah Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo terdapat batuan Tasobosan, Granit Kapen dan batuan Metamorf Sakis (Pratersier) selain juga mempunyai potensi sumber bahan galian batu Gamping Endapan batuan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh *tuffs withpurniceous* dan *Coarse grained clastictuffaceous*.

Bagian utara Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh endapan tuffs dengan purniceous, sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh Coarse grained clastic tuffaceous. Namun begitu formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

1. Endapan pasir kwarsa, rawa, dan alluivium.
2. Batuan gunung api kuarter muda dengan komposisi batuan breksi, lava, dan andesit-basaltis.

3. Formasi Lampung. Formasi ini terdiri atas batuan tuff berbatu apung, batuan pasir tufan dan sisipan tufit yang berumur Plestocin.
4. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batulempung.
5. Formasi Kasai. Merupakan perselingan batu pasir tufaan dengan tuff batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignis dan kayu terkesikan.
6. Formasi Gumai yang bermumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung, dan batu lanau.
7. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuff bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.
8. Formasi Talangakar yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batu pasir sisipan lignit/batubara, dan batu gamping.
9. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti Sekis, kuarsit, marmer, gneis, dan perlit.
10. Batuan terobosan Mesoizoikumakhir.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

d. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Keadaan hidrologi di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,20 ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,20 ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.

Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS lainnya seperti DAS Sekampung di bagian selatan dan DAS Tulang Bawang di bagian utara. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi jalur wilayah bagi 3 (tiga) DAS di Provinsi Lampung yaitu:

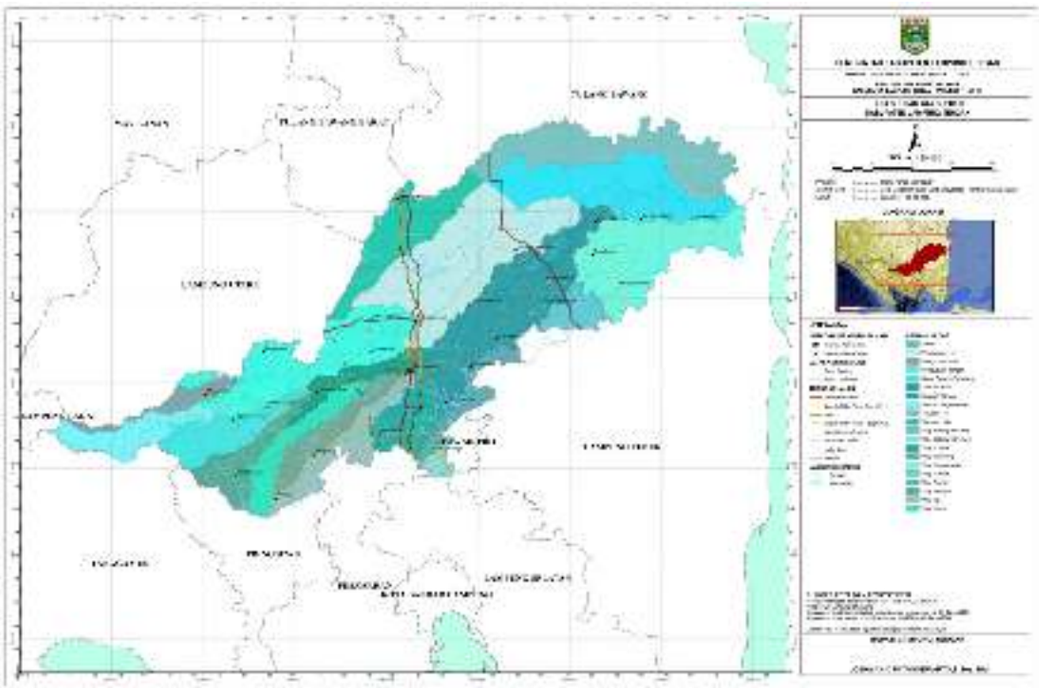
1. DAS Way Seputih.
2. DAS Way Sekampung.
3. DAS Way Tulang Bawang.

Tidak kurang dari 18 (delapan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai-sungai tersebut membelah dan membentang di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai-sungai secara keseluruhan adalah 813 km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 km). Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah, adalah:

1. Way Waya
2. Way Ketaya
3. Kali Pasir
4. Way Besi
5. Kali Macas
6. Way Tipo
7. Way Seputih
8. Way Pengakuan
9. Way Tatayan
10. Way Pubian
11. Kali Punggur

12. Way Sekampung
13. Way Raman
14. Way Bening
15. Way Keliwang
16. Way Buring
17. Way Pengubuan
18. Way Pengandungan

Gambar 2.5
Peta Sub DAS Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

e. Kondisi Klimatologi

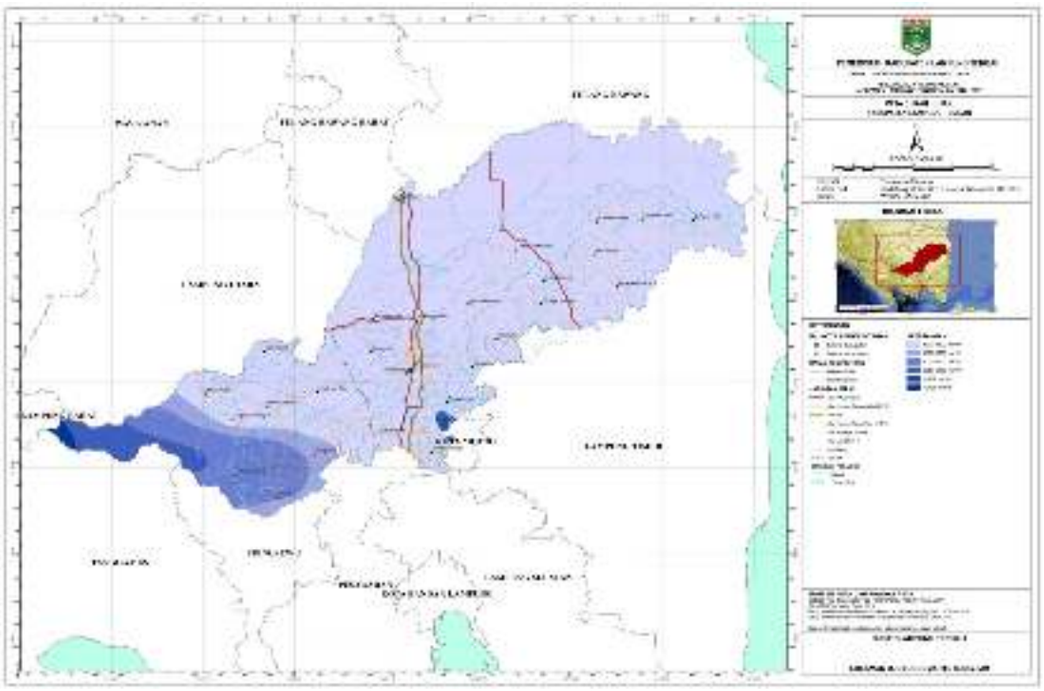
Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim A. Sebagian besar wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Lampung Tengah merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0-50 mdpl sedangkan pada wilayah bagian barat merupakan pegunungan dengan Kecamatan Pubian (Kampung Kota Batu) dengan ketinggian berkisar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan titik terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang/Sadewa) yang ketinggiannya hanya 7 meter di atas permukaan laut.

Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di wilayah utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan di atas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180-260 mm/bulan. Curah hujan rendah atau di bawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangunrejo, Kalirejo, dan Anak Tuha yang merupakan kawasan sentra perkebunan sawit di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan terbagus yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga memiliki jumlah hujan di bawah rata-rata, yaitu sekitar 80-100mm/bulan.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (Monsoon Asia). Data Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20°-28°C dengan suhu rata-rata pertahun 26,3°C. Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup baik. Kelembaban udara rata-rata di wilayah ini bekisar 80-88%.

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari samudera Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26°-28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C.

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

f. Kondisi Tutupan Lahan

Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009, seperti teruang dalam revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, didominasi oleh lahan bukan sawah sebesar 65,75 persen yang terdiri dari ladang/huma, tegal dan perkebunan, dan lahan sawah 28,929 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan pertanian sawah dan bukan sawah akan sangat berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan wilayah.

Gambar 2.7
Peta Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



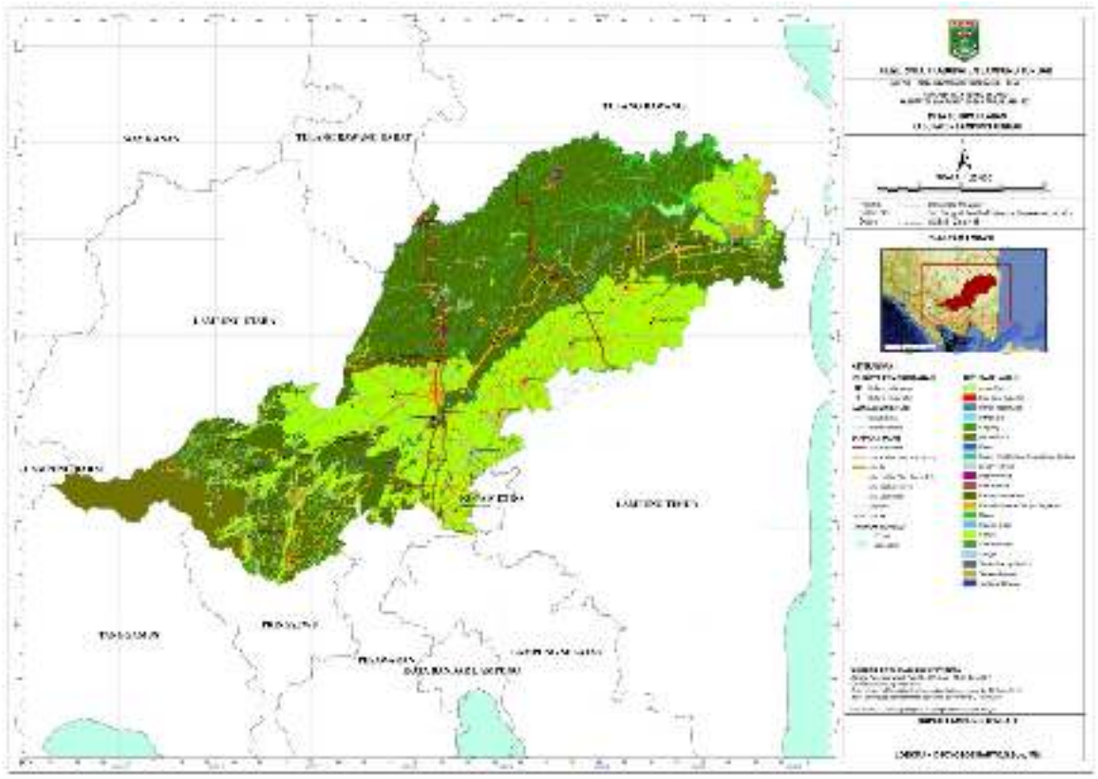
Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Tabel 2.2
Tutupaan Lahan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

No.	JENIS	LUAS (ha)	(%)
1	Alang Alang	846,54	0,186
2	Boundary Jalan Tol	772,22	0,170
3	Danau Tapal Kuda	68,86	0,015
4	Danau/Situ	224,35	0,049
5	Empang	203,00	0,045
6	Hutan Rimba	26426,75	5,814
7	Kolam Oksidasi & Pengelolaan Limbah	300,58	0,066
8	Lahan Terbuka	38,81	0,009
9	Pabrik/Industri	1535,85	0,338
10	Pemakaman	1,83	0,0004
11	Perkebunan/Kebun	219317,59	48,249
12	Permukiman dan Tempat Kegiatan	37532,66	8,257
13	Rawa	20419,93	4,492
14	Saluran Irigasi	535,54	0,118
15	Sawah	131496,07	28,929
16	Semak Belukar	5534,65	1,218
17	Sungai	2325,35	0,512
18	Tanah Kosong/Gundul	876,69	0,193
19	Tegalan/Ladang	6070,90	1,336
20	Terminal Bandara	21,88	0,005
	Jumlah	**454550,04**	**100,00**

Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

g. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031. Pertimbangan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan ruang Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis yang berwawasan lingkungan, serta mampu menggerakkan perekonomian wilayah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi meliputi kawasan perkotaan Terbanggi Besar, perkotaan Bandar Jaya, dan perkotaan Gunung Sugih (TERBAGUS) yang berfungsi sebagai Pusat pemerintahan dan pelayanan regional, pusat pendidikan unggulan terpadu,

pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat koleksi dan distribusi, serta simpul transportasi regional.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan meliputi : (1) PKL Kalirejo di kawasan perkotaan Kalirejo yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, industri kecil dan menengah, minapolitan dan permukiman; dan (2) PKL Seputih Banyak di kawasan perkotaan Seputih Banyak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, industri menengah dan besar, perdagangan jasa dan permukiman.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, yaitu PKLp Bandar Sari di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
    a. PPK Kota Gajah di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, dan minapolitan;
    b. PPK Wates di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
    c. PPK Kurnia Mataram di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengem-bangan peternakan sapi; dan;
    d. PPK Gaya Baru I di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pusat pengem-bangan pertanian tanaman pangan, pengembang-an perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi hutan lindung.

5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi:
   a. PPL Dono Arum yang berfungsi sebagai pengem-bangan peternakan sapi dan industri menengah;
   b. PPL Sendang Mulyo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri dan kawasan wisata;
   c. PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengem-bangan komoditi perkebunan, pengembangan peternakan, dan kawasan industri;
   d. PPL Sukobinangun yang berfungsi sebagai pengembang pertanian lahan kering dan kawasan industri kecil menengah;
   e. PPL Reno Basuki yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pertanian lahan basah, dan permukiman peKampung an;
   f. PPL Bina Karya Utama yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan dan permukiman pekampungan;
   g. PPL Surabaya Ilir yang berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagangan jasa, dan konservasi kawasan lindung;
   h. PPL Negeri Kepayang yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian, pengembangan perke-bunan, dan pengembangan agribisnis/industri pengolahan;
   i. PPL Gedung Sari yang berfungsi sebagai pengam-bangan pertanian lahan basah dan permukiman pekampungan;
   j. PPL Trimurjo yang berfungsi sebagai pengem-bangan pertanian lahan basah, Sentra pemasaran pertanian dan perdagangan jasa;
   k. PPL Tanggul Angin yang berfungsi sebagai pengembangan agrobisnis dan tanaman pangan, perdagangan jasa;
   l. PPL Rukti Harjo yang berfungsi sebagai pengem-bangan pertanian lahan basah dan pengembangan ternak besar; dan

m. PPL Kusumodadi yang berfungsi sebagai pengem-bangan perkebunan, peternakan dan pertanian hortikultura.

Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

1) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**; PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah telah ditetapkan dalam RTRWP Lampung 2009 – 2029 di dua wilayah yaitu:
   a. **PKL TERBAGUS yang meliputi Kecamatan Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih** memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpa-du, perdagangan dan jasa dan pusat koleksi dan distribusi. PKL TERBAGUS akan melayani selu-ruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
   b. **PKL Kalirejo** dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produksi perikanan air tawar. PKL Kalirejo akan melayani beberapa kecamatan disekitarnya seperti Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Bekri.
   c. **PKL Seputih Banyak** dengan fungsi utama pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya air tawar, payau, penangkapan dan industri pengolahan. PKL Seputih Banyak akan melayani beberapa Kecamatan di sekitarnya diantaranya yaitu Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya.
2) **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);** PPK merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di empat wilayah yaitu;
   a. **PPK Haduyang Ratu** di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pengem-bangan pertanian tanaman pangan, pengem-bangan

perkebunan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan.

b. **PPK Kota Gajah** di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan.
c. **PPK Gaya Baru I** di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa dan kawasan hutan lindung.
d. **PPK Bulusari** di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengem-bangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
e. **PPK Kurnia Mataram** di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengem-bangan peternakan sapi;
f. **PPK Bumi Nabung Ilir**, PPK Bumi Nabung ditetapkan untuk mengakomodir rencana pem-bentukan pusat pemerintahan di rencana DOB Seputih Timur. Adapun fungsi utama PPK Bumi Nabung adalah sebagai Pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, perda-gangan dan jasa dan permukiman perkotaan.
g. **PPK Negara Aji Tuha,** PPK Anak Tuha memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, simpul transportasi darat dan permukiman perkotaan.
h. **PPK Reno Basuki,** PPK Rumbia memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.

3) **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**; merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di 13 wilayah yaitu:

a. PPL Dono Arum dengan fungsi utama sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri

menengah. PPL Dono Arum akan melayani seluruh kampung dalam Kecamatan Seputih Agung.

b. PPL Sendang Agung dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri, dan pariwisata. PPL Sendang Agung akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Sendang Agung.
c. PPL Bangun Rejo dengan fungsi utama sebagai pengembanga komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri. PPL Bangun Rejo akan melayani kegiatan di seluruh kampung di Kecamatan Bangun Rejo.
d. PPL Sukobinangun dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan kering dan industri kecil dan menengah. PPL Sukobinangun akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Way Seputih.
e. PPL Bina Karya Utama dengan fungsi utama sebagai pengembangan komoditi perkebunan. PPL Bina Karya Utama akan melayani kampung-kampung di Kecamatan Putra Rumbia
f. PPL Surabaya Ilir dengan fungsi utama sebagai kawasan minapolitan, perdagngan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung. PPL Surabaya Ilir akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bandar Surabaya.
g. PPL Negeri Kepayungan dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian perkebunan, dan agribisnis/industri pengolahan. PPL Negeri Kepayang akan melayani seluruh kampung di Kecamatam Pubian.
h. PPL Gedung Sari dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan. PPL Gedung Sari akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Anak Ratu Aji.
i. PPL Trimurjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil pertanian, dan perdagangan

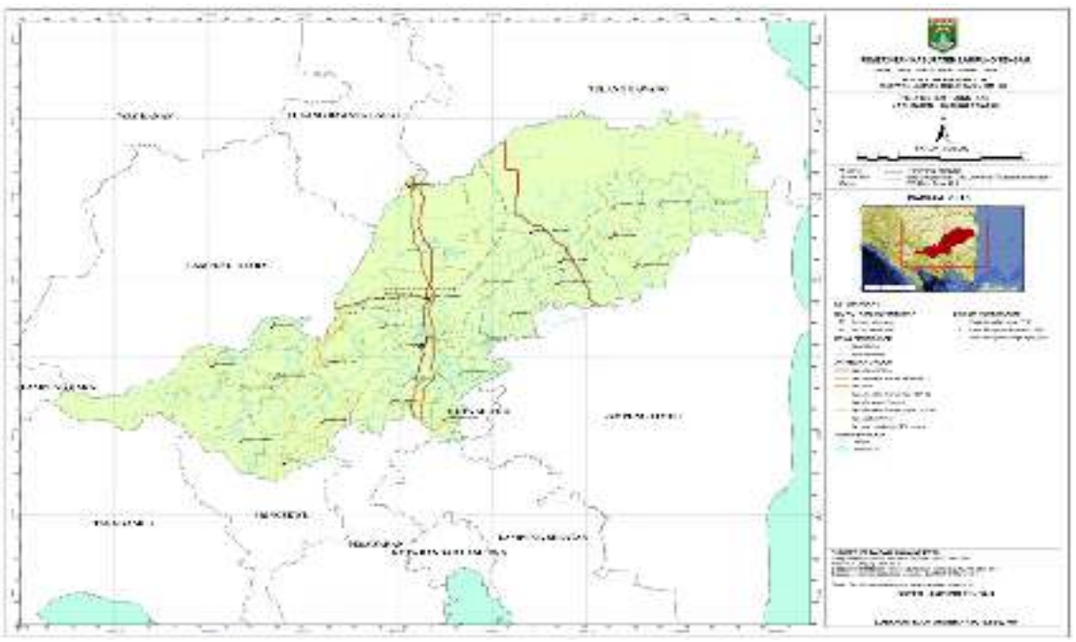
dan jasa. PPL ini akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Trimurjo.

j. PPL Tanggul Angin dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agrobisnis, serta perdagangan dan jasa. PPL Tanggul Angin akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Punggur.

k. PPL Rukti Harjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, dan pengembangan ternak besar. PPL Rukti Harjo akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Seputih Raman.

l. PPL Kusumodadi dengan fungsi utama sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura. PPL Kusumodadi akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bekri.

Gambar 2.9
Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031

Wilayah kabupaten Lampung Tengah mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan yang menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Propinsi Lampung adalah sebagai Kawasan Strategis Perkotaan Bandar Lampung.

h. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi eksisting wilayah, Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki resiko bencana alam geologi seperti letusan gunung berapi dan tsunami dikarenakan wilayahnya tidak dilalui oleh jalur pegunungan dan jauh dari laut. Peta potensi gerakan tanah terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukan bahwa potensi gerakan tanah di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori sedang ke rendah. Dengan demikian jenis bencana alam yang potensi terjadi adalah banjir, tanah longsor dan gempa bumi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1). Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat feno-mena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

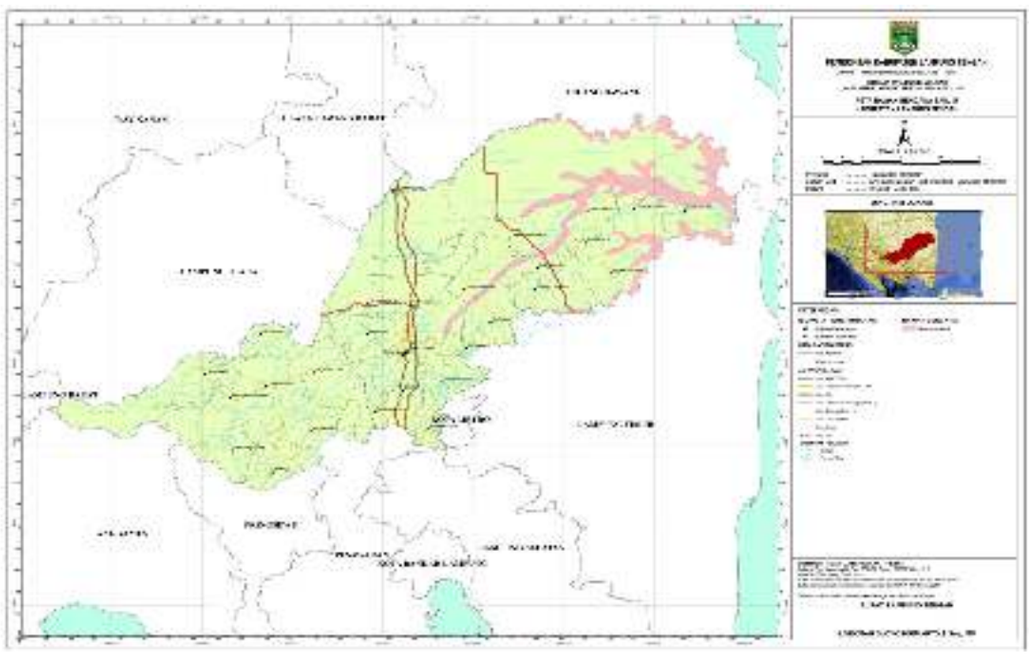
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan *(catchment area)* juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya daerah resapan air di wilayah daratan juga berkontribusi terhadap meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman yang telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah

berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Perilaku manusia yang menimbulkan bencana banjir diantaranya kegiatan pembalakan kayu secara ilegal, proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan kopi skala besar, HPH, HTI, dan IPK yang tidak direncanakan dengan baik telah menye-babkan terjadinya banjir. Akibatnya, beberapa DAS di Lampung Tengah kondisinya semakin kritis, sehingga diperlukan adanya manajemen pengelolaan air. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lampung Tengah secara umum terjadi di sekitar bantaran sungai Way Seputih dengan total luas sekitar 41.524,15 Ha yang melalui sebagian besar wilayah yaitu Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Keca-matan Way Seputih, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Putra Rumbia namun demikian kawasan yang paling rawan diantaranya adalah Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang.

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

2). Kawasan Rawan Bencana Longsor

Bencana longsor merupakan suatu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Longsor merupakan bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalamumla(volume) yang sangat besar. Longsor sangat dipengaruhi oleh keseimbangan air dalam tanah.

Apabila keseimbangan air terganggu maka aliran permukaan akan meningkat yang mengakibatkan laju erosi meningkat. Tanah yang jenuh air berpo-tensi untuk longsor, pada umumnya longsor terjadi apabila:

a. Kemiringan lereng cukup curam, sehingga memungkinkan massa tanah bergerak secara gravitasi
b. Curah hujan yang tinggi: intensitas hujan tinggi dan jangka waktu hujannya lama
c. Adanya bidang peluncur atau bidang gelincir (slide bed-plane) dibawah permukaan tanah. Dapat berupa lapisan atau batuan kedap air (impermeable layer)

Longsor dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan lahan, topografi, erodabilitas, serta tanaman penutup, yang dapat mengakibatkan:

- Kerusakan lingkungan
- Kerusakan lahan pertanian
- Kerusakan pemukiman, sarana, prasana
- Kehilangan aset ekonomi dan manusia.

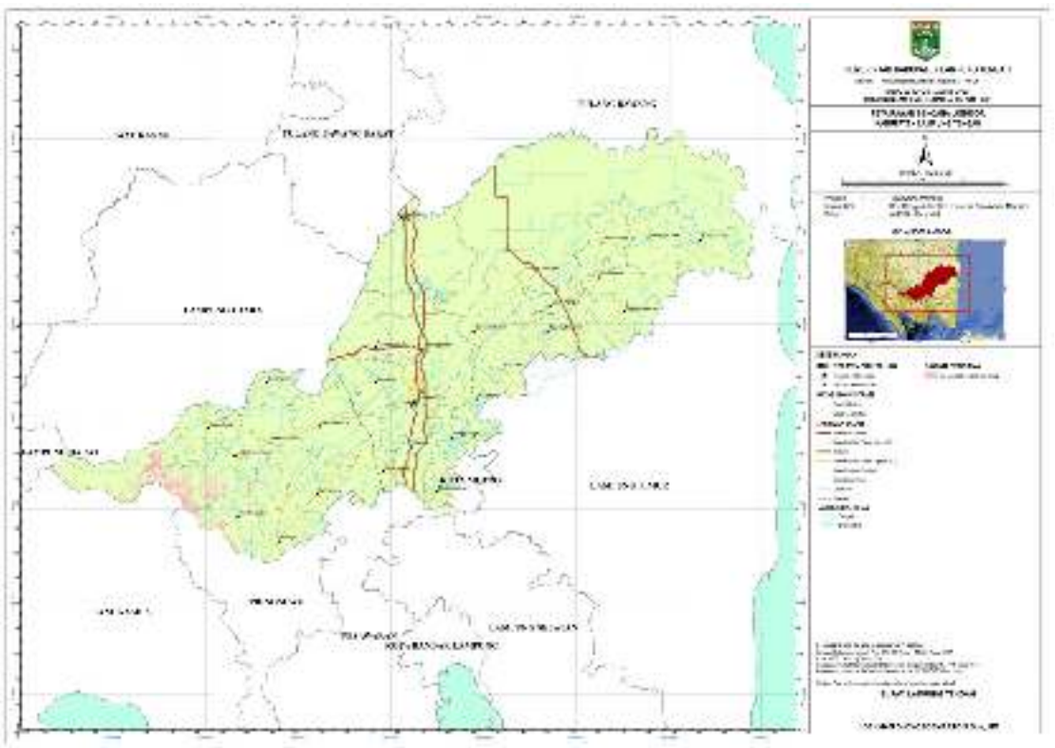
Selain itu, bahaya ikutan akibat longsor adalah bencana banjir, termasuk banjir yang membawa material keras, seperti kayu yang berasal dari pohon-pohon (debris flow), yang dapat menyebabkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Tanah longsor dapat disebabkan karena:

- Getaran-getaran bumi karena gempa, peledakan (bom, dan lain lain.)
- Perubahan kadar air dalam tanah akibat hujan lebat atau kenaikan ketinggian muka air
- Hilangnya penopang tanah permukaan bumi yang bisa terjadi akibat erosi
- Peningkatan beban pada tanah yang disebabkan oleh hujan deras, salju, oleh penumpukan batu-batu lepas, atau bahan-bahan yang dimuntahkan gunung api, bangunan, sampah/limbah, tanaman.

- Pengairan atau tindakan fisik/kimiawi lainnya yang dapat menurunkan kekuatan tanah dan bebatuan dalam jangka waktu tertentu.

Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas sekitar 6.777,26 Ha berada di sekitar kawasan hutan lindung di Kecamatan Selagai Linggga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Sendang Agung.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor



Sumber data: Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

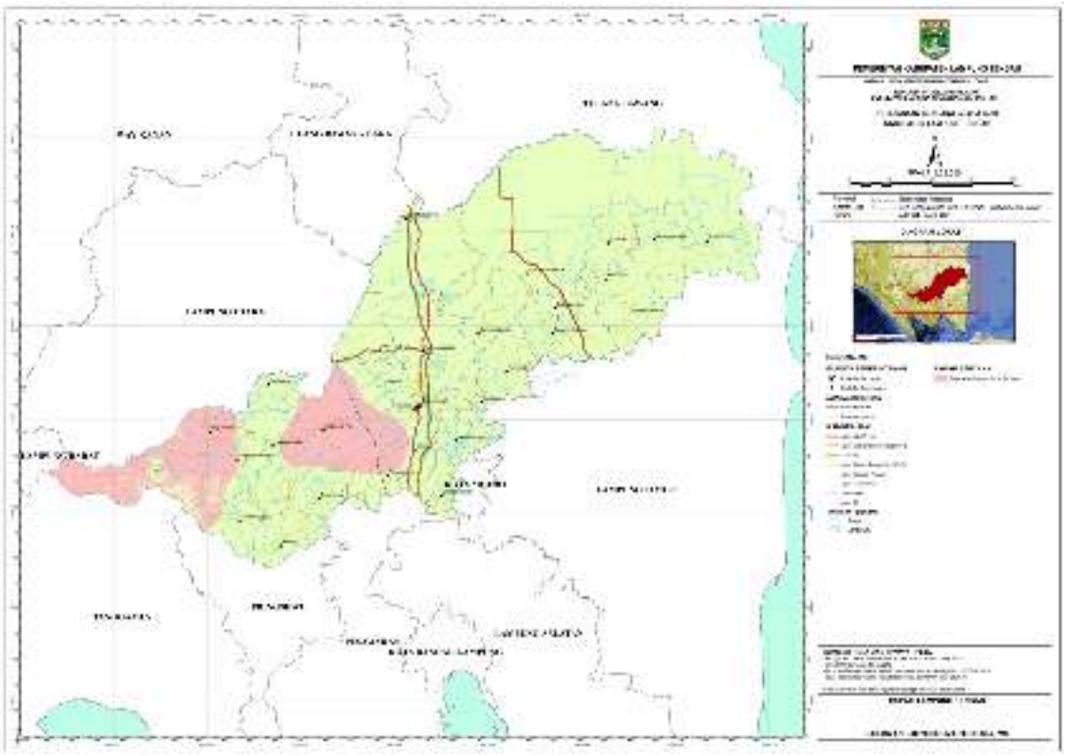
3). Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Bencana Gempa Bumi adalah bencana alam berupa peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gempa Bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas berkategori sedang tersebar di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan

Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Ratu Aji dan Kecamatan Anak Tuha seluas kurang lebih 68.595,4 ha.

Gambar 2.12
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-203

Mengacu pada Indeks Risiko Bencana (IRB) dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Rencana 2020-2024 oleh BNPB, dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah berada pada kelas risiko sedang dengan skor 131,20.

Tabel 2.3
Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempa, Dan Kebakaran Hutan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Ancaman Bencana	Kelas Resiko (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kekeringan	8%	23%c	23%	0.04	41%
2	Gempa	24%	17%	19%	30%	10%
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	1 %	30%	7%	40%	5%
4	Banjir Bandang	17%	19%	20%	24%	19%

Sumber data: BNPB Kabupaten Lampung Tengah

1.1.2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, keadaaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berjumlah 1.460.45 jiwa. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 747.237 jiwa dan penduduk perempuan 712.808 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2020 rasio jenis kelamin 104,83 artinya pada tahun 2020 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk menghitung angka beban ketergantungan yang lebih dikenal sebagai *Dependency Ratio* (DR). Selama periode tahun 2015-2020, Rasio Ketergantungan Umur *(Dependency Ratio)* mengalami penurunan dari sebesar 49,59 % tahun 2015 menjadi 48,92% tahun 2020. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2019 menanggung 49 penduduk yang tidak produktif yang meliputi 39 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dan Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2015				Jumlah Penduduk Tahun 2020			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0-4	59.551	57.561	117.112	103,46%	58.883	56.247	115.130	104,69%
5-9	57.731	54.414	112.145	106,10%	60.337	57.452	117.789	105,02%
10-14	56.147	52.946	109.093	106,05%	57.636	54.047	111.683	106,64%
15-19	53.692	49.408	103.100	108,67%	59.260	56.179	111.439	105,48%
20-24	47.927	47.047	94.974	101,87%	62.883	60.695	123.578	103,60%
25-29	49.496	48.627	98.123	101,79%	62.053	61.165	123.218	101,45%
30-34	51.412	50.924	102.336	100,96%	59.741	58.881	118.622	101,46%
35-39	51.395	50.167	101.562	102,45%	58.007	57.109	115.116	101,57%
40-44	46.467	44.435	90.902	104,57%	57.158	56.142	113.300	101,81%
45-49	41.492	39.330	80.822	105,50%	51.877	49.770	101.647	104,23%
50-54	34.418	32.871	67.289	104,71%	44.402	41.213	85.615	107,74%
55-59	27.321	24.532	51.853	111,37%	37.748	34.382	72.130	109,79%
60-64	19.368	18.016	37.384	107,50%	28.663	25.771	54.404	111,22%
65-69	12.820	13.689	26.509	93,65%	21.056	18.569	39.625	113,39%
70-74	10.137	10.783	20.920	94,01%	13.340	11.751	25.091	113,52%
75	11.588	13.384	24.972	86,58%	14.223	13.435	27.658	105,87%
Jumlah	**630.962**	**608.134**	**1.239.096**	**103,75%**	**747.237**	**712.808**	**1.460.045**	**104,83%**

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2020

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2015-2020 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padang Ratu	49.464	49.696	49.887	50.062	62.716
2	Selagai Lingga	33.328	33.610	33.866	34.113	39.956
3	Pubian	42.123	42.303	42.448	42.579	53.854
4	Anak Tuha	37.558	37.899	38.131	38.391	48.028
5	Anak Ratu Aji	16.017	16.091	16.151	16.207	19.927
6	Kalirejo	66.921	67.478	67.983	68.468	76.884
7	Sendang Agung	37.592	37.779	37.935	38.079	45.995
8	Bangunrejo	57.291	57.513	57.688	57.844	70.242
9	Gunung Sugih	67.470	68.260	69.001	69.727	78.030
10	Bekri	26.901	27.155	27.389	27.615	31.370
11	Bumi Ratu Nuban	31.048	31.436	31.801	32.160	35.533
12	Trimurjo	51.414	51.741	52.028	52.297	58.570
13	Punggur	38.960	39.400	39.810	40.213	42.068
14	Kota Gajah	33.638	33.914	34.163	34.4902	37.064
15	Seputih Raman	48.749	49.147	49.505	49.850	54.030
16	Terbanggi Besar	119.127	120.912	122.626	124.323	129.482
17	Seputih Agung	49.777	50.333	50.852	51.259	57.479
18	Way Pengubuan	42.803	43.776	44.733	45.850	48.099
19	Terusan Nunyai	44.030	44.254	44.121	43.974	58.850
20	Seputih Mataram	48.030	48.332	48.594	48.841	55.856
21	Bandar Mataram	77.572	78.327	79.024	79.698	84.621
22	Seputih Banyak	45.058	45.550	46.010	46.458	53.453
23	Way Seputih	18.395	18.618	18.827	19.032	20.744
24	Rumbia	35.641	35.928	36.187	36.437	41.305
25	Bumi Nabung	32.102	32.265	32.400	32.524	38.112

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
26	Putra Rumbia	18.274	18.409	18.531	18.646	22.562
27	Seputih Surabaya	46.370	47.048	47.326	47.592	53.600
28	Bandar Surabaya	34.154	34.364	24.549	34.722	41.514

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, serta gambaran kinerja ekonomi makro kabupaten dan kontribusi sektor-sektor di dalamnya.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 71.591,8 trilyun atau 2,95% dari Rp 71.380,7 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp 71,952 trilyun pada tahun 2019. Capaian peningkatan PDRB harga berlaku hanya sebesar 2,95% tidak lepas dari pengaruh dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pertumbuhan PDRB secara nasional mengalami perlambatan. Kendati demikian, masih terdapat beberapa perkembangan pada beberapa indikator. Namun perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami perlambatan/kontraksi, bahkan pada tahun 2020 menurun sebesar -1,02 persen dari sebesar Rp 47.837,7 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp 47.348,0 trilyun pada tahun 2020. Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah negatif.

Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015–2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.766,94	19.796,42	22.011,07	23.855,90	25.085,73	19.796,42
B	Pertambangan dan Penggalian	2.228,38	2.704,53	3.030,67	3.259,67	3.502,27	2.704,53
C	Industri Pengolahan	11.726,42	12.889,45	14.000,58	15.172,77	16.988,15	12.889,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,60	42,13	56,36	63,89	70,52	42,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,78	21,10	22,42	23,42	24,71	21,10
F	Konstruksi	4.645,51	5.483,05	6.320,59	6.957,29	7.606,73	5.483,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.989,24	5.603,03	5.936,82	6.592,94	7.364,15	5.603,03
H	Transportasi dan Pergudangan	1.370,34	1.516,99	1.663,65	1.779,80	1.906,17	1.516,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	541,69	619,30	681,90	754,08	831,00	619,30
J	Informasi dan Komunikasi	1.329,84	1.665,84	1.971,84	2.167,09	2.364,89	1.665,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	786,70	904,98	989,23	1.057,37	1.114,92	904,98
L	Real Estat	871,16	1.031,73	1.142,29	1.244,80	1.368,35	1.031,73
M,N	Jasa Perusahaan	58,48	67,43	72,38	76,75	81,87	67,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	863,21	967,47	1.056,47	1.056,73	1.138,34	967,47
P	Jasa Pendidikan	1.111,49	1.254,41	1.337,32	1.1481,43	1.661,42	1.254,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260,55	294,19	327,82	350,40	373,45	294,19
R, S, T, U	Jasa Lainnya	279,03	303,33	333,63	364,65	404,68	303,33
Produk Domestik Regional Bruto		**48.878,37**	**55.171,37**	**60.955,37**	**66.340,55**	**71.952,70**	**55.171,37**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015–2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.079,88	14.657,53	15.262,87	15.787,65	16.107,52	16.222,2
B	Pertambangan dan Penggalian	1.744,63	1.857,46	1.970,29	2.083,26	2.207,70	2.280,8
C	Industri Pengolahan	8.731,75	9.245,94	9.748,22	10.328,07	11.219,86	10.607,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,41	39,23	47,35	51,55	55,61	60,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,57	15,17	15,78	15,83	16,46	17,4
F	Konstruksi	3.843,18	4.241,86	4.640,55	5.036,46	5.388,99	5.279,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.370,50	4.458,95	4.547,40	4.820,93	5.134,73	4.938,7
H	Transportasi dan Pergudangan	1.016,19	1.098,74	1.181,29	1.248,79	1.329,53	1.273,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	371,59	395,28	418,96	454,42	489,26	464
J	Informasi dan Komunikasi	1.239,82	1.443,41	1.646,99	1.788,67	1.930,82	2.015,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	627,32	649,59	671,87	695,59	720,29	747,1
L	Real Estat	765,27	806,97	848,67	893,52	938,03	909,2
M,N	Jasa Perusahaan	42,85	44,07	45,30	457,23	49,37	48,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	600,43	627,66	654,89	687,95	720,14	749,6
P	Jasa Pendidikan	827,03	909,48	946,93	1.027,09	1.108,64	1.162
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201,99	214,49	227,00	240,48	251,36	278,6
R, S, T, U	Jasa Lainnya	218,39	225,55	232,70	248,85	269,40	258,1
Produk Domestik Regional Bruto		**38.773,80**	**40.949,37**	**43.107,05**	**45.456,32**	**47.937,70**	**47.348,00**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Selama periode 2015-2020, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertambanagan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapau 36,09% (angka ini meningkat dari 35,07% di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,54 persen (menurun dari 23,37% ditahun 2019) disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 10,35% (turun dari 10,66% di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,74% (naik dari 10,02% di tahun 2019 dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5.09%.

Seiring berjalannya waktu kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian mulai menurun. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lainnya, antara lain lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Penyebab menurunnya peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diantaranya adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain, serta perubahan pola distribusi akibat percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan lapangan usaha lain yang terkait.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015–2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha1	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,35	35,88	36,11	35,96	34,86	36,09
B	Pertambangan dan Penggalian	4,56	4,90	4,97	4,91	4,87	5,09
C	Industri Pengolahan	23,99	23,36	22,97	22,87	23,61	22,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
F	Konstruksi	9,50	9,94	10,37	10,49	10,57	10,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,21	10,16	9,74	9,94	10,23	9,74
H	Transportasi dan Pergudangan	2,80	2,75	2,73	2,68	2,65	2,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	1,12	1,12	1,14	1,15	1,12
J	Informasi dan Komunikasi	2,72	3,02	3,23	3,27	3,29	3,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,61	1,64	1,62	1,59	1,55	1,58
L	Real Estat	1,78	1,87	1,87	1,88	1,90	1,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,77	1,75	1,73	1,72	1,67	1,79
P	Jasa Pendidikan	2,27	2,27	2,19	2,23	2,31	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	0,53	0,54	0,53	0,52	0,58
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,57	0,56	0,55	0,55	0,56	0,54
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari 5,38 persen tahun 2015, naik menjadi 5,61 persen pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 mengalami pelambatan menjadi 5,27 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 5,45 dan sedikit meningkat pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,46 persen dan tahun 2020 justru terkontraksi atau menurun sebesar -1,02% akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015–2020

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,48	4,23	4,40	3,44	2,03	1,03
B	Pertambangan dan Penggalian	8,86	6,47	6,07	5,73	5,97	3,31
C	Industri Pengolahan	6,58	5,89	5,43	5,95	8,63	-5,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,95	17,43	20,70	8,86	7,88	7,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,89	4,13	3,97	0,34	4,01	5,6
F	Konstruksi	1,24	10,37	9,40	8,53	7,00	-2,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,65	2,02	1,98	6,02	6,51	-3,82
H	Transportasi dan Pergudangan	13,01	8,12	7,51	5,71	6,47	-4,21
I	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	11,21	6,37	5,99	8,46	7,67	-5,16
J	Informasi dan Komunikasi	8,68	16,42	14,10	8,60	7,95	6,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,72	3,55	3,43	3,53	3,55	3,72
L	Real Estat	6,66	5,45	5,17	5,28	4,98	-3,08
M,N	Jasa Perusahaan	7,35	2,85	2,77	4,27	4,54	-1,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	5,12	4,54	4,34	5,05	4,68	4,09
P	Jasa Pendidikan	7,26	4,30	4,12	8,46	7,94	4,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,41	6,19	5,85	5,94	4,52	10,83
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,79	3,28	3,17	6,94	8,26	-4,21
Laju Pertumbuhan Ekonomi		**5,38**	**3,28**	**5,27**	**5,45**	**5,46**	**-1,02**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Lampung Tengah yang merupakan *baseline*) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2019 atau tumbuh di atas rata-rata meliputi 10 (sepuluh) kategori yaitu pertambangan dan energi (5,97%), industri pengolahan (8,63%), pengadaan listrik dan gas (7,88%), konstruksi (7,00%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (6,51%), trnasportasi dan pergudangan (6,47%), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,67%), informasi dan komunikasi (7,95%), jasa pendidkan (7,94%), jasa lainnya (8,26%). Sedangkan lima kategori lainnya tumbuh di bawah rata-rata, yakni pertanian, kehuranan dan perkebunan; pengadaam air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administarsi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Meskipun tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19, namun beberapa lapangan usaha masih memberikan kontribusi positif yang cukup besar diatas 5% terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah. Diantaranya adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (7,93%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,6%), Informasi dan Komunikasi (6,24%), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (10,83%). Sedangkan sisanya mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar berada pada lapangan usaha industri pengolahan (-5,04%), transportasi dan pergudangan (-4,21%), dan jasa lainnya (-4.21%).

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 3,42 persen. Nilai ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (3,19 persen) dan Nasional (3,03 persen).

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2015–2020

No	Uraian	Tahun					
		2105	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Lampung Tengah	5,38	3,28	5,27	5,45	5,46	-1,02
2	Provinsi Lampung	5,13	5,14	5,16	5,25	5,27	-1,67
3	Nasional	4,9	5,0	5,1	5,2	5,02	-2,07

Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

2.2.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjuk-kan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan *(demand)* dan penawaran *(supply)*. Pada tahun 2020, perhitungan inflasi Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Metro (daerah otonom terdekat dari Lampung Tengah) menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 2,53 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender *(point to point)* dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut menunjukan penurunan dibandingkan dengan 2019 dimana pada periode yang sama mengalami inflasi sebesar 2,93 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2020 tersebut di atas inflasi Provinsi Lampung sebesar 2 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender *(point to point)* dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut berada di atas dari inflasi secara nasional sebesar 1,68 persen.

Tabel 2.11
Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015–2020

No.	Tahun	Nasional	Lampung	Lampung Tengah
1	2015	3,35	-	-
2	2016	3,02	2,78	2,92
3	2017	2,92	3,02	2,32
4	2018	3,13	2,73	1,64
5	2019	2,72	-	2,93
6	2020	1,68	2	2,53

Sumber data: BPS (diolah)

2.2.3. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2020 pendapatan per kapita mengalami penurunan 0,41 persen atau dari semula Rp 55.709.190 rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2019 menjadi Rp 55.479.980 rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2020. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional di Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. Penurunan ini juga dimungkinkan terjadi karena dampak adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan perekonomian dunia, nasonal, dan daerah menjadi semakin lesu. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.

Tabel 2.12
Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020

Tahun	PDRB (Milyar rupiah)		Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (Rp)	
	Berlaku	Konstan		Berlaku	Konstan
2015	48.878,37	38.773,80	1.239.096	39.446.798	31.292.006
2016	55.171,37	40.949,37	1.250.486	44.119.942	32.746.764
2017	60.955,29	43.107,05	1.261.498	48.319.767	34.171.319
2018	66.340,55	45.456,32	1.271.566	52.172.321	35.748.298
2019	71.952,70	47.937,70	1.281.310	56.155.575	37.413.038
2020	71.591,00	47.348,00	1.460.045	55.479.980	36.692.280

Sumber data: Badan Pusat Statistik

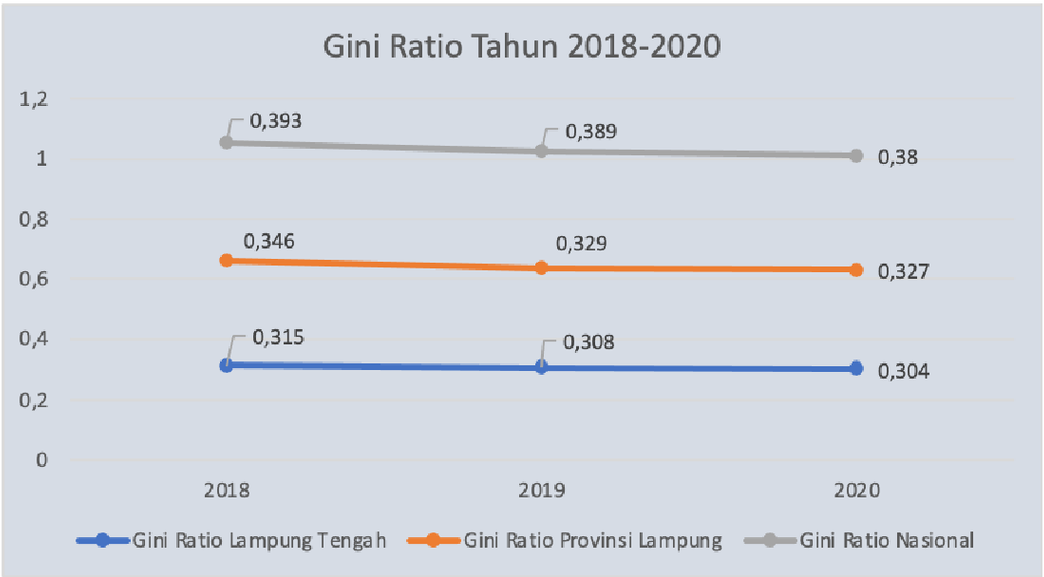
2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien

Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2015-2020 sebesar 0,367 pada tahun 2015 dan mengalami fluktuasi hingga mencapai angka 0,304 pada tahun 2020, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran (konsumsi) penduduk pada periode tersebut semakin merata. Meskipun tahun 2018 Koefisien Gini kembali mengalami kenaikan baik di Kabupaten Lampung Tengah maupun Propinsi Lampung. Selama kurun waktu tahun 2015-2020 Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah di bawah (lebih baik) jika dibandingkan dengan Koefisien Gini Propinsi Lampung dan Nasional yang lebih mendekati ketimpangan sempurna (mendekati angka 1).

Gambar 2.13
Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

2.2.5. Penduduk Miskin

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan pendu-duk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara

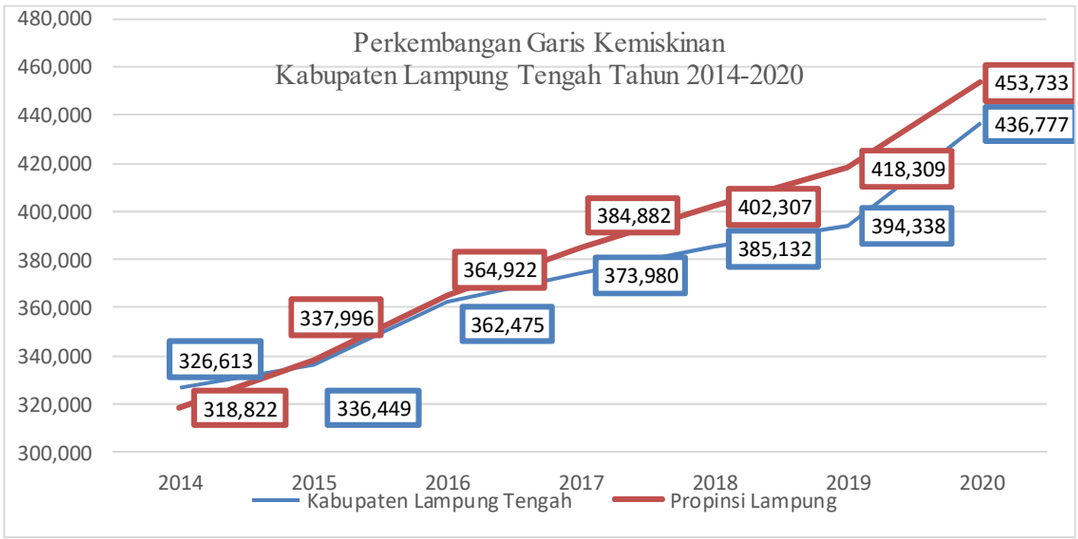
dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendi-dikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dari hasil pendataan BPS tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan sebanyak 1.560 jiwa dari 153.840 jiwa (12,03 persen) pada tahun 2019 menjadi sebanyak 152.280 jiwa (11,82 persen) pada tahun 2020, atau turun sebesar 0,21 persen. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 (0,21 persen) tersebut dibanding kabupaten dan kota di Propinsi Lampung berada pada peringkat ke-13.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,7 persen dari Rp 394.338 per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.436.777 per kapita per bulan pada tahun 2020. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2015-2020, garis kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

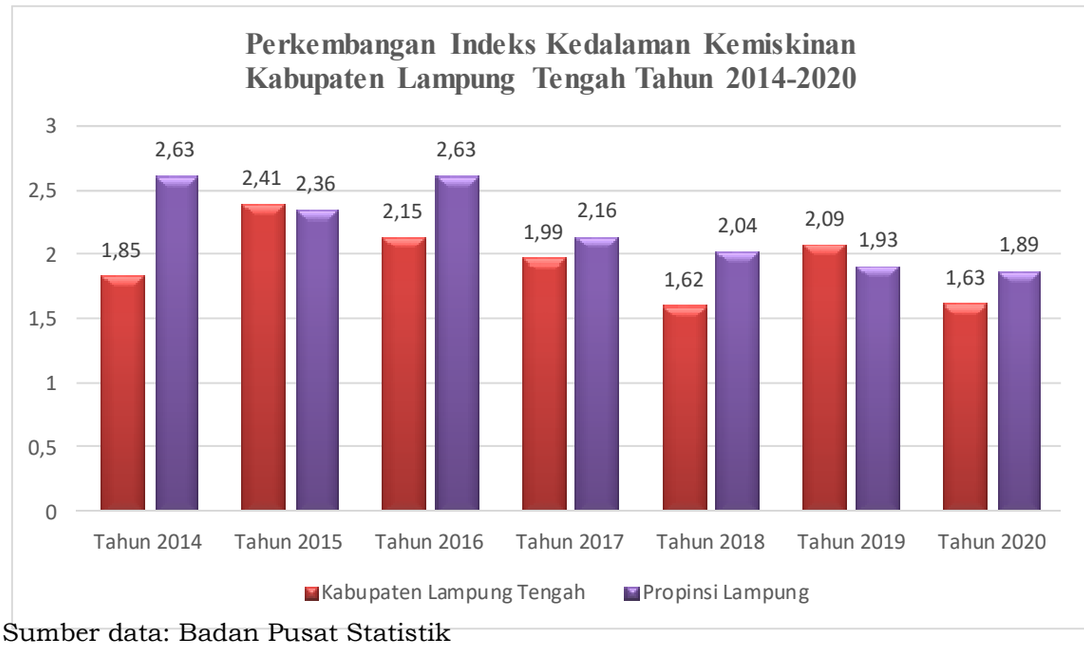
Namun demikian, kenaikan garis kemiskinan per tahunnya masih tetap dibawah garis kemiskinan Propinsi Lampung selama periode 5 tahun. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2020 menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Gambar 2.14
Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.15
Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 – 2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengendalikan peningkatan jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terha-dap garis kemiskinan,

dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari tahun 2014 s.d. tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu turun dari 1,85 menjadi 1,63 atau turun sebesar 0,22 poin, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari tahun 2014 s.d. tahun 2020 juga menunjukkan perkembangan yang signifikan,turun dari 0,45 menjadi 0,33 atau turun sebesar 0,12 poin, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit.

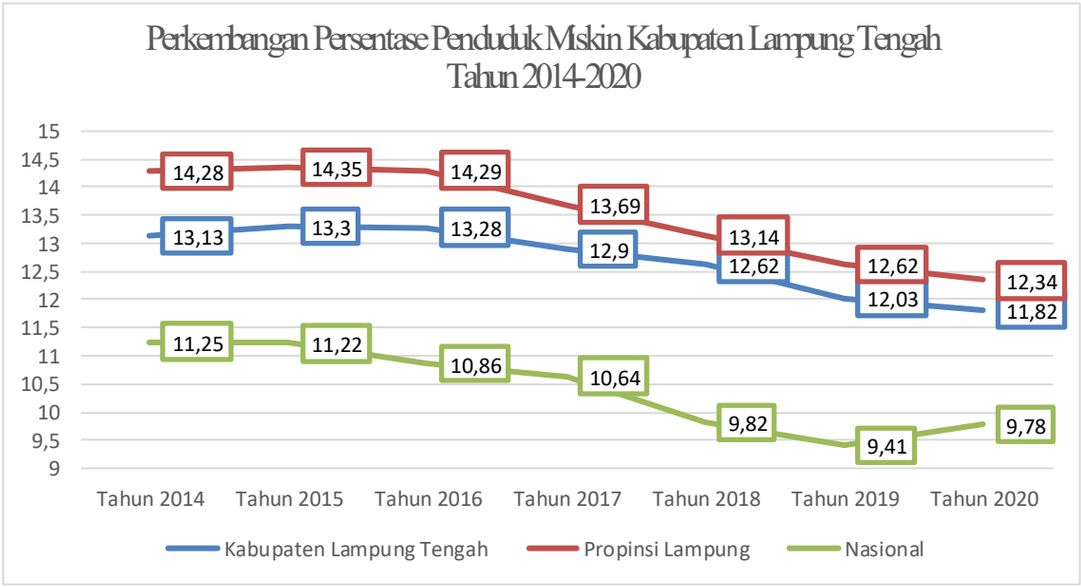
Gambar 2.16
Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,21 menjadi 11,82 % dari 12,03%, dan lebih rendah dari angka kemiskinan propinsi sebesar 12,34%. Adapun rata-rata penurunan sebesar 0,22% dari tahun 2014 s.d. tahun 2020.

Gambar 2.17
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: BPS

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah selama enam tahun secara signifikan, diiringi dengan menurunnya jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pendataan terakhir PBDT Tahun 2020 rekapitulasi jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari pengelompokan desil kondisi kesejahteraan 40% terendah mencapai 131.974 RTS, mengalami kenaikan RTS atau 0,85 persen dari pendataan BDT Tahun 2019 (74.106 RTS). Rata-rata KPM tahun 2018-2020 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 35,84 persen per tahun.

Tabel 2.13
Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PDBT Data 2015-2017 Belum Akurat Karena Belum Terintegrasi Dengan Aplikasi SIKS NG

No	Kecamatan	JUMLAH KPM		
		2018	2019	2020
1	Padang Ratu	5.373	5.464	5.467
2	Selagai Lingga	3.945	3.947	4.155
3	Pubian	5.100	5.780	5.666
4	Anak Tuha	6.434	6.450	6.445
5	Anak Ratu Aji	2.560	2.561	2.559
6	Kalirejo	8.395	8.397	8.395
7	Sendang Agung	4.297	4.312	4.292
8	Bangunrejo	5.330	5.333	5.332
9	Gunung Sugih	7.096	7.190	7.099
10	Bekri	2.575	2.576	2.576
11	Bumi Ratu Nuban	4.078	4.077	4.077
12	Trimurjo	4.001	3.999	4.188
13	Punggur	3.388	3.390	3.593
14	Kota Gajah	2.142	2.146	2.173
15	Seputih Raman	3.739	3.738	3.744
16	Terbanggi Besasr	8.622	8.657	8.639
17	Seputih Agung	4.877	4.875	4.866
18	Way Pengubuan	3.332	3.335	3.372
19	Terusan Nunyai	3.904	3.897	3.893
20	Seputih Mataram	6.516	6.520	6.519
21	Bandar Mataram	8.912	8.909	8.907
22	Seputih Banyak	4.744	4.741	4.751
23	Way Seputih	1.881	1.949	1.916
24	Rumbia	3.746	3.781	3.779
25	Bumi Nabung	3.932	3.933	3.925
26	Putra Rumbia	2.506	2.576	2.492
27	Seputih Surabaya	5.122	5.147	5.135
28	Bandar Surabaya	4.044	4.042	4.019
	Jumlah	**79.188**	**74.106**	**131.974**

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

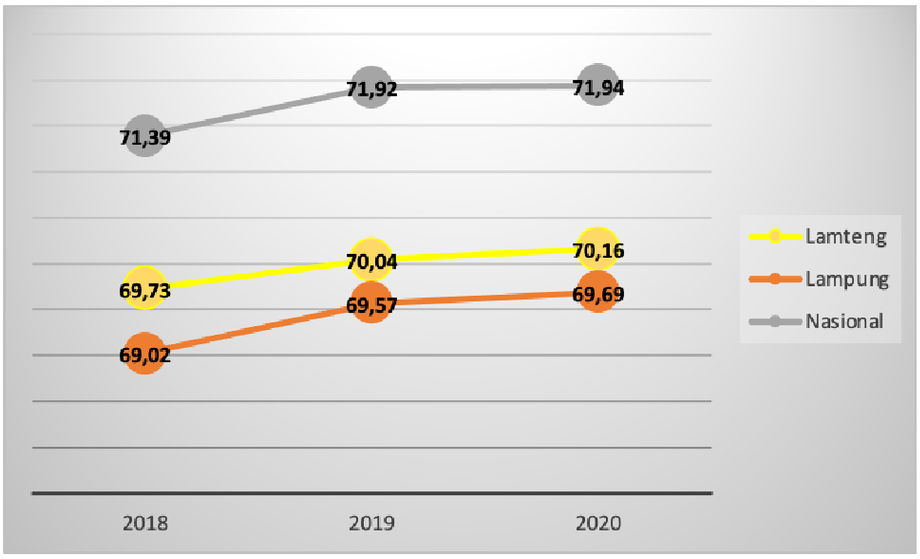
2.2.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2015-2020 mengalami kemajuan yang signifikan, dengan pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2015-2020 sebesar 3,77 persen dari sebesar 67,61 pada tahun 2015 menjadi 70,16 pada tahun 2020 (meningkat 2,55 poin).

Pada tahun 2020 status indek pembangunan manusia Kabupaten Lampung Tengah sudah berstatus “tinggi” yaitu 70,16, dan berada di atas Provinsi yang berstatus “sedang” yaitu 69,69I namun masih di bawah Nasional

yaitu 71,94. Dalam lingkup Kabupaten, IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan IPM tertinggi (70,16) di Provinsi Lampung. Sedangkan dalam lingkup Kabupaten/Kota, IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan IPM tertinggi ketiga (70,16) di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Gambar 2.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Kondisi pencapaian IPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Propinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 dan apabila dibandingkan hanya dengan kabupaten (tanpa kota) berada di posisi ke-2 tertinggi setelah Kabupaten Pringsewu. Namun apabila kita bandingkan dengan nasional IPM Kabupaten Lampung Tengah masih berada dibawah IPM Nasional.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupate/Kota
di Provinsi Lampung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lampung Barat	64,54	65,45	66,06	66,74	67,50	**67,80**
2	Tanggamus	63,66	64,41	64,94	65,67	66,37	**66,36**
3	Lampung Selatan	65,22	66,19	66,95	67,68	68,22	**68,38**
4	Lampung Timur	67,10	67,88	68,05	69,04	69,34	**69,37**
5	Lampung Tengah	67,61	68,33	68,95	69,73	70,04	**70,16**
6	Lampung Utara	65,20	65,95	66,58	67,17	67,63	**67,67**
7	Way Kanan	65,18	65,74	65,97	66,63	67,19	**67,44**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Tulang Bawang	66,08	66,74	67,07	67,70	68,23	**68,52**
9	Pesawaran	62,70	63,47	64,43	64,97	65,75	**65,79**
10	Pringsewu	67,55	68,26	68,61	69,42	69,97	**70,30**
11	Mesuji	59,79	60,72	61,87	62,88	63,52	**63,63**
12	Tulang Bawang Barat	63,01	63,77	64,58	65,30	65,93	**65.78**
13	Pesisir Barat	60,55	61,50	62,20	62,96	63,79	**63,91**
14	Bandar Lampung	74,81	75,34	75,98	76,63	77,33	**77,44**
15	Metro	75,10	75,45	75,87	76,22	76,77	**77,19**
	Propinsi Lampung	**66,95**	**67,65**	**68,25**	**69,02**	**69,57**	**69,69**

Sumber data: Badan Pusat Statistik

2.2.7. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia

Pencapaian pembangunan manusia, diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks di masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan lama sekolah (thn)	12,20	12,21	12,60	12,90	12,91	12,92
Rata –rata lama sekolah (thn)	7,14	7,37	7,38	7,51	7,57	7,58
Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,01	69,15	68,95	69,73	70,04	69,84
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	10.298,00	10.674,00	10.820,00	11.052,00	11.154,00	11.219,00
Indek Pembangunan Manusia	67,61	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16
Pertumbuhan IPM	0,87	1,06	0,91	1,13	0,44	0,12

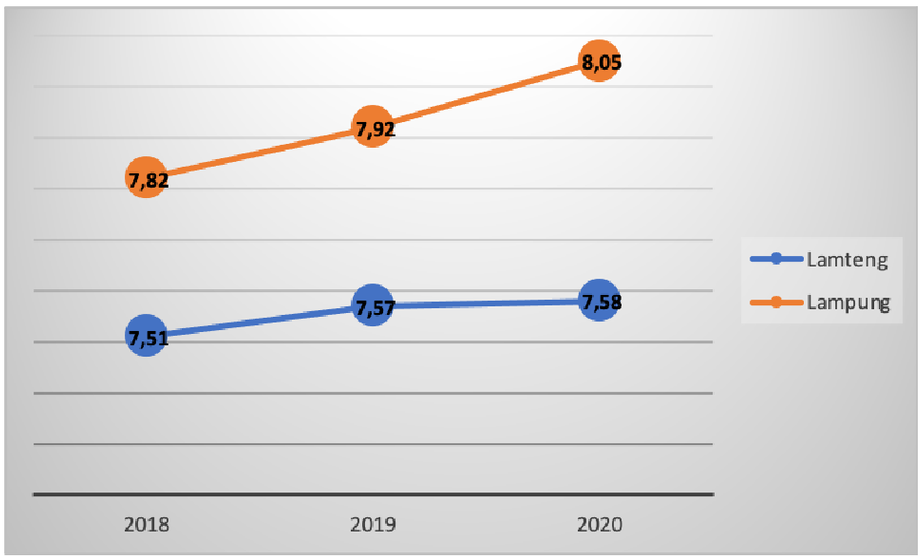
Sumber data: BPS Lampung Tengah

Pertumbuhan IPM di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya lebih didominasi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang mengalami partumbuhan indeks sebesar 0,5 persen. Sedangkan dimensi Kesehatan mengalami pertumbuhan 0,012 persen dan Pendidikan untuk harapan lama sekolah mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 dan Rata-rata lama sekolah 0,13 persen.

2.2.7.1. Dimensi Pengetahuan

Indikator yang dipergunakan untuk menilai IPM di tinjau dari dimensi pengetahuan adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). Pada Tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebesar 7,15 dan pada tahun 2020 telah naik hingga mencapai 7,58. Namun nilai masih berada di bawah RLS Provinsi yaitu 8,05. Standar rata-rata lama sekolah dari UNDP adalah 15,00. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 7,58 tahun. Hal ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai pendidikan hingga kelas VIII (SLTP).

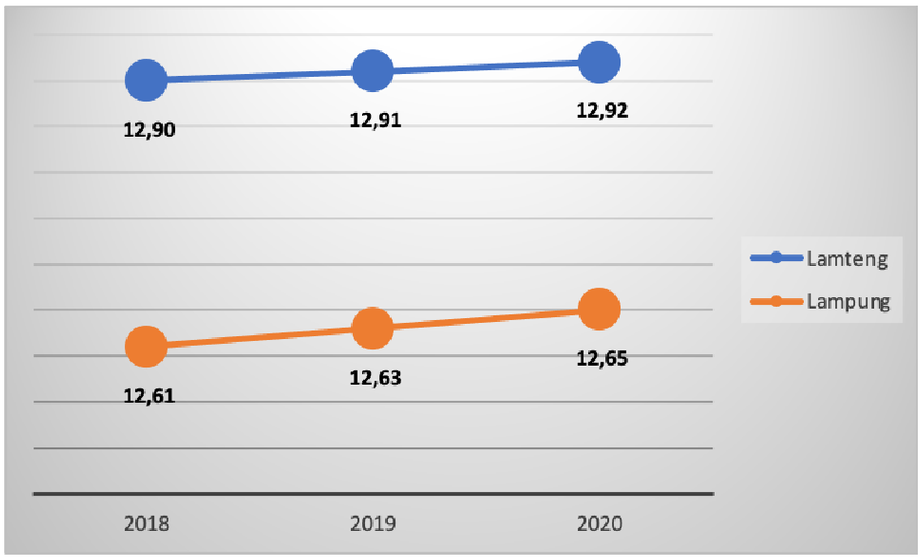
Gambar 2.20
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: BPS Lampung Tengah

Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2015 sebesar 12,2 dan pada tahun 2020 telah naik hingga mencapai 12,92. Namun angka ini masih berada lebih sedikit dari HLS Provinsi yaitu 12,65. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Lampung Tengah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I).

Gambar 2.21
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: BPS Lampung Tengah

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus mengalami peningkatan. Secara umum HLS dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di suatu wilayah/daerah. Dari capaian HLS dan RLS tersebut, maka indeks pengetahuan pada perspektif IPM di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 tercatat sebesar 0,623 poin dan kondisi ini mengalami peningkatan 0,012 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,611 poin.

Tabel 2.16
Dimensi Pengetahuan Kabupaten Lampung Tengah

N	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Harapan Lama Sekolah	12,20	12,21	12,60	12,90	12,91	12,92
2	Rata-rata Lama Sekolah	7,14	7,37	7,38	7,51	7,57	7,58
3	Indek Pendidikan	0,577	0,585	0,596	0,609	0,611	0,623

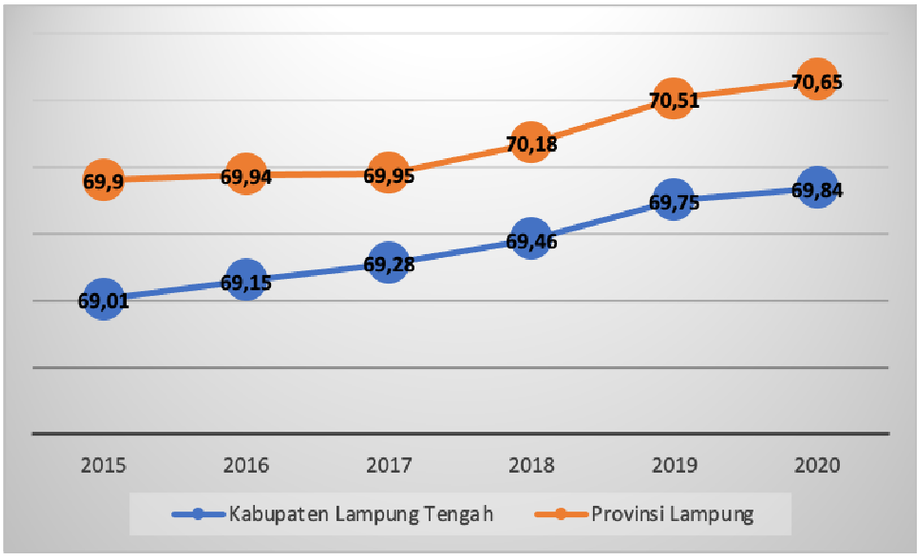
Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.7.2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Pencapaian IPM jika di tinjau dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, maka indikator yang dipergunakan yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimana pada tahun 2020 telah mencapai 69,84 tahun. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, walaupun relatif lambat, UHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 1,07 persen selama

lima tahun dan meningkat 0,74 poin. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Gambar 2.22
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015-2020, Kabupaten Lampung Tengah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 0,83. Selama periode tersebut, secara rata-rata tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Pada Tahun 2015 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 69,01 dan pada tahun 2020 telah naik hingga mencapai 69,84. Namun angka UHH ini masih berada dibawah UHH Propinsi yaitu 70,56. Angka UHH ini juga belum mencapai nilai maksimum standar UNDP sebesar 85,00.

Namun demikian jika dibandingkan dengan UHH Propinsi Lampung pada tahun 2020 yang mencapai 70,65 tahun, maka UHH Kabupaten Lampung Tengah masih terpaut 0,81 tahun lebih rendah dari Provinsi Lampung. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah masih berada dibawah rata-rata Provinsi Lampung.

Tabel 2.17
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Lampung Tengah

N	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	69,01	69,15	68,28	69,46	69,75	69,84
2	Indek Kesehatan	0,75	0,756	0,753	0,761	0,765	0,767

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (*life style*); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Dari sisi lingkungan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 menunjukkan kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 11,45 % rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 5,7 % rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Belum semua penduduk dapat mengakses persalinan dengan tenaga medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah. Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah sangat ntervensid dilakukan terhadap faktor-faktor de

terminan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut.

Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintah-an desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

2.2.7.3. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM di tinjau dari dimensi standar hidup layak, maka indikator yang dipergunakan adalah indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 11,219 juta per kapita per tahun. Walaupun

relatif lambat, pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat selama lima tahun terakhir sebesar 856 poin dan tumbuh sebesar 8,31 persen. Selama kurun waktu tersebut perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 3,65 persen.

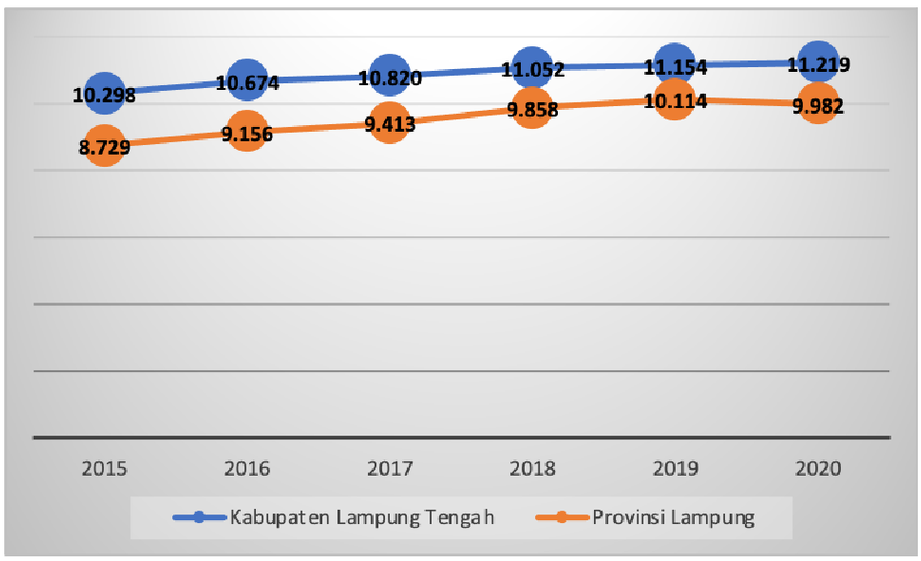
Tabel 2.18
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita (Rp 000)	10.298,00	10.674,00	10.820,00	11.052,00	11.154,00	11.219,00
Indek Daya Beli	0,363	0,378	0,384	0,393	0,397	0,399

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Pada Tahun 2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung Tengah mencapai Rp 11,219 juta per tahun. Nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perkapita propinsi Lampung yaitu Rp 9,982 juta per tahun atau masih terpaut hampir Rp 1,237 juta per kapita per tahun.

Gambar 2.23
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.8. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program- program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 telah mencapai 96,55 persen dan angka ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 94,95 persen. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan diharapkan akan membantu seseorang/penduduk untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.19
Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah

No	Tahun	Angka Melek Huruf		
		Laki-laki	Perempuan	(Rata rata Laki dan Perempuan)
1	2016	96,97	94,05	96,38
2	2017	98,05	94,68	96,39
3	2018	98,79	94,78	96,81
4	2019	96,54	93,09	94,95
5	2020	98,31	94,75	96,55

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.9. Persentase Balita Gizi Buruk

Penyebab gizi buruk atau *kwashiorkor* adalah karena anak tidak memperoleh makanan dengan kandungan energi dan protein yang cukup. Umumnya hal ini sering dikaitkan dengan tingkat perekonomian yang rendah. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, berkisar pada 0,01 persen sampai 0,07 persen. Selama kurun waktu tersebut perkembangan terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2018, dengan pertumbuhan sebesar 0,01 persen dan tertingggi pada tahun 2020 sebesar 0,07 persen.

Tabel 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase balita gizi buruk	0,02	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07
Jumlah balita gizi buruk	20	15	30	14	21	10
Jumlah balita	**118.705**	**115.351**	**113.579**	**111.743**	**109.907**	**138.688**

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.2.10. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan metode pengukuran untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Lampung Tengah mengalami fluktuatif naik-turun dari 1,16 di tahun 2018 meningkat menjadi 3,97 di tahun 2019, kemudian turun kembali menjadi 1,66 di tahun 2020.

Tabel 2.21
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi balita gizi kurang	0	0	0	1.16	3.97	1,66
Banyaknya balita gizi kurang	0	0	0	1307	4369	2308
Jumlah balita	**118.705**	**115.351**	**113.579**	**111.743**	**109.907**	**138.688**

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.2.11. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos ntervens desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan ntervens dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *ntervensid* berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Perkembangan Desa siaga aktif di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2016-2020 telah mencapai 100 persen. Artinya seluruh Desa di Kabupaten Lampung Tengah telah menjadi Desa Siaga Aktif.

Tabel 2.22
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan desa siaga aktif	97.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00
Jumlah desa siaga aktif	307	314	314	314	314	314
Jumlah desa siaga yang dibentuk	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**	**314**

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.2.12. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi nterven kerja *(labor force participation rate)* adalah proporsi nterven kerja terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 16 dan 64 tahun. Statistik ini berguna untuk menganalisis pasar tenaga kerja, terutama ketika menyandingkannya dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh dengan kuat, tingkat partisipasi meningkat karena prospek lapangan kerja dan upah membaik. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 4,45 persen. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 1,68 persen. Adapun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, yaitu menjadi 73,05 persen.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi angkatan kerja	n.a	69.40	71.53	73.85	72.17	73,05
Angkatan kerja 15 tahun ke atas	n.a	632.624	659.830	688.638	680.333	716.022
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	n.a	911.602	922.424	932.492	942.686	980.166

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja

2.2.13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia >15 Tahun

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.

Kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demand side* (penggangguran). Perkembangan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk 15 Tahun ke atas di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Adapun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 73,05.

Tabel 2.24
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Kerja Ke Atas Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas	n.a	69,40	69,36	71,99	70,28	73,05
Kesempatan kerja	632.624	632.624	639.830	671.308	662.539	685.826
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	n.a	911.602	922.424	932.492	942.686	980.166

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja

2.2.14. Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

Gambaran Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” *(basic needs)*, maupun keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga. Perkembangan Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 70 persen pada tahun 2018, menjadi 29 persen pada tahun 2019 atau turun sebesar 41 persen.

Rata-rata persentase Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus menurun dengan tingkat penurunan 14,42 persen per tahun. Rata-rata *jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I* terus menurun dengan tingkat penurunan 13,17 persen per tahun.

Tabel 2.25
Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Lampung Tengah

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	82	66	67	70	29	29
Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	250.000	200.000	205.983	215.791	100.090	100.090
Jumlah keluarga	304.563	304.563	305.296	310.322	345.802	345.802

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah

2.2.15. Indek Kepuasan Masyarakat

Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentu-kan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

IKM Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dari 72,92 di tahun 2016 menjadi 85,9 di tahun 2020. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 2,36 persen per tahun.

Tabel 2.26
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	77	72.92	80.59	80.71	85.9	85.9

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.16. Presentase PAD terhadap Total Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan menggambarkan kemandirian daerah dalam mengupayakan pendanaan dalam pembangunan daerah. Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami trend peningkatan dari 5,9 persen di tahun 2016 menjadi 7,3 persen di tahun 2020.

Tabel 2.27
Presentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase PAD terhadap pendapatan	5.9	6.6	6.1	6.9	7,3
PAD (dalam juta rp)	134,89	164,04	144,96	173,53	179.883
Jumlah pendapatan daerah (dalam juta rp)	2.274.041,7	2.491.283,2	2.388.867,2	2.529.103,6	2.431.332,2

Sumber data: Dispenda Kabupaten Lampung Tengah

2.2.17. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2018 dan 2020 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyampaikan informasi laporan keuangan sudah sesuai dengan kaedah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.28
Opini BPK Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.18. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perkembangan skor PPH Kabupaten Lampung Tengah dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 85,4 pada tahun 2018 menjadi 86,7 pada tahun 2020.

Tabel 2.29
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Lampung Tengah

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	83.5	81.8	85.4	86.7	86,9

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lampung Tengah

2.2.19. Penguatan Cadangan Pangan

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional dan daerah dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat baik ditingkat nasional maupun daerah. Perkembangan penguatan cadangan pangan Kabupaten Lampung Tengah mengalami penguatan sebesar 1,4 persen dari tahun 2018 yang sebesar 30,0 menjadi 31,4 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.30
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penguatan Cadangan Pangan	30,0	30,0	30,0	30,0	31.4	31,4

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lampung Tengah

2.2.20. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Hasil analisis nterv kewaspadaan pangan dan gizi yang menghasilkan peta situasi pangan dan gizi di tingkat wilayah kecamatan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. Upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi sangat penting diketahui siapa yang rentan pangan dan gizi, berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggal, kemudian apa saja sebenarnya yang membuat mereka rentan. Untuk itu hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi dilengkapi dengan data *by name by addres* masyarakat yang mengalami kerentanan pangan dan gizi sehingga ntervensid apat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Perkembangan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 15 persen menjadi 45 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.31
Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	15	15	35	40	40	45

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lampung Tengah 2021

2.2.21. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Konstan

Sektor pertanian terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan mencapai 33,60 persen dari total PDRB dan pada tahun 2020 meningkat menjadai 34,26 persen.

Tabel 2.32
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB kosntan Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB kosntan	36,35	48,34	51,06	55,19	33,60	34,26
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan (milyar rp)	17.766,94	19.796,40	22.011,10	25.085,70	16.107,52	16.222,2
Jumlah PDRB (milyar rp)	38.773,8	40.949,37	43.107,05	45.456,27	47.937,7	47.348,0

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.22. Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian, khususnya tanaman padi mengalami tren yang terus menurun dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 840.000 ton, terus turun hingga menjadi 771.669 ton pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 serta 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena terdapat perubahan pola hitung produksi padi, yang menggunakan pola Kerangka Sampel Area KSA) tanaman padi.

Tabel 2.33
Produksi Sektor Pertanian (Padi/Ton) Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor pertanian (Padi/ton)	840.000	837.322	796.580	771.669	455.234	599.111

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.23. Produksi Sektor Perkebunan

Produski sektor perkebunan selama enam tahun terakhir (2015-2020) menunjukkan trend fluktuatif dan kecenderungan meningkat. Produksi kebun di Kabupaten Lampung Tengah meliputi tiga jenis komoditas utama, yaitu perkebunan karet dengan produksi primernya adalah *latex* dan *lumb*, perkebunan kelapa sawit dengan produksi primernya adalah tandan buah segar, dan perkebunan kakao dengan produksi primernya adalah buah basah. Kenaikan produksi perkebunan tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 280.166,49 ton dan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 118.278,00 ton.

Tabel 2.34
Produksi Sektor Perkebunan (Ton) Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor perkebunan (Ton)	94.320,00	99.379,03	92.889,83	280.166,49	86.907,23	118.278,00

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perkebunan

2.2.24. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana jumlah konstribusi PDRB dari sektor perdagangan pada tahun 2015 mencapai 11,27 persen dari total PDRB, sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 hingga 10,61%, dan kemudian kembali meningkat pada 2019 menjadi 10,71% dan menurun kembali pada tahun 2020.

Tabel 3.35
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11.27	10.89	10.55	10.61	10.71	10,43
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan (milyar rp)	4370.5	4458.95	4547.4	4820.93	5134.73	4,938.7
Jumlah PDRB (milyar rp)	38773.8	40949.37	43107.05	45456.27	47937.7	47,348.0

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.25. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dmana jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian pada tahun 2015 mencapai 22,54 persen dari total PDRB, terus mengalami peningkatan hingga 0,89 persen pada tahun 2019 menjadi 23,41 persen dari jumlah total PDRB. Namun pada tahun 2020 kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan menjadi hanya 22,4 persen.

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	22.52	22.58	22.61	22.72	23.41	22,4
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (milyar rp)	8731.75	9245.94	9748.22	10328.07	11219.86	10,607.4
Jumlah PDRB (milyar rp)	38773.8	40949.37	43107.05	45456.27	47937.7	47,348.0

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.26. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu 2017 hingga 2020 mengalami tren yang terus menurun. Bahkan pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 Pertumbuhan industri di Kabupaten Lampung Tengah mengalami kontraksi yang kuat sehingga pertumbuhannya mencapai minus (-5,3 persen).

Tabel 2.37
Pertumbuhan Industri Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan industri	n.a	n.a	57,03	37,11	0,77	-5,3
Jumlah Industri Tahun (n-1)	n.a	n.a	452	1052	1673	1706
Jumlah Industri s/d Tahun n		452	1052	1673	1686	1614

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar) dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kon-tribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK),Angka pendidikan yang ditamatkan (APT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Angka Melanjutkan (AM), Fasilitas Pendidikan, Rasio guru/murid, Angka melek, dan kualifikasi pendidikan guru.

Rata-rata Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 2,67 perse per tahun. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) juga terus meningkat dengan pertumbuhan masing-masing adalah SD (0,21 persen per tahun) dan SMP (0,40 persen per tahun). Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) juga terus meningkat dengan pertumbuhan masing-masing adalah SD (0,80 persen per tahun) dan SMP (2,25 persen per tahun).

Rata-rata Angka Putus Sekolah tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah untuk SD, SMP, dan SMP cendrung konstan. Demikian juga dengan angka Angka Kelulusan Sekolah juga cenderung konstan dan sudah maksimal yaitu mencapai 100 persen. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs terus meningkat dengan pertumbuhan 2,80 persen per tahun.

Kondisi fasilitas bangunan baik juga terus meningkat dimana pertumbuhannya masing-masing adalah SD (1,10 persen per tahun) dan SMP (3,86 persen per tahun). Angaka melek hurus terus meningkat dengan pertumbuhan 0,75 per tahun dan tahun 2020 angka melek huruf sudah mencapai 99,7 persen. Persentase guru berpendidikan S-1 terus meningkat dengan pertumbuhan 2,10 persen per tahun. Pada akhir 2020, guru berpendidikan S-1 sudah mencapai 92,74 persen.

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Tabel 2.38
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	ratio	56,69	56,69	63,66	64,02	64,56	64,32
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) :							
	- APK SD/MI/Paket A	Ratio	109,58	114,57	110,42	112,23	106,43	110,31
	- APK SMP/MTs/Paket B	ratio	98,98	91.36	90,73	96,16	88,2	99,4
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT):							
	- APT SD/MI/Paket A	ratio	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM):							
	- APM SD/MI/Paket A	ratio	95,5	99,24	98,8	99,13	99,5	99,5
	- APM SMP/MTs/Paket B	ratio	82,87	74,06	75,36	75,77	75,27	90,5
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS):							
	- APM SD/MI/Paket A	ratio	99,5	99,6	100	100	95,65	95,66
	- APM SMP/MTs/Paket B	ratio	95,22	95,94	95,69	96,99	82,23	82,38
6	Angka Putus Sekolah:							
	- Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	ratio	0,19	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	- Angka Putus Sekolah APM SMP/MTs/Paket B	ratio		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7	Angka Kelulusan Sekolah:							
	- Angka Kelulusan SD/MI	ratio	n.a	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan SMP/MTs/9	ratio	n.a	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):							
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	ratio	86,75	98,48	98,56	98,78	98,93	98,95

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	320	323	326	328	334	338
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	77	80	83	84	87	93
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	ratio	46,45	46,46	46,49	46,5	46,52	46,53
11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	ratio	n.a	325,3	318,78	318,99	318,5	n.a
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	ratio	9,48	5,99	5,94	6,96	6,94	6,95
13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	ratio	n.a	n.a	13,38	13,87	13,27	13,27
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	ratio	0,03	0,04	0,045	0,059	0,06	0,07
15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP	ratio	0,05	0,06	0,062	0,07	0,07	0,08
16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Ratio	43,01	45,07	45,5	46,02	46,54	46,57
17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	96,05	98,35	98,5	98,9	99,6	99,7
18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95,8	96,38	96,39	96,81	94,95	95
19	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	44,61	42,63	49,73	74	85	85,03
20	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	83,88	81,77	86,67	86,67	92,72	92,74

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Tabel 2.39
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
				2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	99,80
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100 %	0,67
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	64,32

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Tabel 3.41
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

- Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	2018		2019		2020	
				Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	728	0	0	0	0	0	0
		SMP	205	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar bersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didi dan guru, serta papan tulis.	SD	728	561	77	597	82	618	85
		SMP	205	164	80	169	84	176	86
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	205	95	47	103	64	110	54
4.	Di setiap SD/Mid an SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD	728	597	82	609	86	640	88
		SMP	205	178	87	183	89	187	91
5.	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang	SD	728	466	64	479	76	611	84

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	2018		2019		2020	
				Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
	guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.								
6.	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	205	137	67	142	72	156	76
7.	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-1V dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	728	568	78	583	80	597	82
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuhnya diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebnyak 40% dan 20%.	SMP	205	168	82	173	84	176	86
9.	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	SMP	205	182	89	185	90	187	91
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikar pendidik.	SD	728	488	67	503	70	531	73
11.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikar pendidik.	SMP	205	127	62	132	64	135	66

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jenjang	Total	2018		2019		2020	
				Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
12.	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.								
13.	Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.								
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan.	SD	728	534	73	546	75	561	77
		SMP	205	117	57	120	59	123	60

2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Persatuan Penduduk

Sampai dengan tahun 2020, jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 39 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 32.854 Jumlah ini terdiri dari Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) sebanyak 10 buah dengan Rasio persatuan Penduduk 1 : 128.131 dan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) sebanyak 29 buah dengan rasio persatuan Penduduk sebesar 1 : 44.183 Kondisi tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000. sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sementara itu rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2020 mencapai 1 : 1,39 artinya bahwa dalam satu kecamatan bisa terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas.

Tabel 2.40
Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan)	Unit	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah Puskesmas TTP (Tanpa Tempat Perawatan)	Unit	29	29	29	29	29	29
3	Jumlah Puskesmas Mampu PONED	Unit	10	10	10	10	10	8
4	Jumlah Pustu	Unit	114	114	114	114	114	114
5	Jumlah Poskesdes	Unit	95	95	95	95	95	125
6	Rasio Puskesmas DTP Persatuan Pendudu	Rasio	123.909	125.048	126.149	127.156	128.131	129.041
7	Rasio Puskesmas TTP Persatuan Penduduk	Rasio	42.727	43.120	43.499	43.847	44.183	44.497
8	Rasio Puskesmas PONED Persatuan Penduduk	Rasio	123.909	125.048	126.149	127.156	128.131	161.301
9	Rasio Pustu Persatuan Penduduk	Rasio	1079,7	10.969	11.065	11.154	11.239	11.319
10	Rasio Poskesdes Persatuan Penduduk	Rasio	13.043	13.163	13.278	13.384	9.780	10.323
11	Jumlah Kecamatan	Jumlah	28	28	28	28	28	28
12	Jumlah kampung/ kelurahan	Jumlah	311	311	311	311	311	314
13	Rasio Poskesdes Per Desa	Rasio	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	2,51
14	Rasio Puskesmas Per Kecamatan	Rasio	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 1 unit dan rumah sakit swasta 8 (delapan) unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 mencapai 1 : 143.379 yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah melayani 143.379 penduduk.

Tabel 2.41
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik Per Jumlah Penduduk

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	9	9	9	9	9	9
2	Jumlah Klinik	Unit	36	36	36	36	29	29
3	Rasio Rumah Sakit Thd Penduduk	Rasio	137.677	138.942,9	140.166	141.285	142.367,9	143.379,0
4	Rasio Klinik Thp Penduduk	Rasio	34419	34736	35042	340877	44183	44497
5	Jumlah Penduduk	Jumlah	1.239.096	1.250.486	1.261.498	1.2271.566	1.281.310	1.290.407

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

c. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Jumlah Tenaga Kesehatan secara keseluruhan selama tahun 2015 - 2020 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang. Angka ideal rasio pemenuhan tenaga Kesehatan dokter adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2020, jumlah tenaga dokter mencapai 231 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.460.045 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 513 orang. Sehingga kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 sebanyak 282 orang.

Tabel 2.42
Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Umum + gigi	Orang	146	152	145	164	183	152
2	Jumlah Dokter Spesialis	orang	85	82	93	114	123	79
3	Jumlah Dokter	Orang	231	234	238	278	306	231
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.239.096	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045
5	Rasio Dokter Terhadap Penduduk	Rasio	0,37	0,37	0,38	0,44	0,48	0,32
6	Jumlah Perawat	Orang	806	879	993	1089	1027	1027
7	Jumlah Bidan	Orang	753	851	751	844	760	592
8	Rasio Bidan Terhadap Penduduk	Rasio	1,26	1,38	1,38	1,52	1,39	1,11
9	Jumlah Desa	Desa	311	311	311	311	311	311
10	Rasio Bidan Desa Terhadap Jumlah Desa	Rasio	2,42	2,74	2,41	2,71	2,44	1,90

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Selama periode tahun 2015-2020, jumlah Posyandu di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan 79 buah posyandu atau 5,77% dari sebanyak 1.369 buah pada tahun 2015 menjadi sebanyak 1.448 buah pada tahun 2020. Namun demikian, sampai tahun 2020 masih terdapat Posyandu Pratama sebanyak 0,14 persen dan posyandu madya sebanyak 4,28 persen. Hal ini menggambarkan masih perlunya pembinaan peningkatan cakupan untuk meningkatkan strata posyandu madya ke purnama dan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menaikkan strata pratama menjadi madya melalui penambahan jumlah Kader. Selain itu, perlu pembinaan tokoh masyarakat untuk meningkatkan strata purnama ke mandiri.

Tabel 2.43
Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu Pratama	buah	0	0	0	1	2	2
2	Jumlah Posyandu Madya	buah	504	225	225	254	62	62
3	Jumlah Posyandu Purnama	buah	758	1005	1005	1020	897	897
4	Jumlah Posyandu Mandiri	buah	107	178	178	181	176	176
5	Total Posyandu	buah	1369	1408	1408	1456	1448	1448
6	Persentase							
	- Posyandu Pratama	%	0	0	0	0,07	0,14	0,14
	- Posyandu Madya	%	36,82	15,98	15,98	17,45	4,28	4,28
	- Posyandu Purnama	%	55,37	71,38	71,38	70,05	61,95	61,95
	- Posyandu Mandiri	%	7,82	12,64	12,64	12,43	12,15	12,15
7	Jumlah Balita	orang	118.705	115.351	113.579	111.743	109.907	108.059
8	Rasio Jumlah Balita Setiap Posyandu	Rasio	11,53	12,21	12,40	13,03	13,17	13,40

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2020 sebesar 69,31 persen. Namun apabila capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan -2,93 persen.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

- Kualitas sumber daya manusia bidang kebidanan;
- Sarana prasarana dalam mendukung pertolongan persalinan sesuai standar;
- Akses informasi mengenai pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat;
- Kualitas pelayanan Antenatal care;
- Peran serta masyarakat dalam memobilisasi perto-longan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.44
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	orang	20.434	21.862	21.449	19.889	20.141	15.594
2	Jumlah Total Ibu Bersalin	orang	28.623	24.264	23.829	23.379	22.937	22.500
3	Persentase	%	71,4	90,1	90	85,1	87,8	69,31

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Tabel 2.45
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase balita gizi buruk	%	0,017	0,013	0,026	0,013	0,019	0,093
2	Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan	kasus	18	13	12	10	17	21
3	Jumlah kasus kematian bayi	kasus	98	86	63	96	74	78
4	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan	%	71,39	90,10	90,01	85,07	87,8	69,31
5	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	%	74,51	91,31	91,08	83,49	83,6	66,08
6	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96,50	78,45	86,49	91,4	100	100
7	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Rumah yang memenuhi syarat kesehatan (R)	%	71,01	80,35	76,35	76,58	77,42	n.a
9	Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)	%	67,47	81,11	81,80	84,63	86,67	63,27
10	Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus (K)	%	77,14	78,73	78,89	80,28	81,10	89,31
11	Cakupan tempat pengelolaan makanan	%	80,72	77,22	68,07	68,74	76,7	n.a
12	Persenta kasus KLB yg ditangani < 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase kasus HIV tertangani	%	100	100	100	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Persentase kasus AIDS tertangani	%	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Puskesmas mampu Poned	%	26,32	26,32	25,64	25,64	20,51	20,51
16	Rasio RSU terhadap Penduduk	Rumah Sakit terhadap penduduk	137.677	138.942,9	140.166	141.285	142.367,9	143.379
17	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	Puskesmas terhadap penduduk	10.682	10.780	11.066	11.154	11.239	11.319
18	Rasio dokter : penduduk	dokter terhadap penduduk	5.364	5.343	5.300	4.573	4.781	5.586
19	Rasio dokter spesialis : penduduk	dokter spesialis terhadap penduduk	14.577,6	15.249,8	13.564,4	11.154	10.417	16.334
20	Cakupan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit							
	- Kunjungan Rawat Jalan	orang	262.308	423.559	859.555	943.169	148.112	256.835
	- Kunjungan Rawat Inap	orang	38.107	52.609	45.449	46.800	49.712	41.914
	- Kunjungan Rawat IGD	orang						
	Quality of Place :							
	- Bed Occupancy Rate (BOR	%	29,04	44,40	41,37	36,66	46,4	44,2

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Turn Over Interval (TOI)	hari	3	3	4	4	3	3
	- Bed Turn Over (BTO)	kali	86	66	61	54	66	62
	Quality of Servive :							
	- Average Length Of Stay(Avlos)	Hari	1	2	2	3	3	3
	- Net Death Rate (NDR)	Per 1000	2,27	4,72	5,96	10,37	7,6	35
	- Gross Death Rate (GDR)	Per 1000	3,78	11,64	13,81	18,70	15,0	19
	Angka Kematian Bayi (IMR)	Per 1000	4,7	3,91	2,92	4,95	3,6	0,6
	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	per 100.000	86,36	59,06	52,88	51,48	83,58	106,4

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

f. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan

Jenis layanan dasar untuk SPM bidang kesehatan tingkat kabupaten terdiri dari 12 jenis layanan. Rata-rata SPM tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 16,31 persen per tahun. Rata-rata SPM pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat 0,10 persen per tahun, pelayanan kesehatan ibu bersalin turun 0,47 persen per tahun, kesehatan bayi baru lahir turun 5,90 persen per tahun, kesehatan balita turun 1,57 persen per tahun, kesehatan pada usia pendidikan dasar meningkat 44,24 persen per tahun, kesehatan pada usia produktif meningkat 1,70 persen per tahun, kesehatan pada usia lanjut meningkat 13,34 persen per tahun, kesehatan penderita hipertensi meningkat 4,43 persen per tahun, kesehatan penderita diabetes melitus meningkat 9,69 persen per tahun, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat meningkat 25,83 persen per tahun, kesehatan orang terduga tuberkulosis meningkat 48,92 persen per tahun, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) meningkat 32,88 persen per tahun.

Tabel 2.46
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	74,51	91,31	91,08	83,49	93,34	69,76
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	71,39	90,10	90,01	85,07	87,81	64,80
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	99,17	98,23	91,83	85,18	93,11	70,65
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	80,26	56,58	64,25	46,83	76,23	55,21
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	24,36	92,37	97,30	74,53	66,33	47,14
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	n.a	n.a	39,18	27,95	58,06	15,17
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	76,23	27,35	60,80	60,68	61,31	66,01
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	n.a	n.a	46,05	49,42	57,00	51,64
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan	100 %	n.a	n.a	40,05	46,00	68,03	45,11

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
		layanan kesehatan							
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	n.a	n.a	43,13	60,00	76,00	84,91
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	12,31	33,05	20,24	52,17	73,10	12,44
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	n.a	n.a	n.a	93,88	24,69	50,00

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup		3,8499615	3,91	2,73	4,94	3,625347636	0,6
	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.		105	86	63	96	73	10

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		27.273	22.013	23.109	19.424	20.136	19.820
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		996	996,09	997	995	996	999,4
	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu		105	86	63	96	73	10
	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		27273	22013	23109	19424	20136	19.820
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup		1,44	4,00	2,86	0,57	1,14	0,5
	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu		30	88	66	11	23	6
	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		20844	22013	23109	19424	20136	19.820
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup		3,60	3,23	2,51	4,74	2,73	3,5
	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu.		75	71	58	92	55	69
	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu		20844	22013	23109	19424	20136	19.820
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		23,99	53,58	56,33	50,28	84,05	106,39

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun		5	13	12	10	17	21
	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama		20844	24264	21304	19889	20226	19.820
6	Rasio Pos Yandu per satuan balita		11,53	12,21	12,40	13,02	13,17	1,3
	Jumlah posyandu		1369	1408	1408	1455	1448	1448
	Jumlah balita		118705	115351	113579	111743	109907	108.059
7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk		0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu		190	154	154	154	154	154
	Jumlah penduduk		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1460045
8	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk		0,007263348	0,007197202	0,007134375	0,007077887	0,007024061	0,006974544
	Jumlah rumah sakit		9	9	9	9	9	9
	Jumlah penduduk		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1460045
9	Rasio Dokter per satuan penduduk		0,012	0,012	0,011	0,013	0,014	0,010
	Jumlah dokter (umum + gigi)		146	152	145	164	183	152
	Jumlah penduduk		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1460045

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (dokter + spesialis)		0,019	0,019	0,019	0,022	0,024	0,016
	Jumlah tenaga medis		231	234	238	278	306	231
	Jumlah penduduk		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1460045
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani		72,1	72,8	100,0	100,0	100,0	96,9
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		4321	3699	325	2791	3762	4202
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		5997	5084	3245	2791	3762	4338
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		68,15	90,10	99	99,54	99,58	76,83
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		20434	21862	21103	19889	20141	17287
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		29986	24264	21304	19980	20226	22500

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)		96,50	77,71	85,67	91,40	100,00	100,00
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI		303	244	269	287	314	314
	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan		314	314	314	314	314	314
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		20	15	30	30	30	10
	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		20	15	30	30	30	10
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		95,0	100,0	98,8	111,7	100,9	8,7
	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun		24846	22650	22035	24477	21731	1861
	Jumlah anak usia 1 tahun pada w		26140	22652	22292	21915	21538	21428
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		0	0	2,06	0,884762618	2,657815158	0

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan		0	0	7	3	9	0
	jumlah penduduk < 15 tahun		338884	338884	339074	339074	338624	337494
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		8,48	6,67	9,92	23,80	19,22	13,92
	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun		1007	769	376	593	471	337
	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang samA		11871	11535,1	3788,956312	2491,8689	2450,9261	2421
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA		100	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun		611	748	954	1082	1311	1289
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama		611	748	954	1082	1311	1289
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk		67,63	81,73	89,66	163,11	102,32	14,00
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama		838	1022	1131	2074	1311	180,66

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1290407
20	Tingkat Kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk		0,242111601	0,479813449	0,475625011	1,179647773	0,936541508	0,30997972
	Jumlah Paisen TB yang meninggal		3	6	6	15	12	4
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1290407
21	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		100	100	100	100	100	100
	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS		611	748	954	766	1575	1580
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut		611	748	954	766	1575	1580
22	Proporsi kasus Ttuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		97	75	52	100	99	98
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun		591	563	493	766	1565	1548
	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama		611	748	954	766	1575	1580

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP selama 1 Tahun		177	351	75	109	366	110
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan dalam Kurun waktu yang sama		177	351	75	109	366	110
24	Penderita Diare yang ditangani		53,07	46,94	41,97	52,59	30,47	38,67
	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader		14072	12562	14294	18056	10540	13472
	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)		26517	26760,4004	34060,446	34332,282	34595,37	34841
25	Angka kejadian malaria		2,02	0,32	0,71	0,39	0,62	n.a
	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu		25	4	9	5	8	0
	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1460045
26	Tingkat Kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah kematian tersangka malaria		0	0	0	0	0	0
	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun		0	1239096	1261498	1261498	1261498	n.a
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,002582524	0,000879658	0,008640521	0,002	0,007	0,018
	Jumlah pasien HIV dan AIDS		32	11	109	30	93	227
	Jumlah penduduk		1239098	1250486	1261498	1271566	1281310	1460045
28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		62,16927049	82,6243779	84,52189119	40,62952785	62,95306812	0
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1		244651	340172	369266	65056	96847	n.a
	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten		393524	411709	436888	160120	153840	152.280

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.343,3 km dan terbagi dalam 366 ruas. Sampai dengan tahun 2020 jalan mantab di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 61,91 persen atau sepanjang 698,821 km. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2020 meliputi aspal/hotmix sepanjang 1.058,66 km (78,81%), Beton sepanjang 46,25 km (3,44%), lapis penetrasi/latasir sepanjang 30,57 km (2,28%), Kerikil (Telford) sepanjang 184,99 km (13,77%), dan jalan tanah 22,82 Km (1,70%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 452 buah.

Tabel 2.48 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2020

Jenis Permukaaan Jalan	2018		2019		2020	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Aspal (AC,HRS,ATB)	1013,539	75,45	1076,273	80,12	1058,661	78,81
Perkerasan Beton	22,568	1,68	32,374	2,41	46,255	3,44
Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam	273,367	20,35	-	-	30,574	2,28
Telford /Kerikil/Urpil	33,852	2,52	214,126	15,94	184,994	13,77
Tanah /Belum Tembus	1013,539	75,45	20,553	1,53	22,842	1,70
Jumlah	1.343,326	100	1.343,326	100	1.343,326	100

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, 2020

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Tengah

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	34,69	58,16	58,39	61,20	61,91	61,50
	Panjang jalan kondisi baik	Km	415,177	696,071	537,036	644,423	810,447	313,995
	Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	Km	-	-	161,785	53,01	17,35	517,719
	Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Ringan	Km	-	-	160,135	406,507	47,793	495,749
	Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat	Km	-	-	337,864	239,386	467,736	15,863
	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.196,82	1.196,82	1.196,82	1.343,326	1.343,326	1.343,326
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,0010	0,0010	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
	Jumlah panjang jalan	Km	1.196,820	1.196,820	1.343,326	1.343,326	1.343,326	1.343,326
	Jumlah penduduk	Jiwa	1.239.096	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045
3	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drenase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	n.a	n.a	0,59	0,88	1,21	n.a
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi	Km	N/A	N/A	7,054	12	16	n.a
4	Panjang jalan menurut jenis permukaan							
	Aspal (AC,HRS,ATB)	Km	N/A	N/A	N/A	1013,539	1076,273	1058,661

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Perkerasan Beton	Km	N/A	N/A	N/A	22,568	32,374	46,255
	Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam	Km	N/A	N/A	N/A	273,367	-	30,574
	Telford /Kerikil/Urpil	Km	N/A	N/A	N/A	33,852	214,126	184,994
	Tanah /Belum Tembus	Km	N/A	N/A	N/A	1013,539	20,553	22,842

b. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdapat daerah irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu D.I Way Seputih, D.I. Way Pengubuan, dan D.I. Punggur Utara. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 67,789 km, jaringan irigasi sekunder 496,940 km dengan luas sawah yang terairi 48.335 Ha.

Selain itu juga ada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Way Kali Pasir, D.I. Way Srikaton, D.I. Way Tatayan Kotabaru, dan D.I. Way Tipo Balak. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 44,892 km, jaringan irigasi sekunder 108,091 km dengan luas sawah yang terairi 6.904 Ha.

Untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 163 daerah irigasi. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 403,888 km, jaringan irigasi sekunder 487,757 km dengan luas sawah yang terairi 16.408 Ha.

Pada periode 2015-2020, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata daerah irigasi teknis kewenangan pemerintah kabupaten yang kondisi baik adalah 94,48 persen dan rata-rata embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik meningkat 28,78 persen per tahun. Rata-rata persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah 33,67 persen.

Selama periode 2015-2020, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun terus menurun dengan penurunan 7,38 persen per tahun. Rata-rata persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik terus menurun dengan penurunan 0,20 persen per tahun. Rata-rata persentase jumlah embung dalam kondisi baik 51,85 persen. Rata-rata persentase jumlah bendung dalam kondisi baik 72,72 persen. Rata-rata persentase panjang talud dan bangunan pelengkap 66,80 persen. Rata-rata persentase luas sawah yang terairi oleh jaringan irigasi 90,70 persen. Rata-rata persentase jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik 61,34 persen.

Tabel 2.50
Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kewenangan Pemerintah Pusat	DI	3	3	3	3	3	3
2	Kewenangan Pemerintah Propinsi	DI	4	4	4	4	4	4
3	Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten	DI	163	163	163	163	163	163

Sumber: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah 2021

Tabel 2.51
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pengairan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Daerah irigasi teknis kewenangan pemerintah kabupaten yang kondisi baik	%	94,48	94,48	94,48	94,48	94,48
2	Embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik	%	52	52	46	60	65
3	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	40	40	40	41	41
3.1	*Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)*	km	323	325	327	331	335
3.2	*Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)*	km	813	813	813	813	813
4	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	86%	79%	61%	58%	56%
4.1	*Luasan daerah yang tergenang*	ha	6.660	5.896	4.100	3.840	3.560
4.2	*Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang*	ha	7.777	7.460	6.674	6.600	6.387
5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	10	10	11	17	18
5.1	*Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik*	ha	1.620	1.710	1.905	1.850	1.980
5.2	*Luas irigasi kabupaten*	ha	16.636	16.636	16.636	11.160	11.160
6	Rasio jaringan Irigasi		16,51	16,51	16,51	16,51	16,51
6.1	*Panjang saluran irigasi*	km	2.780,98	2.780,98	2.780,98	2.780,98	2.780,98
6.2	*Luas lahan budidaya pertanian*	ha	16.849	16.849	16.849	16.849	16.849
7	Persentase jumlah embung dalam kondisi baik	%	58,33	62,96	66,67	71,43	73,68

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
7.1	*Jumlah embung dalam kondisi baik*	unit	28	34	40	50	56
7.2	*Jumlah embung*	unit	48	54	60	70	76
8	Persentase jumlah bendung dalam kondisi baik	%	n.a	25	92,86	100	73
8.1	*Jumlah bendung dalam kondisi baik*	unit	n.a	1	13	18	49
8.2	*Jumlah bendung*	unit	n.a	4	14	18	67
9	Persentase panjang talud dan bangunan pelengkap	%	65	70	90	100	74
9.1	*Panjang talud dan bangunan pelengkap*	m	3.920,00	2.190,00	2.545,00	5.666,00	277,23
9.2	*Panjang talud dalam keadaan baik*	m	2.548,00	1.533,21	2.290,59	5.666,00	204,6
10	Persentase luas sawah yang terairi oleh jaringan irigasi	%	78,89	79,88	79,88	79,83	91,87
10.1	*Jumlah luas sawah yang terairi oleh jaringan irigasi*	ha	69.682	69.639	69.639	69.241	79.696
10.2	*Jumlah luas sawah*	ha	87.224	87.181	87.181	86.735	86.745
11	Jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	km	563,22	563,22	563,22	563.22.00	563,22
11.1	*Jaringan irigasi primer dalam kondisi sedang*	km	56,05	56,05	56,05	56.05.00	56,05
11.2	*Jaringan irigasi primer dalam kondisi jelek*	km	72,65	72,65	72,65	72,65	72,65
11.3	*Total jaringan irigasi primer*	km	691,91	691,91	691,91	691,92	691,92
12	Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	km	387,66	387,66	387,66	387,66	387,66
12.1	*Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi sedang*	km	36,38	36,38	36,38	36,38	36,38
12.2	*Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi jelek*	km	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9
12.3	*Total jaringan irigasi sekunder*	km	496,93	496,93	496,93	496,94	496,94
13	Jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	km	422,84	456,64	495,95	590,373	696.441
13.1	*Jaringan irigasi tersier dalam kondisi sedang*	km	36,38	36,38	91.39.00	81,385	49,564

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
13.2	*Jaringan irigasi tersier dalam kondisi jelek*	km	1.027,90	1.024,10	1.004,80	920,367	846,119
13.3	*Total jaringan irigasi tersier*	km	1.592,12	1.592,12	1.592,12	1.592,13	1.592,13
14	Persentase jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik	%	49,4	50,61	52,03	55,42	59,23
14.1	*Jumlah Saluran irigasi dalam kondisi baik (km)*	km	1.373,72	1.407,54	1.446,83	1.541,25	1.647,32
14.2	*Jumlah Saluran irigasi*	km	2.780,98	2.780,98	2.780,98	2.780,98	2.780,98
15	Ketaatan terhadap RTRW	%	n.a	26	73,4	73,4	73,4
15.1	*Luas wilayah*	ha	n.a	478.982	478.982	478.982	478.982
15.2	*Luas wilayah yang taat terhadap RTRW*	ha	n.a	124.535	354.447	354.447	354.447

Sumber data: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah

c. Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejah-teraan penduduk yang menempatinya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2016 – 2020 mengalami kecenderungan meningkat degan rata-rata pertumbuhan 3,56 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 94,30 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih.

Perkembangan jumlah rumah sehat (rumah layak huni) tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat degan rata-rata pertumbuhan 1,70 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 86,58 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk kategori rumah sehat (rumah layak huni).

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga tahun 2016–2020 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat degan rata-rata pertumbuhan 1,78 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 94,30 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menggunakan jamban sehat keluarga.

Perkembangan jumlah pengguna listrik tahun 2016 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat degan rata-rata pertumbuhan 2,41 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 89,30 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menjadi pengguna listrik.

Luas lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) tahun 2016–2020 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan menurun degan rata-rata pertumbuhan penurunan 6,73 persen. Sampai dengan tahun 2020 Luas lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) di Kabupaten Lampung Tengah hanya tinggal 1,52 persen.

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	278.748	285.898	285.898	298,319	320.207
	Persentase	84.83	86,15	86,15	88,12	94,30

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni)
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah sehat (Layak Huni)	283.714	283.752	286.752	287.502	294.002
	Persentase	77	85,51	85,54	86,18	86,58

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.54
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Jamban Sehat Keluarga	298.455	308.455	311.855	315.240	320.207
	Persentase	90.83	92,95	93.04	93,12	94,30

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Pengguna Listrik Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah Pengguna Listrik	275.992	275.992	281.512	285.686	303.229
3	Persentase	84	83,13	83.99	84.39	89.30

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.56
Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan Lingkungan Permukiman (Ha)	527,38	527,38	527,38	642,21	553,74
2	Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	11,21	11,21	10,20	9,89	8,42
3	Persentase	2,1	2,1	1,9	1,54	1,52

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

d. Penataan Ruang

Berdasarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah saat ini memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 5,26 Ha atau sebesar 8,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.57
Penataan Ruang

No	Uraian	Luas (m2)		LOKASI
		2019	2020	
1	Taman Tugu Canang	18.623	18.623	Kec. Gunung Sugih
2	Taman Kopiah Emas	3.063	3.063	Kec. Gunung Sugih
3	Taman Budaya	632	632	Kec. Gunung Sugih
4	RTH Way Tippo dan Halaman Pabung	245	245	Kec. Gunung Sugih
5	Kolam Air Mancur Utara-Selata	3.557	3.557	Kec. Gunung Sugih
6	Lapangan Upacara Baru	18.376	18.376	Kec. Gunung Sugih
7	RTH Plaza Bandar Jaya	220	220	Kec. Gunung Sugih
8	Tugu Perbatasan Pesawaran - Lampung Tengah	414	414	Kec. Bumi Ratu
9	Tugu Nanas	18	18	Kec. Punggur
10	RTH Poncowati	150	150	Kec. Terbanggi Besar
11	RTH Haji Pemanggilan	298	298	Kec. Padang Ratu
12	RTH Wates	100	100	Pasar Wates
13	RTH Taman Gajah	4.338	4.338	Kec. Gunung Sugih
14	RTH Kec. Padang Ratu	594	594	Kec. Padang Ratu
15	RTH Seputih Banyak	840	840	Kec. Seputih Banyak
16	RTH Sendang Agung	630	630	Kec. Sendang Agung
17	RTH Kota Gajah	110	110	Kec. Kota Gajah
18	RTH Bekri	112	112	Kec. Bekri
19	RTH Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan	66	66	Kec. Way Pengubuan
20	RTH Perbatasan Kampung Lempuyang Bandar - Kec. Terbanggi Besar	75	75	Kec. Way Pengubuan

No	Uraian	Luas (m2)		LOKASI
		2019	2020	
21	Kolam Air Mancur Masjid Istiqlal	38	38	Kec. Terbanggi Besar
22	RTH Dam Raman	66	66	Kec. Punggur
Total RTH (m2)		**52.566**	**52.566**	
Total RTH (ha)		**5,26**	**5,26**	

Sumber data: Dinas Pengairan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni pada tahun 2015 sebanyak 284.952, pada tahun 2016 sebanyak 285.352 unit, pada tahun 2017 sebanyak 286.102 unit, pada tahun 2018 sebanyak 286.752 unit, serta pada 2019 rumah layak huni sebanyak 287.502 unit. Adapun pada tahun 2020, jumlah rumah layak huni sebanyak 294.002 unit. Rata-rata pertumbuhan rumah layak huni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,63 persen, rata-rata Rasio permukiman layak huni adalah 0,43 persen, rata-rata cakupan ketersediaan rumah layak huni 93,30 persen, dan rata-rata cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah 100 persen. Capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan 2,91 persen. Indikator yang digunakan untuk mengukur SPM tersebut ada 4 (empat) indikator, yaitu adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni, persentase penurunan luasan.

Tabel 2.58
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24
	Jumlah rumah layak huni	unit	284.952	285.352	286.102	286.752	287.502	294.002
	Jumlah penduduk	jiwa	1.239.098	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.281.310
2	Rasio Permukiman layak huni		0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94
	Luas pemukiman layak huni	ha	487	488	490	491	493	494
	Luas wilayah permukiman	ha	527	527	527		527	527
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		91,3	93,2	93,4	93,6	93,9	94,4
	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	269.451	274.994	275.744	276.394	277.144	278.501
	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	295.167	295.167	295.167	295.167	295.167	295.167
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		0,55	0,62	0,63	0,64	0,65	0,67
	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	unit	40.418	45.961	46.711	47.361	48.111	49.468

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	unit	73.792	73.792	73.792	73.792	73.792	73.792
5	Luas area permukiman tertata	ha	8	16	24	498	499	501
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,008	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Luas lingkungan permukiman kumuh	ha	40	5	6	6	5	4
	Luas wilayah	ha	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0	0	0	0	0	0
	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	ha	40	5	6	6	5	4
	Luas pemukiman kumuh	ha	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		0,008	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	unit	40	5	6	6	5	4
9	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	unit	478.960	478.965	478.965	478.965	478.965	478.964

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawsan Permukiman

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Capaian		Pening-katan
			%	2019	2020	
1	Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,89	85,54	86,58	1,04
2	Luasan Kawasan Kumuh	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	0,0069	1,79	1,52	0,27
3	Akses Air Bersih	Prosentase penduduk berakses air bersih	90	88,12	89,5	1,38
4	Rumah Tinggal Bersanitasi	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	94,39	93,12	94,3	1,18

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat erat kaitanya dengan tingkat kriminalitas. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan per Undang-Undangan, seperti halnya peraturan daerah dan peraturan Bupati. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan per-undang-undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketenteraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran perda dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan perda.

Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunannya dalah 3,78 persen. Hal ini salah satunya di dukung oleh adanya peningkatan rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk yang rata-rata pertumbuhannya adalah 22,98 persen. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 13,30 persen.

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 12,76 persen. Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya adalah 1,73 persen.

Tabel 2.60
Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi 2020	%
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	28 Kec.	28 Kec.	100
2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	28 Kec.	28 Kec.	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lamteng

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Pembangunan
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)		1	1	1	1	1	1
	100 orang petugas Linmas	Orang	96	96	96	96	100	100
	1 Wilayah kerja kabupaten/kota	Orang	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	4	4	4	5	5	4

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Kasus	23	23	24	25	26	25
	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP	Kasus	550	550	550	550	559	556
3	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kebakaran	27	12	17	26	46	22
4	Persentase penegakan PERDA	Persen	0	13,33	17,65	23,08	26,32	20,00
	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Kegiatan	2	2	3	3	5	6
	Jumlah pelanggaran PERDA	Kasus	15	15	17	13	19	30
5	Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	Rasui	0	5.04	5,32	4,39	4,25	0
6	*Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk*	Rasio	0	346	349	676	658	0
	Jumlah Penduduk	Orang	n/a	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1,460,045

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah dan BPBD Kabupaten Lampung Tengah

5. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyara-kat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejah-teraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh keberadaan panti-panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain-lain).

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 54,64 persen. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 88 persen PMKS sudah memperoleh bantuan. Persentase PMKS skala skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 66,99 persen.

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya juga terus mengalami peningktan. Pada akhir tahun 2020 sudah 100 persen PMKS telah menerima bantuan program pemberdayaan, semua panti telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan, wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan, korban bencana telah menerima bantuan selama masa tanggap darurat, dan korban bencana telah dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 2.62
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2016-2020
di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kelompok PMKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	27	85	84	82	88
2	Prosentase Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	3,70%	2.9%	0,80%	1,40%	0,80%
3	Jumlah Anak Terlantar Yang dilakukan Pembinaan	anak	47	47	200	160	200
4	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	orang	30	30	30	10	15
5	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	lembaga	3	3	3	3	3
7	Persentase PMKS skala skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	25	83	79	59	98
8	*Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun*	Orang	28.892	95.981	79.496	95.981	146.355
9	*Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial*	Orang	116.388	115.847	100.925	163.027	149.692
10	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	%	44	82	100	100	100

No	Kelompok PMKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
11	*Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis*	Orang	1.190	2.200	700	540	1.000
12	*Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis*	Orang	2.690	2.690	700	540	1.000
13	Persentase panti yang menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100
14	*Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos*	Panti	48	48	69	26	43
15	*Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos*	Panti	48	48	69	26	43
16	Persentase wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan		100	100	100	100	100
17	*Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos*		143	143	143	143	143

No	Kelompok PMKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
18	*Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala*		143	143	143	143	143
19	Persentase korban bencana yanag menerima bantuan selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
20	*Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun*	kejadian bencana	34	23	46	57	19
21	*Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun*	kejadian bencana	34	23	46	57	19
22	Persentase korban bencana yanag dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	104	100	100
23	*Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun*	Kebakaran	12	17	26	46	22
24	*Jum.lah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala*	Kebakaran	12	17	25	46	22

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.63
Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capainnya					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 persen	1,23%	1,04%	1,05%	0,49%	0,16%	0,24%
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	n.a	n.a	n.a	64,21%	30,51%	33,56%
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	1,23%	1,04%	1,76%	3,59%	5,20%	5,68%
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	100 persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja *(demand for labour)* merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Lampung Tengah, untuk tahun 2018 dan 2019 diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 73,46 persen. Sedangkan pada tahun 2020 TPAK sebesar 72,81 persen. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas terdapat di antaranya 72 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Secara rata-rata selama kurun waktu 2015-2020 TPAK di Kabupaten Lampung Tengah adalah 71,10 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti et al. (1995) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi

angkatan kerja adalah jenis kelamin. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin ini disebabkan karena laki-laki lebih memiliki tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi (baik bekerja maupun mencari kerja) sedangkan perempuan cenderung mengurus rumah tanga.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 dan 2020, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 2,71 persen sedangka di tahun 2020 meningkat menjadi yaitu sebesar 4,42 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat pengangguran terbuka laki-laki selalu lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Secara rata-rata selama kurun waktu 2015-2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah adalah 3,17 persen.

Rata-rata persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2015-2020 di di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 7,41 persen. Bahkan pada akhir tahun 2020 hanya 21,27 persen pencari kerja yang ditempatkan. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya perekonomian. Sehingga semakin sedikit angkatan kerja yang berhasil ditempatkan dan semakin melemahnya serapan/lowongan untuk tenaga kerja. Karena dampak pandemi Covid-19 ini maka persentase tenaga kerja yang sudah mengikuti BPJS Keteagakerjaan juga cenderung menurung dengan rata-rata penurunan 3,03 persen.

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas tahun 2015-2020 di di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,33 persen. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 73,05 persen penduduk usia 15 tahun kerja ke atas telah memiliki kesempatan kerja.

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,34 persen. Namun semua (100 persen) kasus dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsostek cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 20,25 persen.

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,34 persen. Jumlah lulusan S1/S2/S3 juga cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 7,00 persen

Tabel 2.64
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan
Tahun 2015 – 2020

No	Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah (Usia Kerja)	% Tingkat Pengang-guran Terbuka	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja/TPAK
		Bekerja	Pengang-guran	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja			
1	**2015**										
	Laki-Laki	400.290	10.062	410.352	23.788	9.728	14.672	48.188	452.917	2.54	88.79
	Perempuan	213.735	8.537	222.272	30.506	180.845	10.492	221.843	438.330	2.37	53.26
2	**2016**										
	Laki-Laki	400.290	10.062	410.352	23.788	9.728	14.672	48.188	458.540	2.45	89.49
	Perempuan	213.735	8.537	222.272	30.506	180.845	10.492	221.843	444.115	3.84	50.05
3	**2017**										
	Laki-Laki	415.891	8228	424.119	19130	8469	17890	45.489	458.540	2.45	89.49
	Perempuan	223.595	12116	235.711	29029	180139	10310	219.478	444.115	3.84	50.05
4	**2018**										
	Laki-Laki	418.135	8.005	426.140	21.115	14.735	12.165	48.015	458.540	2.45	89.49
	Perempuan	253.173	9.275	262.448	29.059	156.419	12.114	197.592	444.115	3.84	50.05

No	Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah (Usia Kerja)	% Tingkat Pengang-guran Terbuka	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja/TPAK
		Bekerja	Pengang-guran	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja			
5	**2019**							0			
	Laki-Laki	416.820	7.977	424.797	26.472	13.747	15.234	55.453	474.205	1.89	57.05
	Perempuan	245.719	9.817	255.536	26.725	172.747	10.840	210.312	460.040	3.53	89.87
6	**2020**										
	Laki-Laki	426.428	15.178	441.966	27.703	7.743	20.063	55.509	497.475	3.56	88,84
	Perempuan	259.578	14.478	274.056	33.371	160.855	14.049	208.275	482.691	5,28	56,78

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.65
Pencapain Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2020 di Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	n.a	2,37	3,18	2,52	2,62	4.22
2	Rata-rata persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	n.a	57,86	60,60	62	85,89	21,27
3	Persentase Tenaga Kerja Yang Sudah mengikuti BPJS Keteagakerjaan	%	n.a	60	70	80	90	39,97
4	Angka partisipasi angkatan kerja		n.a	69,40	71,53	73,85	72,17	73,05

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Angkatan kerja 15 tahun ke atas		n.a	632.624	659.830	688.638	680.333	716.022
	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas		n.a	911.602	922.424	932.492	942.686	980.166
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas		n.a	69,40	69,36	71,99	70,28	73.05
	Kesempatan kerja		632.624	632.624	639.830	671.308	662.539	685.826
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas		n.a	911.602	922.424	932.492	942.686	980.166
6	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Kasus	166,67	166,67	62,50	90,91	62,50	100
	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	9	9	4	11	9	15
	Jumlah perusahaan		54	54	64	121	144	399
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Kasus	100	100	100	100	100	100
	∑kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		7	7	1	5	4	7
	∑kasus yang dicatatkan		7	7	1	5	4	15
8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan							
	∑pencari kerja yang ditempatkan		n.a	2.264	2.232	2.300	2867	770
	∑pencari kerja yang terdaftar		n.a	3.913	3.683	4162	3338	3620
9	Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	55,21	55,21	85,00	93,50	56,57	100

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	∑*pekerja/ buruh JAMSOSTEK*		19.807	19.807	27.565	31.721	32.715	40.936
	∑*pekerja/ buruh*		35.873	35.873	32.429	33928	57.828	60.524
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	66,67	100	n.a	n.a	100	80
	∑*tenaga kerja yang dilatih*		30	30	n.a	n.a	65	100
	∑*pendaftar pelatihan berbasis masyarakat*		45	30	n.a	n.a	65	125
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		1,28	1,28	0,81	31,23	1,15	80
	∑*tenaga kerja yang dilatih*		50	50	30	1300	65	100
	∑*pendaftar pelatihan kewirausahaan*		3.913	3.913	3.683	4162	5657	125
12	Rasio lulusan S1/S2/S3		175,92	175,92	174,38	207,58	200,67	20.7
	Jumlah lulusan S1/S2/S3		21998	21998	21998	26395	25712	30239
	Jumlah penduduk		1250486	1250486	1261498	1271566	1281310	1460045

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Lampung Tengah

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan diselenggarakannya pemberdayaan perempuan adalah:

a. Untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
c. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan.
d. Untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan perlindungan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2020 tingkat IPG tertinggi terdapat di Kota Metro (95,55), sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji (84,17). Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi ke-7 dengan nilai IPG = 89,87. Rata-rata pertumbuhan IPG di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015-2020 adalah 0,18%.

Jumlah kasus KDRT tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 34,22 persen. Namun jumlah kasus KDRT yang ditangani juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 93,61 persen. Bahkan dia akhir 2020 seluruh kasus (100 persen) KDRT telah berhasil ditangani.

Jumlah kasus terhadap perempuan dan anak tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 11,84 persen. Bahkan hingga akhir 2020 semua kasus (100 persen) terhadap perempuan dan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berhasil ditangani.

Jumlah pekerja perempuan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,75 persen. Hal yang sama juga terjadi pada partisipasi angkatan kerja perempuan dengan rata-rata

pertumbuhan 5,46 persen. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,46 persen.

Tabel 2.66
Pencapaian Kinerja Indek Pangarusataaman Gender (IPG)

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lampung Barat	91,65	n.a	92,47	92,74	92,55	92,55
2	Tanggamus	89,79	n.a	90,71	91,14	90,88	91,13
3	Lampung Selatan	88,89	n.a	89,52	89,87	89,54	89,60
4	Lampung Timur	87,51	n.a	87,85	88,67	88,78	88,83
5	Lampung Tengah	89,08	n.a	89,23	89,57	89,88	89,87
6	Lampung Utara	87,85	n.a	88,69	89,34	89,48	89,46
7	Way Kanan	87.54	n.a	87,85	88,25	88,22	88,19
8	Tulang Bawang	88,08	n.a	88,51	88,69	89,17	89,31
9	Pesawaran	86,13	n.a	87,25	87,57	87,30	87,20
10	Pringsewu	92,37	n.a	92,26	92,59	92,37	92,33
11	Mesuji	84,38	n.a	83,82	84,49	84,22	84,17
12	Tulang Bawang Barat	87,93	n.a	88,08	88,53	88,45	88,56
13	Pesisir Barat	92,07	n.a	82,84	93,40	93,22	93,21
14	Kota Bandar Lampung	93,69	n.a	93,53	93,55	93,96	93,86
15	Kota Metro	94,64	n.a	94,97	94,98	95,02	95,55

Sumber data: BPS Propinsi Lampung/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Tengah

Tabel 2.67
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	n.a	19	24	20	45	46
1.1	Jumlah Kasus KDRT Yang ditangani	Kasus	n.a	4	9	20	45	46
1.2	Persentase Kasus KDRT Yang Ditangani	%	n.a	21,05	27,5	100	100	100
2	Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak	Kasus	318	318	357	405	109	46
2.1	Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak yang ditangani	Kasus	318	318	357	405	109	46
2.2	Persentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	n.a	n.a	2,29	2,25	2,4	n.a
3.1	*Pekerja perempuan di lembaga pemerintah*	orang	n.a	n.a	5,835	5,716	5,918	n.a
3.2	*Jumlah pekerja perempuan*	orang	n.a	n.a	253,711	253,173	245,719	n.a
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	orang	4	4	4	4	12	12
4.1	*Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan*	orang	2	2	2	2	6	6
4.2	*Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD*	orang	50	50	50	50	50	50
5	Jumlah pekerja perempuan	orang	222.272	222.272	253.711	253.173	245.719	n.a
6	Rasio KDRT	Rasio	0,02	0,02	0,03	0,04	0,01	n.a
6.1	*Jumlah KDRT*	Kasus	95	95	145	182	50	62

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.2	*Jumlah rumah tangga*	RT	463.778	463.778	439.874	439.583	452.495	n.a
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	22	24	26,56	27,15	27,11	n.a
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
8.1	*Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu*	Kasus	318	318	357	405	109	123
8.2	*Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu*	Kasus	318	318	357	405	109	123
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	50,4	50,4	49,5	47,4	38,4	60,7
9.1	*Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu*	orang	139	139	141	145	28	54

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.2	*Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu*	orang	276	276	285	306	73	89
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	90,13	90,13	50,53	50	50	50
11.1	*Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak*	Kasus	137	137	144	161	45	35
11.2	*Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan*	orang	152	152	285	322	90	70
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	n.a	100	72	100	100	100
12.1	*Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum*	orang	n.a	276	206	306	73	89
12.2	*Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum*	orang	n.a	276	285	306	73	89

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	*Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya*	orang	137	137	144	161	45	35
14	*Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi social*	orang	137	137	144	161	45	35

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Lampung Tengah

3. Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Tabel 2.68
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Beras (ton)	487.673	477.948	519.054	471.735	460.888
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045
Rata-rata Perkapita (kg/thn)		389,987	378,873	408,201	368,166	315,667

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Pada tabel 2.69 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata perkapita tahun 2016 sebesar 389,987 kg/th dan terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu 315,667 kg/th karena lahan produksi terimbas jalan tol dan lain-lain. Maka pola pangan harapan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan/penurunan, hal ini ada perubahan perilaku dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam konsumsi pangan.

Tabel 2.69
Perkembangan Ketersediaan Energi, Lemak, Protein Perkapita
Perhari Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Protein (kalori)	11.924,16	11.441,62	13.072,52	10.989,41	11.700,68
2	Lemak (gram)	148,85	142,52	168,54	195,15	194,03
3	Protein (gram)	210,94	200,41	242,43	153,72	142,69

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Pada tabel 2.70 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan ketersediaan lemak mengalami penurunan dari 195,15 gram pada tahun 2019 menjadi 194,03 gram tahun 2020, dan protein meningkat di tahun 2019 menjadi 153,72 gram menurun pada tahun 2020 menjadi 142,69 gram. Pola Pangan Harapan Masyarakat Lampung Tengah mengalami penurunan, hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku dari pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam konsumsi pangan.

Tabel 2.70
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Kelompok Pangan	2016	2017	2018	2019	2020	PPH Nasional
1	Padi – padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25
2	Umbi – umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	16,8	14,7	13,4	16,7	18,4	24
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5
5	Buah /Biji Berminyak	0	0	0	0	0	1
6	Kacang – kacangan	2,9	2,8	9,8	3,8	3,3	10
7	Gula	2,5	2,5	2,3	2,4	2,1	2.5
8	Sayur dan Buah	26,2	30,0	28,7	29,7	26,3	30
9	Lain –lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0	00
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	**80,9**	**82,5**	**86,7**	**85,2**	**82,7**	**100**

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Dari tabel 2.71 perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mencapai 85,2 dan pada tahun 2020 mencapai 82,7 terdapat beberapa komoditas pangan yang sudah memenuhi PPH Nasional seperti padi-padian, umbi-umbian, dan minyak/ lemak, sedangkan untuk kooditi yang lain belum mencapai PPH yang ditetapkan Nasional. Hal yang perlu diupayakan adalah bagimana ketersediaan bahan pangan yang belum memenuhi target PPH agar dapat meningkat dan seimbang terdistribusi.

Tabel 2.71
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Tengah 2015 – 2020

No	Jenis	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras	536.555	481.333	471.735	378.873	561.679	454.897
2	Jagung	267.482	283.029	472.334	472.334	432.966	343.027
3	Ubi Jalar	5.218	3.574	3.574	3.574	1.903	3.509
4	Ubi Kayu	1.907.273	1.336.351	1.188.211	1.188.211	1.402.129	1.872.943
5	K. Tanah	827	893	890	890	696	474
6	K. Kedelai	2.447	1.393	38	38	10.408	1.858
7	Kacang Hijau	224	224	234	234	129	224
8	Sayuran	35.106	44.689	54,864	54,864	19.186	35.106
9	Buah-Buahan	92.297	92.297	103.969	103.969	689.584	92.297
10	Ikan	27.947		38.355	38.355	35.276	40.370
11	Daging	19.805	14.896	19.805	19.805	983.394	19.185
12	Telur	n.a	n.a	4.993	4.993	229.403	9.900
13	M. Goreng	64.626	n.a	58.288	58.288	64.626	64.626
14	Gula	13.820	n.a	13.820	13.820	288.453	13.820

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah

Tabel 2.72
Kebutuhan Pangan di Lampung Tengah 2015-2020

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras	117.590	118.671	144.568	144.568	168.563	167.321
2	Jagung	1.239	1.250	1.261	1.261	1.471	1.460
3	Ubi Jalar	2.391	2.413	2.435	2.435	2.839	2.818
4	Ubi Kayu	10.656	10.754	10.849	10.849	12.650	12.556
5	Kacang Tanah	13.531	13.655	13.776	13.776	16.062	15.944
6	Kacang Kedelai	21.672	21.871	22.064	22.064	25.726	25.536
7	Kacang Hijau	644	650	656	656	765	759
8	Sayur sayuran	63.925	64.513	65.081	65.081	75.883	75.324
9	Buah-buahan	33.790	34.101	34.401	34.401	40.111	39.815
10	Ikan	16.159	n.a	16.349	16.349	19.063	18.922
11	Daging	5.167	5.215	5.260	5.260	6.134	6.088
12	Telur	11.152	n.a	11.353	11.353	13.238	13.140
13	Minyak Goreng	13.085	n.a	13.120	13.120	15.297	15.184
14	gula	11.152	n.a	12.687	12.867	15.003	14.892
15	Susu	1.177	1.188	1.198	1.198	1.397	1.387

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah

Dari tabel 2.72 dan 2.73 di atas tentang perkembangan ketersediaan pangan Tahun 2020 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami surplus diantaranya padi, jagung, ubi kayu, sedangkan beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami kekurangan diantaranya kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan bawang merah. Hal yang perlu diupayakan adalah bagimana ketersediaan bahan pangan dapat seimbang terdistribusi, serta aman untuk kebutuhan pangan masyarakat.

Namun demikian secara umum tahun 2015-2020 rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 2,35 persen per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan dan protein perkapita yang cenderung menurun dengan tingkat penurunan 0,98 persen per tahun. Untuk menjamin keamanan konsumsi oleh masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dimana aktifitas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 46,66 persen per tahun. Bahkan pada tahun 2020 aktifitas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sudah mencapai 97,78 persen.

Pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,44 persen per tahun. Selain itu aktifitas penanganan daerah rawan pangan juga terus ditingkatkan dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 32,02 persen per tahun.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Urusan Pangan 2015-2020

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	kg/thn	43,30	39,00	37,89	40,82	36,82	37,96
	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	Ton	536555	487673	477948	519054	471735	489780
	Jumlah penduduk	Jiwa	1239096	1250486	1261498	1271566	1281310	1290240
2	Ketersediaan dan protein perkapita	Kkal	61,02	56,52	57,09	53,92	56,31	57,78
	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD	Kalori	13968,1	11924,16	11441,62	13072,52	10989,41	12876,9
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD	gr/kap/hr	228,89	210,94	200,41	242,43	195,15	222,87
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	30,00	25,00	83,33	83,33	90,91	97,78
	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	sampel	9	12	100	120	1000	1100
	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	sampel	30	48	120	144	1100	1125
4	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan	Skor	81	83,5	81,8	85,4	86,7	86,9
	Penguatan Cadangan pangan	Ton	30	30	30	30	31,4	31,4 Ton
5	*Penanganan Daerah Rawan Pangan*	Persen	15	15	35	40	40	45

4. Pertanahan

Saat ini tanah menjadi permasalahan yang terjadi didalam masyarakat karena setiap orang ingin berusaha untuk mempunyai dan menguasai tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat. Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Jika ingin memperoleh sertifikat tanah, memerlukan proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang harus disesuaikan dengan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Persentase luas tanah yang bersertifikat tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,44 persen per tahun. Sedangkan persentase luas tanah yang bersertifikat juga cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang sama per tahun. Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi penyelesaainnya juga cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 10,83 persen per tahun.

Tabel 2.74
Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015 - 2019

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	55,78	56,74	55,78	56,74	56,74
	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	ha	-	267.202	271.778	271,778	271,778	271,778
	Jumlah luas wilayah	ha	478,982	478,982	478,982	478,982	478,982	478,982
2	Penyelesaian konflik tanah yang difasilitasi	100	60	100	66,67	100	66,67	66,67
	Jumlah kasus yang diselesaikan	kasus	6	5	8	5	8	8
	Jumlah kasus yang terdaftar	kasus	6	5	12	5	12	12
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Ijin Lokasi		5	6	6	10	14	14
	Permohonan Ijin Lokasi		5	6	6	10	14	14

Sumber data: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah

5. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehi-dupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas. Ia memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Semua indikator lingkungan hidup tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing adalah indek kualitas air (13,09 persen), indek kualitas udara (5,76 persen), dan indek kualitas lingkungan hidup (6,66 persen).

Tabel 2.75
Pencapain Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kualitas Air	IKA	41	43,33	46,67	51,70	71,62	73,58
2	Indek Kualitas Udara	IKU	64	70	74,9	81,24	86,35	84,35
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan	IKTL	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	43,25	45,30	48,52	51,93	59,40	59,43
4	Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen Amdal / IPAL /UKP/UPL	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Sampah	%	11,11	9,26	11,11	13,79	20,6	24,91
6	Persentase Penyelesaian Jumlah Kasus Lingkungan Hidup	%	0	0	2	3	1	0

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

Dari tabel 2.75 terlihat bahwa IKLH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu dari 43,25 meningkat menjadi 59,43. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 41 pada tahun 2015 menjadi 73,58 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di beberapa titik sampel yang di pantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indek kualitas udara mengalami peningkatan dari 64 pada tahun 2015 menjadi 84,35 pada tahun 2020. Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Kabupaten Lampung Tengah tidak banyak mengalami perubahan dari 30,13 pada tahun 2015 menjadi 30,13 pada tahun 2020.

Dari kinerja persentase perusahaaan yang memiliki dokumen amdal/IPAL/UKP/UPL menunjukkan adanya kesadaran perusahaaan untuk memenuhi ketentuan-keten-tuan dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase jumlah perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKP/UPL adalah 100% .

Tahun 2016 jumlah wajib perusahaan sebanyak 285 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 285 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2017 jumlah wajib perusahaan sebanyak 305 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 305 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2018 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2019 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKP/UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang tinggi dari perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundangan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup baru mencakup 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar, dan itupun masih belum seluruh kampung/kelurahan dapat terlayani. Gambaran pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan dikabupaten Lampung Tengah menunjukkan terdapat

peningkatan pengelolaan sampah an dari 11,11 persen pada tahun 2015 menjadi 20,06 persen pada tahun 2019, dengan volume sampah yang cenderung terus meningkat dari 10.800 ton pada tahun 2016, 10.800 ton pada tahun 2016. 13.500 ton pada tahun 2017, 14.500 ton pada tahun 2018, 14.500 ton pada tahun 2019 dan 16060 pada tahun 2020. Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 33,69 persen per tahun.

Jumlah kasus lingkungan hidup dari tahun ke tahun menujukkan kenaikan terutama di 3 tahun terahir yaitu sebesar 2 kasus di tahun 2017, 3 Kasus di 2018, 1 kasus di tahun 2019, dan 0 kasus pada tahun 2020.

Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pertama kali menyusun RPPLH dan Raperda tentang RPPLH tahun 2014. Raperda tersebut berhasil disahkan menjadi Perda RPPLH tahun 2017. Namun pada saat bersamaan terbit Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *SE.5/MENLHK*/PKTL/PLA.3/11/*2016* tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Perda tentang RPPLH Kabupetan Lamteng dikonsulatsikan ke Pemerintah Provinsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata Perda tersebut tidak sesuai dengan *SE.5/MENLHK*/PKTL/PLA.3/11/*2016*.

Pada tahun 2019 Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menyusun kembali dokumen RPPLH, sudah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2020 Raperda RPPLH ersebut sudah masuk dalam Prolegda di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, namun belum disahkan karena pandemi Covid 19.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 2,97 persen per tahun. Persentase pertumbuhan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran meningkat dengan tingkat pertumbuhan 26,76 persen per tahun. Jumlah kepala keluarga yang telah memiliki kartu keluarga meningkat dengan tingkat pertumbuhan 40,28 persen per tahun. Jumlah akte perkawinan yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 40,58 persen per tahun. Jumlah akte kematian yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 60,20 persen per tahun.

Tabel 2.76
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	jiwa	1.239.098	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.460.045
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	orang	n.a	1.084.474	1.103.985	1.038.564	1.115.949	1.104.663
3	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman E-KTP	orang	n.a	825.227	893.313	902.942	935.223	935.223
4	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki E-KTP	orang	n.a	813.407	847.721	892.560	913.672	956.072
5	Jumlah Penduduk Yang memiliki Akte Kelahiran	orang	n.a	279.703	578.299	621.754	665.603	687.673
6	Jumlah Kepala Keluarga	KK	n.a	463.778	439.874	439.583	452.495	475.800
7	Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	KK	n.a	39.168	53.322	89.034	104.823	395.021
8	Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	akte	n.a	2.702	6.011	6.520	7.659	8.724

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan	akte	n.a	303	493	790	1.307	1.992

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.77
Pencapaian Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah 2016- 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	0,92	0,89	0,83	0,83	0,81
	Jumlah bayi berakte kelahiran		19.881	19.120	16.663	12.372	2.509
	Jumlah bayi		21.619	21.489	20.031	14.886	3.101
2	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,06	0,14	0,15	0,17	0,20
	Jumlah pasangan nikah berakte nikah		2.702	6.011	6.520	7.659	8.724
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah		43.147	43.580	43.798	44.174	44.320
3	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Ada/tidak ada						
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
	Sudah/belum						
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	0,75	0,77	0,88	0,90	0,86
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan		811.752	847.721	892.686	912.296	950.531
	Jumlah penduduk wajib KTP		1.084.474	1.103.985	1.010.650	1.015.138	1.098.935
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	0,92	0,89	0,83	0,83	0,81
	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan		19.881	19.120	16.663	12.372	2.509
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan		21.619	21.489	20.031	14.886	3.101

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kampung)

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah da-lam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengalokasikan dana desa guna meningkat-kan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari Indek Desa Membangun (IDM). IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dikembang-kan dalam 22 variabel dan 52 indikator, yaitu:

- Ketahanan Sosial: Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, serta Permukiman.
- Ketahanan ekonomi: keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah.
- Ekologi: kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana alam.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 memiliki jumlah desa sangat tertinggal sebanyak **0** Desa, Desa tertinggal sebanyak **11**, Desa Berkembang **207**, Desa Maju sebanyak **83** Dan Desa Mandiri sebanyak **0**. Kondisi tersebut lebih baik dibanding Tahun 2017 yang memiliki desa sangat tertinggal sebanyak **1** Desa, Desa tertinggal sebanyak **100**, Desa Berkembang **177**, Desa Maju sebanyak **23** Dan Desa Mandiri sebanyak **0**.

Indikator pemberdayaan masyarakat lainnya pada tahun 2015-2010 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing adalah untuk pertumbuhan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik (6,64 persen), pertumbuhan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (6,49 persen), pertumbuhan kelompok binaan PKK (6,49 persen), pertumbuhan LSM aktif (22,79 persen), pertumbuhan jumlah LPM berprestasi (5,70 persen), pertumbuhan jumlah PKK aktif (6,42 persen), pertumbuhan jumlah Posyandu aktif (4,34 persen), dan pertumbuhan jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat (4,74 persen).

Tabel 2.78
Klasifikasi Indek Desa Membangun Tahun 2017- 2020 di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	2017					2018					2019					2020				
		DST	DT	DB	D Mj	D Mdr	DST	DT	DB	D Mj	D Mdr	DST	DT	DB	D Mj	D Mdr	DST	DT	DB	D Mj	D Mdr
1	Padang Ratu	-	4	8	3	-	-	-	12	3	-	-	-	11	4	-	-	-	11	4	-
2	Anak Ratu Aji	-	4	2	-	-	-	4	2	-	-	-	1	5	-	-	-	1	5	-	-
3	Selagai Lingga	-	3	11	-	-	-	1	12	1	-	-	-	12	2	-	-	-	12	2	-
4	Pubian	-	10	9	1	-	-	6	13	1	-	-	4	15	1	-	-	4	15	1	-
5	Anak Tuha	-	9	3	-	-	-	2	10	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-
6	Kalirejo	-	3	11	3	-	-	1	12	4	-	-	-	7	10	-	-	-	7	10	-
7	Sendang Agung	-	3	5	1	-	-	2	6	1	-	-	-	8	1	-	-	-	8	1	-
8	Bangun Rejo	-	-	16	1	-	-	-	15	2	-	-	-	14	3	-	-		14	3	-
9	Gunung Sugih	-	7	4	-	-	-	-	11	-	-	-	-	10	1	-	-	-	10	1	-
10	Bekri	-	5	3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-
11	BumiRatu Nuban	-	4	5	1	-	-	-	7	3	-	-	-	1	9	-	-	-	1	9	-
12	Trimurjo	-	4	7	-	-	-	-	7	4	-	-	-	6	5	-	-	-	6	5	-
13	Punggur	-	-	7	2	-	-	-	4	5	-	-	-	2	7	-	-	-	2	7	-
14	Kota Gajah	-	-	5	2	-	-	-	5	2	-	-	-	4	3	-	-	-	4	3	-
15	Seputih Raman	-	4	8	2	-	-	-	9	5	-	-	-	9	5	-	-	-	9	5	-
16	Terbanggi Besar	-	2	5	-	-	-	-	3	4	-	-	-	3	4	-	-	-	3	4	-
17	Seputih Agung	-	3	5	1	-	-	-	10	-	-	-	-	7	3	-	-	-	7	3	-
18	Way Pengubuan	-	4	4	-	-	-	2	4	2	-	-	1	5	2	-	-	1	5	2	-
19	Terusan Nunyai	-	5	2	-	-	-	4	-	3	-	-	3	1	3	-	-	3	1	3	-

No.	Kecamatan	2017					2018					2019					2020				
		DST	DT	DB	D Mj	D Mdr	DST	DT	DB	D Mj	D Mdr	DST	DT	DB	D Mj	D Mdr	DST	DT	DB	D Mj	D Mdr
20	Seputih Mataram	-	4	8	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-
21	Bandar Mataram	-	-	8	1	-	-	-	5	4	-	-	-	4	5	-	-	-	4	5	-
22	Seputih Banyak	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-
23	Way Seputih	-	3	3	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	1	-	-	-	5	1	-
24	Rumbia	-	5	4	-	-	-	2	5	2	-	-	-	7	2	-	-	-	7	2	-
25	Bumi Nabung	-	2	4	1	-	-	-	5	2	-	-	-	2	5	-	-	-	2	5	-
26	Putra Rumbia	1	5	3	1	-	-	-	9	1	-	-	-	9	1	-	-	-	9	1	-
27	Seputih Surabaya	-	6	6	1	-	-	4	8	1	-	-	2	9	2	-	-	2	9	2	-
28	Bandar Surabaya	-	4	4	2	-	-	-	7	3	-	-	-	7	3	-	-	-	7	3	-
	Jumlah	1	100	177	23	0	0	26	221	54	0	0	11	207	83	0	0	11	207	83	0

DST : Desa Sangat Tertinggal; DT : Desa Tertinggal; DB : Desa Berkembang; DMj : Desa Maju; D Mdr : Desa Mandiri

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Lampung Tengah

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tahu 2015-2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	58%	59%	63%	67%	72%	80%
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik		176	179	189	203	216	240
	Jumlah seluruh pemerintahan desa		301	301	301	301	301	301
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	0,7	0,71	0,75	0,80	0,85	0,95
	Jumlah kelompok binaan LPM		210	215	225	242	257	287
	Jumlah LPM		301	301	301	301	301	301
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	0,7	0,71	0,75	0,80	0,85	0,95
	Jumlah kelompok binaan PKK		210	215	225	242	257	287
	Jumlah PKK		301	301	301	301	301	301
4	Persentase LSM aktif	Persen	27%	28%	33%	42%	49%	73%
	Jumlah LSM aktif		53	55	65	83	97	143
	Jumlah LPM		197	197	197	197	197	197
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	72%	73%	80%	83%	88%	95%
	Jumlah LPM berprestasi		218	220	240	250	265	287

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah LPM		301	301	301	301	301	301
6	Persentase PKK aktif	Persen	65%	66%	75%	80%	86%	89%
	Jumlah PKK aktif		197	200	225	240	260	268
	Jumlah PKK		301	301	301	301	301	301
7	Persentase Posyandu aktif	Persen	81%	80%	79%	79%	94%	95%
	Jumlah Posyandu aktif		1135	1130	1117	1120	1359	1382
	Total Posyandu		1407	1407	1407	1425	1448	1448
8	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	63%	68%	72%	74%	77%	79%
	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat		189	204	217	223	233	238
	Total Program Pemberdayaan Masyarakat		301	301	301	301	301	301
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	33%	33%	33%	40%	53%	53%
	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat		5	5	5	6	8	8
	Total pasca program pemberdayaan masyarakat		15	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk produktif yang melimpah dan berkualitas jika dimanfaatkan dengan optimal akan mampu mendukung pembangunan suatu negara.

Indikator utama dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari tahun 2015-2020, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,868 % per tahun. Walaupun mengalami penurunan, namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi jumlah penduduk Lampung Tengah yang mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020.

Tabel 2.80
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015- 2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
1	2015	1.239.098	0.97
2	2016	1.250.486	0,92
3	2017	1.261.498	0,88
4	2018	1.271.566	0,80
5	2019	1.281.310	0,77
6	2020	1.460.045	1,39

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

Salah satu strategi dalam penurunan atau pengendalian kelahiran penduduk adalah melalui program keluarga berencana (KB) dengan pemakaian alat kontrasepsi, terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,39 persen per tahun. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 71,51 persen PUS telah menjadi peserta KB aktif.

Tabel 2.81
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020

No	Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah PUS peserta KB Aktif	Persentase PUS Peserta KB Aktif
1	2015	504563	220111	43,6
2	2016	304563	223265	73,3
3	2017	305296	223265	73,1
4	2018	310322	234443	75,5
5	2019	345802	246345	71,2
6	2020	1345.978	247412	71,51

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 2.82
Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0.97	0,92	0,88	0,80	0,73	0,73
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.32	2,3	2,32	2,3	2,56	2,56
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	n.a	28	28	28	28	28
	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	Dinas/ Badan	10	10	10	10	10	10
	Jumlah semua perangkat daerah	Dinas/ Badan	36	36	36	36	36	36
4	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		36	28	28	28	28	28
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	Dinas/Badan	10	10	10	10	10	10

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah semua perangkat daerah	Dinas/Badan	36	36	36	36	36	36
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penuduk		10	5	5	5	5	5
	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk		10	5	5	5	5	5
6	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Dinas/Badan	10	0	0	0	10	0
7	Jumlah kerja sama penyelenggara Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	sekolah	10	0	0	N/A	1	0
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		0,70	0,70	0,87	0,89	0,83	0,83
	Jumlah anak		322.930	322.930	381.750	392.400	376.320	3763.20

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah keluarga		463.778	463.778	439.874	439.583	452.495	452.495
9	Ratio Akseptor KB	Persen		72,27	73,13	75,55	71,24	71,51
	Jumlah Akseptor KB	orang	200.000	220.111	223.265	234.443	246.345	247.370
	Jumlah pasangan usia subur	orang	504.563	304.563	305.296	310.322	345.802	345.937
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi wanita nikah usia 15 – 49	Persen	43,62	72,27	73,13	75,55	71,24	71,51
	Jumlah peserta KB aktif	orang	220.111	220.111	223.265	234.443	246.345	247.370
	Jumlah pasangan usia subur	orang	504.563	304.563	305.296	310.322	345.802	345.937
11	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	27,73	27,73	26,87	24,45	28,76	28,49
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	orang	84452	84452	82031	75879	99457	98567
	Jumlah pasangan usia subur	orang	304563	304563	305296	310322	345802	345937
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	43,45	43,45	44,16	45,25	43,88	43,67
	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	orang	95633	95633	98587	106075	108099	108018
	Jumlah akseptor KB	orang	220111	220111	223265	234443	246345	247370

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	13,50	13,50	8,79	8,74	24,79	24,22
	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	orang	29709	29709	19626	20492	61071	59921
	Jumlah akseptor KB	orang	220111	220111	223265	234443	246345	247370
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	persen	100,00	51	51,93	54,83	98,45	n.a
	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	orang	32493	16571	16762	16954	32164	n.a
	Jumlah anggota kelompok BKB	orang	32493	32493	32281	30921	32671	n.a
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	persen	100,00	51,47	48,68	45,78428102	98,34482112	98,04942092
	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	orang	100	10930	10051	9606	20974	20911
	Jumlah anggota kelompok BKR	orang	100	21234	20647	20981	21327	21327
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber	persen	26,62524961	26,62524961	32,58	37,64	97,40	105,41

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	KB							
	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	orang	2400	2400	2839	3510	9080	9826
	Jumlah anggota BKL	orang	9014	9014	8714	9325	9322	9322
	Jumlah PKB/PLKB	orang	81	81	78	72	72	n.a
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	persen	100,00	214,29	214,29	214,29	235,71	0,00
	Jumlah PIK R/M	kelompok	60	60	60	60	66	66
	Jumlah kecamatan	kelompok	28	28	28	28	28	28
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	100,00	100	100	100	100	100
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	orang	81	81	78	72	72	72
	Jumlah PKB/PLKB	orang	81	81	78	72	72	72

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	persen	100	100	100	100	100	100
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	orang	4450	4450	2670	2670	2670	2670
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	orang	4450	4450	2670	2670	2670	2670
20	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100	100	100	100	100	100
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	orang	311	311	311	311	311	311
	Jumlah desa/kelurahan	desa	311	311	311	311	311	311
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	100	96	91,76	100,00	87,64	91,14
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota		100000	48000	35620	35820	33500	47600
	Perkiraan Permintaan		100000	50000	38820	35820	38225	52225

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Masyarakat							
22	Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	120	100	100	100	100	100
	Jumlah Faskes dan jejaring bekerjasama dengan BPJS		120	118	122	125	126	128
	Jumlah Faskes dan jejaring		120	118	122	125	126	128
23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	Persen	62,5	42,86	42,86	66,67	100	100
	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia		50	30	30	40	60	60
	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga		80	70	70	60	60	60
24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	66,14	65,34	85,11	86,53	86,44	92,21
	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi		8000	7200	9600	9700	10200	11065

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah kelompok kegiatan		12096	11020	11280	11210	11800	12000
25	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	100	100	100	100	100	100
	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak yang memahami & melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang		32671	31351	30493	30000	30171	30111
	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak		32671	31351	30493	30000	30171	30111
26	Persentase Pembiayaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	100	N/A	N/A	100	100	100
	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	Rupiah	9.000.000.000	N/A	N/A	3.451.208.510	4.372.115.510	2.213.095.220
	Jumlah APBD dan APBDes	Rupiah	9.000.000.000	N/A	N/A	3.451.208.510	4.372.115.510	2.213.095.220

Sumber : Dinas PP & KB Kabupaten Lampung Tengah

9. Perhubungan

Bidang perhubungan memegang peranan yang cukup penting dalam upaya menjaga keselamatan pengguna jalan serta konetivitas antar daerah. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan telah dilakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan daerah diantaranya pengujian KIR kendaraan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat yang melakukan uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan sebesar 1,70 persen. Penurunan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang tidak melakukan uji KIR pada masa pandemi Cavid 19 pada tahun 2020. Dimana penurunannya mencapai 46,29 persen. Jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR berturut-turut adalah truk, pick up, mikrolet, dan mobil tangki.

Tabel 2.83
Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**UMUM**					
1.1	Truck	2752	3264	3833	2572	1971
1.2	Pick UP	102	147	215	185	23
1.3	Bus	81	41	339	542	65
1.4	Mikrolet	209	210	122	112	9
1.5	Mobil Penumpang	3	2	4	44	1
2	**TDK UMUM**					
2.1	Truck	2687	2721	3450	5106	2468
2.2	Pick UP	4498	4353	5092	6615	3390
2.3	Tangki	125	90	118	380	195
2.4	Bus	83	67	52	61	50
2.5	Kereta tempelan	60	67	62	6	25
JUMLAH		**10.600**	**10.962**	**13.287**	**15.263**	**8.197**

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Sampai dengan tahun 2020 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.451 unit atau meningkat sebesar 9,46 persen dibanding tahun 2016 yang berjumlah 1.212 unit. Pertumbuhan rata-rata jumlah rambu-rambu yang terpasang

tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 4,71 persen per tahun. Pada akhir tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan/ memenuhi 57,46 persen kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2.84
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rambu-Rambu yang harus tersedia	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
2.	Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang	1.212	1.311	1.311	1.451	1.451
	Persentase	48,00	51,92	51,92	57,46	57,46

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Pencapaian indikator jumlah izin trayek dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang memiliki izin trayek. Sampai dengan tahun 2020 jumlah armada yang melakukan perpanjangan izin trayek di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 46 buah. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 6 trayek/jurusan atau mengalami penurunan sebesar 6 persen dibanding Tahun 2019 yang berjumlah 46 buah. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19, yang mengakibatkan berkuranganya pergerakan masyarakan terutama anak sekolah yang merupakan konsumen utama kendaraan angkutan umum.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Dibidang Perhubungan
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 – 2020

No	Indikator Kinerja Program	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.100.000	1.986.832	2.018.764	2.120.000	2.131.120	1.287.564
	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	2.100.000	1.986.832	2.018.764	2.120.000	2.131.120	1.287.564
	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	2.100.000	1.986.832	2.018.764	2.120.000	2.131.120	1.287.564
2	Rasio izin trayek	0,000040	0,000021	0,000022	0,000019	0,000020	0,0000046
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	50	26	41	41	46	6
	Jumlah penduduk	1.250.486	1.250.486	1.881.011	2.189.800	2.315.210	1.290.407
3	Jumlah uji kir angkutan umum	10.331	10.600	10.962	13.287	13.287	7627
4	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	3	3	4
5	Persentase layanan angkutan darat	60,71	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79
	Jumlah angkutan darat	425000	309165	343517	381686	424095	471217
	Jumlah penumpang angkutan darat	700.000	469.932	522.146	580.162	644.625	716.250

No	Indikator Kinerja Program	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	22,38	22,38	23,38	23,60	42,53	62,01
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n	64	64	65	63	94	111
	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	350	286	278	267	221	179
7	Pemasangan Rambu-Rambu	15,40	15,40	23,17	18,66	16,47	18,41
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	620	154	196	150	140	130
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	1.000	1.000	846	804	850	706
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	39	39	35	35	32	29
	Panjang Jalan	1196,82	1196,82	1196,82	1343,326	1343,326	1343,326
	Jumlah Kendaraan	425000	309.165	343.517	381.686	424.095	471.217
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	65.000	62.422	98.402	97.217	87.213	41.107
10	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	65.000	62.422	98.402	97.217	87.213	41.107

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

10. Komunikasi dan Informatika

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Pengem-bangan teknologi menjadi instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependu-dukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Pemerintah dapat mengoptimali-sasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Pada tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 86,76 persen, penduduk yang menggunakan HP/telepon mencapai 63,73 persen, rumah tangga dengan akses internet mencapai 90,39 persen, dan rumah tangga yang memiliki computer pribadi mencapai 90,12 persen. Pertumbuhan luas wilayah yang tercoverage telekomunikasi pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 5,00 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 luas wilayah yang tercoverage telekomunikasi mencapai 415.575 km^2 dari total keseluruhan wilayan yaitu 478.982 km^2.

Tabel 2.86
Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		belum ada KIM	belum ada KIM	belum ada KIM	17,9%	71,4%	100,0%
	Jumlah KIM	kelompok	belum ada KIM	belum ada KIM	belum ada KIM	5	20	28
	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	28	28	28	28	28	28	28
2	Cakupan layanan telekomunikasi	km²	67,98%	71,38%	74,95%	78,70%	82,63%	86,76%
	Luas Wilayah Yang Tercoverage		325.612	341.893	358.988	376.938	395.785	415.575
	Luas Wilayah Keseluruhan		478.982	478.982	478.982	478.982	478.982	478.982
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	orang	51,53%	54,10%	56,31%	58,66%	61,12%	63,73%
	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon		644.330	676.546	710.373	745.892	783.187	822.346
	Jumlah penduduk		1.250.486	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.290.407
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	rumah tangga	90,00%	92,13%	91,34%	91,78%	91,90%	90,39%
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet		294.793	301.763	314.926	325.623	332.696	343.578
	Jumlah rumah tangga		327.548	327.548	344.787	354.786	362.026	380.127
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	rumah tangga	89,99%	92,07%	91,25%	91,50%	91,51%	90,12%

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		294.773	301.573	314.629	324.612	331.294	342.563
	Jumlah rumah tangga		327.548	327.548	344.787	354.786	362.026	380.127

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 717 unit. Dari Jumlah tersebut yang aktif sebesar 62,20 % atau sekitar 446 unit koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,37 persen per tahun. Persentase usaha mikro kecil mencapai 99,10 persen dari total unit usaha. Rata-rata pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil adalah 4,70 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan jumlah BPR/LKM aktif mencapai 28,55 persen per tahun.

Peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah terbukti dengan kinerjanya dalam hal besarnya penyerapan tenaga kerja, kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), kontribusinya terhadap eksport, sebagai sumber peningkatan pendapatan per- kapita, dan jumlah unit usaha yang banyak sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan output produksi. UMKM juga berperan sebagai tempat usaha terakhir ("*last resort*") bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari *last resort* masyarakat, maka UMKM menawarkan keunggulan yang mudah dimasuki dan sekaligus mudah untuk ditinggalkan (*free entry and exit*), tidak memerlukan persyaratan keterampilan tertentu, dapat mencakup diberbagai bidang usaha, memiliki ceruk pasar sendiri, dan tidak memerlukan modal besar untuk menjalankan usaha. UMKM juga merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat untuk bertahan hidup.

Tabel 2.87
Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Tahun 2015-2020

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi aktif		59,94	59,45	81,35	85,23	60,85	62,20
	Jumlah koperasi aktif	koperasi	380	390	397	381	401	446
	Jumlah seluruh koperasi	koperasi	634	656	488	447	659	717
2	Persentase UKM non BPR / LKM aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	unit	5.416	5.583	6.379	6.602	6.777	60.972
	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	unit	5.416	5.583	6.379	6.602	6.777	60.972
3	Persentase BPR / LKM aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah BPR/LKM aktif	unit	26	35	40	45	75	86
	Jumlah seluruh BPR/LKM	unit	26	35	40	45	75	86
4	Persentase Usaha Mikro Kecil	persen	96,21	96,27	96,66	96,67	96,65	99,61
	Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	5.211	5.375	6.166	6.382	6.550	60.732
	Jumlah seluruh UKM	unit	5.416	5.583	6.379	6.602	6.777	60.972

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah

12. Penanaman Modal

Secara umum keberhasilan di bidang penanaman modal dapat dilihat dari jumlah nilai investasi dan jumlah PMA/ PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah perusahaan yang berivestasi menunjukkan peningkatan dari 54 perusahaan (PMA/ PMDN) pada tahun 2015 menjadi 195 perusahaaan pada tahun 2020, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 36.221 orang

Pada Tahun 2020 jumlah investasi penanaman modal yang berkembang di Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 13.580.010.671.158 atau mengalami peningkatan sebesar 46,62% persen dibandingkan dengan Tahun 2015 yang sebesar Rp 7.248.039.000.000,-. Daya serap tenaga kerja PMA/ PMDN pada tahun 2020 rata-rata mencapai 36.221 tenaga kerja, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 36.052.

Rata-rata pertumbuah jumlah *investor* berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 28,01 persen per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah 12,88 persen per tahun.

Tabel 2.88
Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan nilai investasi	3.05%	n.a	26%	17%	16%	9%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah

Tabel 2.89
Perkembangan PMA dan PMDN Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Jumlah Perusahaan	54	54	64	121	144	195
	1. PMA	17	17	28	31	32	32
	2. PMDN	37	37	47	90	112	163
II.	Jumlah Tenaga Kerja	36,052	35.860	36.063	35.981	36.186	36.221
	1. Indonesia	35,969	35.851	35.971	35.891	36.091	36.120
	2. Asing	83	90	92	90	95	101
III.	Nilai Investasi (Rp Juta)	7.248.039,000	7.248.039,000	9.163.728.080	10.756.024,8	12.493.155,461	13.580.010,671
	1. PMA	2.427.848,000	2.427.848,000	3.114.176,764	3.159.088,4	3.162.088.489	3.162.088,489
	2. PMDN	4.820.191,000	4.820.191,000	6.049.551,316	7.596.936,3	9.331.066.972	10.417.922,182
IV	Waktu Penyelesaian Perizinan (hari)	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	3 hari	3 hari

Tabel 2.90
Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	667,62	666	481	297	251	208
	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan		36.052	35.941	36.063	35.981	36.186	36.271
	PMA/PMDN jumlah seluruh PMA/PMDN		54	54	75	121	144	174
2	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (ribu rupiah)	%	0	0%	26%	26%	23%	-93,62%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda merupakan harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Rata-rata jumlah pengusaha muda tahun 2018-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 14,21 persen per tahun. Rata-rata jumlah organisasi kepemudaan juga terus meningkat dengan pertumbuhan 13,50 persen per tahun. Rata-rata jumlah cabang olah raga yang terdaftar juga terus meningkat dengan pertumbuhan 11,11 persen per tahun.

Tabel 2.91
Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengusaha Muda	n.a	n.a	n.a	869	1.116	1.116
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan	n.a	16	19	20	26	26

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah

Prestasi olahraga dilahirkan dari pembinaan yang berkelanjutan, pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga ditingkat regional dan Nasional.

Prestasi Olahraga Kabupaten Lampung Tengah pada ajang Porprov ke VIII yang berlansung pada tanggal 27 November 2017 s.d 17 Desemeber 2017 masih belum optimal, dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah berada di peringkat 6 dari 15 kabupaten/kota di Propinsi Lampung dengan mendapatkan Medali Perunggu dari 22 Cabang olah raga yang dipertandingkan kabupaten Lampung tengah mengikuti 21 Cabang olah raga dengan meraih 15 Emas. Terdapat 6 cabang olahraga yang menjadi unggulan yaitu Kempo, Taekwondo, Tanis Meja, Bridge, Catur dan Judo dengan jumlah 400 atlet yang disiapkan. Untuk ajang Porprov ke 9 tahun 2022 KONI menetapkan Kabupaten Pringsewu yang akan menjadi Tuang Rumah selanjutnya.

Tabel 2.92
Peringkat PORPROV Lampung Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang Olah Raga Yang Terdaftar	21	28	28	28

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah

Permasalahan bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktifitas dan kreatifitas generasi muda yang mandiri dan kreatif.
2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan po-tensi pemuda baik secara individu/kelembagaan.
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat.
4. Terbatasnya pembinaan atlet.
5. Terbatasnya praktisi olahraga yang mempunyai kompetensi disetiap cabang olahraga.
6. Terbatasnya penyelanggaraan kompetisi berjenjang.
7. Terbatasnya kesiapan pada kompetisi berjenjang seperti PORWIL/POPDA

Tabel 2.93
Pencapaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	31,25	36,84	45,00	45,00	45,00
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif		5	7	9	9	9
	Jumlah seluruh organisasi pemuda		16	19	20	20	20
2	Jumlah atlet berprestasi;	Orang	-	97	18	17	n.a
3	Jumlah prestasi olah raga	Buah	-	18	2	7	n.a
4	Jumlah Organisasi Olah Raga	Buah	18	25	25	25	n.a
5	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	Cabang	7	10	25	35	n.a
6	Jumlah pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan	Kali	2	5	5	5	n.a
7	Jumlah pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi	Kali	3	6	6	6	n.a
8	Jumlah pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi	Kali	8	18	9	8	n.a

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah

14. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan informasi statistika dalam bentuk Buku ”Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka”, Buku ”PDRB”, dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi.

Tabel 2.94
Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku ”Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka”	Ada/ tidak	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku ”PDRB”	Ada/ tidak	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada
3	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ tidak	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah

15. Persandian

Definisi persandian menurut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 bahwa persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keterak-sesan, ketersediaan, dan penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan bidang urusan persandian belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mampu dan memahami system pengelolaan persandian.

Hingga tahun 2020, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sudah mencapai 100 persen. Rata-rata pertumbuah jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 32,17 persen per tahun.

Tabel 2.95
Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015 – 2020

URAIAN	Satuan	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		45,65%	50,00%	65,22%	79,73%	85,14%	100%
Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	21	23	30	59	63	74
jumlah total perangkat daerah	46	46	46	46	74	74	74

16. Kebudayaan

Dalam masyarakat, pengertian kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the art* yang meliputi seni musik, seni sastra, seni rupa, seni pahat, seni penge-tahuan, atau bagian-bagian indah yang terdapat dalam diri manusia.

Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengem-bangan kebudayaaan telah dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya dengan melestarikan situs budaya, serta mela-kukan pembinaan dan pengembangan sanggar seni yangada di Lampung Tengah.

Hingga tahun 2020, jumlah situs budaya di Kabupaten Lampung Tengah adalah 22 unit. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 100 persen. Rata-rata jumlah sanggar seni budaya tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung

Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,53 persen per tahun.

Tabel 2.96
Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2015 – 2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Situs Budaya	Unit	15	15	18	20	22	22
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya	Unit	689	689	779	789	792	815

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	1	1	5	5
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		15	15	16	16	18	18
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah		15	15	16	16	18	18
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	0	0	1	1	1

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

17. Perpustakaan

Menurut Undang Undang Perpustakaan dinyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan

Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melelui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka:

a. Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesimbungan;
b. Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapang-an ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik;
c. Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang kons-truktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik;

d. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan menggunakan kemempuannya untuk menghargai hasil seni dan budaya manusia
e. Dapat meningkatkan tarap kehidupan seharihari dan lapangan pekerjaannya;
f. Dapat menjadi WN yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasio-nal dan dalam membina saling pengertian antar bangsa;
g. Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Pada tahun 2019 Perpustakaan Kampung Purworejo mendapat penghargaan terbaik III tingkat Nasional dalam ajang Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Surabaya, dan Tahun 2020 kampung Purworejo masuk dalam 10 besar perpustakaan terbaik Nasional di medan dalam ajang *Peer Learning Meeting* Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Telaah terhadap Kebijakan nasional dan Provinsi beradasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat sasaran pokok untuk meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, dan telah ditetapkan ke dalam arah kebijakan nasional pembangunan perpustakaan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pengembangan perpustakaan digital untuk memobilisasi pengetahuan dan meningkatkan akses masyarakat ke perpustakaan;
3. Penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga riset, media massa, industri penerbitan dan rekaman, kalangan profesional dan masyarakat;
4. Peningkatan jumlah perpustakaan sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan.

Tabel 2.98
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	2,10	1,35	1,58	1,60	2,03	2,86
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Orang	725	620	1.300	1.200	1.220	600
	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	345	460	825	750	600	210
2	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	15247	15.847	16.195	17.001	17.570	17.880
	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	79574	82.574	85.474	87.914	90.434	90.744
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
	Jumlah perpustakaan	Unit	38	58	70	679	1.299	1.299
	Jumlah penduduk	Orang	1.239.096	1.250.486	1.261.498	1.271.566	1.281.310	1.290.467
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun		745	620	1.270	1.200	1.220	210
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		15247	15.847	16.195	17.001	17.570	17.880

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

18. Kearsipan

Kearsipan (*filling*) adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip (file) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliha-raan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi:

- penciptaan. penerimaan, pengumpulan arsip
- pengendalian, pemeliharaan dan perawatan arsip
- penyimpanan dan pemusnahan arsip.

Hingga tahun 2020, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Lampung Tengah telah menacapai 100 persen. Rata-rata pertumbuhan jumlah dokumen yang telah diarsipkan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 49,18 persen per tahun.

Tabel 2.99
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2015 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0,05	100	100	100	100	100
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku	OPD	3	4	6	6	6	6
	Jumlah Perangkat Daerah		58	4	6	6	6	6
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	4	2	2	3	3
	Jumlah dokumen yang telah diarsipkan	Buah	n.a	3.321	4.031	11.240	10.845	10.845

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu pening-katan produksi perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan perikanan.

Rata-rata pertumbuhan jumlah produksi perikanan berdasarkan jenis unit usaha perikanan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 4,53 persen per tahun. Penyumbang produksi terbesar berasal dari unit usaha kolam dengan rata-rata pertumbuhan 5,26 persen dan disusul oleh unit usaha perairan laut.

Rata-rata pertumbuhan jumlah produksi perikanan berdasarkan komoditas unggulan perikanan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 14,41 persen per tahun. Penyumbang produksi terbesar berasal dari komoditas ikan patin dengan rata-rata pertumbuhan 5,96 persen dan disusul oleh ikan lele dan ikan gurame. Rata-rata kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB adalah 3,99 persen per tahun.

Tabel 2.100
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan							
	Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Unit Usaha Perikanan (ton)		**38.052**	**39.645,8**	**41.501**	**43.521**	**45.233**	**47.494**
	- Kolam	Ton	32.069	33.542	35.362	37.311	38.724	41.434
	- Keramba	Ton	810	866,10	877	878	1.161	895,3
	- Perairan Laut	Ton	3.382	3.420,350	3.472	3.468	3.473	3.217
	- Perairan Umum	Ton	1.791	1.817,381	1.790	1.864	1.875	1.948
	Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Komoditas Unggulan Perikanan (ton)		**24.118,60**	**33.856,30**	**35.542**	**37.491**	**42.236**	**45.849**
	- Patin	Ton	10.479,40	11.028	11.620	12.660	12.967	13.981
	- Gurame	Ton	8.016	8.551	8.850	9.285	10.316	10.591
	- Lele	Ton	3.457,20	8.541	9.200	9.688	11.203	11.328
	- Nila	Ton	0	3.528	3.672	3.674	3.754	4.167
	- Baung	Ton	0	0	0	0	5,10	5,15
	- Bawal	Ton	2.166	2.208,50	2.200	2.184	0	2.257
	- Teri	Ton	0	0	0		116	61
	- Daging Rajungan	Kg	0	0	0		3.875	3.459
2	Konsumsi ikan							
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Ton	26,74	26,77	28,01	28,4	28,9	29,31
	Target Daerah (Ton)	Ton						

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Cakupan bina kelompok Perikanan/ nelayan			11,88				
	Jumlah kelompok / perikanan nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	Kelompok	50	24	57	5	7	29
	Jumlah kelompok perikanan/ nelayan	Kelompok	180	202	218	18	22	294
4	*Aspek Kesra Perikanan*							
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB		4,29	4,08	3,89	3,70	0,00	4,29
	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kalutan dan perikanan		1663,4	1669,3	1675,3	1680,7	n.a	1663,4
	Jumlah PDRB		38773,8	40949,37	43107,05	45456,27	47937,7	38773,8

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

2. Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata tirta. Objek wisata alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami dan ada pula yang buatan. Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nanas Asto Mulyo di Kecamatan Punggur.

Hingga tahun 2020, jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah 6 (enam) wisata alam, jumlah objek wisata alam buatan adalah 4 (empat) objek wisata buatan, jumlah objek wisata agro adalah 2 (dua) obyek wisata, jumlah objek wisata tirta agro adalah 3 (tiga) obyek wisata, jumlah objek wisata air modern adalah 3 (tiga) obyek wisata, jumlah objek wisata budaya adalah 4 (empat) obyek wisata, dan jumlah objek wisata religi dan sejarah adalah 4 (empat) obyek wisata.

Tabel 2.101
Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Air Terjun Curug 7	Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga	Panorama Alam	87
2	Air Terjun Curug Lestari	Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian	Panorama Alam	45
3	Air Terjun Curug Gading	Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	35
4	Watu Agung	Kecamatan Terusan Nunyai	Panorama Alam	30
5	Watu Tumpang	Kecamatan Pubian	Panorama Alam	46
6	Sungai Cabang	Kecamatan Bandar Surabaya	Penyelenggaraan Event Perahu Dayung	40

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.102
jalanObjek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Embung Tanjung Anom	Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nuyai	Tempat Rekreasi dan Pemancingan	28

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
2	Embung Dua Wisata Telaga Tangkit Puntang	Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian	Tempat Rekreasi, Pemancingan, dan event gasstrack	48
3	Banyu Asri	Kampung Nyukangharjo, Kecamatan Selagai Lingga	Tempat Pemancingan, Taman Bermain, Karaoke, gasstrack, dan meeting room	80
4	Banyu Selo	Kampung Watu, Kecamatan Kalirejo	Tempat Rekreasi, Perahu Bebek Air dan Pemancingan	50

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.103
Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi	Kampung Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo	Rekreasi Agro Wisata Tanaman Obat, Sayur dan Buah	40
2	Perkebunan Nanas Asto Mulyo	Kampung Asto Mulyo, Kecamatan Punggur	Rekreasi Agro Wisata Buah Nanas Quin	30

Objek wisata tirta di Kabupaten Lampung Tengah ada tiga, yaitu Danau Telago Rejo di Kecamatan Sendang Agung, Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak dan Danau Bekri di Kecamatan Bekri (lihat Tabel 3.42). Selain objek wisata tirta di atas, kabupaten ini juga memiliki objek wisata air modern. Objek wisata tersebut adalah Kolam Renang Telaga Putri di Kecamatan Seputih Banyak, Kolam Renang Tirta Bening di Kecamatan Pubian dan Kolam Renang Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung.

Tabel 2.104
Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Danau Telago Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	74

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
2	Danau Tirta Gangga	Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak	Taman Rekreasi Danau, Pura, Patung Hanoman	50
3	Danau Bekri	Kecamatan Bekri	Panorama Alam	26

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.105
Objek Wisata Air Modern di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kolam Renang Telaga Putri	Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak	Kolam Renang, Water Boom, Sepeda Air, dan Kolam Ikan	46
2	Kolam Renang Tirta Bening	Kampung Payung Rejo, Kecamatan Pubian	Kolam Renang dengan beberapa permainan anak-anak	40
3	Kolam Renang Telogo Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Kolam Renang dengan Panorama Alam Perbukitan Hijau	74

Sumber data: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih. Sementara itu, objek wisata religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato di Kecamatan Bandar Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadatullah di Kecamatan Terbanggi Besar serta Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram.

Tabel 2.106
Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Tugu Kopiah Emas	Kecamatan Gunung Sugih	Tugu Kopiah Emas dan Foto Area	0,5
2	Nuwo Balak dan Sesat Agung	Kecamatan Gunung Sugih	Bangunan Kulturalistik Pertemuan Serbaguna	1

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
3	Kampung Wisata Terbanggi Besar	Kecamatan Terbanggi Besar	Rumah Adat Khas Lampung yang Berusia Ratusan Tahun dan Kesenian Adat Lampung	15
4	Tugu Gajah Siwo Mergo	Kecamatan Gunung Sugih	Patung Gajah dengan Kereta Kencana dan Foto Area	3

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.107
Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato	Kecamatan Bandar Surabaya	Bukti Peninggalan Sejarah Keris, Sabuk, Buku Kayu Alim dan Rompi Terbang	90
2	Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani	Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bangun Rejo	Panorama Alam, Tempat Petilasan dan Tempat Peristirahatan	45
3	Makam Syekh Sadatullah	Kecamatan Terbanggi Besar	Situs Sejarah Makam Syekh Sadatullah	6
4	Gua Maria	Kampung Fajar Mataram, Kec. Seputih Mataram	Panorama Alam dan Patung Bunda Maria	40

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Wisata Alam Kabupaten Lampung Tengah

1. Danau Tirta Gangga Taman: terletak di Kecamatan Seputih Banyak dengan luas sekitar 175 ha. Pada mulanya berfungsi untuk penampungan air irigasi, namun seiring perkembangan waktu danau buatan tersebut akhirnya menjadi menarik untuk sarana rekreasi.
2. Air Terjun Curup Bilik Air: terletak di dusun Harapan Jaya kampung Gedung Harta Kecamatan Selagai Lingga.
3. Air Terjun Curup Tujuh: terletak di kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Linggga.
4. Danau Telogo Rejo: terletak di kampung Sendang baru kecamatan Sendang Agung.

5. Danau Bekri: terletak di kecamatan Bekri
6. Pemancingan Ikan Way Seputih: terletak di daerah susuk Kecamatan Rumbia. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.
7. Pemancingan Kolam Kalirejo: terletak di Kecamatan Kalirejo tepatnya di kampung di Way Kerui. Peman-cingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.

Dapat di lihat pada tabel bahwa jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebanyak 1208 kunjungan hanya tercapai 0.13 persen dari target kunjungan yang direncanakan yaitu 9000, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menutup sementara lokasi2 wisata dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Dan PAD yang dicapai pada tahun 2020 1,78 persen. Namun demikian secara kuantitatif, nilai rupiah PAD dari sekor pariwisata dan rata-rata persentase peningkatan mencapai 6,52 persen per tahun.

Tabel 2.108
Capaian Kinerja Pembangunan BIdang Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah

No	URAIAN	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	%	172	172	146	122	115	0,13
	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota		8.600	8.600	8.800	8.544	9.206	1208
	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota		5.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9000
2	Lama kunjungan wisata	hari	1	1	1	1	1	1
3	PAD Sektor wisata		1,76%	2,16%	1,83%	2,91%	3,05%	1,87%
	Pajak Hotel *(juta rupiah)*		164,4	180,8	206,9	631,4	4.161,2	2.609,5
	Pajak Rumah Makan *(juta rupiah)*		1.821,4	2.610,4	2.675,3	3.412,5	868,6	378, 8
	Pajak Hiburan *(juta rupiah)*		110,2	119,7	115,7	170,3	267,3	300, 0
	Total PAD sektor pariwisata (juta rupiah)		2.096,1	2.911,0	2.998,0	4.214,3	5.297,2	3.288,3
	Total PAD (juta rupiah)		118.862,8	134.894,6	164.046,7	144.961,3	173.533,1	175.676,78

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

3. Pertanian

Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Lahan pertanian tanaman pangan terluas terdapat pada tanaman padi yaitu 143.252,4 Ha. Luas lahan tanaman padi pada tahun 2015 – 2017 mengalami kenaikan dari 140.242 Ha menjadi 159.182 Ha, tahun 2018 turun menjadi 135.640 Ha dan turun kembali menjadi 134.831 Ha pada tahun 2019. Sementara luas lahan tanaman jagung mengalami penurunan pada tahun 2016 (51.154 Ha) dari tahun 2015 (59.358 Ha) dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2019 (63.180). Luas lahan tanaman ubi kayu terus mengalami penurunan sampai tahun 2019.

Produktivitas tanaman padi dan palawija kabupaten lampung tengah pada tahun 2015 -2019 mengalami fluktuasi. Produktivitas dari yang tertinggi sampai terendah di Kabupaten Lampung Tengah adalah tanaman Ubi Kayu (248,93 Ku/Ha), diikuti dengan Ubi Jalar (114,93 Ku/Ha), Jagung (54,22 Ku/Ha), Padi (50,30), Kacang Tanah (13,89), Kedelai (13,20), dan terakhir Kacang Hijau (4,48). Hal ini menunjukan bawasannya lahan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah di kelola sudah cukup maksimal sehingga menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi dan dapat berpengaruh terhadap pendapatan para petani di kabupaten lampung tengah.

Rata-rata persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 0,12 persen per tahun. Kondisi ini terjadi salah satunya karena adanya kecenderungan penurunan luas tanam pertanian selama tahun 2016-2020 khususnya komoditas padi yaitu turun 3,75 persen per tahun. Namun demikian beberapa komoditas lain mengalami peningkatan luas tanam pertanian selama tahun 2016-2020, yaitu jagung (12,36 persen) dan ubi kayu (7,75 persen).

Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu padi (1,79 persen), jagung (22,91 persen), dan ubi kayu (8,72 persen). Rata-rata pertumbuhan kelompok tani tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu kelompok tani pemula (18,31 persen), kelompok tani lanjut (91,68 persen), dan kelompok tani madya (90,01 persen).

Tabel 2.109
Capaian Kinerja Pembangunan BIdang Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah

NO	URAIAN	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB		36,35	35,88	36,11	35,96	34,86	36,09
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	milyar	17.766,94	19.796,42	22.011,07	23.855,9	25.085,73	25.837,7
	Jumlah PDRB	milyar	48.878,37	55.171,37	60.955,29	66.340,55	71.952,7	71.591,8
2	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	Persen	46,97	46,96	47,02	46,35	N/A	N/A
	Jumlah Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan)		15,05	14,96	14,93	14,78	N/A	N/A
	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan		32,04	31,86	31,75	31,89	N/A	N/A
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	13,67	12,79	11,51	10,23	0,00	n.a
	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)		2.429,5	2.532,9	2.533,4	2.565,8	n.a	n.a
	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan		17.766,94	19.796,4	22.011,1	25.085,7	16.107,52	n.a
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a
	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n		828.487	837.322	796.580	771.669	705.402	n.a
	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n		828.487	837.322	796.580	771.669	705.402	n.a

NO	URAIAN	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Persen	5,41	4,98	5,27	4,80	4,89	5,29
	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)		828.487	837.322	796.580	771.669	705.402	768.147
	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)		153.127	168.043	151.035	160.837	144.399	136.039
6	Cakupan bina kelompok tani	Persen	11,02	4,99	3,00	3,67	10,18	1,67
	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n		551	248	153	187	518	85
	jumlah kelompok tani		4.999	4.968	5.107	5.097	5.089	5.089
7	**Luas Tanam Pertanian (Ha)**							
	Padi	Ha	n.a	174.113	134.631	161.659	155.434	136.039
	Jagung	Ha	n.a	44.205	77.484	81.411	61.524	65.148
	Kedelai	Ha	n.a	302	115	12.214	2.392	n.a
	Ubi Kayu	Ha	n.a	79.805	69.167	62.118	67.708	103.779
8	**Luas Panen**							
	Padi	Ha	n.a	168.043	151.035	160.837	144.399	146.915

NO	URAIAN	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jagung	Ha	n.a	46.060	77.310	80.713	59.041	68.175
	Kedelai	Ha	n.a	302	30	10.836	n.a	n.a
	Ubi Kayu	Ha	n.a	68.720	53.718	64.560	60.568	86.545
9	**Produktivitas Tanaman Pangan**							
	Padi	ku/ha	n.a	52,43	68,65	55,95	60,89	52,29
	Jagung	ku/ha	n.a	14,29	13,36	9,77	n.a	56,53
	Kedelai	ku/ha	n.a	251,77	260,23	222,06	247,39	n.a
	Ubi Kayu	ku/ha	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	254,60
10	**Produksi Tanaman Pangan**							
	Padi	ton	n.a	837.322	796.580	771.669	705.402	768.147
	Jagung	ton	n.a	241.512	530.712	451.624	359.506	385.426
	Kedelai	ton	n.a	431	40,08	14.056	n.a	n.a
	Ubi Kayu	ton	n.a	1.730.156	1.397.895	1.433.638	1.500.624	2.203.462

NO	URAIAN	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	**Kelompok Tani**							
	Pemula	poktan		1.640	1.706	3.005	2.848	2.800
	Lanjut	poktan		376	376	1.706	1.819	1.935
	Madya	poktan		9	10	376	412	412
	Utama	poktan		4.958	5.107	10	10	10
12	**Perkembangan Lembaga tani**							
	Jumlah Kelompok Tani			4.958	5.107	5.097	5.089	5.157
	Jumlah P3A			258	260	273	273	273
	Jumlah GP3A			24	24	24	24	24
	Jumlah UPJA			114	114	117	117	117
	Jumlah kelompok penangkar benih			45	45	45	45	45
	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat Bantuan dari Pemerintah			n.a	2.678	2.678	5.413	1.123

Sumber data: Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Tengah

4. Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan tertinggi menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 – 2020 pada tanaman kelapa sawit produksi tertinggi terdapat pada Kec. Anak Tuha yaitu 9.438 ton tahun 2018 - 2019, tanaman kelapa produksi tertinggi terdapat pada kecamatan kalirejo 658 ton tahun 2018 - 2019, tanaman karet produksi tertinggi terdapat pada Kec. Seputih Surabaya 1.567 tahun 2018 - 2019, tanaman kopi produksi tertinggi terdapat pada Kec. Seputih Agung 44 ton tahun 2018-2019, tanaman kakao produksi tertinggi terdapat pada Kec. Kalirejo 578 ton tahun 2018-2019, dan yang terakhir tanaman tebu produksi tertinggi terdapat pada Kec. Terusan Nunyai 13.533 ton tahun 2018-2019. Namun demikian pada tahun 2020 seluruh produksi tanaman perkebunan pada setiap kecamatan mengakami penurunan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya dampak pndemi Covid 19 yang membuat lemahnya perekonomian termasuk pada produksi tanaman perkebunan.

Tabel 2.110
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2020 (ton)

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Produksi (Ton)		
			2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	Anak Tuha	9.438	9.438	3.256
2	Kelapa	Kalirejo	658	658	411
3	Karet	Seputih Surabaya	1.567	1.567	1.539
4	Kopi	Seputih Agung	44	44	66
5	Kakao	Kalirejo	578	578	1.057
6	Tebu	Terusan Nunyai	13.533	13.533	2.205

Sumber data: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2015-2019)

Rata-rata produksi sektor perkebunan Kakao tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,67 persen per tahun. Produksi sektor perkebunan karet 0,06 persen per tahun, produksi sektor perkebunan kelapa dalam 2,19 persen per tahun, produksi sektor perkebunan kelapa sawit turun 7,08 persen per tahun, dan produksi sektor perkebunan lada 2,82 persen per tahun

Tabel. 2.111
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perkebunan Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	13.67	12.79	11.51	10.23	n.a	n.a
	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)		2.429,5	2.532,9	2.533,4	2.565,8	n.a	n.a
	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan		17.766,94	19.796,4	22.011,1	25.085,7	16.107,52	n.a
2	Produksi sektor perkebunan Kakao	ton	n.a	2.969,56	2.775,4	3.255,6	2.992	2.992
3	Produksi sektor perkebunan Karet	ton	n.a	4.930,83	4.790,56	4.701,3	4.930,83	66,50
4	Produksi sektor perkebunan Kelapa Dalam	ton	n.a	6.429,51	6.538,40	6.865,4	6.258	6.942
5	Produksi sektor perkebunan Kelapa Sawit	ton	n.a	59.298,94	59.778,63	53.941,9	43.553	43.503
6	Produksi sektor perkebunan lada	ton	n.a	97,56	98,15	76,89	101	102
7	Produksi sektor perkebunan tebu	Ton	n.a	18.515	18.367	210.785	28.523	59.781

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

5. Peternakan

Ternak ruminansia yang dikembang di Lampung Tengah meliputi sapi, kerbau, kambing dan domba. Di antara keempat jenis ternak tersebut, berdasarkan data tahun 2018, populasi tertinggi adalah ternak sapi sebesar 273.136 ekor, kemudian diikuti kambing sebesar 232.776 ekor. Sedangkan ternak domba dan kerbau populasinya kurang, yaitu masing-masing 8.982 dan 5.216 ekor. Pada beberapa kecamatan, bahkan tidak tercatat data ternak domba, sedangkan ternak kambing cukup merata di seluruh kecamatan. Rata-rata jumlah sapi per kecamatan adalah 9.754 ekor, kerbau 186 ekor, kambing 8.313 ekor, dan domba 320 ekor.

Tabel 2.112
Populasi Sapi, Kerbau, Kambing Di Lampung Tengah

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Padang Ratu	7.251	621	10.635	43
2	Selanggai Lingga	2.722	126	4.393	182
3	Pubian	5.026	695	6.276	87
4	Anak Tuha	4.034	708	5.678	272
5	Anak Ratu Aji	3.306	46	3.992	56
6	Kali Rejo	2.515	61	12.838	191
7	Sendang Agung	1.906	46	3.338	225
8	Bangun Rejo	10.690	127	16.554	563
9	Gunung Sugih	6.996	129	21.764	254
10	Bekri	9.063	62	3.130	96
11	Bumi Ratu Nuban	1.641	31	2.793	885
12	Trimurjo	2.683	411	3.343	679
13	Punggur	8.475	83	2.689	612
14	Kota Gajah	4.659	83	2.077	401
15	Seputih Raman	17.402	21	1.764	467
16	Terbanggi Besar	33.057	168	17.277	2.639
17	Seputih Agung	26.206	320	5.096	7
18	Way Pengubuan	3.760	247	3.777	856
19	Terusan Nunyai	5.180	18	9.804	n.a
20	Seputih Mataram	22.449	29	12.989	323
21	Bandar Mataram	12.994	332	19.300	15
22	Seputih Banyak	28.271	164	8.382	651
23	Way Seputih	13.099	37	8.585	n.a
24	Rumbia	12.814	51	6.928	n.a
25	Bumi Nabung	7.555	43	6.371	n.a
26	Putra Rumbia	10.595	29	2.780	n.a
27	Seputih Surabaya	4.717	59	13.359	n.a
28	Bandar Surabaya	4.070	469	16.864	25
	Lampung Tengah	**273.136**	**5.216**	**232.776**	**8.982**

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

Populasi ternak sapi dan kambing tercatat meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 populasi sapi menjadi 311.259 atau meningkat 4,71 persen, sedangkan kambing menjadi 289.957 atau meningkat sebesar 7,118 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat di Lampung Tengah lebih berminat untuk mengembangkan ternak sapi dan kambing. Rata-rata pertumbuhan selama tahun 2018-2020 untuk ternak sapi potong adalah 6,77 persen dan untuk kambing adalah 11,09 persen.

Tabel 2.113
Populasi Sapi Potong dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak		
		2018	2019	2020
1.	Sapi Potong	273.136	297.253	311.259
2.	Kambing	235.266	270.543	289.957

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

Peternakan Sapi

Jumlah usaha peternakan sapi tidak linier dengan jumlah populasi sapi. Usaha peternakan sapi yang paling banyak di kecamatan Punggur, di mana jumlah populasinya menempati urutan ke 12. Di kecamatan Seputih Banyak, yang menempati urutan ke 2 populasi sapi bahkan tidak tercatat adanya usaha ternak sapi.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki populasi ternak sapi yang paling tinggi di provinsi Lampung, yaitu sebesar 41,7% dari 15 kabupaten yang ada. Peringkat berikutnya adalah kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Berdasar kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra pengembangan ternak Sapi di Lampung yang berpotensi mendukung penyediaan daging sapi secara nasional.

4. Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Pasar Kampung, Pasar Daerah, Mall/Supermarket/Mini Market. Jumlah infrastruktur tersebut semakin bertambah, terutama pada fasilitas perdagangan modern seperti Mall. Pada tahun 2020, pusat perbelanjaan Pasar Bandar Jaya diberikan izin sebagai Mall dan direncanakan untuk dilengkapi fasilitasnya untuk dapat beroperasi seperti layaknya pusat perbelanjaan setingkat Mall.

Perkembangan jumlah fasilitas perbelanjaan di Kabupaten Lampung Tengah tergambar pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2019, tercatat jumlah pasar kampung adalah 75 fasilitas, pasar daerah berjumlah 9 fasilitas, dan mall/supermarket/mini market berjumlah 148 fasilitas.

Tabel 2.114
Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2016 – 2020

No	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar Kampung	75	75	75	75	75
2	Pasar Daerah	9	9	9	9	9
3	Mall / Super Market / Mini Market	90	123	14	14	15
	JUMLAH	**84**	**207**	**232**	**232**	**99**

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah

Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah, setelah sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor perdagangan besar dan eceran mengalami partumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai ekspor tahun 2015 sebesar Rp 2,5 trilyun dan meningkat 19 persen pada tahun 2020 yaitu 3,1 trilyun. Nilai impor pada tahun 2015 sebesar Rp 676 milyar lebih turun menjadi sebesar Rp 643 milyar lebih pada tahun 2020. Rata-rata peningkatan ekspor tahun 2015-2020 adalah 7,35 persen per tahun.

Tabel 2.115
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satu-an	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan		2.550.100.159.313	2.019.982.621.500	2.424.400.045.140	2.312.087.574.352	3.190.366.616.565	3.580.477.339.798
	Nilai ekspor	Rp	3.226.157.199.422	2.578.389.489.755	3.352.508.578.329	3.225.673.986.352	3.269.221.354.465	4.224.397.405.573
	Nilai impor		676.057.040.109	558.406.868.255	928.108.533.189	913.586.412.000	78.854.737.900	643.920.065.775
2	Jumlah Pasar Kampung			75	75	75	75	75
	Jumlah Pasar Daerah			9	9	9	9	9
	Jumlah Mall/Super Market/ Mini Market			90	123	14	14	15

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah

5. Perindustrian

Bidang perindustrian salah satu bidang urusan pilihan yang menjadi kewengan pemerintah daerah, yang mengurusi segala sesuatu yang bertalian dengan industri. Di Kabupaten Lampung Tengah sektor industri menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. Rata-rata prosetase peningkatan jumlah indutri kecil dan menengah tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 31,38 persen per tahun.

Tabel 2.116
Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosetase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	Persen	13,49%	11,46%	57,03%	37,12%	0,77%	0,05%

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.117
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah Unit Usaha (unit)					Jumlah Tenaga Kerja (orang)					Nilai Produksi (Rp milyar)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I	IHPK															
	besar	37	89	n.a	65	65	10.003	32.457	30.734	30.743	23.057	4.290	5.790	19.807,5	20.807,5	16.646
	menengah	75	137	170	170	170	2.158	5.429	1.738	1.738	1.390	318.171	319.171	622,556	632.557	537.677
	kecil	273	455	1.424	1.437	1.365	830	1.595	4.343	4.385	3.069	351.305	352.805	292.200	302.200	256.87
	jumlah	385	681	1.659	1.672	1.600	12.991	39.481	36.815	36.866	27.516	673.766	677.766	934.563,5	955.564,5	554.576
2	ILMEKA															
	besar	28	89	n.a	n.a	n.a	25.364	2.641	n.a	n.a		25	27	n.a	n.a	n.a
	menengah	13	17	n.a	n.a	n.a	1.834	1.881	n.a	n.a		11.860	13.360	n.a	n.a	n.a
	kecil	26	265	14	14	14	183	625	336	336	300	92.000	93.000	106.323	116.324	102.365
	jumlah	67	371	14	14	14	27.381	5.147	336	336	300	103.885	106.387	106.323	116.324	102.365
3	SUB TOTAL															
	besar	65	178	65	65	65	35.367	35.098	30.734	30.743	23.057	n.a	n.a	19.807,5	20.807,5	16.646
	menengah	88	154	170	170	170	3.992	7.310	1.738	1.738	1.390	n.a	n.a	622.556	632.557	537.674
	kecil	299	720	1.372	1.451	1.379	1.013	2.220	4.679	4.721	3.369	n.a	n.a	292.200	116.324	102.365
	Total	452	1.052	1.673	1.686	1.614	40.372	44.628	37.151	37.202	27.816	n.a	n.a	934.563	955.564	554.576

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Rata-rata pertumbuhan jumlah unit usaha industri kecil, menengah, dan besar untuk kelompok IHPK dan ILMEKA tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing yaitu industri kecil 58,04 persen per tahun, industri menengah 21,35 persen per tahun, dan industri besar 27,59 persen per tahun.

Rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah, dan besar untuk kelompok IHPK dan ILMEKA tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung naik dan turun dengan tingkat pertumbuhan masing-masing yaitu industri kecil naik 50,54 persen per tahun, industri menengah turun 3,28 persen per tahun, dan industri besar turun 9,54 persen per tahun.

Sektor pertanian sangat mewarnai setor-sektor lain di Kabupaten Lampung Tengah. Sektor hilir (sekunder) di wilayah ini didominasi oleh industri hasil pertanian atau agroindustri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekembangan sektor pertanian dengan berbagai komoditas unggulannya, akan memacu perkembangan sektor lainnya seperti industri.

Jumlah perusahaan industri pengolahan yang berskala besar di Lampung Tengah tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama untuk perusahaan berskala besar, yakni 74 Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) dan 14 Industri Logam, Mesin, Elektronika, Kimia dan Aneka (ILMEKA). Penambahan jumlah industry pada skala kecil dan menengah IHPK dan ILMEKA yakni 4819 usaha IHPK dan 685 usaha ILMEKA. Dari sisi tenaga kerja, penambahan jumlah industri ini menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja di kedua jenis industri tersebut. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di IHPK berskala kecil dan menengah bertambah sebanyak 194 orang. Sedangkan kenaikan tenaga kerja di ILMEKA berskala kecil dan menengah hanya sebanyak 5 orang.

Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 434,41 milyar mencapai Rp. 434.50 milyar, sedangkan nilai investasi ILMEKA hanya Rp. 99,85 milyar. Persentase kenaikan nilai investasi selama 3 tahun terakhir, ILMEKA lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi IHPK. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, nilai investasi ILMEKA tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 0,23%, sementara nilai investasi IHPK hanya meningkat sekitar (0,02%).

Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 434,41 milyar mencapai Rp. 434.50 milyar, sedangkan nilai investasi ILMEKA hanya Rp 99,85 milyar. Persentase kenaikan

nilai investasi selama 3 tahun terakhir, ILMEKA lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi IHPK. Bila dibandingkan dengan th2014, nilai investasi ILMEKA tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 0,23%, sementara nilai investasi IHPK hanya meningkat sekitar 0,02%.

6. Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru yaitu:

- Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
- Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
- Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
- Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
- Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesem-patan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran penduduk asal (TPA). Selama kurun waktu 2016-2020, telah terjadi penambahan jumlah transmigran umum (KK) sebanyak 53 KK.

Tabel 2.118
Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2015 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Transmigran Umum (KK)	20	10	10	13	0
2	Jumlah Transmigran Swakarsa (KK)	0	0	0	0	0
3	Jumlah Transmigran Swakarsa Mandiri (KK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	**20**	**10**	**10**	**13**	**0**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Hingga tahun 2020, Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki dokumen RPJPD 2005 – 2025 (Perda Nomor 03 Tahun 2010), RTRW 2011-2031 (Perda Nomor 01 Tahun 2012), RPJMD 2016-2021 (Perda Nomor 07 Tahun 2016). Rata-rata penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah 95 persen, rata-rata Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD adalah 100 persen, dan rata-rata kesatuan rencana pembangunan dengan RTRW adalah 80 persen.

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	ada	ada	Ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	ada	ada	Ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	ada	ada	Ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	ada	ada	Ada	ada	ada
5	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		97%	97%	91%	94%	94%
	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan		180	180	170	174	174
	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan		186	186	186	186	186
6	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD		100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan		180	180	170	174	174
	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan		180	180	170	174	174
7	Kesatuan rencana pembangunan dengan RTRW		78%	81%	81%	81%	81%
	kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang		29	30	30	30	30
	dokumen RTRW		37	37	37	37	37

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lampung Tengah

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asset daerah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun Anggaran 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rata-rata dana SILPA tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 7,9 persen per tahun, rata-rata dana urusan pendidikan, dan Bagi hasil kabupaten dan desa adalah 5,28 persen per tahun.

Tabel 2.120
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Skor	n.a	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	SILPA	rupiah	231.696.131.019,71	197.624.086.327,98	55.714.484.280,12	139.955.248.082,15	200.010.842.976,16	269.944.049.759,28
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	11,28	8,69	2,24	5,86	7,21	12,36
	Total SILPA	Rupiah	231.696.131.019,71	197.624.086.327,98	55.714.484.280,12	139.955.248.082,15	200.010.842.976,16	269.944.049.759,28
	Total APBD	Rupiah	2.054.770.343.390,43	2.274.041.706.308,00	2.491.283.236.818,98	2.388.867.281.594,57	2.529.103.615.744,36	2.184.236.301.152,43
4	Persentase belaja pendidikan (20 %)	Persen	43,47	39,12	36,35	37,07	35,94	32,63
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Rupiah	893.296.240.085,00	889.625.506.508,00	905.699.537.686	885.643.419.516	909.053.155.395	712.744.110.650,00
	Total APBD	Rupiah	2.054.770.343.390,43	2.274.041.706.308,00	2.491.283.236.818,98	2.388.867.281.594,57	2.529.103.615.744,36	2.184.236.301.152,43
5	Persentase belanja kesehatan (10 %)	Persen	8,29	8,24	7,73	8,23	8,59	9,37
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Rupiah	8.979.759.564.900,00	187.424.226.323	192.643.272.404,08	196.689.118.603,01	217.263.619.096,04	204.744.695.570,11
	Total APBD	Rupiah	205.477.034.339,00	2.274.041.706.308,00	2.491.283.236.818,98	2.388.867.281.594,57	2.529.103.615.744,36	2.184.236.301.152,43

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	130,27	57,82	70,28	62,55	59,86	35,82
	Jumlah Belanja Langsung	Rupiah	1.162.430.405.423,00	833.092.636.929,00	1.028.193.413.749,98	919.223.350.318,71	947.036.441.402,36	576.079.025.618,43
	Total APBD	Rupiah	2.054.770.343.390,43	2.274.041.706.308,00	2.491.283.236.818,98	2.388.867.281.594,57	2.529.103.615.744,36	2.184.236.301.152,43
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rupiah	262.193.720.653,57	1.440.949.069.379,00	1.463.089.823.069,00	1.469.643.931.275,86	1.582.067.174.342,00	1.608.157.275.534,00
	Total APBD	Rupiah	2.054.770.343.390,43	2.274.041.706.308,00	2.491.283.236.818,98	2.388.867.281.594,57	2.529.103.615.744,36	2.184.236.301.152,43
7	Bagi hasil kabupaten dan desa	Persen	0,24	0,24	0,22	0,29	0,31	0,36
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Rupiah	4.831.123.848,00	5.494.565.430,00	5.575.613.249,00	7.044.716.063,00	7.929.178.723,00	7.766.649.980,00
	Total APBD	Rupiah	2.054.770.343.390,43	2.274.041.706.308,00	2.491.283.236.818,98	2.388.867.281.594,57	2.529.103.615.744,36	2.184.236.301.152,43
8	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber data: BPKAD Kabupaten Lampung Tengah

3. Kepegawaian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem NKRI.

Pada aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 sebanyak 11.017 orang, terdiri dari 5.099 orang laki-laki dan 5.918 orang perempuan. Kondisi tersebut menga-lami penurunan sebanyak 2.563 orang dibanding kondisi tahun 2015 sebanyak 13.580 orang. Dari sisi ketersediaan perangkat daerah, rasio ketersediaan PNS per 1.000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik, adalah sebesar rata-rata 7 PNS melayani 1.000 penduduk. PNS menurut golongan terbanyak ada pada golongan III yakni sebanyak 4.874 orang dan paling sedikit golongan I sebanyak 71 orang. Selanjutnya, hal yang juga mengkontribusi terhadap kualitas pelayanan adalah sebaran PNS menurut tingkat pendidikan.

Pada tahun 2020, tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Lampung Tengah di dominasi oleh S-1 (58,63 persen), SMA (17,09 persen), dan D-3 (10,48 persen). Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid mencapai 99 persen. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal juga terus meningkat.

Tabel 2.121
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Golongan I	160	144	127	99	71	0
2	Golongan II	3.033	2.669	2.676	2.206	2.209	1.956
3	Golongan III	5.085	4.473	4.574	4.585	4.874	5.263
4	Golongan IV	5.302	4.551	4.295	4.150	3.863	3.584
Jumlah		**13.580**	**11.837**	**11.672**	**11.040**	**11.017**	**10.803**

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.122
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	197	166	123	89	70	55
2	SMP	255	226	173	151	103	97
3	SMA	3.739	3.457	3.077	2.553	2.127	1.859
4	D1	173	162	109	89	78	77
5	D2	2.098	2.700	2.413	1.967	1.035	728
6	D3	960	886	1.120	1.066	1.165	1.140
7	D4/ S1	5.075	3.948	4.225	4.687	5.852	6.377
8	S2	271	291	429	436	584	540
9	S3	2	1	3	2	3	3
Jumlah		**12.770**	**11.837**	**11.672**	**11.040**	**11.012**	**10.876**

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.123
Persentase Kompetensi Kepegawaian Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kompetensi aparatur	Persen	-	-	-	-	60	65
2.	Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid	Persen	90	92	94	94	95	99
3	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat dan sosialisasi	orang	80	80	80	257	761	10

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.124
Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	5	5	5	5	5	5
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	n.a	80	80	257	761	10
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		80	80	80	257	761	n.a
	Jumlah total ASN		13580	13633	11672	11040	11017	10447
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tor	Persen	n.a	80	30	80	40	60
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural		560	80	30	80	40	60
	Jumlah total jabatan		1173	1173	1173	1173	1173	1173
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Unit	42	40	41	35	39	36
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Unit	1212	1120	1064	974	1006	956
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Unit	12420	8345	8319	7611	7736	7306

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah lembaga. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengeta-huan dan untuk kemakmuran masyarakat.

Rumusan kebijakan merupakan sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini, yang diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif.

Rata-rata persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 9,99 persen per tahun. Rata-rata persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah juga menurun dengan tingkat penurunan 13,35 persen per tahun.

Rata-rata persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 89,02 persen per tahun. Rata-rata persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah meningkat 5,66 persen per tahun.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah memperoleh predikat SANGAT INOVATIF dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 1.705 (Kepmendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020).

Tabel 2.125
Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		balitbang belum ada	balitbang belum ada	100,00%	92,86%	88,24%	75,00%
	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	kegiatan	balitbang belum ada	balitbang belum ada	11	13	15	12
	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	kegiatan	balitbang belum ada	balitbang belum ada	11	14	17	16
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	rekomendasi	balitbang belum ada	balitbang belum ada	11	13	15	12
	Penerapan SIDa:	ada	balitbang belum ada	balitbang belum ada	ada	ada	ada	ada
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	balitbang belum ada	balitbang belum ada	100,00%	100,00%	68,75%	71,88%
	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	perangkat daerah	balitbang belum ada	balitbang belum ada	32	32	22	23
	Jumlah total perangkat daerah	perangkat daerah	balitbang belum ada	balitbang belum ada	32	32	32	32

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		balitbang belum ada	balitbang belum ada	18,29%	76,15%	100,00%	80,00%
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	*rekomendasi*	balitbang belum ada	balitbang belum ada	15	83	45	*24*
	Jumlah inovasi yang diusulkan	*rekomendasi*	balitbang belum ada	balitbang belum ada	82	109	45	*30*
5	Indek inovasi daerah	indeks	balitbang belum ada	balitbang belum ada	n.a	n.a	n.a	1.705

Sumber data: Balitbang Kabupaten Lampung Tengah

5. Pengawasan

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan dan dinamika turut meningkatkan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Segenap jajaran penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan internal APIP tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai tujuan yang ditetapkan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku *(oversight)*, namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah *(insight)* serta mampu mengidentifikasikan *trend* atau perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah *(foresight)*.

Pada tahun 2020 semua (100 persen) temuan sudah ditindaklanjuti. Rata-rata persentase Jumlah total temuan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dan pada tahun 2020 menurun 11,82 persen jika dibandingkan tahun 2019. Rata-rata persentase pelanggaran pegawai terus menurun dengan penurunan 6,33 persen per tahun.

Tabel 2.126
Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2015 – 2020

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	95,4	92,59	95,65	100	100	100
	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah	925	1000	1100	1200	1100	970
	Jumlah total temuan	Jumlah	970	1080	1150	1200	1100	970
2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,1	0,10	0,06	0,12	0,09	0,03
	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	11	13	7	13	10	3
	Jumlah total ASN	Orang	13.580	13.633	11.672	11.040	11.017	10.447
3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	127	53	51	57	34	33

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

6. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dalam pembentukan kebijakan pembangunan daerah terdapat unsur Lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan membentuk, menyusun dan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainya serta kebijakan pemerintah daerah.

Rata-rata rapat/sidang Hearing per tahun adalah 36,5 kali dalam setahun. Sedangkan Rata-rata rapat/sidang Banmus per tahun adalah 28 kali dalam setahun dan Paripurna adalah 21,5 kali setahun. Rata-rata persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda adalah 81,5 persen per tahun.

Tabel 2.127
Jumlah Rapat/Sidang Yang Difasilitasi Tahun 2019 – 2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1	Hearing	Kali	43	30
2	Rapat Banmus	Kali	22	34
3	Paripurna	Kali	27	16
	Jumlah		**92**	**80**

Sumber data: Sekretariat DPRD Lampung Tengah

Tabel 2.128
Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2019 – 2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1	Persentase Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda	%	81	82

Sumber data: Sekretariat DPRD Lampung Tengah

7. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Rata-rata indek kepuasan masyarakat tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,42 persen per tahun. Nilai SAKIP meningkat dengan rata-rata peningkatan 4,30 persen per tahun. Jumlah peraturan yang diterbitkan juga terus per tahun. Persentase KUR yang disalurkan juga terus per tahun.

Tabel 2.129
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	n.a	72.92	80.59	80.71	85.9	85.9
2	Nilai SAKIP	Skor		51,86	51,86	60,13	62,05	63,52
3	Nilai LPPD	Skor		3,0755	1,889	3,1566	n.a	n.a
4	Jumlah Paket Pengadaan Barang & Jasa	paket	802	1041	741	386	357	221
5	Jumlah Peraturan yang diterbitkan							
	- Peraturan Daerah	Buah		47	87	14	14	11
	- Peraturan Bupati	Buah		13	11	50	69	61
6	Persentase KUR yang disalurkan	Juta rp		516,010	109.851	630.666	802.162	1.107.876

Sumber data: Sekretariat Daerah Lampung Tengah

2.3.5. Fokus Layanan Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah LSM, Ormas dan Parpol yang terdaftar secara resmi di pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2020 jumlah LSM yang terdaftar sebanyak 45 LSM , kemudian jumlah Ormas berjumlah 116 Ormas, serta Partai Politik yang terdaftar sebanyak 12 parpol.

Rata-rata jumlah Ormas tahun 2017-2020 di Kabuaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 15,75 persen per tahun. Namun rata-rata jumlah LSM terus menurun dengan penurunan 13,41 persen per tahun.

Tabel 2.130
Pencapaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	LSM	Unit	81	88	88	45
2.	Ormas	Unit	76	87	114	116
3.	Parpol	Unit	12	12	12	12

Sumber data: Badan Kesbangpol Lampung Tengah

2.3.6. Fokus Layanan Umum Kewilayahan

Unsur kewilayanan ditingkat kabupaten dalam hal ini dilak-sanakan oleh Pemerintah kecamatan selaku pelaksana sebagian kewenangan bupati yang diserahkan atau dikuasakan kepada camat. Pada saat ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 28 Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat. Adapun tugas pokok dan fungsi samat adalah sebagai berikut:

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing ekomi daerah dapat dilihat dari kemampau ekonomi daerah yang tercermin dari pengeluaran konsumsi masyarakat, rasio ekspor dan impor dan persentase desa (kampung) maju.

Rata-rata Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 5,14 persen per tahun. Sedangkan rata-rata Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,66 persen per tahun.

Rata-rata rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,90 persen per tahun. Rata-rata Prosentase desa maju terhadap total desa juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 50,42 persen per tahun.

Tabel 2.131
Pencapaian Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	Rupiah/ bulan	376.934	421.095	451.886	432.544	469.537	480.895
2	Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita	Rupiah/ bulan	362.592	372.558	321.924	378.715	415.446	422.998
3	Rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	n.a	73,50	68,70	73,00	74,77	75,86
4	Prosentase desa maju terhadap total desa	%	n.a	0.07	0.17	0.27	0.27	0,27

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing wilayah/ infrastruktur daerah dapat dilihat dari kondisi infrastruktur wilayah. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedan) tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 5,64 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 sebanyak 61,9 persen jalan di Kabupaten Lampung Tengah masuk kategori jalan mantap.

Rata-rata cakupan rumah tinggal bersanitasi 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,96 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 cakupan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai 94,35 persen. Rata-rata persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,57 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 89,30persen.

Tabel 2.132
Pencapaian Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jalan mantap (baik dan sedan)	%	n.a	52,68	67,68	54,43	61,62	61,9
3	Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi	%	n.a	90,83	92,95	93,04	93,12	94,35
4	Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten	%	n.a	26,56	28,68	31,15	37,08	43,71
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	n.a	84	83,13	83,99	84,39	89,30

Sumber: Dinas Bina Marga/Perumahan dan Permukiman/Pengairan

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Aspek daya saing ikilim berinvestasi dapat dilihat dari kondisi iklim berinvestasi. Angka kriminalitas rasio per 10.000 penduduk cenderung menurun, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah semakin aman. Kondisi ini semFakin menjadi daya tarik investasi.

Tabel 2.133
Pencapaian Indikator Fokus Iklim Investasi Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas rasio per 10.000 penduduk	rasio per 10.000 penduduk	3.92	5.05	5.33	4.40	4.25	4,19

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata rasio ketergantungan 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus menurun dengan tingkat penurunan 0,38 persen per tahun. Pada akhir tahun 2020, rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah hanya mencapai 48,6. Ini artinya dalam 100 orang penduduk hanya menanggung 48 orang.

Rata-rata penduduk yang tamat perguruan tinggi 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 40,74 persen per tahun. Namun demikian tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah masih di dominasi tamatan SD, disusul dengan tamatan SMA/Sederajat, dan tamatan SMP/Sederajat.

Tabel. 2.134
Pencapaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
Tahun 2015 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketergantungan	rasio	49.59	49.34	49.16	49.03	48.92	48.6
3	Tamat SD	jumlah	n.a	238.446	238.446	183.850	307.664	242.612
4	Tamat SMP/ Sederajat	jumlah	n.a	233.293	233.293	182.061	171.323	172.515
5	Tamat SMA/ Sederajat	jumlah	n.a	137.900	137.900	178.460	159.668	186.010
6	Tamat Diploma	jumlah	n.a	74.750	74.750	9.482	15.966	11.414
7	Tamat Perguruan Tinggi	jumlah	n.a	10.671	10.671	26.395	25.062	30.239

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal yang mendasari dari pelaksanaan SPM diantaranya adalah penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diturunkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nmor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meningggal dunia.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi urusan yang mengharuskan adanya SPM, terdiri dari urusan bidang:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Ketentraman Ketetiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
5. Ketentraman Ketetiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana
6. Sosial

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Jenis layanan dasar untuk SPM bidang kesehatan tingkat kabupaten terdiri dari 12 jenis layanan. Rata-rata SPM tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 16,31 persen per tahun. Rata-rata SPM pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat 0,10 persen per tahun, pelayanan kesehatan ibu bersalin turun 0,47 persen per tahun, kesehatan bayi baru lahir turun 5,90 persen per tahun, kesehatan balita turun 1,57 persen per tahun, kesehatan pada usia pendidikan dasar meningkat 44,24 persen per tahun, kesehatan pada usia produktif meningkat 1,70 persen per tahun, kesehatan pada usia lanjut meningkat 13,34 persen per tahun, kesehatan penderita hipertensi meningkat 4,43 persen per tahun, kesehatan penderita diabetes melitus meningkat 9,69 persen per tahun, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat meningkat 25,83 persen per tahun, kesehatan orang terduga tuberkulosis meningkat 48,92 persen per tahun, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya

tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) meningkat 32,88 persen per tahun.

Capaian kinerja SPM bidang perumahan rakyat tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan 2,91 persen. Indikator yang digunakan untuk mengukur SPM tersebut ada 4 (empat) indikator, yaitu adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni, persentase penurunan luasan kawasan kumuh, persentase penduduk berakses air bersih, dan persentase rumah tinggal bersanitasi.

SPM pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat satuan polisi pamong praja terdapat 2 (dua) jenis pelayanan. Untuk dapat melaksanakan target pencapaian dan penerapan SPM bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut terdapat 1 (satu) organisasi perangkat daerah (OPD) penanggung jawab, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Jenis. Hingga tahun 2020, SPM bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah mencapai 100 persen dan sudah menjangkau di seluruh kecamatan (28 kecamatan) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Capaian kinerja SPM ketentraman ketetiban umum dan perlindungan masyarakat penanggulangan bencana pemadam kebakaran berdasarkan cakupan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dalam Kab. Lampung Tengah 4.789.82 Km2, dengan meliputi seluruh aktifitas kepentingan public, masyarakat dan pemerintahan. Tingkat waktu tanggap (response time rate) target 100% capaian target realisasi 100% dari jumlah kasus kebakaran diwilayah WMK 22 kejadian yang tertangani pada waktu tanggap.Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi target 25 orang realisasi target 4 % karena hanya 1 orang yang bersertifikasi keahlian dari Pusdiklatsar, Jumlah satgas target 90 orang realisasi target 27.8% hanya tersedia 25 orang satgas yang terdiri dari 4 PNS dan 21 Non PNS dan 2 orang Danru, jumlah mobil pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK target 28 unit realisasi kendaraan yang layak fungsi 14.29% sama dengan 3 unit.

SPM bidang sosial meliputi 5 (lima) layanan, yaitu pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, anak terlantar dipanti/LKSA, lanjut usia terlantar diluar panti, gelandangan dan napzah, dan saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Hingga tahun 2020 sudah mencapai 100 persen, kecuali pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan karena datanya tidak ditemukan.

Tabel 2.135
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi 2020
	Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	99,80
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100 %	0,67
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	64,32
	Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	69,76
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	64,80
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	70,65
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	55,21

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi 2020
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	47,14
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	15,17
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	66,01
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	51,64
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	45,11
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	84,91
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	12,44
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh *manusia (Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	50,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi 2020
	Immunodefici ency Virus)			
	Pekerjaan Umum			
1	Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	94,35
2	Luasan Kawasan Kumuh	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	100%	1,52
3	Akses Air Bersih	Prosentase penduduk berakses air bersih	100%	89,5
4	Rumah Tinggal Bersanitasi	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100%	94,3
	Ketertiban Umum			
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%
	Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi 2020
	panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	100%	100%

2.6 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 yaitu:

a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempro-mosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
g. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industri-alisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar nagara;
k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
l. Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.136
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2020

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	12,9%	12,62%	12,03%	11,82%
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	N/A	N/A	N/A	N/A
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	70%	80%	90%	90%
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100%	100%	100%	100%
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	85%	84%	82%	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	90,01%	85,07%	87,8%	86,25%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	106%	107%	102,5%	96,45%
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,1%	75,55	71,2	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	86,15	86,15	88,12	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		sumber air minum layak dan berkelanjutan.				
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	76,35	76,58	77,42	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	98,8	99,13	99,5	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	75,35	75,77	75,27	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	62,5%	94,94	93,17	
1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(k	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	83,13	83,99	84,39	
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	N/A	N/A	N/A	N/A
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100%	100%	100%	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	N/A	N/A	N/A	N/A
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	N/A	N/A	N/A	N/A
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	0,55	0,91	2,56	
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	N/A	N/A	N/A	N/A
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.			3,97	
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	N/A	N/A	N/A	N/A
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	N/A	N/A	N/A	N/A
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	37%	25,32%	13,98%	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	dan menyusui, serta manula						
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	37%	25,32%	13,98%	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,03 %	0,01 %	0,02%	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	5,7	7,7	11,59	
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	77,1%	44,5%	52,1%	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	81,8%,	85,4%	86,7%	
2,3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	N/A	N/A	N/A	N/A
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	52,8	51,48	78	
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	90,01	85,07	87,8	
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	90,01	85,07	87,8	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,14	0,57	0,23	3,5
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 100	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2,51	4,74	2,73	3,5
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	(AKB) per 1000 kelahiran hidup	2,78	4,94	3,34	0,6
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,0086	0,002	0,007	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	menular lainnya						
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,007	0,004	0,00433	
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai e3liminasi malaria.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber a3ir, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	N/A	N/A	N/A	N/A
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	menular lainnya.						
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	N/A	N/A	N/A	N/A
3,4	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	N/A	N/A	N/A	N/A
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	mental dan kesejahteraan.						
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	N/A	N/A	N/A
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	73,1	75,6	71,2	
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,1	75,6	71,2	
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A	N/A	N/A
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,32	2,3	2,5	2,56
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	26,87	24,45	28,76	
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2* J	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan,	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.1						
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a	Proporsi kematian akibat keracunan.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	3.b.1.(a	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil						
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	N/A	N/A	N/A	N/A
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	N/A	N/A	N/A	N/A
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	N/A	N/A	N/A	N/A
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	110,42	112,23	106,43	
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	90,73	96,16	88,2	

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif						
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	7,38	7,51	7,57	
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	N/A	N/A	N/A	N/A
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	N/A	N/A	N/A	N/A
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/lakilaki di (4) Perguruan Tinggi.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,3	96,8	94,95	
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun.	96,54	95,94	96,43	
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	N/A	N/A	N/A	N/A
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	N/A	N/A	N/A	N/A
5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	N/A	N/A	N/A	N/A
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	N/A	N/A	N/A	N/A
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	N/A	N/A	N/A	N/A
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	N/A	N/A	N/A	N/A
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A	N/A	N/A
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	4	4	12	
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	N/A	N/A	N/A	N/A
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	N/A	N/A	N/A	N/A
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.	5.6.1.(b	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	N/A	N/A	N/A	N/A
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	N/A	N/A	N/A	N/A
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	N/A	N/A	N/A	N/A
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjuta	N/A	N/A	N/A	N/A
6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A	N/A	N/A
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	N/A	N/A	N/A	N/A
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	N/A	N/A	N/A	N/A
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	N/A	N/A	N/A	N/A
6,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang				

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan		terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.				
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	N/A	N/A	N/A	N/A
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan	6.3.2.(a)	Kualitas air danau	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6,2	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	N/A	N/A	N/A	N/A
6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	N/A	N/A	N/A	N/A
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	N/A	N/A	N/A	N/A
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	N/A	N/A	N/A	N/A
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	tepat.		tangkapan sungai dan danau.				
6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	N/A	N/A	N/A	N/A
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	N/A	N/A	N/A	N/A
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	N/A	N/A	N/A	N/A
7,1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya		pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.				
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	N/A	N/A	N/A	N/A
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	terhadap jasa keuangan.						
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan lakilaki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	N/A	N/A	N/A	N/A
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	N/A	N/A	N/A	N/A
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	N/A	N/A	N/A	N/A
8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	N/A	N/A	N/A	N/A
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	N/A	N/A	N/A	N/A
8,10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	N/A	N/A	N/A	N/A
8,10	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	N/A	N/A	N/A	N/A
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	N/A	N/A	N/A	N/A
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang						
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	N/A	N/A	N/A	N/A
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	N/A	N/A	N/A	N/A
9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	N/A	N/A	N/A	N/A
9,5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
9,c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	N/A	N/A	N/A	N/A
9,c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	N/A	N/A	N/A	N/A
9,c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	N/A	N/A	N/A	N/A
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	N/A	N/A	N/A	N/A
10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	N/A	N/A	N/A	N/A
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasiona	N/A	N/A	N/A	N/A
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	N/A	N/A	N/A	N/A
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	N/A	N/A	N/A	N/A
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1.(b	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	N/A	N/A	N/A	N/A
11,3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	11.3.2.(b	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A
11,4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
			kecil.				
1,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A
1,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	N/A	N/A	N/A	N/A
1,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	N/A	N/A	N/A	N/A
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	N/A	N/A	N/A	N/A
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b) J	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	N/A	N/A	N/A	N/A
11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	N/A	N/A	N/A	N/A
11,b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	N/A	N/A	N/A	N/A
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan						
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	N/A	N/A	N/A	N/A
12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	N/A	N/A	N/A	N/A
12,7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	N/A	N/A	N/A	N/A
12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	N/A	N/A	N/A	N/A
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	N/A	N/A	N/A	N/A
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A
15,1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
15,3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	N/A	N/A	N/A	N/A
15,6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	N/A	N/A	N/A	N/A
15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	N/A	N/A	N/A	N/A
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
16,1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	N/A	N/A	N/A	N/A
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	N/A	N/A	N/A	N/A
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A
16,5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/A	N/A	N/A	N/A
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	N/A	N/A	N/A	N/A
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	N/A	N/A	N/A	N/A
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
			dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	N/A	N/A	N/A	N/A
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	N/A	N/A	N/A	N/A
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	N/A	N/A	N/A	N/A
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	N/A	N/A	N/A	N/A
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	N/A	N/A	N/A	N/A
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan	N/A	N/A	N/A	N/A
16,b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	N/A	N/A	N/A	N/A
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	N/A	N/A	N/A	N/A
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	N/A	N/A	N/A	N/A
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	N/A	N/A	N/A	N/A
17,6	Meningkatkan kerjasama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar *(fixed broadband)* di Perkotaan dan di Perdesaan.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global						
17,6	Meningkatkan kerjasama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile *broadband*	N/A	N/A	N/A	N/A
17,6	Meningkatkan kerjasama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile *broadband*	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
17,8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	N/A	N/A	N/A	N/A
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	N/A	N/A	N/A	N/A
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	N/A	N/A	N/A	N/A
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	N/A	N/A	N/A	N/A
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		utama.				
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	N/A	N/A	N/A	N/A
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	N/A	N/A	N/A	N/A

TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	N/A	N/A	N/A	N/A
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	N/A	N/A	N/A	N/A
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	N/A	N/A	N/A	N/A

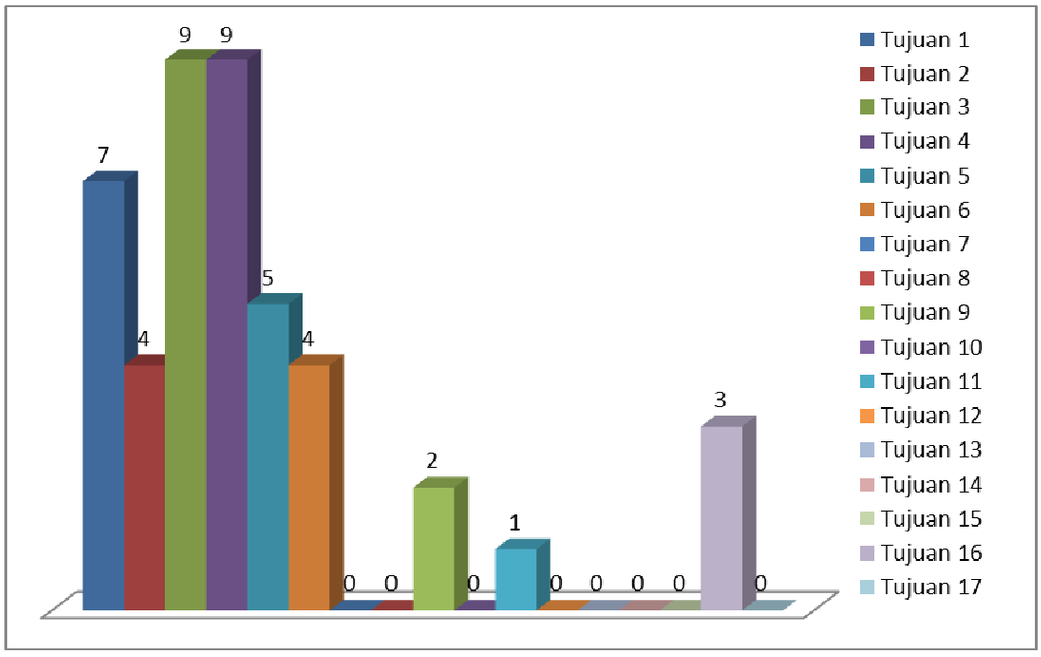
Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan *(cross cutting)*, terdapat 217 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Lampung Tengah. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda.

Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan yang masuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebanyak 33 indikator atau 15,94% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Capaian paling tinggi adalah tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia dan tujuan 4 yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS).

Gambar 2.24. Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)



Sumber data: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

Tujuan 1	:	Menghapus segala bentuk kemiskinan
Tujuan 2	:	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
Tujuan 3	:	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejah-teraan penduduk di segala usia
Tujuan 4	:	Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
Tujuan 5	:	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
Tujuan 6	:	Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
Tujuan 7	:	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
Tujuan 8	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Tujuan 9	:	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
Tujuan 10	:	Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
Tujuan 11	:	Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
Tujuan 12	:	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
Tujuan 13	:	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
Tujuan 14	:	Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
Tujuan 15	:	Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
Tujuan 16	:	Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
Tujuan 17	:	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemi-traan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.137
Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 1: Menghapus segala bentuk kemiskinan	1. Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap 2. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

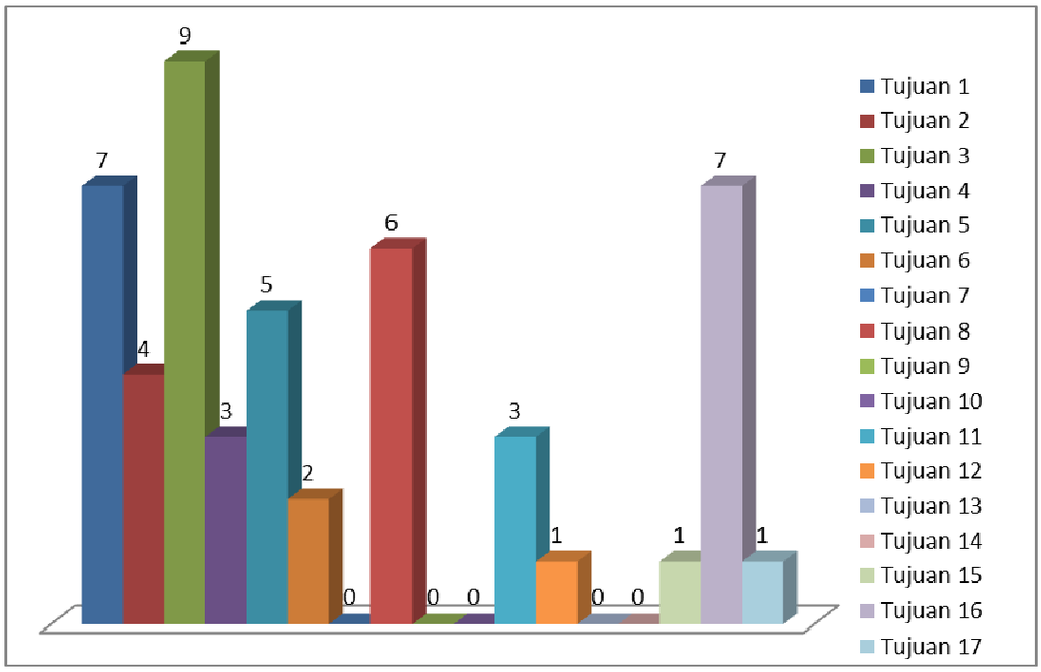
Tujuan	Indikator TPB
	layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 5. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan 6. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di SD / MI / sederajat 7. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di SMP / MTs / sederajat
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	1. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 2. Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita 3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan 4. Tersalurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. 3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Prevalensi HIV pada populasi dewasa 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria. 6. Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati 7. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 8. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin. 9. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / sederajat. 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs / sederajat. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / sederajat. 4. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 6. Persentase APK SMA / SMK / MA / sederajat. 7. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun 8. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/MI/sederajat 9. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMP/MTS/sederajat
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / sederajat. 4. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD

Tujuan	Indikator TPB
	Provinsi/Kabupaten/Kota). 5. Proporsi perempuan yang berada diposisi managerial.
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 3. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 4. Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	1. Kondisi Mantap jalan Kabupaten 2. Panjang Jalur Kereta Api
Tujuan 11: Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	• Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua	1. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 3. Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 51 Indikator atau 23,5% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Capaian indikator hanya terjadi pada tujuan. Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB).

Gambar 2.25 Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)



Sumber data: Hasil Analisis, 2021

Keterangan :

Tujuan 1 : Menghapus segala bentuk kemiskinan

Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelan-jutan

Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kese-jahteraan penduduk di segala usia

Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua

Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan

Tujuan 7 : Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern

Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Tujuan 9 : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan indus-trialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi

Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara

Tujuan 11 : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Tujuan 13 : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

Tujuan 14 : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi

Tujuan 16 : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua

Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemi-traan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.138
Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 1: Menghapus segala bentuk kemiskinan	1. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 2. Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 4. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat 5. Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. 6. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di SMA / MA / sederajat 7. Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	1. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta 3. Prevalensi anemia pada ibu hamil 4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	1. Angka Kematian Ibu (AKI). 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

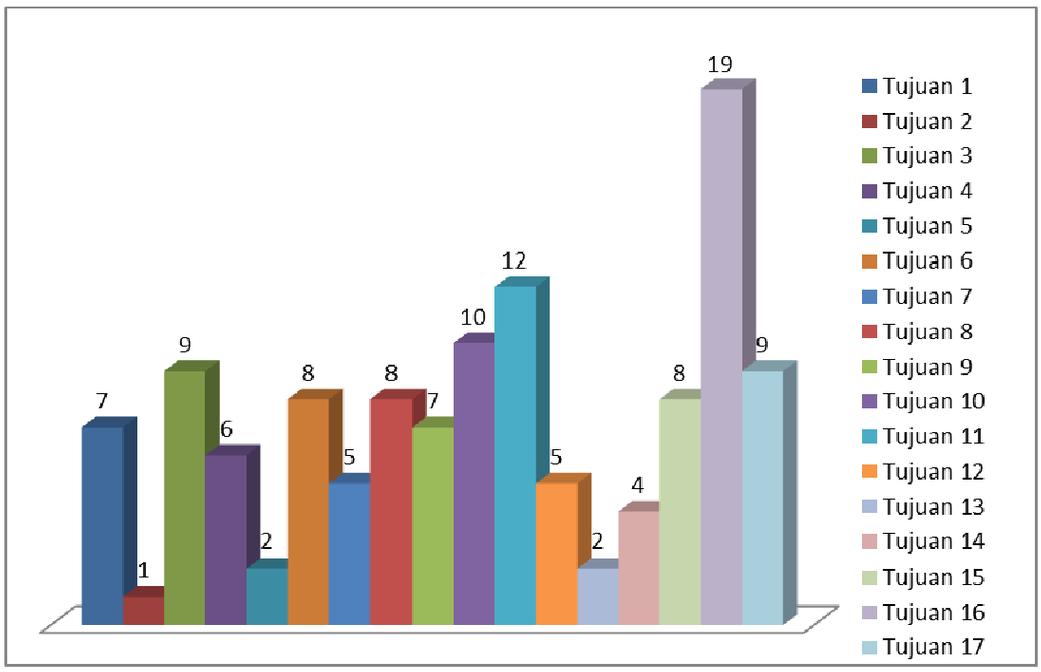
Tujuan	Indikator TPB
	4. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 5. Prevalensi tekanan darah tinggi. 6. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun 7. Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 8. Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). 9. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	1. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 2. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 3. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMA/SMK/ sederajat
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional 2. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan 3. Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertitility Rate/ASFR). 4. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 5. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	1. Jumlah desa/ kelurahan yang open defection free (ODF) 2. Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. PDRB per kapita 2. Laju pertumbuhan PDRB perkapita 3. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB Riil 4. Tingkat pengangguran terbuka 5. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 6. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara	1. Jumlah Desa Tertinggal 2. Jumlah Desa Mandiri
Tujuan 11: Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1. Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 2. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 3. Tercapainya pengurangan resiko banjir yang merugikan masyarakat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	• Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Tujuan 15: Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi	• Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua	1. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir. 2. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir 3. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. 4. Proporsi korban kekerasandalam 12 bulan terakhir yang melapor kepada polisi. 5. Proporsi aturan hukum dan undang-undang terhadap masyarakat keseluruhan 6. Jumlah Sosialisasi Aturan Hukum Partai Politik dan Ormas terhadap konponen masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 7. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	• Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 122 indikator atau 56,2% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Hampir setiap tujuan terdapat indikator yang tidak ada/belum ada datanya, kecuali pada tujuan 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang yang tidak ada/belum ada data (NA).

Gambar 2.26 Target TPB yang Tidak ada/belum ada Data (NA)



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan :

Tujuan 1	:	Menghapus segala bentuk kemiskinan
Tujuan 2	:	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
Tujuan 3	:	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
Tujuan 4	:	Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
Tujuan 5	:	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
Tujuan 6	:	Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
Tujuan 7	:	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
Tujuan 8	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Tujuan 9	:	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
Tujuan 10	:	Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
Tujuan 11	:	Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
Tujuan 12	:	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Tujuan 13 : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

Tujuan 14 : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi

Tujuan 16 : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua

Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.139
Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 1: Menghapus segala bentuk kemiskinan	1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenaga kerjaan 2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN 3. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 5. Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi 6. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 7. Dokumen strategi pengurangan resiko bencana tingkat daera
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	• Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	1. Angka kematian neonatal (AKN) per1000 kelahiran hidup 2. Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B 3. Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%. 4. Jumlah penyalahgunaan Narkotika dan penggunaan alkohol yang merugikan yang mengakses layanan rehabilitasi. 5. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. 6. Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu 7. Total Fertility Rate (TFR).

Tujuan	Indikator TPB
	8. Unmet need pelayanan kesehatan. 9. Persentase merokok pada penduduk ≥15 tahun
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	1. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 2. Persentase APK Perguruan Tinggi (PT). 3. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun. 4. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi 5. Proporsi sekolah dengan akses ke listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi, fasilitas cuci tangan bagi semua 6. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA,SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 2. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	1. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 2. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman. 3. Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik. 4. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 5. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. 6. Insentif penghematan air pertanian / perkebunan dan industri. 7. Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang di internalisasike dalam RTRW 8. Jumlah jaringan sumberdaya air yang dibentuk
Tujuan 7: Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern	1. Bauran energi terbarukan 2. Intensitas energi primer 3. Konsumsi listrik perkapita 4. Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga 5. Rasio penggunaan gas rumah tangga
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Persentase tenaga kerja formal 2. Persentase tenaga kerja in formal sektor pertanian 3. Persentase akses layanan keuangan formal UMKM 4. Upah rata-rata per jam kerja 5. Tingkat setengah pengangguran 6. Persentase usia muda (15-24) yang sedang sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) 7. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk bentuk pekerjaan terburuk

Tujuan	Indikator TPB
	untuk anak) 8. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	1. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur 2. Proporsi nilai tambah sektor industri manufactur terhadap PDB perkapita 3. Persentase perubahan emisi CO2/emisi gas rumah kaca 4. Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri 5. Proporsi penduduk yang terlayani mobil broadband 6. Proporsi individu yang menggunakan telp genggam 7. Proporsi individu yang menggunakan internet
Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara	1. Koefisien Gini 2. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur 3. Jumlah Daerah Tertinggal yang terentaskan 4. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 5. Indeks Kebebasan Sipil 6. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 7. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat 8. Proporsi peserta program jaminan bidang ketenaga kerjaan 9. Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan 10. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi
Tujuan 11: Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 2. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 3. Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. 4. Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama 5. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 6. Jumlah institusi (swasta, ormas,organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. 7. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. 8. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI). 9. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. 10. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green di kawasan perkotaan metropolitan. 11. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 12. Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB)

Tujuan	Indikator TPB
	tingkat daerah
Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1. Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang 2. Jumlah peserta PROER yang mencapai minimal rangking biru 3. Jumlah limbah B3 terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) 4. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 5. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
Tujuan 13: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 2. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Tujuan 14: Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. 2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. 3. Jumlah luas kawasan konservasi perairan. 4. Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).
Tujuan 15: Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi	1. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. 2. Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. 3. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 4. Jumlah kesatuan pengelolaan hutan 5. Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas. 6. Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. 7. Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati. 8. Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020
Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua	1. Proporsipenduduk yang merasa aman berjalan sendirian diarea tempat tinggalnya 2. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 thn yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir 3. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. 4. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum. 5. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 6. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Tujuan	Indikator TPB
	(WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 7. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota). 8. Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan. 9. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 10. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota). 11. Indeks Lembaga Demokrasi. 12. Indeks Kebebasan Sipil. 13. Indeks Hak-hak Politik. 14. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 15. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 16. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 17. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. 18. Sebanyak 800 ribu penduduk yang tersebar di 23 kecamatan berhak mendapatkan akses pelayanan yang mudah 19. Semakin banyaknya masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi/internet untuk menjalankan aktifitasnya
Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	1. Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota 2. Persentase penetrasi koneksi akses tetap (fixed broadband) di Perkotaan (20Mbps) dan di Perdesaan (10Mbps) 3. Persentase penetrasi akses bergerak pitalebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) di Perkotaan dan di Perdesaan 4. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet 5. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 6. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), transaksi proyek KPBU dan dukungan pemerintah. 7. Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian / Lembaga. 8. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. 9. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Secara keseluruhan menurut kategori dan jumlah total indikator yang digunakan dalam analisis capaian tujuan TPB di Kabupaten Lampung Tengah adalah dalam tabel berikut.

Tabel 2.140
Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Tercapai	Belum Mencapai Target	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	N/A	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	7	7	14	0	7	21
2	Tanpa Kelaparan	4	4	5	0	1	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	9	9	18	0	9	27
4	Pendidikan Berkualitas	9	3	9	0	6	18
5	Kesetaraan Gender	5	5	7	0	2	12
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	2	10	0	8	14
7	Menjamin Akses Energi	0	0	5	0	5	5
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	0	6	14	0	8	14
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	2	0	7	0	7	9
10	Mengurangi Kesenjangan	0	2	12	0	10	12
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	1	3	15	0	12	16
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	0	1	6	0	5	6
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	0	2	0	2	2
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera	0	0	4	0	4	4
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	0	1	9	0	8	9
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	3	7	26	0	19	29
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0	1	10	0	9	10
	TOTAL	**44**	**51**	**173**	**0**	**122**	**217**

2.7 Pencapaian Kinerja RPJMD Periode 2016-2020

Secara substansi, bagian ini menjelaskan capaian kinerja atas pelaksanaan RPJMD periode 2016-2020 sesuai dengan Sasaran Pembangunan Daerah, serta capaian kerja sama yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.7.1 Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2016-2020

Tabel 2.141

Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Tahun 2016-2020

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Target RPJMD Hingga 2020 (%)
Misi Kesatu : Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.	1. Terwujudnya kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat.	1. Menurunnya rasio angka kriminalitas	1.Rasio Angka kriminalitas	5,04	5,32	4,39	4,25	4,19	106,47
		2. Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	2. Jumlah Kasus Konflik Sosial	0	0	0	0	0	100
	2. Terwujudnya kelestarian niali-nilai budaya daerah	1. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	1. Prosentase Situs budaya yang lestari	65	70	70	75	80	100
			2. Prosentase Sanggar sani budaya yang aktif	70	75	80	80	85	100
Misi Kedua : Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.	1. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	1. Meningkatkan konekvitas wilayah secara terpadu	1. Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	58,16	51,92	61,21	61,91	56,4	98,09
			2. Prosentase pelayanan angkutan jalan	53,28	54,64	56	56	60	105,08
		2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	1. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	26,56	28,68	31,15	37,08	80,88	98,07

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Target RPJMD Hingga 2020 (%)
		3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,17	93,42	93,64	93,89	94,35	107,83
			2. Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	1,48	4,43	6,64	8,85	22,78	455,66
			3. Persentase penduduk berakses air bersih	84.83	86,15	86,15	88,12	89,5	101,70
			4. Persentase rumah tinggal bersanitasi	94,45	94,55	94,61	94,30	94,30	112,26
		4. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	71,4	74,9	78,7	82,6	86,76	115,68
Misi Ketiga : Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan	1. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	1. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	4,23	4	3,24	1,09	-1,03	-20,44
			2. Pertumbuhan ekonomi sektor industri	5,89	5,43	5,59	8,15	-5,04	-79,37
			3. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	2,02	3,97	5,58	6,95	-3,82	-71,94
			4. Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	10,61	7,63	8,92	9,87	18,04	300,67

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Target RPJMD Hingga 2020 (%)
			5. Prosentase peningkatan volume Usaha UMKM/UKM	8,87	9.30	12,42	18,03	11,14	123,78
		2. Meningkatnya kunjungan wisatawan	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	10	20	21,11	77,63	2,88	4,38
			Rata-rata lama tinggal	1	1	1	1	1	50,00
		3. Meningkatnya nilai investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	6	8	8	9	9	90,00
		4.Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,27	12,9	12,62	12,03	11,82	94,92
		5. Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka		3,08	2,52	2,62	4,22	54,74
		6. Meningkatnya desa maju	Persentase peningkatan jumlah desa dengan kategori maju	3,99	7,64	7,64	17,94	27,57	415,28
		7. Meningkatnya pelayanan kepada calon transmigran	Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi ke luar Lampung Tengah	20 KK	10 KK	10 KK	13 KK	0	0,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Target RPJMD Hingga 2020 (%)
		8. Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan pangan	389,99	378,87	408,20	368,17	315,67	54,11
Misi Keempat : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.	1. Meningkatkan kualitas hidup masyakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	7,37	7,38	7,51	7,57	7,58	90,78
			2. Lama harapan sekolah	12,21	12,6	12,9	12,91	12,92	105,38
			3. Nilai rata-rata ujian SD	73,35	75	75,5	76	76,5	100,00
			4. Nilai rata-rata ujian SMP	8,07	8,5	80,75	81	81,25	100,49
		2. Meningkatnya derajad Kesehatan Masayarakat	1. Usia Harapan Hidup	69,15	69,28	69,46	69,73	69,84	100,49
			2. Angka Kematian Bayi	3,91	2,73	4,94	3,63	4,3	52,33
			3. Angka Keematian Ibu Melahirkan	53,58	56	50,28	84,05	102,67	19,48
			4.Prevalensi Stunting	26,2	37	25,32	13,98	16,84	129,54
		3. Meningkatnya pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Angka laju pertumbuhan penduduk	0,92	0,88	0,8	0,73	0,73	91,25
		4. Meningkatnya partisipasi perempuan dan perlindungan	1. Indek Pambangunan Gender	89,23	89,23	89,57	89,88	89,4	99,91

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Target RPJMD Hingga 2020 (%)
		anak	2. Prosentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	116,28
Misi Kelima : Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.	1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1. Indek Kualitas Air	43,33	46,67	51,70	71,62	73,58	133,78
			2. Indek Kualitas Udara	70	74,9	81,24	86,35	84,35	109,55
			3. Indek Tutupan Lahan	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	86,09
	2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Ketaatan terhadap RTRW	26,6	26,6	26,6	26,6	73,4	91,75
		2. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	3. Prosentase desa siaga bencana	3,82	3,82	3,82	3,82	3,32	103,11
Misi Keenam : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.	1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Profesional	1. Meningkatnya akuntabiltas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil evaluasii atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah	CC	CC	B	B	B	90,74
			2. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Target RPJMD Hingga 2020 (%)
		2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1. Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,08	6,26	6,68	7,48	7,55	83,86
		3. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat	72,92	80,59	80,71	85,9	85,9	106,14

2.7.2 Capaian Kerjasama

Kerjasama dengan pihak lain (pihak ketiga) merupakan salah satu strategi untuk mempercepat proses pembangunan dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara maksimal sehingga sumber daya yang dimiliki dapat berdaya guna dan berhasl guna. Pemerintah Daerah dapat mengambil inisiatif strategi kerjasama dengan berbagai pihak dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan. Pemerintah Daerah meyakini bahwa semangat menggalang kerjasama daerah antar kabupaten/kota, kerjasama luar negeri, dan dengan pihak lain merupakan bentuk kesadaran bahwa potensi yang dimiliki masing-masing pihak bisa didayagunakan secara bersama sama akan memberikan hasil yang lebih baik, efektif, dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah menjelaskan bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan 24 kerja sama dengan berbagai lembaga dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai kapasitas masing-masing lembaga (tabel dibawah ini).

Tabel 2.142
Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015 – 2020

No.	NOMOR PKS	TANGGAL BERLAKU	DINAS/ INSTANSI	TUJUAN	KETERANGAN
1	1.a /PKS/B.a VII.02/2020 B.47 / KC-XIX/RTL/01/2020	2 Januari 2020 (12 Bulan)	DPKAD Lamteng – Bank BRI (Persero), TBK Cabang Bandar Jaya	Pengelolaan Rekening bagian Umum daerah (RKUD) dan Layanan Cash Managemen.	Ditandatangani Kepala BPKAD
2	1.b/ PKS/B.a.VII.02/2020 11/Kc-BDJ/PKS/ /2020	2 Januari 2020 Satu Tahun	DPKAD Lamteng – PT. Bank BPD Lampung Cabang Bandar Jaya	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ditandatangani Kepala BPKAD
3	1.C/PKS/Setda.I.04/2020 B.45 / KC.XIX/RTL/01/2020	2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	Pemkab Lamteng – Bank BRI (Persero), Bandar Jaya	Penyaluran Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada kampung dan Dana Kampung yang bersumber dari APBN dan APBD di Kabupaten Lampug Tengah Tahun anggaran 2020	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah

No.	NOMOR PKS	TANGGAL BERLAKU	DINAS/ INSTANSI	TUJUAN	KETERANGAN
4	1.d/PKS/B.a.VII.03/2020 917/REG.3/JLK/PR/HK/01/2020	31 Januari 2020 30 Januari 2022	BPPRD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah – PT. Pos Indonesia (Persero)	Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
5	02/MOU/Setda.I.03/2020 B-524/L.8.18/GPH/01/2020	5 Februari 2020 Satu Tahun	Bagian Hukum Kab. Lamteng – Kajari Lampung Tengah	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN pada wilayah Hukum Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
6	10/PKS/B.a.VII.02/2020 B.46/KC-XIX/PKS/LTD.2/2020	19 Februari 2020 24 BULAN	DPKAD Lamteng – PT. BRI Cabang Bandar Jaya	Jasa Kustudian	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
7	11/PKS/B.a.VII.02/2020		DPKAD Lamteng – BPJS Ketenagakerjaan	Bagi ASN Non PNS di Kabupaten Lampung Tengah.	Ditanda tangani Kepala BPKAD
8	12/NK/Setda.I.04/2020 01/TLJA/III-2020	10 Februari 2020	Pemkab Lamteng – PT. TAUHID LAMBANG JAYA ABADI	PERDAGANGAN	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
9	13/PKS/Setda.I.04/2020 02/TLJA/III-2020	23 Maret 2020 10 Bulan	Pemkab Lamteng – PT. TAUHID LAMBANG JAYA ABADI	Pembangunan Pasar Daerah Gaya Baru Kec. Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
10	14/NKB/B.aVII-01/B/2020 142/MOU/II.3-AU/F/2020	23 Maret 2020 s/d 4 tahun	BAPPEDA LT – Universitas Muhammadiyah Lampung.	Tridarma PT	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
11	15/MOU/Setda.I.04/2020	1 April 2020	Bagian Hukum Lamteng – Law Firm Tosa & Partner	Hukum	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
12	16/MOU/D.b.VI.15/2020 HK/201/6/17/PTD-STTD/2020	Mei 2020 s/d 5 tahun	Pemkab Lamteng – Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah melalui Tri Darma Perguruan tinggi	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
13	17/PKS/D.b.VI.15/2020 HK.201/6/18/PTD-STTD-2020	Mei 2020 s/d 5 Tahun	Pemkab Lamteng – Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	Pemenuhan Kebutuhan SDM dibidang Perhubungan Darat.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
14	18/PKS/D.a.VI.02/2020 47/KTR/XIII-07/0620	30 Juni 2020	Pemkab Lamteng – BPJS Kesehatan Cabang Metro	Kepesertaan Program jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemkab. Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
15	19/PKS/D.b.VI.15/2020 DIB/TAD/PKS/07/2020	Juni 2020 5 Tahun	Dinas Perhubungan	Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pemkab Lampung Tengah.	Ditandatangani Kadishub LT
16	20/PKS/D.a.VI.01/2020 DIB/TAD/PKS/07/2020	Juni 2020 4 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jenjang Strata 1	Ditandatangani Kadis Pendidikan

No.	NOMOR PKS	TANGGAL BERLAKU	DINAS/ INSTANSI	TUJUAN	KETERANGAN
				(SI) Bagi Putra Putri Asal Pemkab.LT di Universitas Gajah Mada.	dan Kebudayaan Kab.LT
17	489/PKS/B.a.VII.01/2020 1862/UN1/FEG/KIA/DL/2020	27 Maret 2020 8 Bulan	Bappeda Lamteng – FEB UGM	Penyusuann Grand Design Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Kepala BAPPEDA LT
18	100/67/Setda.I.04/2020 466.a/MTMO.18.02.AT.02.03/ VI/2020	3 Juli 2020 31 Desember 2020	BPKAD Lamteng – Kantor Pertanahan Kabupaten LT	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Sekda LT
19	21/PKS/D.b.VI.15/2020 MOU/14/08/2020	19 Agustus 2020 3 Tahun	Pemkab Lamteng – BPJS Ketenagakerjaan	Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui mekanisme Pelaksanaan Perpanjangan KEUR dan izin Trayek Angkutan.	Ditandatangani Kadis Perhubungan LT
20	21.b/ADD-PKS/B.a.VII.09/2020 B/KC.XIX/RTL/09/2020	1 September 2020	BPKAD Lamteng – PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya	Pengelolaan Rekening Kas umum Daerah Dan Layanan Cash Management.	Ditanda tangani Kepala BPKAD
21	PJ/HKM.00/26/0200/2020 454.a/B.a.VII.03/2020	18 september 2020 5 Tahun	BPPRD Lamteng – PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Ub.Metro	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemda Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
22	22/NK/D.a.VI.01/2020 MOU/16/10/2020	9 November 2020 2 Bulan.	Dikbud Lamteng – BPJS Ketenaga Kerjaan	Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Guru Honorer dan TKS Honorer di Dinas Dikbud Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab.LT
23	16/PR.07-PK/18023/KAB/XIX2020 442/2803/D.a.IV.02/XI /2020	12 November 2020 30 Desember 2020	KPU dan Dinkes	Rapid Test dan Swab Petugas PEMILU Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Kadis Kesehatan Kab. Lampung Tengah
24	586/2111/Da.VI.17/2020 225/BPRS-RJS/Dir/XII/2020	10 Desember 2020	Dinas Koperasi – BPRS Rajasa	Penyaluran Bantuan Stimulasi Penguatan Modal bagi pelaku Usaha Mikro terdampak Covid – 19 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	Ditandatangani Kadis Koperasi Kab. Lampung Tengah

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Pada Bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu (lima tahun terakhir) serta kerangka pendanaan proyeksi APBD lima tahun ke depan selama periode RPJMD Tahun 2021-2026.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang terdiri dari:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
   1) Hasil Pajak Daerah;
   2) Hasil Retribusi Daerah;
   3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   4) Lain-lain PAD yang Sah.

B. Dana Perimbangan, yaitu:
   1) Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
   2) Dana Alokasi Umum;
   3) Dana Alokasi Khusus;

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas:
   1) Pendapatan hibah;
   2) Dana bagi hasil pajak propinsi;
   3) Dana Penyesuaian/ Dana Transfer lainnya dari Pemerintah

Selama tahun 2015-2020, secara umum kinerja Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp 2.023.623.520.880,85 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 2.496.892.254.153,48 pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 5,12 % pertahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2016 hal ini sebabkan oleh dimulainya pengalokasiannya dana desa.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	2.048.023.262.304,00	2.023.623.520.880,85	98,81	-	-
2016	2.454.740.548.775,00	2.269.083.164.816,27	92,44	19,86	12,13
2017	2.450.724.735.038,00	2.349.373.634.771,12	95,86	0,16	3,54
2018	2.546.700.281.403,00	2.474.608.075.396,60	97,17	3,92	5,33
2019	2.635.337.294.964,43	2.588.849.568.438,37	98,23	3,48	4,62
2020	2.496.892.254.153,48	2.431.332.258.820,89	97,37	-5,25	-6,08

Sumber data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2015-2020 didominasi oleh sumber dana

perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 72,52 %, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 20,58 %, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 6,89 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Tabel 3.2
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Tahun						Rata-Rata Kontribusi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pendapatan Asli Daerah	5,75	8,33	6,26	6,68	7,48	7,40	6,61
2	Dana Perimbangan	68,08	78,53	73,32	73,24	69,42	66,87	72,52
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	26,17	13,14	20,43	20,07	23,10	25,73	20,58

Sumber data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 116.342.550.598,56 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 179.857.473.561,86 pada tahun 2020, dengan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan selama tahun 2015-2020 secara rata-rata baru mencapai 6,61 %, yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar.
2. Dana Perimbangan mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 1.377.672.256.118 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 1.625.918.929.774,00 pada tahun 2020, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,21%. Dana perimbangan merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2015-2020, dengan kontribusi rata-rata sebesar 71,90%. Komponen penyumbang terbesar terhadap Dana Perimbangan selama periode tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum .

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 529.608.714.164,29 pada tahun 2015 menjadi Rp 625.555.855.485,03 pada tahun 2020, dengan kontribusi pertahun rata-rata per tahunnya sebesar 21,49 %.

3.1.1.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan. Belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung
   - Belanja Pegawai
   - Belanja Bunga
   - Belanja Hibah
   - Belanja Bantuan Sosial
   - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   - Belanja Tidak Terduga
2) Belanja Langsung
   - Belanja Pegawai
   - Belanja Barang dan Jasa
   - Belanja Modal

Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Selama tahun 2015-2020, secara umum Belanja Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari Rp 1.898.882.243.080,57 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 2.470.642.148.631,00 pada tahun 2020. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2015-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 90,30%.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	2.180.635.488.247,43	1.898.882.243.080,57			
2016	2.656.908.882.645,00	2.274.041.706.308,00	85,59	21,84	19,76
2017	2.648.348.821.365,98	2.491.283.236.818,98	94,07	(0,32)	9,55
2018	2.600.914.765.683,00	2.388.867.281.594,57	91,85	(1,79)	(4,11)
2019	2.774.292.573.046,58	2.529.103.615.744,36	91,16	6,67	5,87
2020	2.684.007.356.287,16	2.470.642.148.631,00	92,05	(3,25)	(2,31)

Sumber data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2015-2020 didominasi untuk pemenuhan belanja tidak langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 64,45 %, sementara untuk belanja langsung sebesar 33,55 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja tidak langsung (terutama untuk aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS), dimana komposisi terbesar PNSD di Kabupaten Lampung Tengah merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatnya wajib.

Tabel 3.4
Kontribusi Komponen Realisasi Belanja

No	Uraian Belanja	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Tidak Langsung	67,20	63,37	58,73	61,52	62,55	73,32	64,45
2	Belanja Langsung	62,80	36,83	41.27	38,48	37,45	26,28	35,55

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 1.276.027.065.360,00 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 1.811.452.433.535,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh berpindahnya penggajian guru sekolah menengah ke pemerintah propinsi, serta adanya biaya Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2015. Tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2015-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 92,96%.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja Tidak Langsung	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	1.458.552.655.580,80	1.276.027.065.360,00	87,49	-	-
2016	1.709.428.409.001,00	1.440.949.069.379,00	84,29	17,20	12,92
2017	1.475.764.942.771,92	1.463.089.823.069,00	99,14	(13,67)	1,54
2018	1.532.375.227.242,00	1.469.643.931.275,86	95,91	3,84	0,45
2019	1.656.018.272.451,53	1.582.067.174.342,00	95,53	8,07	7,65
2020	1.898.366.005.529,63	1.811.452.433.535,00	95,42	14,63	14,50

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

- Belanja Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 622.855.177.720,57 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 659.189.715.096,00 pada tahun 2020. Tingkat realisasi Belanja Langsung selama tahun 2015-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 86,08%.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja Langsung	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	722.082.832.666,63	622.855.177.720,57	86,26	-	-
2016	947.480.473.644,00	833.092.636.929,00	87,93	31,21	33,75
2017	1.172.583.878.594,06	1.028.193.413.749,98	87,69	23,76	23,42
2018	1.068.539.538.441,00	919.223.350.318,71	86,03	(8,87)	(10,60)
2019	1.118.274.300.595,05	947.036.441.402.36	84,69	4,65	3,03
2020	785.641.350.757,53	659.189.715.096,00	83,90	(29,75)	(30,39)

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/ dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan).

Selama tahun 2015-2020, realisasi pembiayaan daerah cenderung berfluktuasi, tergantung dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 106.950.277.153,43; pada tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp 202.582.627.819,71; pada tahun 2017 turun menjadi sebesar Rp 197.624.086.327,98, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi sebesar Rp 54.214.484.280,12, tahun 2019 sebesar Rp 140.264.890.282,15, dan kemudian tahun 2020 sebesat Rp 187.115.105.613,55.

Tabel 3.7
Rata- Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016-2020
Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**2.023.624.159.312,85**	**2.269.083.164.816,27**	**2.349.373.634.771,12**	**2.474.608.045.396,60**	**2.588.849.568.438,37**	**2.431.332.258.820,89**	**3,36%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**116.343.189.031**	**137.871.550.591**	**147.048.201.164**	**165.414.795.486**	**193.634.175.310**	**179.857.473.562**	**9,10%**
1.1.1	Pajak Daerah	48.630.649.351	51.802.533.168	63.604.185.084	79.709.849.666	92.615.976.246	85.423.087.503	12,61%
1.1.2	Retribusi Daerah	6.351.980.544	4.687.317.315	4.845.199.293	6.643.364.163	10.498.043.912	9.646.781.059	8,65%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	6.325.665.768	6.431.338.694	5.425.023.296	6.524.251.287	6.523.066.078	7.231.134.960	2,39%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	55.034.893.367	74.950.361.414	73.173.793.491	72.537.330.369	83.997.089.074	77.556.470.039	6,82%
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.377.672.256.118**	**1.825.749.300.391**	**1.722.465.741.922**	**1.812.504.062.561**	**1.797.258.034.498**	**1.625.918.929.774**	**3,00%**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	48.346.377.118	49.904.392.912	56.056.783.412	51.129.440.962	39.624.261.681	33.545.484.116	-5,10%
1.2.2	Dana alokasi umum	1.220.616.169.000	1.341.242.293.000	1.317.680.979.000	1.323.730.688.000	1.378.175.214.000	1.248.686.762.000	0,38%
1.2.3	Dana alokasi khusus	108.709.710.000	434.602.614.479	348.727.979.510	437.643.933.599	379.458.558.817	343.686.683.658	36,03%
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**529.608.714.164**	**305.462.313.834**	**479.859.691.685**	**496.689.187.350**	**597.957.358.630**	**625.555.855.485**	**3,02%**
1.3.1	Hibah	242.714.750	1.147.641.785	886.018.875	128.288.640.000	143.726.782.695	153.056.649.757	10493%
1.3.2	Dana darurat							
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	529.365.999.414	304.314.672.049	478.973.672.810	368.400.547.350	454.230.575.935	472.499.205.728	-1,79%

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	**BELANJA**	**1.898.882.243.044,57**	**2.274.041.706.308**	**2.491.283.236.819**	**2.388.867.281.595**	**2.529.103.615.744**	**2.470.642.148.631**	**5,02%**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.276.027.065.324**	**1.440.949.069.379**	**1.463.089.823.069**	**1.469.643.931.276**	**1.582.067.174.342**	**1.811.452.433.535**	**6,99%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.111.086.296.766	1.158.978.551.112	1.031.213.985.489	1.026.135.089.790	1.068.166.509.979	1.179.969.542.945	1,03%
2.1.2	Belanja Bunga							
2.1.3	Belanja Subsidi							
2.1.4	Belanja Hibah	42.384.825.983,00	21.317.288.129	38.377.388.930	36.562.163.400	48.882.336.272	127.832.872.390	33,60%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial							
2.1.6	Belanja Bagi hasil	4.831.123.848,00	5.494.565.430	5.575.613.249	7.044.716.063	7.929.178.723	7.766.649.980	10,13%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	117.615.374.298,00	254.730.020.958	387.922.835.401	399.842.462.023	456.111.025.618	457.522.212.598	48,17%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	109.444.429,00	428.643.750	-	59.500.000	978.123.750	38.361.155.622	5825,13%
2.2	**Belanja Langsung**	**622.855.177.720,57**	**833.092.636.929**	**1.028.193.413.750**	**919.223.350.319**	**947.036.441.402**	**659.189.715.096**	**0,97%**
2.2.1	Belanja Pegawai	51.343.470.225,00	54.599.536.568	88.275.097.682	89.356.769.600	116.346.762.375		25,32%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	262.198.296.720	355.873.960.889	484.969.333.539	456.959.091.229	483.228.627.199	444.002.558.338	11,56%
2.2.3	Belanja Modal	309.313.410.776	422.619.139.472	454.948.982.529	372.907.489.490	347.461.051.828	215.187.156.758	-5,07%
3	**Pembiayaan**	**106.950.277.153,43**	**202.582.627.820**	**197.624.086.328**	**53.674.484.280**	**138.955.278.082**	**187.115.105.613**	**12%**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	142.459.272.173,43	231.732.692.020	197.624.086.328	55.174.484.280	139.955.278.082	200.010.842.976	7%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	35.508.995.020,00	29.150.064.200	-	1.500.000.000	1.000.000.000	12.895.737.363	-11%

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar *(current asset)* dan aset non lancar/ tetap *(long-term asset)*.

Jumlah Aset Lancar berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu dari sebesar Rp 341.366.270.537,26 pada tahun 2015; menurun menjadi Rp 275.002.622.278,52 pada tahun 2016; kemudian menurun menjadi sebesar Rp 166.138.941.763,97 pada tahun 2017; dan meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 257.771.462.026,63; tahun 2019 meningkat menjadi Rp 268.068.574.334,47, serta pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 218.421.366.774,95 Apabila dibandingkan antara jumlah asset lancer pada tahun 2015 dengan asset lancer pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 36,02 %.

Jumlah investasi jangka panjang cenderung meningkat yang semula sebesar Rp 20.668.787.830,92 tahun 2015; kemudian menurun pada tahun 2016 menjaadi sebesar Rp 20.549.069.406,18; kemudian meningkat menjadi Rp 21.590.802.020,00 pada tahun 2017; tahun 2018 menjadi Rp 24.114.573.922,00; tahun 2019 menjadi Rp 26.295.625.445,00, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 36.445.105.417,66. Apabila kita bandingkan antara jumlah investasi jangka panjang pada tahun 2015 dengan jumlah investasi jangka panjang pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 57,66 %.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Jumlah kewajiban Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 sebesar Rp 35.660.836.607,11; kemudian meningkat menjadi Rp 52.662.975.533,00 pada tahun 2016; kemudian cenderung mengalami penurunan menjadi Rp 38.958.184.852,00 pada tahun 2017; dan pada tahun 2018 menjadi 38.035.334.318,42; serta kembali menurun menjadi Rp 31.999.440.769,59 pada tahun 2019. Adapun pada tahun 2020 jumlah kewajiban menjadi Rp 48.258.607.854,53 Apabila dibandingkan antara jumlah kewajiban pada tahun 2015 dengan jumlah kewajiban pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 35,33 %.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Jumlah ekuitas dana Kabupaten Lampung Tengah yang semula sebesar Rp 2.302.721.057.776,31 pada tahun 2015 menjadi Rp 2.913.091.670.544,78 pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi Rp 3.017.232.498.767,99 pada tahun 2017; dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi Rp 3.215.837.533.868,00 kemudian meningkat menjadi Rp 3.235.504.653.479,49 pada tahun 2019 serta menjadi Rp 3.182.319.653.920,60 pada tahun 2020. Apabila dibandingkan antara Ekuitas pada tahun 2015 dengan ekuitas pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 38,20 %.

Tabel 3.8
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN
ASET							
ASET LANCAR							
Kas di Kas Daerah	223.977.168.694,65	184.751.290.123,92	46.260.883.756,06	133.393.096.132,10	181.142.323.755,23	134.820.060.390,15	-6,63%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.754.211,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	123.889.832,00	107.366.976,00	1.938,00	25.230.000,00	0,00	0	
Kas di Bendahara FKTP			8.096.236.629,00	6.945.620.338,00	8.968.504.972,00	1.643.506.221,29	
Kas Dana JKN	7.599.414.657,00	10.581.237.656,00				11.270.459.192	8,05%
Kas di BLUD	62.014.798,07	2.207.069.771,07	1.230.949.807,06	239.038.074,05	1.302.042.798,93	71.190.000	2,47%
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.432.874	
Kas di Bendahara BOS	0,00	552.813.727,00	126.412.150,00		8.597.971.450,00	-	
Kas di Kas Bank BRI			0,00	0,00	0,00	29.082.650.377	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.942.670.390	
Piutang Pendapatan	38.997.617.503,00	23.134.798.292,00	82.745.278.789,09	25.550.668.333,51	27.818.186.091,51	132.518.400	-16,61%
Piutang Lainnya	69.764.680.668,00	54.582.659.514,18	4.724.330.040,21	77.450.410.720,45	47.546.076.233,33	-32.294.697	-16,67%
Penyisihan Piutang	-28.434.917.357,46	-14.866.874.021,10	-17.595.446.967,16	-18.721.746.594,57	-22.400.963.615,25	45.938.214.486	-43,59%
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	78.240.000,00	0,00	0,00	-382.066.502	
Persediaan	29.276.401.742,00	13.952.260.239,45	40.472.055.621,71	32.883.045.023,09	15.094.432.648,72	16379612214	-7,34%
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,00	0,00					
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00					
JUMLAH ASET LANCAR	**341.366.270.537,26**	**275.002.622.278,52**	**166.138.941.763,97**	**257.771.462.026,63**	**268.068.574.334,47**	**218.421.366.775,94**	**-6%**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Jangka Panjang Non Permanen							
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Dana Bergulir	2.447.660.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen			0,00	0,00		0	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**2.447.660.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Investasi Jangka Panjang Permanen							
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.668.787.830,92	20.549.069.406,18	21.590.802.020,00	24.114.573.922,00	26.295.625.445,00	36.445.105.417,66	13%
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	**20.668.787.830,92**	**20.549.069.406,18**	**21.590.802.020,00**	**24.114.573.922,00**	**26.295.625.445,00**	**36.445.105.417,66**	**13%**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**23.116.448.593,92**	**20.549.069.406,18**	**21.590.802.020,00**	**24.114.573.922,00**	**26.295.625.445,00**	**36.445.105.417,66**	**10%**
ASET TETAP							
Tanah	166.984.384.191,57	164.842.814.391,57	166.084.879.391,57	168.049.814.391,57	165.695.363.534,57	237.447.572.614,57	7,03%
Peralatan dan Mesin	394.384.198.527,51	439.773.796.947,51	490.977.813.061,75	522.554.829.843,75	571.626.479.523,22	618.925.077.890,50	9,49%

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Gedung dan Bangunan	782.842.527.139,34	785.912.486.477,64	870.937.974.468,07	900.788.422.961,06	982.998.023.244,12	1.027.111.102.616,92	5,20%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.387.152.716.043,75	2.182.646.253.944,76	2.485.839.089.950,75	2.773.550.346.815,62	2.993.984.271.181,15	3.116.249.144.381,92	20,78%
Aset Tetap Lainnya	5.793.039.758,57	9.945.818.664,67	10.815.176.573,16	11.066.856.198,16	10.824.218.623,56	12.053.844.021,28	18,01%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.234.804.800,64	31.487.266.800,64	42.892.880.223,51	54.588.833.038,51	29.708.804.575,83	34.211.089.997,03	6,86%
Akumulasi Penyusutan	-906.634.463.695,16	-1.109.377.928.331,00	-1.332.195.293.562,94	-1.576.350.587.887,91	-1.898.647.721.858,91	-2.189.014.832.346,73	23,57%
JUMLAH ASET TETAP	**1.854.757.206.766,22**	**2.505.230.508.895,79**	**2.735.352.520.105,87**	**2.854.248.515.360,76**	**2.856.189.438.823,54**	**2.856.982.999.175,49**	**9,01%**
DANA CADANGAN							
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ASET LAINNYA							
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	9.922.690,00	9.422.690,00	6.144.080,00	0	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.395.703.000,00	2.231.828.000,00	2.231.828.000,00	2.602.556.000,00	2.602.556.000,00	2.782.556.000,00	2,69%
Aset Tidak Berwujud	27.574.458,33	105.789.442,00	136.425.500,00	230.475.500,00	925.530.796,00	685.916.873,00	397,92%
Aset Lain-lain	625.728.381.721,69	270.283.710.424,29	130.730.243.540,15	114.895.862.687,03	113.286.231.535,07	115.154.324.299,03	-13,60%
Penyisihan Aset Lain-Lain	-509.009.690.694,00	-107.648.882.369,00					
Tuntutan Ganti Rugi					129.993.235,00	105.993.235,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	**119.141.968.486,02**	**164.972.445.497,29**	**133.108.419.730,15**	**117.738.316.877,03**	**116.950.455.646,07**	**118.728.790.407,03**	**-0,06%**
JUMLAH ASET	**2.338.381.894.383,42**	**2.965.754.646.077,78**	**3.056.190.683.619,99**	**3.253.872.868.186,42**	**3.267.504.094.249,08**	**3.230.578.261.775,13**	**6,36%**
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	320.356.962,00	276.878.199,00	254.000.000,00	907.836.462,00	254.000.000,00	1.028.432.873,80	36,84%

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Pendapatan Diterima Dimuka	464.664.115,26	562.908.921,00	592.161.164,00	571.738.503,42	566.879.689,00	484.519.695,00	0,71%
Utang Beban	5.348.018.379,85	12.119.620.163,00	10.700.834.688,00	7.408.076.023,00	8.048.875.635,27	34.978.332.091,27	92,34%
Utang Jangka Pendek Lainnya	29.527.797.150,00	39.703.568.250,00	27.411.189.000,00	29.147.683.330,00	23.129.685.445,32	11.767.323.194,46	-10,02%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**35.660.836.607,11**	**52.662.975.533,00**	**38.958.184.852,00**	**38.035.334.318,42**	**31.999.440.769,59**	**48.258.607.854,53**	**5,89%**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**35.660.836.607,11**	**52.662.975.533,00**	**38.958.184.852,00**	**38.035.334.318,42**	**31.999.440.769,59**	**48.258.607.854,53**	**5,89%**
EKUITAS							
EKUITAS	**2.302.721.057.776,31**	**2.913.091.670.544,78**	**3.017.232.498.767,99**	**3.215.837.533.868,00**	**3.235.504.653.479,49**	**3.182.319.653.920,60**	**6,37%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.338.381.894.383,42**	**2.965.754.646.077,78**	**3.056.190.683.619,99**	**3.253.872.868.186,42**	**3.267.504.094.249,08**	**3.230.578.261.775,13**	**6,36%**

Sumber Data : Data diolah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembengunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2015- 2020

No	Tahun	Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase Belanja Aparatur	Prosentase Belanja Non Aparatur
1	2015	1.111.086.296.802,00	787.795.946.278,57	58,51	41,49
2	2016	1.158.978.551.112,00	1.144.590.952.346,00	50,31	49,69
3	2017	1.031.213.985.489,00	1.460.069.251.329,98	41,39	58,61
4	2018	1.026.135.089.790,00	1.364.232.191.804,57	42,93	57,07
5	2019	1.068.166.509.979,00	1.461.937.105.765,36	42,22	57,78
6	2020	1.202.667.036.569,00	1.457.388.732.978,61	45,21	54,79

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah 2020

Secara umum persentase belanja aparatur (gaji dan tunjangan aparatur) dari tahun 2015 sampai dengan 2020 cenderung mengalami penurunan yaitu dari 58,51% pada tahun 2015 menjadi 45,21% pada tahun 2020.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Tengah ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit riil.

Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	2.023.623.520.880,85	2.269.083.164.816,27	2.349.373.634.771,12	2.474.608.045.396,60	2.588.849.568.438,37	2.431.332.258.821,00
Dikurangi						
Belanja Daerah	1.898.882.243.081,00	2.274.041.706.308,00	2.491.283.236.819,00	2.388.867.281.595,00	2.529.103.615.744,00	2.469.976.394.420,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	29.527.797.150,00	-	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	12.895.737.363,00
Defisit/Surplus Riil	124.741.277.800,28	(-34.486.338.641,73)	(-141.909.602.047,86)	84.240.763.802,03	58.745.952.694,01	(-51.539.872.962,00)

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		231.696.131.019,71	197.624.086.327,98	55.714.484.280,12	139.955.278.082,15	200.010.842.976,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		36.561.000,00				
Penerimaan Pinjaman Daerah					1.309.612.200,00	
Penerimaan Pembiayaan		**231.732.692.019,71**	**197.624.086.327,98**	**55.714.484.280,12**	**141.264.890.282,15**	**200.010.842.976,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan		**197.246.353.377,98**	**55.714.484.280,12**	**139.955.248.082,15**	**200.010.842.976,16**	**148.470.970.014,00**

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Lampung Tengah

NO	URAIAN	2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPa	Rp	% dari SiLPa	Rp	% dari SiLPa	Rp	% dari SiLPa
1	Jumlah SiLPa	197.624.086.328		55.174.484.280		139.955.248.082		200.010.842.976	
2	Pelampauan penerimaan PAD	19.008.724.225	9,62%	- 142.753.941.248	-258,73%	1.159.596.212	0,83%	2.271.300.475	1,14%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	- 186.178.400.639	-94,21%	- 63.902.497.375	-115,82%	- 22.814.573.439	-16%	- 50.601.006.502	-25,30%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 18.487.707.545	-9,35%	105.305.338.356	190,86%	- 50.437.258.779	-36%	1.841.979.501	0,92%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	382.867.176.337	193,74%	157.065.584.547	284,67%	212.047.484.088	152%	245.188.957.302	122,59%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	377.732.950	0,19%						
7	Kegiatan lanjutan								
8	Penerimaan Pembiayaan lainnya	36.561.000	0,02%					1.309.612.200	0,65%

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendapatan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, meliputi:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dilaksanan melalui:
   a) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
   b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
   c) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
   d) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
   e) Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
   f) Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD *online*, e-PAD, Tapping Box serta kerjasama pembayaran on line dengan toko modern;
   g) Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
   h) Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
   i) Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
   j) Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah *(tax clearance)* yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Lampung Tengah'
   k) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal KonfirmasiStatus Wajib Pajak (KSWP);

l) Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.

(2) Dana Perimbangan, dilaksanakan melalui:
   a) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah
   b) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah
   c) Penyiapan data base yang akurat sesuai dengan ketentuan dalam kebijkan usulan DAK.

(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dilaksanakan melalui:
   a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah propinsi dalam upaya peningkatan bagi hasil pajak;
   b) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pemerintah pusat untuk mendapatkan dana hibah.

3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat;
5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kampung/ Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
8. Menyesuaikan Belanja pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;

3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pengeloaan pembiaayan daerah meliputi:

1) Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh melalui kebijakan:
   a) Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA)
   b) Pencairan Dana Cadangan;
   c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
   g) peraturan perundang-undangan.
2) Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh melalui kebijakan:
   a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
   b) Penyertaan Modal Daerah;
   c) Pembentukan Dana Cadangan;
   d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau;
   e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.13
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2021-2026
Kabupaten Lampung Tengah

Kode	URAIAN	PERTUMBUHAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**							
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**192.843.139.245**	**204.413.727.600**	**216.678.551.256**	**229.679.264.331**	**243.460.020.191**	**258.067.621.402**
4.1.01	Pajak Daerah	6%	87.961.730.200	93.239.434.012	98.833.800.053	104.763.828.056	111.049.657.739	117.712.637.204
4.1.02	Retribusi Daerah	6%	9.382.000.000	9.944.920.000	10.541.615.200	11.174.112.112	11.844.558.839	12.555.232.369
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6%	7.344.035.423	7.784.677.548	8.251.758.201	8.746.863.693	9.271.675.515	9.827.976.046
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6%	88.155.373.622	93.444.696.039	99.051.377.802	104.994.460.470	111.294.128.098	117.971.775.784
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**		**2.153.154.321.000**	**2.199.667.407.420**	**2.247.283.255.568**	**2.296.032.545.680**	**2.345.947.002.843**	**2.397.059.439.463**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2%	2.038.154.321.000	2.078.917.407.420	2.120.495.755.568	2.162.905.670.680	2.206.163.784.093	2.250.287.059.775
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5%	115.000.000.000	120.750.000.000	126.787.500.000	133.126.875.000	139.783.218.750	146.772.379.688
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**218.210.099.940**	**222.574.301.939**	**227.025.787.978**	**231.566.303.737**	**236.197.629.812**	**240.921.582.408**

Kode	URAIAN	PERTUMBUHAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.3.01	Pendapatan Hibah	2%	29.018.028.490	29.598.389.060	30.190.356.841	30.794.163.978	31.410.047.257	32.038.248.203
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2%	189.192.071.450	192.975.912.879	196.835.431.137	200.772.139.759	204.787.582.554	208.883.334.206
	Jumlah Pendapatan		**2.564.207.560.185**	**2.626.655.436.959**	**2.690.987.594.802**	**2.757.278.113.748**	**2.825.604.652.846**	**2.896.048.643.273**
5	**BELANJA**							
5,1	**BELANJA OPERASI**	2%	**1.868.108.744.104**	**1.881.417.578.254,70**	**1.919.045.929.819,79**	**1.957.426.848.416,19**	**1.996.575.385.384,51**	**2.036.506.893.092,20**
5.1.01	Belanja Pegawai	2%	1.202.667.036.569	1.202.667.036.569,00	1.226.720.377.300,38	1.251.254.784.846,39	1.276.279.880.543,32	1.301.805.478.154,18
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2%	559.889.476.760	571.087.266.295,20	582.509.011.621,10	594.159.191.853,53	606.042.375.690,60	618.163.223.204,41
5.1.04	Belanja Subsidi	2%	544.475.000	555.364.500,00	566.471.790,00	577.801.225,80	589.357.250,32	601.144.395,32
5.1.05	Belanja Hibah	2%	104.965.755.775	107.065.070.890,50	109.206.372.308,31	111.390.499.754,48	113.618.309.749,57	115.890.675.944,56
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2%	42.000.000	42.840.000,00	43.696.800,00	44.570.736,00	45.462.150,72	46.371.393,73
5,2	**BELANJA MODAL**		**282.968.969.861**	**297.104.650.054,05**	**311.946.858.890,75**	**327.530.917.695,97**	**343.893.913.758,66**	**361.074.788.628,05**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5%	2.841.262.000	2.983.325.100,00	3.132.491.355,00	3.289.115.922,75	3.453.571.718,89	3.626.250.304,83
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5%	71.407.288.985	74.977.653.434,25	78.726.536.105,96	82.662.862.911,26	86.796.006.056,82	91.135.806.359,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5%	30.802.782.132	32.342.921.238,60	33.960.067.300,53	35.658.070.665,56	37.440.974.198,83	39.313.022.908,78
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5%	177.492.026.744	186.366.628.081,20	195.684.959.485,26	205.469.207.459,52	215.742.667.832,50	226.529.801.224,12
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2%	425.610.000	434.122.200,00	442.804.644,00	451.660.736,88	460.693.951,62	469.907.830,65

Kode	URAIAN	PERTUMBUHAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**		**30.000.000.000**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		30.000.000.000	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
5,4	**BELANJA TRANSFER**		**466.082.318.220**	**476.996.434.131,00**	**488.208.455.837,55**	**499.728.322.629,43**	**511.566.371.640,90**	**523.733.355.760,54**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5%	9.734.373.020	10.221.091.671,00	10.732.146.254,55	11.268.753.567,28	11.832.191.245,64	12.423.800.807,92
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2%	456.347.945.200	466.775.342.460,00	477.476.309.583,00	488.459.569.062,15	499.734.180.395,26	511.309.554.952,62
	Jumlah Belanja		**2.647.160.032.185**	**2.685.518.662.439,75**	**2.749.201.244.548,10**	**2.814.686.088.741,59**	**2.882.035.670.784,07**	**2.951.315.037.480,79**
	Total Surplus/(Defisit)		**(82.952.472.000)**	(58.863.225.481,25)	(58.213.649.746,44)	(57.407.974.993,67)	(56.431.017.937,96)	(55.266.394.207,62)
6	**PEMBIAYAAN**							
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**		**82.952.472.000**	**103.879.088.951,25**	**104.074.607.576,44**	**101.239.501.160,67**	**98.206.000.349,96**	**80.766.737.804,62**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		82.952.472.000	103.879.088.951,25	104.074.607.576,44	101.239.501.160,67	98.206.000.349,96	80.766.737.804,62
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**82.952.472.000**					
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		**0**	**45.015.863.470**	**45.860.957.830**	**43.831.526.167**	**41.774.982.412**	**25.500.343.597**
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			40.015.863.470	40.860.957.830	38.831.526.167	36.774.982.412	20.500.343.597
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto		**82.952.472.000**	58.863.225.481	58.213.649.746	57.407.974.994	56.431.017.938	55.266.394.208
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		-	-	-	-	-	-

Kode	URAIAN	PERTUMBUHAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TOTAL APBD		**2.647.160.032.185**	**2.730.534.525.909,75**	**2.795.062.202.378,10**	**2.858.517.614.908,59**	**2.923.810.653.196,07**	**2.976.815.381.077,79**

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah setiap tahunnya diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 5%, sehingga dengan asumsi peningkatan tersebut, maka pendanaan Pembangunan daerah 5 tahun Kedepan yaitu tahun 202012026 hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah, yaitu:

1. Proyeksi tahun 2021 sebesar Rp 2.564.207.560.185,00-.
2. Proyeksi tahun 2022 sebesar Rp 2.624.727.005.566,00-.
3. Proyeksi tahun 2023 sebesar Rp 2.686.918.604.564,00-.
4. Proyeksi tahun 2024 sebesar Rp 2.750.838.888.485,00-.
5. Proyeksi tahun 2025 sebesar Rp 2.816.546.673.677,00-.
6. Proyeksi tahun 2026 sebesar Rp 2.884.103.164.944,00-.

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja wajib dan mengikat, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3.14
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

URAIAN	PROYEKSI (Rp milyar)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	2.564.207.560.185,00	2.624.727.005.566,00	2.686.918.604.564,00	2.750.838.888.485,00	2.816.546.673.677,00	2.884.103.164.944,00
Penerimaan Pembiayaan	82.952.472.000,00	65.791.656.873,70	67.282.639.984,51	68.847.200.256,20	70.488.997.106,92	72.211.872.536,94
TOTAL PENERIMAAN	2.647.160.032.185,00	2.690.518.662.439,75	2.754.201.244.548,10	2.819.686.088.741,59	2.887.035.670.784,07	2.956.315.037.480,79
DIKURANGI						
Belanja Wajib dan mengikat	1.668.749.354.789,00	1.679.663.470.700,00	1.714.928.833.138,00	1.750.983.107.476,00	1.787.846.252.184,00	1.825.538.833.915,00
Pengeluaran Pembiayaan	0	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	978.410.677.396,00	1.005.855.191.740	1.034.272.411.411,00	1.063.702.981.265,00	1.094.189.418.600,00	1.125.776.203.566,00

Sumber data: Data diolah

Jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dalam membiayai:

a. Rencana Alokasi Prioritas I, yakni berkaitan dengan Tema atau Program Unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagai mana diamanatkan didalam RPJMD, dan amanat kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan 20% dan Kesehatan 10%, penanggulangan Kemiskinan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar. Selain itu program prioritas I ini berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi – misi Daerah serta diprioritaskan pada belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Rencana Alokasi Prioritas II, yakni berkaitan dengan program unggulan ditingkat Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing Segmentasi Masyarakat yang dilayani, sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.
c. Rencana alokasi prioritas III, yakni dialokasikan untuk belanja-belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer seperti belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan, serta belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa. Pengalokasian pada prioritas III mendahulukan pemenuhan Dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Tabel 3.15
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	978.410.677.396,00	1.005.855.191.740	1.034.272.411.411,00	1.063.702.981.265,00	1.094.189.418.600,00	1.125.776.203.566,00
2	Prioritas I (Standar Pelayanan Minimal)	489.205.338.698	502.927.595.870	517.136.205.706	531.851.490.633	547.094.709.300	562.888.101.783
3	Prioritas II	293.523.203.219	301.756.557.522	310.281.723.423	319.110.894.380	328.256.825.580	337.732.861.070
4	Prioritas III	195.682.135.479	201.171.038.348	206.854.482.282	212.740.596.253	218.837.883.720	225.155.240.713

BAB IV
PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab 2 yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.1.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Belum tercapainya program wajib belajar 12 tahun (82,38%);
2) Rendahnya rata-rata lama sekolah (7,57%);
3) Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan;
4) Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
5) Masih kurangnya partisipasi Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan anak berkebutuhan khusus;

6) Belum semua SD terpenuhinya persyaratan Akreditasi (3,4 persen) dan Sekolah Menengah Pertama (4,9 persen).

2. Kesehatan

Permasalahan dibidang urusan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih rendahnya aksesibiltas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya distribusi ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas di setiap fasilitas layanan kesehatan;
2) Masih rendahnya puskesmas dengan jumlah nakes yang sesuai standar;
3) Angka kematian ibu dan anak yang relatif masih tinggi;
4) Masih Rendahnya perilaku hidup sehat di masyarakat;
5) Kasus kematian ibu dan kematian bayi relatif masih tinggi, Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor-faktor lainnya;
6) Masalah gizi balita yang masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah gizi buruk dan gizi kurang, stunting (pendek) merupakan masalah banyak terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan bergizi, kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat;
7) Tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, Tb, Malaria dll);
8) Tingginya angka kejadian penyakit tidak menular (PTM) terutama hiprertensi, Diabetes, jantung, dan paru;
9) Prosentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan yang masih rendah;
10) Akses dan mutu layanan kesehatan yang masih rendah (Ketersedian dan Akreditasi Fasilitas kesehatan).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

1) Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap;
2) Belum optimalnya kondisi jaringan irigasi;
3) Belum optimalnya penyediaan air minum bagi masyarakat;
4) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan kawasan kumuh;
5) Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
6) Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
8) Masih belum optimalnya ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah;

9) Masih belum optimalnya infrastruktur daerah;
10) Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian masyarakat.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pada bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

1) Belum optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni;
2) Masih kurangnya penyediaan sarana, prasarana dan utilitas dalam lingkungan perumahan dan permukiman;
3) Terdapat wilayah permukiman kumuh dan daerah potensi tumbuhnya permukiman dan perumahan kumuh;
4) Masih kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau dalam lingkungan perumahan dan permukiman;
5) Minimnya akses air bersih dan masih kurangnya prasarana sanitasi dalam lingkungan perumahan dan permukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1) Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda rendah dan rendahnya penegakan perda oleh petugas;
2) Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda masih rendah;
3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban dilingkungannya;
4) Belum optimalnya koordinasi antar OPD dan instansi vertikal lainnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum;
5) Masih tingginya angka gangguan keamanan dan kriminalitas;
6) Masih tingginya potensi konflik sosial di masyarakat;
7) Kurangnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana.

6. Sosial

Permasalahan di bidang urusan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Tingginya jumlah penduduk miskin dan angka penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
2) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal;
4) Kurangnya kemandirian potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS;

5) Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi Lansia dan disabilitas;
6) Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak sosialnya;
7) Belum optimalnya pelayanan dasar bidang sosial (SPM).

4.1.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
2) Rendahnya penyerapan, penempatan, dan kompetensi pencari kerja;
3) Rendahnya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
4) Rekomendasi dan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) belum sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL);
5) Perlindungan tenaga kerja belum optimal;
6) Masih banyak perusahaan belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan;
7) Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

1) Penanganan pengaduan, trafficking, kekerasan dan sarana prasarana terhadap Perlindungan korban anak dan perempuan belum optimal;
2) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3) Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak;
4) Belum optimalnya penerapan regulasi pro gender dan perlindungan anak;
5) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat;
6) Indek pemberdayaan gender (IDG) relatif masih rendah dibanding dengan Kabupaten lain;
7) Belum optimalnya mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).

3. Pangan

Permasalahan di bidang urusan pangan:

1) Masih timpangnya ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan;

2) Pola konsumsi masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA);
3) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
4) Masih rendahnya tingkat keamanan pangan segar;
5) Belum optimalnya diversifikasi penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis pangan lokal.

4. Pertanahan

Permasalahan di bidang urusan pertanahan:

1) Masih adanya kasus konflik pertanahan antara masyarakat dan Negara terkait tanah negara.
2) Masih adanya kasus konflik pertanahan di masyarakat.
3) Masih adanya tanah yang belum bersertifikat.
4) Masih terdapat tanah terlantar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
5) Terdapat tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang urusan Pertanahan di Kabupaten Lampung Tengah:

1) Menurunnya kualitas air pada sumber-sumber air;
2) Masih tingginya kerusakan lingkungan dan banyaknya lahan kritis;
3) Menurunnya kualitas lingkungan pada wilayah DAS
4) Masih tingginya pencemaran air sungai,
5) Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor
6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan Limbah
7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan;
8) Masih kurangnya kuantitas dan belum optimalnya fungsi ruang terbuka hijau;
9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (*reduce, reuse, recycle*) dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu;
10) Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan;
11) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)
12) Masih rendahnya upaya pengurangan sampah pada sumbernya;

13) Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14) Belum tersedianya regulasi (peraturan bupati) mengenai persampahan;
15) Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
16) Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup;
17) Belum optimalnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
18) Belum tersedianya SDM fungsional pengendali dampak, pejabat pengawas, dan PPNS lingkungan hidup.
19) Belum optimalnya pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di kawasan permukiman.
20) Permasalahan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri rumah tangga.
21) Masih rendahnya pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah.
22) Masih rendahnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
23) Masih rendahnya IPAL Komunal.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan di bidang urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah:

1) Belum semua penduduk memiliki e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal dan dokumen kependudukan lainnya (kartu identitas anak, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga).
2) Belum optimalnya data base kependudukan untuk data dasar pembangunan dengan data kependudukan instansi lainnya.
3) Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik.
4) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas (ahli informatika dan teknologi/IT).
5) Belum maksimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian petugas pelayanan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK) di tingkat Kecamatan (petugas pelayanan/operator berstatus pegawai kecamatan/bukan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

6) Terbatasnya blangko KTP elektronik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Lampung Tengah:

1) Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan;
2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
3) Belum optimalnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
4) Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
5) Belum optimalnya regulasi penggunaan dana kampung.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah:

1) Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi;
2) Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB, tingkat kemandirian ber-KB dan rata-rata kawin pertama wanita masih rendah;
3) Jumlah *drop out* [DO] kesertaan ber-KB masih tinggi;
4) Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah desa/kelurahan belum ideal (44.80%);
5) Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB dengan presentase 1,25%;
6) Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat;
7) Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah.

9. Perhubungan

Permasalahan di bidang urusan Perhubungan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum memadai;
2) Penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan belum optimal;
3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi belum optimal;
4) Jumlah aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi dibidang perhubungan masih kurang;
5) Disiplin pengguna jalan dan pemahaman keselamatan lalu lintas dan angkutan masih rendah;

6) Pelayanan jasa sektor perhubungan belum optimal;
7) Masih rendahnya angkutan umum daerah dan biro jasa pariwisata yang menuju destinasi wisata.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi belum optimal;
2) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
3) Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD dan Desa;
4) Kualitas sumberdaya manusia belum memadai;
5) Regulasi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK belum maksimal;
6) Masih minimnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan dibidang urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
2) Masih rendahnya pemahaman tentang perkoperasian;
3) rendahnya kapasitas SDM koperasi;
4) masih rendahnya pengelolaan UKM (tradisional);
5) Masih belum optimalnya daya saing produk;
6) Rendahnya produktivitas UKM;
7) Masih belum optimalnya jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil;
8) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan;
9) Masih rendahnya akses UMKM ke layanan keuangan;
10) Masih belum optimalnya penyediaan tempat usaha bagi pedagang kreatif;
11) Masih minimnya kegiatan sosialisasi pelatihan indutri kecil kreatif.

12. Penanaman Modal

Permasalahan di bidang urusan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
2) Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi;
3) Belum tersedianya rencana detil tata ruang yang telah memiliki aspek legal;

4) Masih terbatasnya studi kelayakan penanaman modal yang berkualitas untuk ditawarkan kepada investor;
5) Alih fungsi lahan untuk aktivitas penanaman modal;
6) Promosi investasi yang belum optimal;
7) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
8) Belum adanya persepsi yang sama antara SKPD dalam pelayanan perizinan;
9) Belum optimalnya perencanaan terhadap potensi suatu daerah untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang urusan Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif dalam berbagai aktifitas;
2) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
3) Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga masyarakat;
4) Terbatasnya pembinaan atlet;
5) Masih rendahnya kegiatan lomba tingkat kabupaten yang diselenggarakan pemerintah daerah.

14. Statistik

Permasalahan di bidang urusan Statistik di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaataan data/ statistik daerah;
2) Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal;
3) Belum adanya e-database sebagai informasi pembangunan daerah;
4) Masih rendahnya tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data statistik;
5) Masih minimnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

15. Persandian

Permasalahan di bidang urusan Persandian di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Belum optimalnya tata kelola persandian dalam penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
2) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya persandian;
3) Belum optimalnya operasional pengamanan persandian;

4) Belum optimalnya pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah.

16. Kebudayaan

Permasalahan di bdang urusan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Tengah:

1) Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah;
2) Belum optimalnya pelestarian/ pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya;
3) Belum Optimalnya pendataan dibidang kebudayaan;
4) Belum Optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni.

17. Perpustakaan

Permasalahan dibidang urusan Perpustakaan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan;
2) Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan;
3) Belum optimalnya promosi dan publikasi dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;
4) Akses layanan perpustakaan belum optimal;
5) Belum optimalnya perpustakaan kampung.

18. Kearsipan

Permasalahan dibidang urusan Kearsipan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaaan kearsipan;
2) Masih rendahnya sumber daya pengelola kearsipan;
3) Penyelamatan Arsip bernilai sejarah masih belum optimal;
4) Pengelolaan Kearsipan sesuai standar baku masih rendah.

4.1.1.3 Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Permasalahan dibidang urusan Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) adalah:

1) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani gurem;
2) Masih terbatasnya SDM Pertanian serta rendahnya Pengetahuan Petani;
3) Belum optimalnya produksi pertanian;
4) Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
5) Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian;
6) Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian

7) Pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung pertanian masih minim.

Permasalahan di bidang urusan Pertanian (Peternakan):

1) Masih rendahnya skala usaha ekonomis masyarakat peternak;
2) Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional;
3) Belum optimalnya kemampuan manajemen usaha peternak baik dalam proses produksi maupun pasca produksi;
4) Tidak meratanya ketersediaan sumber pakan hijauan ternak;
5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular.

Permasalahan dibidang urusan Pertanian (Perkebunan):

1) Belum maksimalnya pengolahan hasil perkebuan;
2) Masih rendahnya hasil olahan hasil perkebunan sumberdaya lokal;
3) Belum optimalnya pemberdayaan kelompok tani sektor perkebunan.

2. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang urusan Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap;
2) Belum profesionalnya pengelolaan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan serta unit usaha bersama;
3) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dan nelayan;
4) Masih rendahnya aksesibilitas pembudidaya ikan dan nelayan terhadap permodalan serta tata niaga pasar;
5) Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil perikanan.

3. Pariwisata

Permasalahan di bidang urusan Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur;
2) Kurangnya pemahaman SDM wisata tentang sapta pesona wisata serta kurangnya SDM wisata;
3) Kesiapan destinasi pariwisata yang belum optimal;
4) Kurang optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah.

4. Perdagangan

Permasalahan di bidang urusan Perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;

2) Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak kosumen;
3) Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern;
4) Masih rendahnya system pemasaran produk hasil olahan lokal;
5) Masih belum optimal pelaksanaan standarisasi serta pengawasan produk;
6) Kurang stabil fluktuasi harga pada situasi tertentu;
7) Masih rendahnya standar pelayanan sarana prasarana perdagangan.

5. Perindustrian

Permasalahan di bidang urusan Perindustrian di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
2) Masih belum optimalnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor.
3) Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan;
4) Belum adanya sinergi antara IKM dan industri menengah besar/rendahnya IKM sebagai pemasok IMB;
5) Masih rendahnya pengawasan Industri yang ramah lingkungan;
6) Masih belum optimal pengelolaan sumberdaya lokal/unggul menjadi produk olahan yang unggul;
7) Masih rendahnya kualitas produk IKM unggulan.

7. Transmigrasi

Permasalahan pada urusan Transmigrasi di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Terbatasnya keterampilan para transmigran lokal dalam mengolah lahan usahanya;
2) Adanya kesenjangan antara besarnya minat/animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan terbatasnya quota yang tersedia di daerah penempatan;
3) Belum optimalnya pendataan terkait data transmigrasi.

4.1.1.4 Penunjang Urusan

1. Pengawasan

Permasalahan dibidang urusan Pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Belum optimalnya peran APIP dalam pengawasan;
2) Belum optimalnya penerpanan SPIP;
3) Sarana prasarana yang menunjang kerja masih kurang;
4) Keterbatasan jumlah SDM APIP (tenaga auditor masih kurang).

2. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan dibidang urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
2) Belum optimalnya sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah;
3) Kinerja sumberdaya manusia perencana belum optimal;
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakiat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan;
5) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai dasar perencanaan;
6) Belum optimalnya koordinasi, asistensi dan evaluasi monitoring, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

3. Keuangan

Permasalahan dibidang urusan Keuangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Masih adanya aset yang belum memuliki bukti kepemilikan yang sah/tersertifikasi;
2) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan barang milik daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) serta sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPD);
3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
4) Belum optimalnya sumber daya manusia perpajakan.

4. Kepegawaian serta Pendididikan dan Pelatihan

Permasalahan dibidang urusan kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah:

1) Belum optimalnya sistem penilaian kinerja ASN;
2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
3) Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap OPD;
4) Belum efektifnya koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan (setiap Perangkat Daerah yang mengirimkan pegawai atas undangan provinsi/K/L tidak menginformasikan kepada BKPSDM.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dibidang urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1) Keterbatasan SDM dalam melakukan penelitian dan pengembangan;
2) Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah yang membutuhkan dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan.

4.1.1.5 Fungsi Lainnya Pendukung Urusan

1. Sekretariat Daerah

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang urusan fungsi lainnya yaitu:

1) Belum optimalnya pelaksanaan rencana aksi hak asasi manusia (HAM);
2) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
3) Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5) Belum optimalnya pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan;
6) Belum optimalnya sistem pengadaan barang dan jasa;
7) Belum optimalnya kerja sama daerah;
8) Belum optimalnya sistem perencanaan dan pelaporan di lingkup sekretariat daerah;
9) Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggung-jawaban barang dan aset milik daerah.

4.1.1.6 Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lampung Tengah:

1) Kesadaran pendidikan politik masyarakat masih rendah
2) Krisis kepercayaan terhadap pemerintah
3) Harmonisasi kehidupan beragaman cenderung menurun
4) Potensi konflik terhatap ketentraman dan ketertiban masih tinggi
5) Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda masih rendah
6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan utama pembangunan yang mengemuka dan berdasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah serta permasalah masing-masing urusan pemerintahan daerah yang teridentifikasi. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkunan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebgai lingkungan strategis, sebagaimana tercantum pada skema di bawah ini.



Gambar 4.1
Lingkungan Strategis Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Perincian penelaahan dari kondisi masing-masing isu strategis dapat diuraikan dibawah ini.

4.2.1 Telaah Isu Strategis Lingkungan Global

Lingkungan global dapat berpotensi menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang bagi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Tumbuhnya perekonomian negara-negara maju dan di beberapa kawasan seperti kawasan Amerika, Eropa, Jepang, Cina, dan negara-negara *emerging market* lainnya juga akan mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Di sisi lain terdapat hal-hal yang harus tetap diwaspadai yaitu potensi terjadinya inflasi global, gejolak harga minyak dunia, kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah, dan lain-lain yang juga akan mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Beberapa isu strategis lingkungan global yang perlu dipertimbangkan dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 diantaranya, *pertama,* kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. *Kedua*, peran ekonomi kawasan Asia Pasifik yang semakin penting dalam perekonomian global. Perekonomian kawasan Asia Pasifik memperlihatkan kondisi mulai membaik yang ditandai oleh permintaan domestik yang kuat, munculnya investasi swasta, dan munculnya berbagai kerjasama lintas negara di Asia Pasifik. Beberapa kerjasama tersebut diantaranya *ASEAN Regional Forum* (ARF), *East Asia Summit* (EAS), *Trans Pacific Partnerships* (TPP), dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Selain itu, juga termasuk beberapa kesepakatan-kesepakatan lain dari Pemerintah Pusat yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah.

Ketiga, adanya potensi ancaman krisis global. Krisis dan kelesuan ekonomi global yang terjadi mulai 2008 hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Fenomena keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (UE) atau biasa dikenal sebagai "Brexit" semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia. Ditambah lagi mulai tahun 2020 muncul isu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga sangat mempengaruhi pergerakan perekonomian global. Isu-isu global lain yang mempengaruhi perekonomian diantaranya isu terorisme global, propoganda Korea Utara-Korea Selatan, perang di kawasan Timur Tengah, dan lain-lain juga memberikan dampak terhadap kecepatan pemulihan ekonomi global.

Keempat, potensi ketidakpastian ekonomi global khususnya di Kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara tujuan ekspor Indonesia seperti Jepang, India, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Singapura, Selandia Baru, dan Australia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan perekonomian. Saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan banyak negara mengalami tekanan ekonomi. Kondisi ini tentunya akan berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia dan juga akan mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Kelima, adanya keterbukaan pasar ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberlakuan pasar tunggal di kawasan ASEAN melalui MEA sejak tahun 2016 memberikan peluang dan tantangan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah penduduk yang besar memberikan peluang terhadap ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten bagi Indonesia dan bagi Kabupaten Lampung Tengah. Di samping itu, kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, aliran investasi, dan aliran modal lintas batas negara juga menuntut kesiapan negara dan daerah untuk mengantisipanya secara tepat, cepat, kompetitif.

Keenam, adanya perubahan iklim global (*global climate change*). Perubahan iklim muncul diantaranya karena proses pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup. Dampak munculnya perubahan iklim adalah rusaknya kelestarian ekosistem alam, kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir, longsor lahan, abrasi pantai, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 diperlukan program-program yang memungkinkan adanya proses mitigasi bencana dan penanggulangan bencana.

Ketujuh, adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus batas negara. Kemampuan teknologi yang mampu menghantarkan proses globalisasi, mengintegrasikan proses perdagangan, dan menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas perlu diantisipasi dengan cara mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemerintah daerah juga perlu mengembangankan kemampuan untuk mengantisipasi dan memanfaatkan era revolusi industri 4.0 (RI 4.0) dengan mengkombinasikan kecerdasan buatan (*artificial intelegence*), *big data*, *internet of thing*, dan lain-lain dalam pembangunan ekonomi daerah.

4.2.2 Telaah Isu Strategis Terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis". KLHS juga bisa diartikan sebagai rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (PP Nomor 46 Tahun 2016). Pemerintah Kabupateng Lampung Tengah melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dimana KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD (Permendagri Nomor 7 Tahun 2018).

Tujuan dari pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Tengah ini adalah:

1. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam TPB dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

2. Meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam memberikan kontribusi terhadap materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan melalui:
   a. Perumusan skenario upaya tambahan dan *Bussines As Usual* (BAU) yang meliputi analisis isu pembangunan berkelanjutan, skenario dan target pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perumusan rekomendasi penyempurnaan pencapaian TPB pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.
   b. Peningkatan, penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.
   c. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Hasil konsultasi publik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen KLHS di peroleh 11 (sebelas) Isu Pembangunan yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD, yaitu:

1. Terdapat permasalahan mengenai *stunting*.
2. Masih adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.
4. Banyaknya objek wisata yang belum dikembangkan.
5. Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian masyarakat.
6. Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di kawasan permukiman.
7. Permasalahan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri.
8. Ketidaksiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana.
9. Banyaknya timbulan sampah.
10. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
11. Kesetaraan gender.

Pemilihan isu strategis yang akan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam Penyusnan RPJMD dirumuskan melalui peleburan isu yang bersumber dari 4 (empat), yatu analisis pencapaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan, isu pembangunan dari konsultasi public, hasil capaian evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021, dan Indikator Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan hasil peleburan isu dari keempat sumber tersebut maka dihasilkan 28 isu strategis.

Tabel 4.1
Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis Pilar Sosial	Isu Strategis Pilar Ekonomi
1. Menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah 2. Meningkaktan peran dan fungsi lembaga kesehatan 3. Meningkatkan Pelayanan Dasar Bidang Sosial (SPM) 4. Menurunkan Angka Stunting 5. Prevalesi anemia pada Ibu Hamil 6. Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 7. Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 8. Meningkatkan Pelayanan tanggap siaga kesehatan 9. Meningkatkan Pelayanan terhadap PUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 10. Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan 11. Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 12. Meningkatkan pelayanan KB dan alcon terhadap pasangan usia subur	1. Meningkatkan PDB Perkapita 2. Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata 3. Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah 4. Mengurangi persentase tingkat kemiskinan 5. Mengurangi Jumlah desa tertinggal 6. Mengoptimalkan PAD
Isu Strategis Pilar Lingkungan	**Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan**
1. Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 2. Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 3. Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana 4. Mengurangi timbunan sampah perkotaan 5. Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan 6. Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah 7. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	1. Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang 2. Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislative 3. Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

4.2.3 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJM Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Adapun tema pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan".

Penjabaran tema pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut adalah sebagai:

1. Berpenghasilan menengah–tinggi akan diwujudkan dengan cara (a) Transformasi struktural berjalan; (b) Produktifitas tenaga kerja meningkat; (c) Iklim investasi kondusif; dan (d) GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera akan diwujudkan dengan cara (a) Kualitas hidup meningkat; (b) Perilaku disiplin dan beradab; (c) SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (d) Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil akan diwujudkan dengan cara (a) Ketimpangan menurun; dan (b) Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan akan diwujudkan dengan cara (a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung; dan (b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Adapun Isu Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu untuk diperhatikan dalam Penyusunan RPJMD Kabupetan Lampung Tengah 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia, yang meliputi (a) Pelayanan Dasar; dan (b) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi yang meliputi (a) Pangan; (b) Energi; (c) Pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital; dan (d) Industri manufaktur kelautan dan kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan yang meliputi (a) Sentra pertumbuhan; dan (b) Komoditas unggulan daerah pertumbuhan perkotaan
4. Pembangunan infrastruktur yang meliputi (a) Transportasi; (b) Telekomunikasi; dan (c) Sumber daya air perumahan dan pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan yang meliputi (a) Hukum dan regulasi; (b) Hankam; dan (c) Politik

Adapun arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupetan Lampung Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia. Pembangunan manusia dilakukan melalui peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial; serta sumberdaya berkualitas dan berdaya saing.

2. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dimplimentasikan melalui pembangunan sektor pangan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, digital, industri manufaktur dan kelautan kemaritiman.
3. Pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan diupayakan dengan membangun sentra-sentra pertumbuhan, komoditas unggulan daerah dan pertumbuhan perkotaan.
4. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, perumahan dan permukiman.
5. Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Pembangunan ini dilakukan dengan perbaikan dan penegakan hukum dan regulasi, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan politik yang baik dan sehat.

4.2.4 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Visi pembangunan Provinsi Lampung 2005-2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung adalah “Lampung Maju dan Sejahtera 2025”. Maju mempunyai konotasi modern atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Upaya mewujudkan Visi jangka panjang Provinsi Lampung 2005-2025, dapat dilaksanakan melalui implementasi misi, yaitu (1) Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global; (2) Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; (3) Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (4) Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah; (5) Mewujudkan daerah yang asri dan lestari; (6) Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis; dan (7) Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sebagai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 adalah “*Rakyat Lampung Berjaya*”. Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 yaitu (1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai; (2) Misi-2: Mewujudkan *"good govemance"* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan

pelayanan publik; (3) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas; (4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah; (5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan; dan (6) Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat agenda kerja utama dan sektor prioritas pembangunan yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Agenda Kerja Utama dan Sektor Prioritas Pembangunan tersebut seperti tercantum pada pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Agenda Kerja Utama Berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD Provinsi Lampung

Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
Misi ke-1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman Dan Damai	
Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya	1. Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan
	2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
	3. Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran
	4. Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan
	5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
Misi ke-2: Mewujudkan "Good Govemance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik	
Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem penjenjangan karir berbasis kinerja dan kompetensi (*job fit assessment*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
	2. APBD Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
	3. *Smart Village* : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan *e-participation*

Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
	4. Pendampingan Program Pembangunan Desa
Misi ke-3: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Disabilitas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perempuan Berjaya : memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan
	2. Lampung Ramah Perempuan dan Anak : mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
	3. Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja
	4. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta memperbaiki tata kelola organisasi olahraga
Pembangunan Bidang Kesehatan	Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
Pembangunan Bidang Pendidikan	1. *Smart School* : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan
	2. Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)
Misi ke-4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi Dan Konektivitas Wilayah.	
Pembangunan Bidang Infrastruktur	1. Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi
	2. Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT
	3. Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik
Misi ke-5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Perdesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan	
Pembangunan Bidang Pertanian Dan Perdesaan	1. Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)
	2. Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian
	3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
	4. Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper)
	5. Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri

Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
	6. Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak nelayan, SPBU untuk nelayan
	7. Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)
	8. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
Pembangunan Bidang Industri	1. Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
	2. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi
	3. Lampung Ramah usaha : menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha
	4. Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan)
Misi ke-6: Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama	
Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	1. Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat
	2. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara

4.2.5 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Daerah Lain

Kabupaten Lampung Tengah secara administratif berbatasan dengan Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026 juga perlu memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD daerah lain di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk membangun keterpaduan dan keterkaitan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar untuk mensukseskan tujuan pembangunan daerah dan pembangunan pada tingkat yang lebih luas, yaitu pembangunan tingkat provinsi dan pembangunan nasional. Keterkaitan bisa berupa keterkaitan pada saat perencanaan, pada saat implementasi, ataupun pada saat pengawasan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan yang dibuat daerah sekitar (daerah tetangga) dan atau kebijakan pusat terhadap daerah tetangga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.

Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah dari daerah sekitar (daerah tetangga) yang perlu diperhatikan dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi Pembangunan Kota Metro adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif". Adapun penekanan misi pembangunannya adalah peningkatkan kualitas SDM sektor pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan *good governance*. Strategi dan arah kebijakan Kota Metro adalah:
    a. Peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pendidik, manajemen kependidikan, sarana prsarana, pendidikan dasar, ekstrakurikuler, pendidikan khusus, budaya baca masyarakat, akses dan mutu pelayanan kesehatan, dokter spesialis, kepesertaan PBI-JKN, kemandirian peserta KB, layanan konseling, kota layak anak, *life skil* kepemudaan, dan pemasyarakatan seni dan budaya;
    b. Peningkatan industri kreatif, sinergi industri, pengembangan wisata keluarga, kualitas koperasi UMKM, perlindungan social, SDM tenaga kerja, dan ketersediaan pangan
    c. Memantapkan kondisi transportasi jalan, jembatan, pemerataan infrastruktur, pelayanan listrik dan PJU, cakupan layanan internet SKPD s/d kelurahan, optimalisasi RTRW, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, taman kota & rest area sebagai tujuan wisata keluarga, proteksi bahaya kebakaran, dan kesiapsiagaan serta mitigasi bencana;
    d. Optimalisasi SAKIP, pengawasan internal, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan manajemen aset daerah, arsip daerah dan sistem reward dan punishment.
2. Visi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang adalah Terwujudnya Tulang Bawang Yang Aman, Mandiri, dan Sejahtera. Adapun penekanan misi pembangunannya adalah meningkatkan kualitas kerukunan agama dan budaya, layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, perekonomian untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, *good governance,* dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Tulang Bawang adalah:

a. Meningkatkan ketentraman, wawasan kebangsaan, dan kehidupan beragaama dan adat istiadat;
b. Meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan penduduk, kualitas hidup perempuan dan anak, kompetensi pemuda, kemantapan infrastruktur dasar, dan fasilitas dan cakupan transportasi;
c. Meningkatkan ketahanan pangan, produktifitas industri dan koperasi, kepastian investasi, destinasi pariwisata, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja;
d. Meningkatkan transparansi birokrasi, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi kependudukan, dan partisipasi masyarakat kampung;
e. Meningkatkan pelestarian SDA berkelanjutan

3. Visi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing. Adapun penekanan misi pembangunannya adalah Mengembangkan SDM produktif, kreatif, dan inovatif; perekonomian daerah yang kokoh, merata, dan berkelanjutan; memperluas cakupan prasarana dan yang terintegrasi antar wilayah; *good governance;* kehidupan masyarakat yang religius, partisipasif, taat hukum, dan mentransformasi budaya daerah sebagai sumber energi sosial pembangunan. Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
   a. Peningkatan layanan pendidikan, layanan kesehatan, kompetensi angkatan kerja, iklim ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, kesetaraan gender, Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA), layanan kesejahteraan sosial, layanan kepemudaan, dan pembinaan prestasi olahraga;
   b. Penguatan pangan, agroindustri, jaminan kepastian investasi, prasarana pendukung perdagangan, pelindungan Konsumen, akses permodalan, teknologi, perlindungan usaha, pemodernisasian usaha koperasi, dan destinasi dan objek pariwisata daerah;
   c. Pemantapan jaringan transportasi, layanan infrastruktur persampahan, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, layanan jaringan telekomunikasi dan energi, dan mengendalikan pencemaran;
   d. Peningkatan layanan prima, pendampingan aparatur pemerintah tiyuh, tata kelola keuangan dan aset daerah, iklim Investasi daerah, Sistem Merit, kesepakatan tata batas antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kabupaten sekitarnya;

e. Peningkatan keamanan masyarakat, pengurangan risiko bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat terdampak bencana, internalisasi nilai-nilai agama dan budaya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, wawasan kebangsaan, masyarakat yang taat hukum, nilai dan norma.

4.2.6 Telaah Isu Strategis Terhadap RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 merupakan salah satu bahan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah 2011 – 2031 adalah "Terwujudnya Lampung Tengah sebagai Kawasan Agribisnis yang berwawasan Lingkungan serta mampu menggerakan perekonomian wilayah". Kebijakan penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah 2011 – 2031 adalah:

1. Pengembangan pertanian modern; berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia usaha;
2. Perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah;
3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
4. Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai potensi lestari;
5. Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Adapun rencana program pembangunan wilayah menurut RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011 – 2031 meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan. Penjelasan masing-masing program pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang, yang meliputi rencana pusat kegiatan, kawasan perkotaan dan perdesaan, dan rencana sistem prasarana wilayah.

a. Rencana pusat kegiatan. Adapun rencana pusat kegiatan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011 – 2031 adalah sebagai berikut:
   1). Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKWp Kabupaten Lampung Tengah yaitu kawasan Terbagus (Terbanggi Besar, Bandar Jaya, dan Gunung Sugih) dan memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpadu, perdagangan dan jasa, pusat koleksi dan distribusi, permukiman perkotaan, dan sistem transportasi regional.
   2). Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah yaitu PKL Kalirejo (Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Bekri), dan PKL Seputih Banyak (Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya).
   3). Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), ditetapkan di Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu dan berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan konsevasi. PKLp Bandar Sari akan melayani beberapa kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Anak Ratu Aji, Pubian, Sendang Agung, dan Selagai Lingga.
   4). Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di empat wilayah yaitu (a) PPK Kota Gajah berfungsi pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan dan melayani Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Punggur, dan Kecamatan Trimurjo; (b) PPK Wates berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan, dan pusat pemasaran produk unggulan dan melayani Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan Bekri; (c) PPK Kurnia Mataram berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga, dan pengembangan peternakan sapi dan melayani Kecamatan Seputih Mataram; dan (d) PPK Gaya Baru I berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa, dan kawasan konservasi dan melayani Kecamatan Seputih Surabaya, Bandar Surabaya, Bandar Mataram, dan Bumi Nabung.
   5). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), ditetapkan di 13 wilayah yaitu (a) PPL Dono Arum berfungsi sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah dan melayani seluruh Kecamatan Seputih Agung; (b) PPL Sendang Mulyo berfungsi

sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri, dan pariwisata; (c) PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengembanga komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri; (d) PPL Sukobinangun berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan kering dan industri kecil dan menengah dan Kecamatan Way Seputih; (e) PPL Reno Basuki berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan dan melayani Kecamatan Rumbia; (f) PPL Bina Karya Utama berfungsi sebagai pengembangan komoditi perkebunan dan melayani Kecamatan Putra Rumbia; (g) PPL Surabaya Ilir berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagngan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung dan melayani Kecamatan Bandar Surabaya; (h) PPL Negeri Kepayang berfungsi sebagai pengembangan pertanian perkebunan, dan agribisnis/industri pengolahan dan melayani Kecamatam Pubian; (i) PPL Gedung Sari berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan dan melayani Kecamatan Anak Ratu Aji; (j) PPL Trimurjo berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil pertanian, dan perdagangan dan jasa dan melayani Kecamatan Trimurjo; (k) PPL Tanggul Angin berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agrobisnis, serta perdagangan dan jasa dan melayani Kecamatan Punggur; (l) PPL Rukti Harjo berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, dan pengembangan ternak besar dan melayani Kecamatan Seputih Raman; dan (m) PPL Kosumodadi berfungsi sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura dan melayani Kecamatan Bekri.

b. Kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Bandar Jaya, Kalirejo, Tanjung Harapan, Bandar Sari, Kota Gajah, Wates, Kurnia Mataram, Trimurjo, dan Gaya Baru I. Sedangkan kawasan perdesaan meliputi Dono Arum (Seputih Agung), Jati Datar Mataram (Bandar Mataram), Tanggul Angin (Punggur), Nyukang Harjo (Selagai Lingga), dan Rukti Harjo (Seputih Raman).

c. Rencana sistem prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan prasarana transportasi (darat, sungai, dan udara), sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air (lintas

wilayah, sungai, irigasi, air bersih, pengendalian banjir), sistem jaringan prasarana persampahan, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem drainase.

2. Rencana Pola Ruang, yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari:
   a. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Lampung Tengah adalah Register 22 Way Waya (± 5.118 Ha), Register 39 Kota Agung Utara (± 17.647 Ha), dan Register 8 Way Rumbia (± 5.066,72 Ha) dengan total ± 27.831,72 Ha
   b. Kawasan sempadan sungai yaitu sungai besar (±18.454,84 Ha) dan sungai kecil (±68.382,72 Ha). Selain itu kawasan sempadan irigasi primer ditetapkan sekitar 2.941.880 meter atau ±294,19 Ha.
   c. Kawasan sempadan danau yaitu danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak, danau Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung, danau Way Waya Srimulyo, Way Waya Krui, Way Tatangan I dan II, Way Muaramas di Kecamatan Kalirejo, Way Tipo Lunik, Way Tipo Balak, Way Srikaton, serta Way Ilian Balak di Kecamatan Bangunrejo dengan total luas ±314,95 hektar.
   d. Kawasan sempadan rel kereta api dengan panjang rel kereta api 30,894 Km dan dengan luas sekitar 67,97 Ha.
   e. Kawasan rawan bencana banjir di sekitar bantaran sungai Way Seputih yang melalui sebagian besar wilayah, namun demikian kawasan yang paling rawan diantaranya adalah Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang dan di Kecamatan Bekri.
   f. Kawasan rawan bencana tanah di sekitar kawasan hutan lindung di Kecamatan Selagai Linggga, Pubian, dan Sendang Agung.

   Sedangkan kawasan budidaya menurut RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011 – 2031 meliputi:
   a. Kawasan hutan produksi di Register 47 Way Terusan di sekitar Kecamatan Bandar Mataram ±12.500 ha.
   b. Kawasan tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 107.760 hektar akan dikembangkan di Kecamatan Padang Ratu, Pubian, Sendang Agung, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, Seputih Agung dan Seputih Raman.
   c. Kawasan tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 70.684 hektar dan diperuntukan bagi pengembangan berupa tanaman pangan seperti padi ladang, ubi kayu, serta jagung dan tanaman palawija. Sentra pengembangan di Kecamatan Anak Tuha, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nubang, Terbanggi Besar, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, Seputih Banyak, Way Seputih,

Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya, Selagai Lingga, Kalirejo, Bangun Rejo, Bekri, Bandar Mataram dan Seputih Mataram.

d. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 142.755 hektar ditetapkan di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Anak Tuha, dan Kecamatan Seputih Raman.
e. Kawasan pertanian tanaman hortikultura meliputi cabe (Kecamatan Bekri, Seputih Banyak, dan Rumbia), nenas (Kecamatan Punggur, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, dan Seputih Raman), kelengkeng (Kecamatan Padang Ratu, Terbanggi Besar, Bekri, dan Anak Ratu Aji), durian (Kecamatan Selagai Lingga,Pubian, dan Sendang Agung), jeruk (Kecamatan Bandar Mataram dan Anak Tuha), alpukat (Kecamatan Bangun Rejo), dan duku (Kecamatan Kaliarejo)
f. Kawasan pertanian tanaman perkebunan, meliputi kelapa sawit (Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Pubian, Kalirejo, Sendang Agung, Bangun Rejo, Bekri, dan Way Pengubuan), kelapa (Kecamatan Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, Terbanggi Besar, Seputih Raman, Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya), perkebunan kopi dan lada (Kecamatan Selagai Lingga), tebu (Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Terbanggi Besar dan Bandar Mataram), kakao (Kecamatan Kalirejo, Bangunrejo, Sendang Agung, Pubian, Selagai Lingga dan Padang Ratu0, dan karet (Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Bumi Nabung, Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Rumbia, Putra Rumbia, Terusan Nunyai, dan Seputih Banyak).
g. Kawasan Peternakan, Meliputi peternakan sapi, domba, ayam buras, dan ayam pedaging.
h. Kawasan perikanan, meliputi perikanan tangkap, Budidaya Air Payau, Budidaya Air Tawar, pengolahan ikan, dan Minapolitan.
i. Kawasan Pertambangan, Meliputi Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, batubara, Minyak bumi. Jumlah sumber daya hidrokarbon (minyak dan gas) di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, adalah 503.063,08 MSTB (Milion Stock Tank Barrel).

j. Kawasan Industri, Meliputi Kawasan industry skala Besar, Kawasan industri skala Menengah, dan Kawasan industri kecil. Kegiatan industri Besar dan Menengah di Kecamatan Gunung Sugih khususnya pada kawasan Ibukota Kabupaten, akan dikendalikan dan dibatasi pengembangannya. Kawasan Pariwisata, meliputi Danau Tirta Gangga, Air Terjun Curup Bilik, Air Terjun Curup Tujuh, Danau Telogo Rejo, Danau Bekri, Pemancingan Ikan Way Seputih, Pemancingan Kolam Kalirejo, Gedung Nuwo Balak dan Sesat Agung, Tugu Pepadun, Tugu Kopiah Mas, Makam Malik Abdullah, Gua Maria, Perkebunan dan Pengalengan Nanas, dan Perkebunan Buah-buahan.

k. Permukiman Perkotaan, yaitu Kawasan Terbagus (Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih) akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Sementara Kalirejo, Tanjung Harapan (Seputih Banyak), dan Bandar Sari (Padang Ratu) sebagai PKL juga akan berkembang sebagai pusat permukiman perkotaan. Demikian pula pada Pusat Pelayanan Kawasan di Kota Gajah, Seputih Surabaya (Gaya Baru), Bumi Ratu Nuban (Wates), dan Trimurjo, serta Pusat Pelayanan Lokal di masing-masing ibukota kecamatan akan berkembang menjadi permukiman perkotaan.

l. Permukiman Perdesaan, berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK diluar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik. Ciri permukiman bersifat mengelompok dan tersebar secara sporadis.

m. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Meliputi zona pertempuran militer di kecamatan seputih Surabaya, zona komunikasi militer, zona belakang militer, zona latihan militer pertahanan pantai, zona latihan militer pertahanan akhir, komplek markas Kepolisian Resort, komplek maskas komando Brigade Mobil, dan komplek markas Kepolisian Sektor.

3. Rencana Kawasan. Kawasan Strategis untuk Kabupaten Lampung Tengah adalah:

a. Kawasan Agropolitan. Beberapa desa di Kecamatan Terbanggi Besar yang dapat masuk ke dalam kawasan strategis agropolitan adalah Desa Terbanggi Besar, Yukum Jaya, Poncowati, Adi Jaya, Indra Putra Subing, Karang Endah, Nambah Dadi, dan Ono Harjo

b. Kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Kecamatan Kota Gajah Kawasan Minapolitan Patin, Kecamatan Kalirejo Kawasan Minapolitan

Gurame, dan Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang) Kawasan Minapolitan Pesisir.

c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp). Adapun PKWp yang dimaksud adalah Terbanggi Besar-Bandar Jaya dan Gunung Sugih (TERBAGUS) di Kabupaten Lampung Tengah.
d. Pusat Pendidikan Terpadu Berbasis Potensi Lokal yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah (Desa Sulusuban).

4.2.7 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 tahapan ke-4. Visi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 yaitu *"Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera"*. Adapun misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 adalah (*i*) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius; (*ii*) mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat; (*iii*) meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik dan hukum secara demokratis dan berkeadilan; (*iv*) meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan serasi; (*v*) mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance;* dan (*vi*) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 telah memprediksi bahwa pada periode lima tahunan keempat (RPJMD tahap IV tahun 2021 – 2025) strategi pembangunan daerah akan diprioritaskan pada program-program/kegiatan yang pelaksanaannya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada periode lima tahun ketiga sekaligus juga bertujuan untuk memacu dan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2021-2026 harus mempedomani RPJPD Tahun 2005 – 2025 ini. sehingga visi, misi, strategi, dan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai salah satu upaya untuk pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 tersebut.

Arah Pembangunan Daerah jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang perlu dipedomani dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan religius. Pembangunan kualitas SDM diarahkan pada peningkatan kualitas berbagai aspek yaitu:
   a. Aspek pendidikan, dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, nilai rata-rata kelulusan ujian nasional, daya tampung sekolah, angka melek huruf dan tersedianya sarana/prasarana pendidikan.
   b. Aspek kesehatan, dengan indikator usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, status gizi balita, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, dan sarana/prasarana kesehatan.
   c. Aspek ketenagakerjaan, dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran terbuka, perlindungan kerja, kecelakaan kerja, dan kasus ketenagakerjaan lainnya.
   d. Aspek moralitas dan perilaku, dengan indikator beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, saling percaya, tenggang rasa dan toleransi, menjunjung tinggi hukum dan HAM.
   e. Aspek kepemudaan dan olah raga, dengan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan dan prestasi olah raga.
   f. Aspek pemberdayaan perempuan, dengan indikator kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi perempuan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
2. Mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat. Perekonomian daerah didasarkan pada aspek:
   a. Aspek pertanian (dalam arti luas/agribisnis) dan kelautan, diarahkan melalui: 1) peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan kelautan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; (3) pengembangan sistem budidaya; (4) penguatan kelembagaan dan permodalan usaha tani; dan (5) peningkatan fasilitasi pemasaran hasil.
   b. Aspek industri, diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, pengembangan industri kecil dan menengah, dan penguatan struktur industri
   c. Aspek perdagangan dan jasa, diarahkan pada pengembangan pusat perdagangan dan jasa, penguatan sistem distribusi, penguatan lembaga keuangan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

d. Aspek koperasi dan UKM, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM, pengembangan struktur koperasi dan UKM, penguatan permodalan usaha, dan peran koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah.
e. Aspek investasi dan penanaman modal, diarahkan pada peningkatan penanaman modal (PMA/PMDN), promosi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan penyederhanaan mekanisme dan prosedur perizinan.

3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik, hukum secara demokratis dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya dilakukan melalui:
   a. Aspek pembangunan agama, yaitu agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan, dan kerukunan hidup umat beragama dan toleransi.
   b. Aspek budaya, diarahkan pada pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur, seni dan budaya daerah.
   c. Aspek politik, diarahkan pada kesadaran politik masyarakat, pengembangan budaya politik, dan penanaman nilai-nilai HAM.
   d. Aspek supremasi hukum, yaitu kesadaran dan pelayanan hukum, penegakan supremasi hukum, dan menciptakan kondisi yang aman dan damai.
   e. Aspek pengembangan nilai-nilai kebangsaan, diarahkan pada peningkatan wawasan kebangsaan, bela negara, dan rasa nasionalisme.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan serasi. Pembangunan infrastruktur wilayah meliputi:
   a. Pembangunan jalan dan jembatan, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, meningkatkan arus barang dan jasa, membuka daerah terisolir dan tertinggal, mempercepat laju pertumbuhan sentra-sentra produksi dan daerah pertumbuhan baru.
   b. Pembangunan jaringan irigasi, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas saluran irigasi dan peningkatan pengelolaan sumberdaya air.
   c. Pembangunan perumahan pemukiman, diarahkan pada peningkatan fasilitas umum dan sarana prasarana pemukiman.
   d. Pembangunan bidang transportasi, diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk keamanan dan kenyamanan lalulintas.

e. Pembangunan bidang telekomunikasi, diarahkan pada peningkatan dan pengembangan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah.

5. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance,* diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi masyarakat, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualiatas SDM profesional, peningkatan pengawasan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mewujudkan prisnsip-prinsip good governance.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam daerah, pengembangan obye-obyek wisata, sumber daya energi, konservasi dan rehabilitasi, dan pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Tabel 4.3
Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi, KLHS, dan Kabupaten Lampung Tengah

Isu Strategis Nasional RPJMN 2020-2024	Isu Strategis Sektor Prioritas RPJMD Prov. Lampung 2019-2024	Isu Strategis Arah Pembangunan RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025	Isu Strategis KLHS Kab. Lampung Tengah	Isu Strategis Kab. Lampung Tengah 2021-2026
1. Pembangunan manusia, yang meliputi (a) pelayanan dasar; dan (b) SDM berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi yang meliputi (a) Pangan; (b) energi; (c) pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital; dan (d) industri manufaktur kelautan dan kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan yang meliputi (a) sentra pertumbuhan; dan (b) komoditas unggulan daerah pertumbuhan perkotaan 4. Pembangunan infrastruktur yang meliputi (a) transportasi; (b) telekomunikasi; dan (c) Sumber daya air perumahan dan pemukiman 5. Pembangunan	1. Pembangunan bidang pariwisata dan budaya 2. Reformasi birokrasi 3. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Pembangunan bidang kesehatan 5. Pembangunan bidang pendidikan 6. Pembangunan bidang infrastruktur 7. Pembangunan bidang pertanian dan perdesaan 8. Pembangunan bidang industri 9. Pembangunan bidang lingkungan hidup	1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan religius. 2. Mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat. 3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik, hukum secara demokratis dan berkeadilan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan serasi. 5. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi	Pilar Sosial, meliputi: 1. Menurunkan persentase kemiskinan Meningkaktan peran dan fungsi lembaga kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan dasar bidang sosial (SPM) 3. Menurunkan angka stunting 4. Prevalesi anemia pada ibu hamil 5. Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 6. Meningkatkan Angka Harapan Hidup 7. Meningkatkan pelayanan tanggap siaga kesehatan 8. Meningkatkan pelayanan terhadap PUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1. Peningkatan kualitas infrastruktur publik 2. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman 3. Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan 4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5. Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan 6. Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan

Polhukkamhan yang meliputi (a) hukum dan regulasi; (b) hankam; dan (c) politik		masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance.* 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, diarahkan pada peningkatan	9. Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan 10. Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 11. Meningkatkan pelayanan KB dan alcon pasangan usia subur Pilar Ekonomi, meliputi: 1. Meningkatkan PDB perkapita 2. Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata 3. Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan wilayah 4. Mengurangi persentase tingkat kemiskinan 5. Mengurangi jumlah desa tertinggal 6. Mengoptimalkan PAD Pilar Lingkungan, meliputi: 1. Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 2. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis	

			Masyarakat (STBM) 3. Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana 4. Mengurangi timbunan sampah perkotaan 5. Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan 6. Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah 7. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Pilar Hukum & Tata Kelola Kelembagaan, meliputi: 1. Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang 2. Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif 3. Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	

4.2.8 Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Kabupaten Tengah Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil telaahan identfikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mengunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4) Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah;
5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Kabupaten Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Lampung Tengah mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2019 sebesar 5,46 %, diatas pertumbuhan ekonomi propinsi yang sebesar 5,25%, dan berada di atas Nasional (5,17%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang dan bahkan pada tahun 2020 mengalami konstraksi atau penurunan mencapai (-1,02%) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Masih tingginya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 11,82 persen, atau jumlahnya mencapai 152.280 jiwa, Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Propinsi Lampung yang sebesar 12,34%. Angka kemisikinan di Kabupaten Lampung Tengah sedikit lebih baik, namun apabila dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 9,68%, Kabupaten Lampung Tengah masih yang masih ketinggalan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berada di posisi 8 terendah angka penganggurannya dibandingkan 14 kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung, walaupun di tahun 2020 TPT Kabupaten Lampung Tengah mengalami posisi tertinggi sepanjang 4 tahun belakangan ini.

3. Belum optimalnya kualitas pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 terealisasi sebesar 70,16 masih dibawah IPM nasional tahun 2020

sebesar 71,94 meskipun berdada diatas capaian provinsi Lampung sebesar 69,69 di tahun yang sama.

Kulitas pembangunan manusia dari sisi kesetaraan gender dapat diketahui dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pencapaian IPG di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dari sebesar 89,23 pada tahun 2017 menjadi 89,86 pada tahun 2020. Kabupaten Lampung Tengah menempati ranking ke-5 di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

4. Tingginya angka kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas pada tahun 2020 mencapai 4,25 kasus per 10.000 penduduk. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi.

5. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi pembangunan antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah sampai tahun 2020 belum merata. Dengan luas wilayah wilayah mencapai 4.546 km2, dan secara administratif terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 301 kampung dan 10 kelurahan, dalam hal bidang pembangunan infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 1.343,326 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 61,9% pada tahun 2020 atau masih terdapat sepanjang 511,612 km jalan dalam kondisi rusak. Begitu juga dengan tingkat aksesibilitas jalan kabupaten pada tahun 2020 sebesar 86,36%.

6. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang layak, yang ditunjukan oleh persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman di tahun 2019 adalah sebesar 88,12%. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi di tahun 2019 adaah sebesar 93,12%. Persentase rumah tidak Layak huni di Tahun 2019 adalah

sebesar 86,18%. Hal ini perlu terus diupayakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

7. Belum optimalnya indek kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 di Kabupaten Lampung sebesar 59,43, mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dari tahun 2019 sebesar 59,40 poin. Jika ditinjau dari komposit Indek Kualitas Air dan Indeks kualitas tutupan lahan mengalami kenaikan akan tetapi indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 2 poin dari tahun 2019 menjadi sebesar 84,35 poin. Hal ini perlu diupayakan lebih baik lagi agar indek kualitas lingkungan hidup tersebut semakin meningkat.

8. Belum optimalnya reformasi birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 sudah menunjukkan adanya kemajuan diantaranya diperolehnya opini BPK atas laporan keuangan daerah kategori WTP pada beberapa tahun ini, namun demikian masih ada beberapa penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal seperti pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang masih masih kategori B (63,52 poin). Kemudian reformasi birokrasi yang belum dilakukan evaluasi secara optimal, sehingga belum diketahui hasil penilaian reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu juga menurunnya penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari kategori tinggi menjadi sedang.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteran masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus didorong dengan penerapan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk perbaikan kinerja aparatur melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan

Reformasi birokrasi diarahkan pada pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi baru mencapai predikat “B” nilai 63,52. Penilaian ini menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, baik pada tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Namun demikian perlu upaya peningkatan agar tidak tertinggal dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun terakhir tahun 2018 sampai tahun 2020 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini perlu terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Pernyataan visi merupakan pandangan jauh ke depan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi di masa depan. Visi disusun dengan mempertimbangkan inisiasi, idealisme, informasi, kondisi permulaan, serta peramalan yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta memperhatikan aspirasi atau keinginan *stakeholders*.

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 tahapan ke-4. Visi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 yaitu *"Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera"*. Oleh karena itu, selain sebagai penegasan atas janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah terpilih yang harus diwujudkan, visi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 juga merupakan upaya untuk pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD Lampung Tengah tersebut.

Secara normatif, beberapa alasan dasar perlunya visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Adanya kebutuhan untuk mengendalikan cita-cita institusi.
   Visi pada dasarnya mencerminkan apa yang ingin dicapai. Fungsi visi dalam hal ini adalah sebagai alat kendali institusi sehingga memiliki arah yang jelas yang telah ditentukan.
2. Adanya kebutuhan mengenai arah dan fokus strategi yang jelas.
   Visi akan mengarahkan seluruh jajaran institusi memiliki titik tolak dalam merumuskan misi dan tujuan organisasi secara lebih operasional.
3. Adanya kebutuhan untuk mengeksploitasi kesempatan atau untuk mengatasi tantangan baru.
   Visi akan mengarahkan langkah operasional dalam mengantisipasi perubahan lingkungan yang mengharuskan adanya kajian terhadap berbagai strategi untuk menghadapinya.
4. Adanya kebutuhan terhadap kesatuan akan imajinasi bersama.
   Visi merupakan perekat yang menyatukan berbagai gagasan strategi yang terdapat dalam institusi sehingga menumbuhkan saling pengertian dalam merumuskan peran dan fungsi masing-masing jajaran dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai.

5. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan di masa kini bukanlah jaminan bagi keberhasilan di masa datang.

   Visi akan mengorientasikan seluruh jajaran institusi untuk memiliki kesadaran strategis dalam pengelolaan rutinitas operasi sehingga dapat berpartisipasi dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan melalui pemanfaatan peluang yang muncul dari lingkungan yang terus berubah.
6. Adanya kebutuhan untuk membebaskan diri dari kendala operasional yang dihadapi masa kini.

   Visi akan menstimulasi solusi stratejik operatif terhadap masalah-masalah operasional setiap jajaran institusi. Hal tersebut akan memberikan arahan yang jelas terhadap masalah-masalah operasional yang dihadapi oleh seluruh jajaran institusi.
7. Adanya kebutuhan untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran institusi.

   Visi akan menumbuhkan rasa kebermaknaan pada setiap jajaran institusi dalam upaya untuk mencapai tujuan institusi. Hal ini akan mendorong antusiasme dan keterlibatan emosional pada segenap jajaran institusi
8. Adanya kebutuhan untuk menjamin kesinambungan.

   Visi akan memberikan pedoman bagi segenap jajaran institusi dalam aktivitas operasionalnya dalam mencapai cita-cita institusi sehingga momentum pergantian kepemimpinan kabupaten tidak memberikan kendala bagi pelaksanaan operasional rutin institusi.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, termasuk pertimbangan atas isu strategis daerah, potensi wilayah, tuntutan masyarakat, dinamika pembangunan, dan sinkronisasi dengan visi tingkatan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan nasional), maka Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2021-2016 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"

Visi Rakyat Lampung Tengah **Berjaya** pada uraian visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. **Pendidikan Berjaya**

   Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.
2. **Kesehatan Berjaya**

   Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. **Pemuda Milenial Berjaya**

   Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang

4. **SIJALU Berjaya**

   SIJALU merupakan akronim dari *Setiap Infrastruktur Jalan Mulus.* diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. **Petani Berjaya**

   Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. **BUMKAM Berjaya**

   BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai posos ekonoomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. **Keberagaman Umat Berjaya**

   Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. **Pelayanan Berjaya**

   Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance.*

5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna 'berjaya' di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

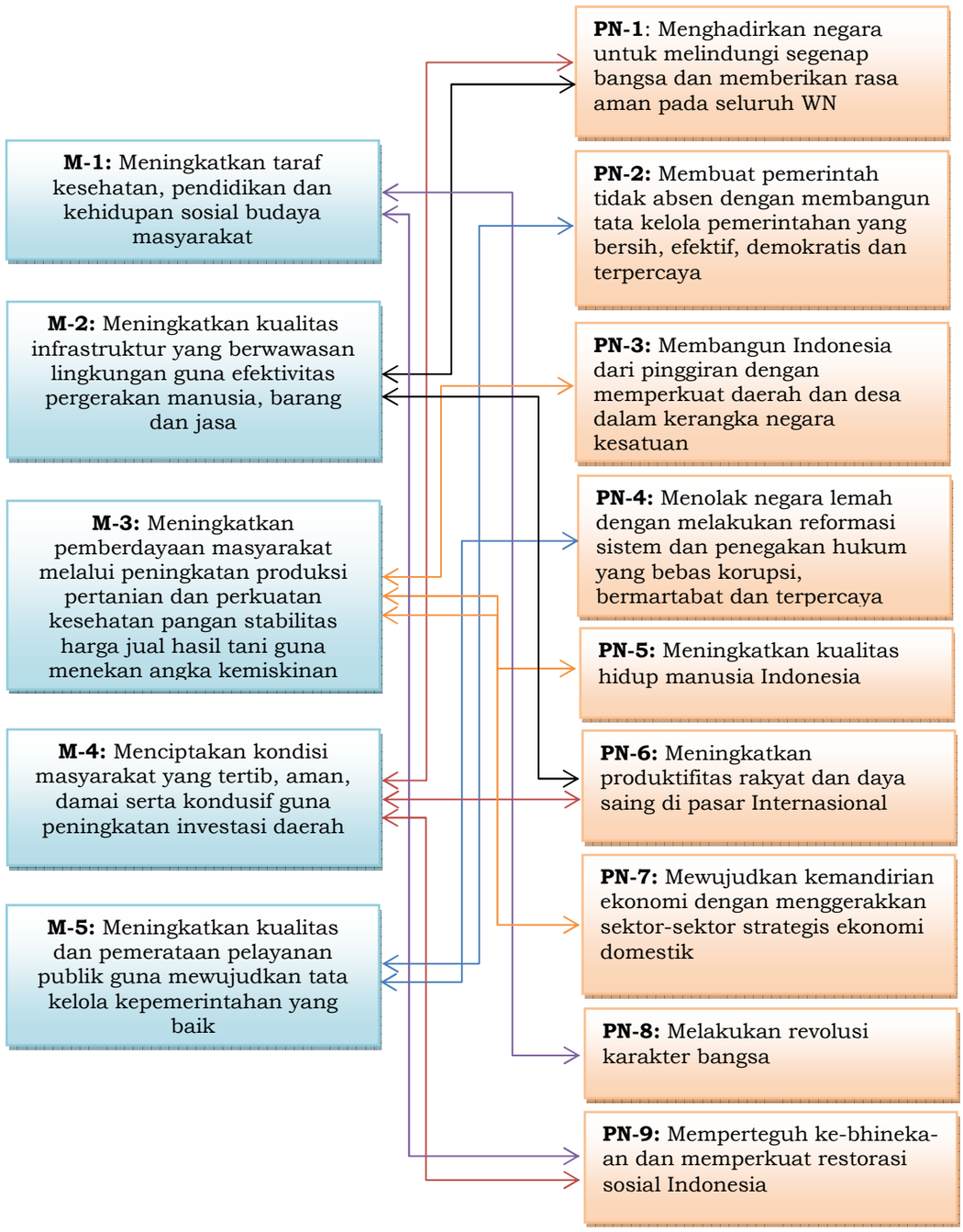
Jika ditelaah lebih dalam, uraian 5 (lima) misi Kabupaten Lampung Tengah berkaitan erat dengan agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita II) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Misi ke-1, Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, terkait dengan Prioritas Nasional 8 dan 9, dimana Misi ke-1 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas; mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau; meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, serta mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi ke-2, Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa, terkait dengan Prioritas Nasional 1 dan 6, dimana Misi ke-2 ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah; dan mewujudkan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Misi ke-3, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan, terkait dengan Prioritas Nasional 3, 5 dan 7, dimana Misi ke-3 ini bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan, mewujudkan kampung unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; mewujudkan daya dukung investasi bagi pembangunan kampung yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja; serta mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.



Gambar 5.1 Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Prioritas Nasional (Nawa Cita II)

Misi ke-4, Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah, terkait dengan Prioritas Nasional 1, 6 dan 9, dimana Misi ke-4 ini bertujuan mewujudkan kondisi

aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat; menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat; dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Misi ke-5, Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik, dengan Prioritas Nasional 2 dan 4, dimana Misi ke-5 ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas; dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama.

Tabel 5.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025, Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Misi & Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Misi RPJMD Kab. Lampung Tengah Tahun 2021- 2026	Misi RPJPD Kab Lampung Tengah 2005-2025	Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	Misi RPJMN 2020-2024	Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024
Misi ke-1: Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat	Misi ke-1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius	Misi ke-3: Meningkatkan Kualitas SDM, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas	Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	• Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Misi ke-2: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa	Misi ke-4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras, dan serasi	Misi ke-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	• Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Misi ke-3: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga	Misi ke-2: Mewujudkan Sistem Agribisnis yang maju dan Tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian	Misi 5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing Misi ke-3: Pembangunan	• Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan • Mengembangkan

jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan	masyarakat		yang merata dan berkeadilan	wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Misi ke-4: Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah	Misi ke-3: Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatanAgama, budaya, politik dan hukum secara demokratis dan berkeadilan	Misi 1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai	Misi ke-6: Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Misi ke-7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	• Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Misi ke-5: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik	Misi ke-5: Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*	Misi 2: Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya Misi ke-9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	• Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN 2020-2024, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat									
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,16	70,65	71,14	71,63	72,12	72,61	73,08
Sasaran 1: Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indek	89,87	90,27	90,68	91,08	91,49	91,89	92,29
	Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional (jenis)	Persen	17,86	17,86	21,43	25	28,57	32,14	32,14
Sasran 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	7,58	7,6	7,62	7,64	7,66	7,68	7,7
	Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,97	12,98
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indek	N/A	N/A	13	14	15	16	17
Sasaran 3: Meningkatnya aksesibiltas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	69,84	69,94	70,04	70,14	70,24	70,34	70,44
	Prevalensi intervensi stunting	Persen	13,34	12,7	12,06	11,42	10,78	10,14	9,5

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Sasaran 4: Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,71	0,66	0,61	0,56	0,51	0,46	0,41
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	N/A	N/A	57	60	64	67	70
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa									
Tujuan 1: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Cakupan rata-rata peningkatan kondisi infrastruktur	Persen	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	85,67
	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	Persen	3,16	16,95	30,73	44,52	58,30	72,09	85,87
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	52	61,83	62,41	63,00	63,58	64,16	64,74
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5
	Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten	Persen	86,36	88,36	89,36	90,36	91,36	92,36	93,36
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	82	83	85	85	86	86	86
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C	0,57	0,58	0,6	0,6	0,62	0,63	0,63
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi	Persen	91,87	92,79	93,72	94,65	9560	96,56	97,52
	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Persen	93,02	94,2589	95,498	96,737	97,976	99,2152	99,2152
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perumahan dan	Jumlah Luas kawasan kumuh	Ha	61,77	52,33	43,61	34,89	26,17	17,45	8,73

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
permukiman masyarakat	Rumah layak Tidak huni	Persen	27,18	23,74	21,74	17,40	13,92	11,13	8,91
	Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	89,5	89,6	91,6	93,28	94,62	95,7	96,56
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	94,3	94,44	95,44	96,35	97,08	97,67	98,13
Sasaran 5: Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	55	74	74,5	75	75,5	76	76,5
	Indeks kualitas udara	IKU	72	85	86	87	88	89	90
	Indeks tutupan lahan	ITL	30	31	32	33	34	35	36
Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang	Persen	78	78	80	82	84	86	88
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan									
Tujuan 1: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,02	0,1	1,2	2,2	3,3	4,4	5,5
	Indeks Gini	Indeks	0,304	0,299	0,293	0,288	0,282	0,277	0,271
	PDRB Perkapita (Juta)	Juta	55,48	56,88	58,28	59,68	61,08	62,48	63,88
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,22	3,86	3,5	3,14	2,78	2,42	2,08

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
penanggulangan kemiskinan yang terpadu	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,82	11,52	11,22	10,92	10,62	10,32	10
Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Skore PPH	Score	85,2	86,1	86,7	87,2	88	88,5	89
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	36,09	36,4	36,8	37	37,3	37,7	38
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,74	10	11	11,5	12	12,5	13
	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB	Persen	22,54	22,9	23,3	23,7	24	24,5	25
Sasaran 2: Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	8,9
Sasaran 3: Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	18,04	20	20	20	20	20	20
Sasaran 4: Meningkatkan iklim investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	8,7	10	10	10	10	10	10
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indek	0,6932	0,7141	0,735	0,7559	0,7768	0,7977	0,8186

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Sasaran 6: Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,05	73,48	73,9	74,33	74,75	75,18	75,6
Sasaran 7: Meningkatnya penanganan masalah kesejangan sosial	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	N/A	4	4	4	4	4	20
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah									
Tujuan 1: Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas (per 10000)	Rasio	4,5	4,25	4	3,75	3,5	3,25	3
	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	N/A	N/A	N/A	72	73	74	75
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian konflik sosial	Kali	0	0	0	0	0	0	0
Sasaran 2: Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	Persen	N/A	10	10	10	10	10	10

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Indek	82	72,16	62,32	52,48	42,64	32,8	22,96
Visi: Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya									
Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik									
Tujuan 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	N/A	N/A	N/A	65	67	69	73
Sasaran 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks SPBE	Indek	N/A	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3
	Nilai AKIP Pemerintah Kab. Lampung Tengah	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	A
	Indek Inovasi Daerah	Indek	1.705	1.725	1.745	1.765	1.785	1.800	1.820
Sasaaran 2: Mewujudkan birikrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indek	55	56	57	58	59	60	61
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	85,01	85,01	86,72	88,81	89,47	90,1	90,5

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Permendagri 86/2017). Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah *(value added)* pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Lampung Tengah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan seta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan TI untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
				Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
				Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya
			Meningkatnya aksesibiltas, kualitas dan derajat kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif mapun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
			Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga
			Meningkatknya keadilan dan kesetaraan Gender, prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan Pramuka
				Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga
2	Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, melalui pembangunan dan rehabilitasi
				Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih
			Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan
			Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh, dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru
				Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan SDA lingkungan hidup sesuai daya dukung daya tampung
				Meningkatkan pengelolaan sampah dengan memperluas area pelayanan sampah, pengolahan sampah di TPA, dan pengurangan sampah (3R)
			Meningkatnya kualitas penataan ruang berwawasan lingkungan	Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah
3	Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, penguatan kapasitas sumber daya pertain, serta penanganan bencana pertanian
				Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
				Meningkatkan produktivitas perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik, pendampingan pemasaran, industri pengolahan perikanan, dan penyediaan sarana produksi perikanan
				Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau
				Meningkatkan sarana distribusi perdagangan, mempermudah perijinan serta pendafataran perusahan perdagangan, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah
				Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat peetumbuhan ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja local

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				Meningkatkan kunjungan wisata dan Mengembangkan daerah tujuan wisata unggulan dan destinasi wisata baru, agrowisata dan ekowisata, serta infrastruktur pengembangan pariwisata
			Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	• Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. • Meningkatkan kontribusi BUMD dalam upaya peningkatan PAD
			Meningkatknya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Mendorong perkembangan IKM, UMKM, dan koperasi
			Meningkatnya iklim investasi daerah	Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi,pemasaran investasi dan kemudahan perizinan berusaha di daerah
			Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMKam, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Kampung, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kampung
			Menurunya angka pengangguran	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang telah dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
				Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan/hubungan industrial

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
4	Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah	Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Peningkatan kondusivitas daerah, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
			Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana
5	Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
				Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
				Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi Iptek

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
				Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah
				Pengembangan e-goverment untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open goverment) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau
				Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM persandian
				Peningkatan implementasi *single data* didukung teknologi informasi terintegrasi
			Mewujudkan birokrasi yang kapabel	Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
				Meningkatkan pengelolaan kearsipan melalui dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan
				Peningkatan kualitas pelayanan transmigran
				Meningkatkan kualitas penyelenggaan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan
				Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta pemulihan perekonomian dan sosial dengan semangat Gotong Royong	Percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM	Pengembangan sumber daya manusia dan Infrastruktur pendukung perekonomian daerah serta pementapan tata kelola pemerintahan	Pembangunan ekonomi kerakyatan didukung sumberdaya manuasia yang berdaya saing	Penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didukung pelayanan publik yang berkualitas	Perwujudan rakyat Lampung Tengah Berjaya

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2021

   Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: ***"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta pemulihan perekonomian dan sosial dengan Semangat Gotong Royong".*** Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

   a. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pengendalian stunting;
   b. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan semangat gotong royong;
   c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan ketahanan pangan;
   d. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
   e. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   f. Peningkatan keaman, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

   Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: ***"Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kesehatan Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan SDM".*** Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

   a. Peningkatan kualitas infrastruktur berwawasan Lingkungan;
   b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan;
   c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
   d. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
   e. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Umat Beragama

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

   Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: ***"Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan"***

   Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

   a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
   b. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
   c. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
   d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
   e. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

   Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: ***"Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"***

   a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
   b. Pengembangan potensi ekonomi unggulan dan investasi daerah
   c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
   d. peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.
   e. Peningkatan kondisvitas wilayah dan kerukunan umat beragama

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

   Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: ***"Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas"***

a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
b. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan
c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
d. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas
e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: ***"Perwujudan rakyat Lampung Tengah Berjaya"***

a. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal
c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

6.2.2 Isu Strategi dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, maka terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti di dalam program pembangunan daerah pada dokumen RPJMD dan program perangkat daerah/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra perangkat daerah berdasarkan isu strategis sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tabel 6.3
Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Sosial

Isu Strategis	Rekomendasi
• Menurunkan Persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah	• Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. • Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya • Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya. • Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat • Meningkatkan infrastuktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah. • Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum). • Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima. • Mewujudkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah. • Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
• Meningkaktan peran dan fungsi lembaga kesehatan	• Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Lampung Tengah. • Memberikan *update* data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan. • Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait.
• Meningkatkan Pelayanan Dasar Bidang Sosial (SPM)	• Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes) dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. • Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. • Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia. • Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah.
• Menurunkan Angka Stunting	• Memperbaharui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten. • Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). • Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah. • Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 5x selama masa kehamilan,pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe). • Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap,vitaminA,serta pemberian makanan tambahan. • Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 Tahun.
• Prevalesi anemia pada Ibu Hamil.	• Memberikan sosialiasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. • Mengadakan program periksa kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan. • Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil. • Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada saat kehamilan untuk menurunkan komplikasi saat persalinan.

Isu Strategis	Rekomendasi
• Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	• Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minia 5 (lima) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa. • Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI. • Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif. • Melakukan sosialiasi tentang cara mendapatkan ASI ekslusif untuk ibu hamil. • Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus di konsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi.
• Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	• Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. • Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta. • Pemberian pembelajaran tentang pembukaan usaha berbasis ekonomi kreatif. • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes), rumah sakit daerah maupun swasta. • Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.
• Meningkatkan Pelayanan tanggap siaga kesehatan	• Melakukan perbaharuan *database* infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun. • Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. • Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 puskesmas, pustu maupun poskesdes.
• Meningkatkan Pelayanan terhadap PUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka • panjang (MKJP)	• Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. • Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan. • Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi.
• Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan	• Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. • Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA) • Pemberian jaminan pagi tenaga pengajar.
• Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	• Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban. • Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal. • Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan.
• Meningkatkan pelayanan • KB dan alcon terhadap pasangan usia subur	• Pemberian sosialiasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda.

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Tabel 6.4
Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Ekonomi

Isu Strategis	Rekomendasi
• Meningkatkan PDB Perkapita	• Peningkatan infrastruktur daerah. • Melakukan pelatihan tentang indus tri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lmapung Tengah. • Meningkatkan pembangunan Industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta. • Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata.
• Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata.	• Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman. • Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata. • Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupate Lmapung Tengah. • Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau pariwisata.
• Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah	• Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah. • Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta. • Peningkatan kualitas dan cangkupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi.
• Mengurangi Persentase tingkat kemiskinan	• Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta. • Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif. • Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif.
• Mengurangi Jumlah desa tertinggal	• Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur.
• Mengoptimalkan PAD	• Membuat *workshop* tentang optimaslisasi pajak yang di ikuti oleh SKPD. • Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah. • Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdasarakan data dari PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Tabel 6.5
Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Lingkungan

Isu Strategis	Rekomendasi
• Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	• Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. • Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih. • Melakukan sosialiasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. • Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air.

Isu Strategis	Rekomendasi
Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	• Meningkatkan IPAL komunal. • Meningkatkan PAMSIMAS. • Melakuan sosialisasi pentingnya STBM.
• Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana	• Sosialiasi BPBD terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat. • Pelatihan tanggap bencana oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah. • Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi.
• Mengurangi timbunan sampah perkotaan	• Membukan TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada. • Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura.
• Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	• Melakukan perencanaan kesesuaian lahan. • Menggunakan tanaman yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah. • Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan.
• Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah	• Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan. • Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang. • Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan. • Melakukan sosialiasasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar.
• Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	• Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan krisis. • Pengembangan keanekaragaman hayati. • Pembuatan terasering atau sengkedan. • Pengoptimalan fungsi DAS. • Penggemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organic.

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Tabel 6.6
Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Isu Strategis	Rekomendasi
• Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang	• Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh aparatur negara kepada masyarakat di Instansi atau pusat pendidikan.
• Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif	• Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif.

Isu Strategis	Rekomendasi
• Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	• Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.3.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Berdasarkan tujuan penataan ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah, kebijakan serta strategi penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan pertanian modern, berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia usaha. Dengan strategi kebijakan sebagi berikut:
   a. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan ketahanan pangan.
   b. Meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian daerah dan sebagai lumbung padi Provinsi Lampung.
   c. Meningkatkan dan mengembangkan Kawasan agropolitan dan minapolitan mendukung pembangunan wilayah.
   d. Meningkatkan dan mengembangkan industry rakyat, kecil dan menengah.
   e. Meningkatan dan mengembangkan sistem distribusi, pemasaran, perdagangan dan jasa.
   f. Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha kecil menengah.
   g. Menumbuh-kembangkan produktifitas dan inovasi produk serta usaha baru yang berkualitas
   h. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
2) Perkuatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah. Dengan strategi kebijakan sebagi berikut:
   a. Memantapkan dan meningkatkan sistem pusat pelayanan kegiatan wilayah promosi menjadi pusat kegiatan wilayah secara nasional dan sebagai pusat koleksi/distribusi skala kabupaten, atau beberapa kabupaten

b. Meningkatkan jangkauan skala pelayanan pusat kegiatan lokal promosi menjadi pusat kegiatan lokal dan memantapkan pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal.
c. Mempertahankan fungsi dan luas kawasan hutan dan kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten.
d. Mengembangkan kawasan budidaya secara optimal sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan serta arahan peruntukkan ruangnya.
e. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah dan pengerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah.

3) Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumber daya air (irigasi) yang terpadu dan merata
b. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang
c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, industri dan perdagangan
d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya
e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.

4) Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai dengan potensi lestari. Dengan strategi kebijakan sebagi berikut:
a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau dan tawar;
b. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan;
c. Mengembangkan industri pengolahan perikanan.

5) Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dengan strategi kebijakan sebagi berikut:

a. Meningkatkan pengelolaan energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang dan lestari
b. Menetapkan dan mempertahankan kawasan lindung sesuai fungsinya, serta membatasi pengembangan aktifitas budi daya pada kawasan lindung baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam
c. Menjaga dan mengendalikan ekploitasi dan ekplorasi penambangan bahan galian dan perambahan hutan pada kawasan lindung
d. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sebagai kawasan pengembangan terbatas dan mempersiapkan mitigasi bencana.
e. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan.
f. Mendeliniasi serta menetapkan luasan lahan pangan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan regional dan nasional.

6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dengan strategi kebijakan sebagi berikut:
   a. Mengembangkan kawasan pendidikan terpadu dan meningkatkan mutu serta pelayanan pendidikan.
   b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan.
   c. Mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan.
   d. Memberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan.
   e. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan.
7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dengan strategi kebijakan sebagi berikut:
   a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanaan dan keamanan.
   b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

6.4 Program Pembangunan Daerah

6.4.1 Program Unggulan Kabupaten Lampung Tengah

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan upaya strategis dan perlu dikedepankan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi:

1. Pendidikan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berjaya adalah:
   a. Memperluas akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
   b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
   c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM tenaga pendidik dan tenaga honorer.
   d. Pemerataan keunggulan tempat pendidikan.
   e. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi dan kurang mampu.
   f. Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah.
   g. Memberdayakan pondok pesantren serta memberikan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid.
2. Kesehatan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesehatan berjaya adalah:
   a. Mendorong peran serta kader-kader kesehatan dan bidan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
   b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan pemerataan jangkauan penanganan Kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di wilayah timur dan di wilayah barat.
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan obat di puskesmas.
   d. Meningkatkan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu).
   e. Menjadikan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sebagai rumah sakit yang ramah dan berkualitas.
3. Pemuda Milenial Berjaya. Agenda Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan wadah yang menghimpun, mengakomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UMKM serta ekonomi kreatif.
4. SIJALU Berjaya. Untuk mewujudkan SIJALU Berjaya, agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat akan melakukan:
   a. Percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun; dan

b. Pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan/ kampung sebagai akses transportasi hasil bumi.

5. Petani Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan petani berjaya adalah:
   a. Memberikan bantuan usaha bagi kelompok tani.
   b. Memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada KWT, Gapoktan, dan Petani Mandiri.
   c. Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat.
   d. Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
   e. Penguatan regional Sentra Produk Pertanian dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada petani mulai dari pra panen, saat panen, dan pasca panen.
6. BUMKAM Berjaya. Agenda pemerintah daerah dalam upaya mendorong peran BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan.
7. Keberagaman Umat Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keberagaman umat berjaya adalah:
   a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya serta golongan.
   b. Meningkatkan dana bagi pengelola keamanan di kampung (Linmas dan Perangkat Kampung).
   c. Bekerja sama dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalah gunaan Narkotika.
   d. Memfasilitasi agar terjadi komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat.
   e. Mendorong dan menjaga upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal.
   f. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya, dan adat istiadat
8. Pelayanan Berjaya. Agenda pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan berjaya adalah:
   a. Menjaring aspirasi dan melayani masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam satu minggu.
   b. Melakukan jejak pendapat dengan turun langsung dan berkantor di Kampung dan kecamatan yang telah dijadualkan
   c. Memangkas rantai birokrasi demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat.

d. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan (skrining) Kesehatan gratis di di Kampung dan kecamatan secara berkala.
e. *DPMPT mobile* yang terjadwal di setiap Kecamatan.
f. Memudahkan segala aspek perizinan usaha sampai ke tingkat kampung/kelurahan, menggratiskan perizinan SIUP dan TDP dan selesai dalam satu hari.
g. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum.

Program unggulan daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam lima tahun kedepan dengan penjabaran kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.7
Penjabaran Program Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 Sebagaimana Dimutakhirkan Melalui Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pendidikan Berjaya	1.01 Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah
					Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah
					Pembangunan Laboratorium
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah
					Pengadaan Perlengkapan Siswa
					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
					Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
					Pengadaan Perlengkapan PAUD
					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Kesehatan Berjaya	1.2 Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
					Pembangunan Puskesmas
					Pengembangan Rumah Sakit
					Pengembangan Puskesmas

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit
					Operasional Pelayanan Puskesmas
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
3	Pemuda Milenial Berjaya	2.07 Tenaga Kerja	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		2.13 Koperasi dan UKM	Program pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
			Program pemberdayaan usaha menegah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
				Pemangku Kepentingan	
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
		2.19 Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
		3.26 Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
4	SIJALU Berjaya	1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
					Pembangunan Jalan
					Pelebaran Jalan Menuju Standar
					Pelebaran Jalan Menambah Lajur
					Rekonstruksi Jalan

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Rehabilitasi Jalan
					Pemeliharaan Berkala Jalan
					Pemeliharaan Rutin Jalan
					Pembangunan Jembatan
					Pembangunan Flyover
					Pembangunan Underpass
					Pembangunan Terowongan/Tunnel
					Penggantian Jembatan
					Pelebaran Jembatan
					Rehabilitasi Jembatan
					Pemeliharaan Rutin Jembatan
					Pemeliharaan Berkala Jembatan
					Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
					Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
					Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
5	Petani Berjaya	3.27 Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
					Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
			Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
					Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
					Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
					Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
				Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
					Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
		2.09 Pangan	Program Peningkatan	Penyediaan dan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
			Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Neraca Bahan Makanan
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
				Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
6	BUMKAM Berjaya	2.17 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Admnistrasi Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
7	Keberagaman Umat Berjaya	8.1 Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Program Peningkatan Kewasdaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
8	Pelayanan Berjaya	1.2 Kesehatan	Program pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

No	Program Unggulan	Urusan	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2020		
			Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		2.18 Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		7.01 Unsur Kewilayahan (kecamatan)	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		5.02 keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		5.01 Perencanaan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

6.4.2 Program Rekomendasi KLHS Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 6.8

Rekomendasi KLHS dan Program Kabupaten Lampung Tengah

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
1	Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
2	Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional dan penyiapan tempat berusaha bagi pedagang kreatif.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
3	Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya.	Program perencanaan tenaga kerja. Program pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan Usaha mikro (UMKM) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi Dinas Koperasi dan UKM Dinas Penanaman Modal PTSP
4	Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat	Program pelatihan kerja dan produktifitas kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi
5	Meningkatkan infrastuktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah.	Program peningkatan jalan dan jembatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas Bina Marga
6	Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum)	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	BPPRD
7	Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Sekretariat Daerah Dinas Koperasi dan UKM
8	Mewujudkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
9	Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
10	Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Memberikan update data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan.		

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.		
14	Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia.		
15	Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
16	Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu		
17	Memperbaharui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
18	Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;	Dinas Kesehatan
19	Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat,	Dinas Kesehatan
20	Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 5x selama masa kehamilan,pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe).		Dinas Kesehatan
21	Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap,vitaminA,serta pemberian makanan tambahan.		Dinas Kesehatan
22	Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 Tahun.		
23	Memberikan sosialiasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
24	Mengadakan program periksa kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan		Dinas Kesehatan
25	Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi)		Dinas Kesehatan

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	pada ibu hamil.		
26	Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada		Dinas Kesehatan
27	Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minia 5 (lima) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Kesehatan
28	Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI		
29	Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif.		
30	Melakukan sosialiasi tentang cara mendapatkan ASI ekslusif untuk ibu hamil		
31	Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus di konsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi		
32	Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
33	Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta		
34	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes), rumah sakit daerah maupun swasta.		
35	Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.		
36	Melakukan perbaharuan *database* infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
37	Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	Tengah		
38	Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 puskesmas, pustu maupun poskesdes.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
39	Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan keluarga berencana,	Dinas Kesehatan
40	Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
41	Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi		Dinas Kesehatan
42	Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah	Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Kesehatan
43	Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	Pemberian jaminan bagi tenaga pengajar		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban	Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Peremèpuan dan Perlindungan Anak
46	Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal		Dinas Pemberdayaan Peremèpuan dan Perlindungan Anak
47	Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48	Pemberian sosialiasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda	Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga berencana.	Dinas Pengendalian penduduk dan KB
49	Peningkatan infrastruktur daerah	Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Bina Marga Dinas Pengairan Dinas Perumahan Rakyat Dan

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
		(Sda) Program Pengembangan Perumahan.	Kawasan Pemukiman
50	Melakukan pelatihan tentang industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lmapung Tengah.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
51	Meningkatkan pembangunan Industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta.	Program Pengembangan Iklim Penanaman, Modal Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal PTSP
52	Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
53	Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pariwisata Dinas Bina Marga
54	Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata.		
55	Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupaten Lampung Tengah.		
56	Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau pariwisata.		
57	Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga
58	Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta.	Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
59	Peningkatan kualitas dan cangkupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pengairan
60	Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
61	Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan UKM
62	Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
63	Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur	Masyarakat Hukum Adat	Kampung
64	Membuat *workshop* tentang optimaslisasi pajak yang di ikuti oleh SKPD.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPRD
65	Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah.		
66	Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdasarakan data dari PDRB Kabupaten Lampung Tengah.		
67	Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
68	Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih.		
69	Melakukan sosialiasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.		
70	Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
71	Meningkatkan IPAL komunal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
72	Meningkatkan PAMSIMAS	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regiona Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
73	Melakuan sosialisasi pentingnya STBM	lProgram Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
74	Sosialiasi BPBD terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
75	Pelatihan tanggap bencana oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah		
76	Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi.	Program Pengembangan Perumahan Program Penanganan Bencana	BPBD

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
77	Membukan TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup
78	Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
79	Melakukan perencanaan kesesuaian lahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pengairan
80	Menggunakan tanaman yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah.		Dinas Pengairan
81	Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan.		Dinas Pengairan
82	Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
83	Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
84	Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan.		
85	Melakukan sosialiasasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar.		
86	Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan krisis	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
87	Pengembangan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
88	Pembuatan terasering atau sengkedan		Dinas Pengairan
89	Pengoptimalan fungsi DAS	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pengairan
90	Penggemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organik		
91	Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh aparatur negara kepada masyarakat di Instansi atau pusat pendidikan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Serkretariat Daerah
92	Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	Dinas PP dan PA Badan Kesbangpol

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
		Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
93	Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	BKPSDM Dinas Komunikasi dan Informatika

6.6 Program Pembangunan Daerah

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan di atas, maka untuk pelaksanaaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan Nomenklatur yang ada beserta pagu indikatif sebagaimana dapat di lihat dalam tabel 6.9

Tabel 6.9
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lampung Tengah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat																
Tujuan ke-1 :Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,16	70,65		71,14		71,63		72,12		72,61		73,08		
Sasaran ke-1 : Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indek	89,87	90,27		90,27		90,68		91,08		91,49		91,89		
	Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	persen	17,86	17,86		21,43		25,00		28,57		32,14		32,14		
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	0,00056	6E-04	1.500.000.000	6E-04	1.750.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000	100%	97.742.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA
Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	100	100	170.550.000	100	762.372.130	100	785.243.294	100	808.800.593	100	852.512.155	100	937.763.370	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP& PA

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	persen	1	100	736.374.820	100	520.550.000	100	536.166.500	100	552.251.495	100	568.819.040	100	585.883.611	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA
	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun data terpilah	persen		100	49.800.000		49.800.000	100	49.800.00	100	52.290.000	100	54.904.500	100	57.649.725	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase pemenuhan hak dasar anak	persen		100	257.587.225	100	243.110.000	100	250.403.300	100	257.915.399	100	265.652.861	100	273.622.447	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA
	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kelurahan, TESA, PISA)	persen		100		100		100		100		100		100		
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	persen		100	300.000.300	100	302.258.800	100	317.371.740	100	333.240.328	100	349.902.345	100	367.397.463	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	persen		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standar	persen		100		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	0,39	0,44	928.129.000	0,48	1.398.129.000	0,55	2.160.000.000	0,60	1.465.000.000	0,66	1.130.000.000	0,73	1.500.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	2,61	2,79		2,96		3,13		3,31		3,48		3,65		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	persen	17,86	17,86	1.292.887.500	21,4	1.685.118.000	25,00	2.035.118.000	28,57	2.444.618.000	32,14	2.504.618.000	32,14	2.529.618.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase kwartir ranting (kecamatan) pramuka yang aktif	persen	N/A	71,43	350.000.000	78,57	350.000.000	85,71	350.000.000	89,29	350.000.000	96,43	350.000.000	96,43	350.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Sasaran ke-2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan seta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	tahun	9,26	9,4		9,5		9,55		9,6		9,8		10		
	Lama harapan sekolah (EYS)	tahun	12,26	12,28		12,3		12,32		12,34		12,36		12,40		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indek	N/A	N/A		13		14		15		16		17		
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	83,00	84,00	300.150.500	85,00	351.018.250	86,00	485.000.000	87,00	549.000.000	88,00	657.000.000	89,00	810.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perpustakaan
	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	persen	1,16	1,14		2,50		2,80		4,00		3,40		4,00		
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	rasio	0,03	0,03		0,03		0,04		0,04		0,08		0,10		
	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	unit	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		0,01		
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	persen	5,00	5,00		5,00		7,00		7,00		8,00		10,00		
Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (%)	persen				25,00	22.000.000	30,00	29.000.000	35,00	38.000.000	40,00	49.000.000	42,00	55.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kearsipan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	persen	64,32	64,34	252.391.466.200	64,36	211.183.582.650	64,38	217.519.090.130	64,40	224.044.662.833	64,42	230.766.002.718	64,44	232.766.002.718	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	persen	99,80	99,8		99,8		99,9		99,9		95,8		95,8		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	persen	24,70	60,0		65,0		70,0		72,0		74,0		76,0		
Program Pendidik dan tenaga pendidik	Presentase Guru yang besertifikasi	persen	56,09	58	21.894.560.100	60	22.898.000.000	62	24.042.900.000	64,00	25.245.045.000	66,00	26.507.297.250	68,00	26.507.297.250	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	persen	70	72	707.115.500	72	898.500.000	74	944.425.000	76	991.646.250	78	1.040.305.000	80	1.092.320.250	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Situs budaya yang lestari	persen	0,8	0,82	394.489.300	0,82	414.213.765	0,84	434.924.453	0,86	456.670.676	0,86	479.504.210	0,88	503.479.420	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kebudayaan
Sasaran ke-3 :Meningkatnya aksesibiltas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	tahun	69,84	69,94		70,04		70,14		70,24		70,34		70,44		
	Prevalensi intervensi stunting	persen	13,34	12,7		12,06		11,42		10,78		10,14		9,5		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Rogram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	rasio			133.009.397.077		178.141.120.615		183.485.354.233		188.989.914.860		194.659.612.306		198.552.804.552	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayu baru lahir	persen		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan keseahatan sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen		100		70		73		75		85		90		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Kampung/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen		100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	persen	75	5	288.000.000	5	442.242.150	5	440.000.000	5	440.000.000	5	440.000.000	5	440.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Kefarmasian (Apotik dan toko obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar yang diawasi	persen	85	90	714.792.050	95	523.826.000	100	775.000.000	100	775.000.000	100	775.000.000	100	775.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Organisasi kemasyarajatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	persen		100	330.881.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesehatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Sasaran ke-4 : Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	persen	0,71	0,66		0,61		0,56		0,51		0,46		0,41		
Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifik Fertility rate/ASFR 15-19)	persen	24.16	24	84.865.300	21	67.612.100	20	105.000.000	18	111.000.000	16	117.000.000	14	123.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP dan KB
	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	persen	20.9	21.0		21.0		21.0		21.0		21.0		21.0		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	persen	27,78	41,66		55,55		69,44		83		97		100		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen	27,78	41,66		55,55		69,44		83		97		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		60	60	7.823.445.500	70	7.931.303.000	75	8.036.409.320	80	8.059.413.320	85	8.075.418.000	90	6.986.423.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP dan KB
	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		43,67	53		63		73		83		87		93		
	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		6,75	6,78		6,81		6,84		6,87		6,9		6,93		
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		39,83	39,86		39,89		39,92		39,95		39,98		40,02		
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		100	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		91,14	91,17		91,20		91,23		91.26		91,29		91,32		
	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah		70	75		80		83		85		87		88		
	Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI		0,35	0,38		0,42		0,46		0,51		0,56		0,61		
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		100	100	108.990.000	100	174.999.700	100	180.000.000	100	182.000.000	100	185.000.000	100	188.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP dan KB
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		98,25	98,28		98,25		98,34		98,37		98.40		98,43		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		96,13	96,16		96,13		96,22		96,25		96,28		96,31		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		98,19	98,21		98,19		98,27		98,30		98,33		98,36		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		92,21	92,24		92,21		92,31		92,34		92,37		92,40		
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		92,16	92,19		92,16		92,25		92,28		92,31		92,34		
Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa																
Tujuan ke-1: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan berwawasan lingkungan	Cakupan rata-rata peningkatan kondisi infrastruktur	persen	78,46	78,46		78,46		78,46		78,46		78,46		85,7		
	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	persen	3,16	16,95		30,73		44,52		58,30		72,09		85,9		
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	persen	52	61,83		62,41		63		63,58		64,16		64,74		
Sasaran ke-1: Meningkatnya kualitas	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	61,5	63,5		65,5		67,5		69,5		71,5		73,5		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	persen	86,36	88,36		89,36		90,36		91,36		92,36		93,36		
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	61,5	63,5	161.020.164.958	65,5	161.020.164.958	67,5	161.020.164.958	69,5	161.020.164.958	71,5	141.020.164.958	73,5	150.505.910.242	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memliki sertifikat kompetensi	persen	0	44,44	957.946.000,00	77,78	957.946.000,00	88,89	957.946.000,00	93,33	957.946.000,00	96,67	957.946.000,00	97,78	957.946.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
Sasaran ke-2: Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	persen	82	83		85		85		86		86		86		
	Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	v/c	0,57	0,58		0,6		0,6		0,62		0,63		0,63		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Type C	persen	75	77	265.250.000	78	3.238.600.000	80	6.038.250.000	82	6.035.500.000	82	6.211.000.000	82	6.031.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perhubungan
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau kota	persen	75	80		85		85		90		90		95		
	Prosentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik (%)	persen	80	80		85		85		87		87		87		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Jumlah Izin Trayek	kendaraan	201	190		186		170		150		150		150		
	Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	persen	62,01	60		58		55		52		52		52		
	Pemasangan Rambu-rambu	persen	18,41	20		22		25		28		28		28		
	Presentase ketersediaan Lampu Jalan	persen	70	70		73	3.058.013.050	75	3.149.753.442	78	3.244.246.045	80	3.341.573.426	82	3.441.820.629	
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dokumen inventarasasi fasilitas keselamatan perkeretaapian	dokumen	0		-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perhubungan
Sasaran ke-3 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	persen	93,02	94,26		95,5		96,74		97,98		99,22		99,22		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	26,09	26,09	37.596.168.290	26,19	37.806.152.059	26,28	20.578.425.207	26,38	21.607.346.467	26,47	22.687.713.791	26,57	23.822.099.480	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
	Presentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	persen	2,85	7,85		12,85		17,85		22,85		27,85		32,85		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Presentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	persen	-	5		10		15		20		25		30		
	Presentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	persen	4,76	9,76		14,76		19,76		24,76		29,76		34,76		
Sasaran ke-4 : Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	ha	61,77	52,33		43,61		34,89		26,17		17,45		8,73		
	Rumah tidak layak huni	persen	27,18	23,74		21,74		17,39		13,92		11,13		8,91		
	Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	persen	89,5	89,6		91,6		93,28		94,62		95,7		96,56		
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	persen	94,3	94,44		95,44		96,35		97,08		97,67		98,13		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan akses air minum	persen	89,5	89,6	23.606.086.375	91,6	30.700.000.000	93,28	33.770.000.000	94,62	37.147.000.000	95,7	40.861.700.000	96,56	44.947.870.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	persen	94,3	94,44	3.488.781.000	95,44	6.000.000.000	96,35	6.600.000.000	97,08	7.260.000.000	97,67	7.986.000.000	98,13	8.784.600.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang drainase permukiman	persen	52,33	54,86	1.750.000.000	61,86	3.500.000.000	69,49	3.850.000.000	75,59	4.235.000.000	80,47	4.658.500.000	84,38	5.124.350.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung ber IMB dan memenuhi standar keslamatan	persen	25	26	8.283.319.641	40	8.697.485.623	52	9.132.359.904	61,6	9.588.977.899	69,28	10.068.426.794	75,42	10.571.848.134	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	persen	25	38	163.760.500	40	175.000.000	52	192.500.000	61,6	211.750.000	69,28	232.925.000	75,42	256.217.500	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani	persen	72,82	76,26	2.512.370.000	78,26	6.000.000.000	82,61	9.000.000.000	86,08	9.000.000.000	88,87	9.000.000.000	91,09	9.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai	persen	18,75	19	7.295.835.200	35	8.500.000.000	48	9.350.000.000	58,4	10.285.000.000	66,72	11.313.500.000	73,38	12.444.850.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Sasaran ke-5 : Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	ika	73,58	58,34		58,44		58,54		59,64		58,74		58,84		
	Indeks kualitas udara	iku	84,35	83,98		84,08		84,18		84,28		84,38		84,48		
	Indeks kualitas lahan	itl	30,13	26,86		29,17		31,47		33,78		36,09		38,4		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan LH	dokumen	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu	persen	70	71	275.000.000	72	1.617.500.000	73	455.000.000	74	497.500.000	75	530.000.000	76	567.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	persen	80	81		82		83		84		85		86		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang Terpelihara	persen	74,07	74,07	850.000.000	77,78	670.000.000	81,48	600.000.000	85,19	600.000.000	88,89	600.000.000	92,59	600.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (Limbah B3)	Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan	persen	10	15	30.000.000	20	25.000.000	25	25.000.000	30	25.000.000	35	25.000.000	40	25.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan terhadap izin ligkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	persen	40	50	12.500.000	60	42.500.000	70	42.500.000	80	42.500.000	90	42.500.000	100	42.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
	Rasio pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	rasio				0,04		0,06		0,08		0,1		0,12		
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah MHA yg diakui pemerintah	kelompok	0	0	-	1	27.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persen	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional	orang	0	2	43.750.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk	persen	50	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah (poin)	rasio	30	31,25	105.000.000	31,88	130.000.000	32,5	245.000.000	33,75	260.000.000	35	275.000.000	36,25	290.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup
	Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah	persen	30			31		32		33		34		35		
Sasaran ke-6 : Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	persen	73,4													

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana daerah	persen	-	74	336.510.000	74	251.244.000	75	263.806.200	77	276.996.510	80	290.846.336	82	305.388.652	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah Yang Difasilitasi oleh daerah	persen	-	50	57.893.000	55	63.683.000	60	66.867.150	65	70.210.508	70	73.721.033	75	77.407.085	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanahan
Program Penyelesaian ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase realisasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum di daerah	persen				100	3.002.320.900									Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanahan
Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Produksi Pertanian Dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan																
Tujuan ke-1 : Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu	Pertumbuhan Ekonomi	persen	-1,02	**0,1**		**1,2**		**2,2**		**3,3**		**4,4**		**5,5**		
	Indeks Gini	Indeks	0,304	0,299		0,293		0,288		0,282		0,277		0,271		
	PDRB Perkapita (Juta)	Juta	55,48	56,88		58,28		59,68		61,08		62,48		63,88		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,22	3,86		3,5		3,14		2,78		2,42		2,08		
	Angka Kemiskinan	persen	11,82	11,52		11,22		10,92		10,62		10,32		10		
Sasaran ke-1 :Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan	Score PPH	nilai	85,2	86,1		86,7		87,2		88		88,5		89		
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan	persen	36,09	36,4		36,8		37		37,3		37,7		38		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
ketahan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	terhadap PDRB															
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	9,74	10		11		11,5		12		12,5		13		
	Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	persen	22,54	22,9		23,3		23,7		24		24,5		25		
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Dengan Kemandirian Pangan	rasio	30	40	870.258.000	45	896.365.740	47	923.256.712	50	950.954.414	55	979.483.046	60	1.008.867.537	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan
	Persentase Kampung yang telah memiliki lumbung pangan masyarakat	persen	33,00	34,00		41		50,00		60		70,00		82		
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	rasio	30	31	1.767.945.350	50	1.820.983.711	70	1.875.613.222	80	1.931.881.618	90	1.989.838.067	100	2.049.533.209	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan
	Persentase ketersediaan pangan	persen	30,00	31,00		50,00		70,00		80,00		90,00		100,00		
	Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)	kg/kapita/ tahun	102,18	108,09		107,55		107,02		106,48		105,94		105,40		
	Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/Thn)	kg/kapita/ tahun	101,29	76,99		79,20		81,41		83,62		85,83		88,04		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/Thn)	kg/kapita/ tahun	58,73	50,38		51,14		51,90		52,66		53,42		54,17		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Rawan Pangan	persen	25	25	242.666.000	28	400.658.500	28	421.175.000	35,71	438.175.000	35,71	464.100.000	42,8	486.075.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	persen	85	90	191.500.000	90	885.705.000	95	788.600.000	95	831.600.000	100	892.375.000	100	962.900.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	persen	2	4	582.574.500	6	871.200.550	8	965.409.245	Persen	1.070.456.538	12	1.187.709.833	12	1.187.709.833	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian
	Jumlah populasi peternakan (sapi)	ekor	311.259	317484	2.763.136.000	323833	935.663.400	330310	1.015.386.290	336916	1.102.389.297	343654	1.197.365.822	350527	1.301.076.881	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha)	kelapa sawit 2,894 ton/ha, karet 0,920 ton/ha, kakao 0,747 ton/ha, tebu 6,649 ton/ha, lada 0,829 ton/ha, kelapa dalam 1,165 ton /ha		kelapa sawit 3,009 ton/ha, karet 0,938 ton/ha, kakao 0,769 ton/ha, tebu 6,848 ton/ha, lada 0,837 ton /ha, kelapa dalam 1,188 ton/ha		kelapa sawit 3,130 ton/ha, karet 0,957 to/ha, kakao 0,793 ton/ha, tebu 7,053 ton/ha, lada 0,845 ton/ha, kelapa dalam 1,212 ton/ha		kelapa sawit 3,255 ton/ha, karet 0,976 ton/ha, kakao 0,816 ton/ha, tebu 7,265 ton/ha, lada 0,84 ton/ha, kelapa dalam 1,236 ton/ha		kelapa sawit 3,385 ton/ha, karet 0,995 ton/ha, kakao 0,840 ton/ha, tebu 7,482 ton/ha, lada 0,862 ton/ha, kelapa dalam 1,261 ton/ha		kelapa sawit 3,520 ton/ha, karet 1,015 ton/ha, kakao 0,865 ton/ha, tebu 7,707 ton/ha, lada 0,871 ton/ha, kelapa dalam 1,286 ton/ha		kelapa sawit 3,661 ton/ha, karet 1,036 ton/ha, kakao 0,891 ton/ha, tebu 7,938 ton/ha, lada 0,880 ton/ha, kelapa dalam 1,311 ton/ha		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	persen	95	99.96	4.978.180.000	99.96	6.873.918.000	99.96	7.437.297.300	99.96	7.953.933.550	99.96	8.592.647.175	99.96	8.592.647.175	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian
	Persentase peningkatan sarana dan rasarana peternakan dan perkebunan (0,1%)	persen	10	10	257.123.000	11	457.123.000	12	498.154.300	13	543.054.680	14	592.199.346	15	646.000.437	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	81	81	335.955.500	81	408.004.160	82	448.804.576	83	493.685.034	84	543.053.537	85	597.358.891	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanganggulangan bencana	persen		12,02	83.720.000	12,02	197.190.000	12,02	209.010.000	12,02	218.940.000	12,02	228.440.000	12,02	228.440.000	PD Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian
	Persentase Luas lahan perkebun-an yang tertangani akibat bencana	persen	0,01	0,02	67.245.000	0,03	94.087.000	0,04	103.495.700	0,05	113.845.270	0,06	125.229.797	0,07	137.752.777	
Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	persen	3	4,1	3.520.749.200	4,5	3.618.809.200	4,5	550.700.000	4,5	605.700.000	4,5	666.400.000	4,5	666.400.000	PD Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian
	Persentase peningkatan sarana dan pra-sarana peternak-an & perkebunan (0,1%)	persen	10	10	257.123.000	11	457.123.000	12	498.154.300	13	543.054.680	14	592.199.346	15	646.000.437	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan Tangkap (ton)	ton	5165	5.165	1.195.000.000	5.217	1.655.000.000	5.269	1.822.000.000	5.322	1.934.000.000	5.375	2.141.000.000	5.428	2.304.000.000	PD Penanggung-jawab Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
	Jumlah POKMASWAS dan benih yang di restocking			1 kelomp ok, 95000 ekor		2 kelompo k, 100000 ekor		2 kelomp ok, 150000 ekor		2 kelomp ok, 200000 ekor		2 kelomp ok, 200000 ekor		2 kelomp ok, 200000 ekor		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	ton	42329	3573	1.172.000.000	3626	1.266.838.500	3680	1.334.838.500	3735	1.418.060.000	3790	1.502.065.000	3847	1.586.065.000	PD Penanggung-jawab Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Pokdakan /UPR yang dibina			15		20		20		20		20		20		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP		-	1 kelompok	50.000.000	2 kelompok	105.000.000	2 kelompok	130.000.000	2 kelompok	150.000.000	2 kelompok	155.000.000	2 kelompok	160.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan		-		440.000.000		850.000.000		825.000.000		885.000.000		1.050.000.000		965.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Implentasi pelaksanaan RPIK	persen	0,00	0	1.200.000.000	5	1.480.000.000	5	2.096.000.000	10	2.729.000.000	10	3.339.000.000	15	3.706.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan industry yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan terhadap industry yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan	persen	0,00	60	162.349.000	60	195.000.000	65	205.000.000	65	215.000.000	70	226.000.000	70	237.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase peningkatan data perusahaan industri yang ada di dalam Siinas terhadap jumlah total perusahaan industri	persen	0,00	1	351.590.000	1	720.000.000	1	850.000.000	2	945.000.000	2	1.040.000.000	2	1.160.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan	persen		86	45.000.000	89	192.500.000	92	211.750.000	95	239.512.000	98	269.063.000	100	230.950.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan
	Persentase penerbitan TDG	persen		100		100		100		100						
	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	persen		1		1		1		0		0		0		
	Persentase penerbitan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) yang tepat waktu	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten	persen		55		58		61		64		67		70		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	persen	100	100	726.093.500	100	749.593.500	100	767.093.500	100	786.793.500	100	808.800.000	1000	829.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen		<9%	488.333.200	<9%	547.680.000	<9%	1.334.750.000	<9%	1.526.740.000	<9%	1.619.900.000	<9%	1.857.580.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan
	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase barang beredar yang diawasi yg sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	persen		57		60		63		66		69		71		
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	persen		33		44		55		66		88		90		
Program Pengembangan Ekaspor	Nilai Ekspor Non Migas tahun berkenaan	persen	95			96	235.000.000	96.5	270.250.000	97	269.053.000	97.5	351.500.000	98	404.210.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapaanya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	persen	72,14	75	410.000.000	80	430.000.000	85	440.000.000	90	456.500.000	95	458.500.000	100	461.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku UMKM yang dibina	persen		30	133.694.000	40	200.000.000	40	196.380.000	50	231.096.000	60	271.700.000	70	326.040.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
sasaran ke-2 :Meningkatknya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	persen	18,04	20		20		20		20		20		20		
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	6,05	6,05	308.420.000	12	259.400.000	18,15	285.339.000	24	313.872.000	30,26	345.258.000	36	379.783.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	6,05	6,05		12		18		24		30,26		36		
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	0	8,17	68.807.000	20	174.950.000	32,38	192.444.000	44	211.687.000	56,58	232.855.000	69	256.140.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	7,56	15,43	55.150.000	24	84.450.000	31,77	142.895.000	40	152.184.000	48,11	162.402.000	56	173.642.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	2,27	2,27	31.378.000	5	124.746.500	6,81	177.221.000	9	194.943.000	11,35	219.277.000	14	241.204.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten	persen														

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	4,54	4,54	58.130.000	9,08	134.653.500	13,62	148.118.000	18,15	162.929.000	22,69	179.221.000	27,23	197.143.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	4,54	4,54		9,08		13,62		18,15		22,69		27,23		
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	persen	0,62	1	52.455.000	1,24	284.120.000	2	407.851.000	2,48	448.634.000	3	493.430.000	3,72	535.245.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Sasaran ke-3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	persen	7,28	7,29		7,54		8		7,93		8,13		8,34		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	persen	108,18	100	3.788.537.020	100	3.902.193.131	100	4.019.258.925	100	4.139.836.692	100	4.264.031.793	100	4.391.952.747	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	persen	94,93	100		100		100		100		100		100		
	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	persen	95	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	N/A	3	4.689.796.000	3	1.630.527.000	3	4.971.039.000	3	3.821.372.000	3	4.265.457.000	3	4.148.828.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pariwisata
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	persen	47,54	52,30		55,00		57,00		60,00		62,00		65		
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	persen	52	55	1.442.883.000	57	1.928.083.000	60	2.055.000.000	62	2.190.000.000	65	2.350.000.000	67	2.475.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pariwisata
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektuan	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang HKI nya terfasilitasi	persen				10	1.705.000.000	15	1.830.000.000	20	1.985.000.000	25	2.125.000.000	30	26.435.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	persen		0	160.000.000	100	1.625.000.000	100	1.700.000.000	100	1.815.000.000	100	1.955.000.000	100	2.085.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pariwisata
sasaran ke-4 : Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	persen	8,7	10		10		10		10		10		10		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi	persen	70	70	130.098.200	70	132.123.200	70	175.224.700	70	175.224.700	70	175.224.700	70	175.224.700	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	persen	8,9	10	151.705.200	10	263.981.200	10	341.976.600	10	351.976.600	10	361.976.600	10	371.976.600	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	persen	100	100	145.245.050	100	258.919.200	100	210.245.050	100	235.245.050	100	235.245.050	100	371.976.600	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	persen	70	70	402.761.950	70	321.503.600	70	682.980.950	70	692.980.950	70	702.980.950	70	712.980.950	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	persen	75	75	203.837.500	75	215.132.800	75	230.340.500	75	235.340.500	75	240.340.500	75	245.340.500	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal
Sasaran ke-5 :Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	indek	0,6932	0,714		0,735		0,756		0,777		0,798		0,819		
Program Penataan Desa	Jumlah Kampung Tertib Administrasi		301	301		301	138.000.000	301	144.000.000	301	149.000.000	301	151.000.000	301	156.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan kerjasama antar Kampung	persen	-	-	-	10	138.000.000	20	143.000.000	30	148.000.000	40	148.000.000	50	154.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD
Program Administrasi Pemerintahahan Desa	Persentase BUMKAM kategori berkembang	persen	0	1,68	945.500.000	1160%	7.051.502.700	21,60	1.671.000.000	31,50	1.685.000.000	41,50	8.800.000.000	51,40	1.714.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	persen	100	100	510.000.000	100	849.200.000	100	1.046.000.000	100	1.105.000.000	100	1.148.000.000	100	1.193.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD
	Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	nilai	7	11		16		20		24		29		33		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	persen	0	0		5		10		20		30		40	-	
	Persentase LPM Berprestasi	persen	5	5		6		8		10		12		15	-	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	persen													-	
	Persentase Kampung yang menerapkan TTG	persen	30	30		35		45		55		65		75	-	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kampung/Kelurahan yang telah melakukan Musrenbang Kampung/Kelurahan sesuai dengan peraturan	persen	100	100	**3.660.000.000**	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kecamatan
sasaran ke-6 : Menurunya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	73,05	73,48		73,90		74,33		74,75		75,18		75,60		
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	persen	75	75	140.750.000	75	140.750.000	76	153.750.000	77	164.750.000	80	166.750.000	85	178.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Tenaga Kerja

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	persen	30	40		50		60		70		75		80		
	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	persen	20	25		30		35		40		45		50		
	Persentase LPK yang terakreditasi	persen	15,03	20		25		30		35		40		40		
	Persentase LPK yang memiliki perizinan	persen	90	91		92		93		94		95		96		
	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	persen	20	30		40		50		60		70		80		
	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	perusahaan	N/A	5		5		5		5		5		5		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	persen	80	82	240.750.000	83	240.750.000	84	240.750.000	85	240.750.000	90	240.750.000	90	240.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	persen	85	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Tenaga Kerja

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	persen	20	21		24		26		26		26		26		
	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	persen	70	72		74		74		76		78		78		
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketagakerjaan	persen	82	82		84		84		86		86		88		
	Persentase penyelasaian hubungan industrial	persen	100	100		100		100		100		100		100		
Sasaran ke-7 :Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1															
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina;	persen	N/A	75	1.534.450.400	75	861.142.900	80	1.147.257.190	85	1.261.982.909	90	1.388.181.200	95	1.526.999.320	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen		5	545.537.500	5	1.043.177.000	7	2.138.494.700	10	2.352.344.170	12	2.587.578.587	15	2.846.336.446	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen		40		40		50		60		70		80		
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen		10		10		15		20		25		30		
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen		40		40		50		60		70		80		
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase (%) PMKS skala Kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	persen		100	1.156.125.600	100	1.406.738.160	100	1.547.411.976	100	1.702.153.174	100	1.872.368.491	100	1.770.160.893	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial
	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	persen		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase (%)Verivikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten	persen		100		100		100		100		100		100		
	Verivikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten	persen		100		100		100		100		100		100		
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana lam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	persen		100		100	789.726.000	100	898.698.600	100	988.568.460	100	1.087.425.306	100	1.196.167.837	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial
	Persentase TAGANA Aktif	persen		100		100		100		100		100		100		
Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah																
Tujuan ke-1: Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas (Jumlah kejahatan yang dilaporkan)	persen	4,5	4,25		4		3,75		3,5		3,25		2		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	persen	N/A	N/A		N/A		**72**		73		74		75		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Sasaran ke-1 : Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0		0		0		0		0		0		
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	persen	100	100	88.846.000	100	297.923.500	100	312.819.675	100	328.460.659	100	344.883.692	100	362.127.876	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik	persen				15	1.586.250.398	18,59	1.419.549.494	37,8	1.490.526.969	57,7	1.565.053.317	78,2	1.643.305.983	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	persen				100		100		100		100		100		
Program pembendayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	persen			6.540.000.000	61	6.244.282.600	74	6.556.496.730	80	6.884.321.567	89	7.228.537.645	100	7.589.964.527	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pemuda dan Pelajar yang mendapatkan Pembinaan terhadap bahaya Narkoba	persen			38.500.000	14	38.500.000	33	40.425.000	53	42.446.250	74	44.568.563	100	46.796.991	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang terbahas dalam rakor	persen		100	204.557.700	100	191.772.900	100	201.361.545	100	211.429.622	100	222.001.103	100	233.101.159	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase cakupan pencegahan/tang kal dini konflik	persen		80		80		85		88		90		100		
Sasaran ke-2: Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	persen	N/A	10		10		10		10		10		10		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	94	91	1.380.700.500	92	2.954.372.400	94	2.705.980.000	95	3.160.900.000	96	3.287.500.000	98	3.464.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) (%)	persen	84	86		87		88		90		94		97		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	83	86		88		92		94		95		97		
	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	persen	40,2	64,3		76		86		90		96		100		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi bidang ketertiban umum Yang ditindaklanjuti	persen	N/A	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kecamatan
Sasaran ke-3 : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	indek	82,00	72,16		62,32		52,48		42,64		32,80		22,96		
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	persen			10.692.644.523		12.597.137.400		12.628.713.500		12.664.660.000		12.703.176.000		13.098.043.600	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas
	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penyelasaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penananganan Pra Bencana	persen	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	persen	100	100	100.120.900	100	932.780.000	100	940.480.000	100	947.465.000	100	953.083.500	100	1.009.013.850	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas
	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	persen	3,95	3,95		3,95		3,95		3,95		3,95		3,95		
	Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	menit	15	15		15		15		15		15		15		
	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	persen	0,00	0		0		7,14		7,14		10,71		10,71		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik																
Tujuan ke-1 :Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	indek	N/A	N/A		N/A		N/A		65		67		69		
Sasaran ke-1 : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Indeks SPBE	indek	N/A											2,3		
	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	B		BB		BB		A		A		A		
	Indek Inovasi Daerah	indek	1.705	####		####		####		####		####		1820		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD	persen	100	100	506.657.870.532	100	519.866.530.828	100	529.658.909.403	100	528.932.430.028	100	542.424.286.678	100	525.306.583.674	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan
	Prosentase ketepatan waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan ketepatan waktu	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Prosentase jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan yang berlaku	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu	persen	100,00	100	561.987.700,00	100	573.227.454,00	100	584.692.003	100	596.385.843	100	608.313.560	100	620.479.831	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	persen	75	80	4.802.588.600	85	5.042.718.030	90	5.294.853.932	95	5.559.596.628	100	5.837.576.459	100	6.129.455.282	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Inspektorat Daerah
Program Perum Daerahusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	persen	100	100	775.992.700	100	814.792.335	100	855.531.952	100	898.308.549	100	943.223.977	100	990.385.176	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Inspektorat Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	persen	50	60	6.142.000.000	70	6.172.000.000	80	6.172.000.000	90	6.190.000.000	95	6.195.000.000	100	6.135.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kominfo
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	persen	40	50		60		70		80		90		100		
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	persen	50	55		60		65		70		75		80		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	persen	60	65		70		75		80		85		90		
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten sesuai amanat UU No.14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	persen	60	65		70		75		80		85		90		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	persen	50	56		62		67		73		76		80		
Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	0	2.448.048.000	46	2.502.000.000	54	2.555.000.000	67	2.573.000.000	93	2.598.000.000	100	2.625.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kominfo
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	persen	100	0		46		54		67		93		100		
	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	persen	100	47		56		67		76		83		95		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	persen	50	47		56		67		76		83		95		
	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	persen	50	100		100		100		100		100		100		
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	persen	30	45		57		68		73		89		95		
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	persen				35		55		67		78		89		
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	persen				35		45		57		65		75		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	persen				35		46		65		79		89		
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	persen				45		56		68		79		93		
	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	opd	1	2		3		10		13		13		13		
	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase data yang dapat berbagi pakai	persen	56	65		72		84		89		93		98		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Master Plan	persen				34		45		67		82		93		
	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	orang				2		7		10		13		15		
	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	persen	54	57		64		71		79		82		92		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen				100	50.000.000	100	6.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Statistik

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen				100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781		57.432.670	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Persandian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah tahunan (ke-n) dengan tingkat capaian outcome minimal 75%		75	75	1.819.618.100	76	1.856.010.462	77	1.893.130.671	78	1.930.993.285	79	1.969.613.150	80	2.009.005.413	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perencanaan
	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		75	75		76		77		78		79		80		
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100	100		100		100		100		100		100		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%		76	77	2.610.965.000	80	2.663.184.300	83	2.716.447.986	87	2.770.776.946	90	2.826.192.485	92	2.882.716.334	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perencanaan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik			100		100		100		100		100		100		
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	60	70	5.597.343.856	70	5.873.673.499	80	9.718.500.000	80	10.754.500.000	90	10.430.200.000	90	11.071.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Litbang
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	60	70		70		80		80		90		90		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kinerja kecamatan dan kelurahan yang mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan	persen	100	100	27.337.421.669	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Sektor BUMD	persen	100	100	2.093.277.100	100	2.302.604.810	100	2.532.865.291	100	2.993.386.253	100	3.292.724.878	100	3.621.997.365	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat Daerah
	Persentase PD Yang Dokumen Adminstrasi Sesuai Dengan Standar	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan Secara Elektronik	persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	persen		100	1.302.129.147.541	100	1.278.238.969.070	100	1.314.739.958.881	100	1.353.089.936.773	100	1.394.972.204.940	100	1.438.325.203.396	Seluruh PD
	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		85		85		85		85		85		85		
Sasaran ke-2 : Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indek	55	56		57		58		59		60		61		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Kepegawaian Daerah	Persentase data kepegawaian yang akurat	persen	95	100	2.854.972.975	100	3.100.883.300	100	4.039.781.000	100	4.194.136.000	100	4.350.295.500	100	4.543.997.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepegawaian
	Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	persen	7,48	8,25		8,25		51,02		15,52		5,51		10,75		
	Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	persen	0	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	persen	0	81		90		90		95		95		95		
	Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu	persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	persen	100	100	4.452.784.000	100	2.655.038.000	100	2.864.813.000	100	4.254.923.000	100	4.441.576.000	100	4.271.105.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepegawaian
	Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	persen		100		100		100		100		100		100		
Sasaran ke-3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	persen	85,01	85,01		86,72		88,81		89,47		90,10		90,5		
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-El		87,08	90	1.805.800	91,00	61.500.000	92	364.000.000	93,00	389.000.000	94	399.000.000	95,00	394.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Admindukcapil

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100,00	100	1.172.900	100	61.500.000	100	120.500.000	100	129.500.000	100	124.500.000	100	134.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Admindukcapil
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinanya dilaporkan			100		100		100		100		100		100		
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan			100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	persen	N/A	7	1.633.600	9	2.650.000	11	60.900.000	13	49.900.000	15	68.400.000	17	51.900.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Admindukcapil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase keterisian data profil kependudukan	persen	100,00	100	2.059.200	100	6.000.000	100	12.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Admindukcapil

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD	persen		90	37.254.644.000	90	32.985.502.300	90	38.122.484.000	90	38.600.162.000	90	38.250.162.000	90	38.250.162.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	persen		90		90		90		90		90		90		
	Persentase pembahasan Raperda	persen		90		90		90		90		90		90		
	Persentase pembahasan produk hukum non perkada	persen		90		90		90		90		90		90		
	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	persen		90		90		90		90		90		90		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	orang	151	151	140.750.000	151	140.750.000	171	141.750.000	176	142.750.000	181	143.750.000	201	144.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Transmigrasi
Program Pengelolaan Arsip	Pesentase PD yang melaksanakan pegnelolaan kearsipan dengan baik	persen	45	50	63.460.283	55	73.592.817	60	90.000.000	65	100.000.000	70	130.000.000	75	300.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip statis yang diselamatkan oleh perangkat Daerah						61.392.817		70.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kearsipan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	persen						100	840.000.000	100	840.000.000	100	840.000.000	100	840.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kecamatan

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan penyajian program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III, tidak lagi mengacu pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan perubahan aturan perundang-undangan dalam penganggaran dan tata cara nomenklatur program- kegiatan-sub kegiatan, maka kapasitas riil seharusnya diperoleh dari proyeksi total penerimaan daerah. Untuk itu, perlu adanya perubahan format penyajian tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021-2026
Kabupaten Lampung Tengah

Uraian	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	978.410.677.396	1.005.855.191.740	1.034.272.411.411	1.063.702.981.265	1.094.189.418.600	1.125.776.203.566
BELANJA	**2.647.160.032.185**	**2.685.518.662.440**	**2.749.201.244.548**	**2.814.686.088.742**	**2.882.035.670.784**	**2.951.315.037.481**
BELANJA OPERASI	**1.868.108.744.104**	**1.881.417.578.255**	**1.919.045.929.820**	**1.957.426.848.416**	**1.996.575.385.385**	**2.036.506.893.092**
Belanja Pegawai	1.202.667.036.569	1.202.667.036.569	1.226.720.377.300	1.251.254.784.846	1.276.279.880.543	1.301.805.478.154
Belanja Barang dan Jasa	559.889.476.760	571.087.266.295	582.509.011.621	594.159.191.854	606.042.375.691	618.163.223.204
Belanja Subsidi	544.475.000	555.364.500	566.471.790	577.801.226	589.357.250	601.144.395
Belanja Hibah	104.965.755.775	107.065.070.891	109.206.372.308	111.390.499.754	113.618.309.750	115.890.675.945
Belanja Bantuan Sosial	42.000.000	42.840.000	43.696.800	44.570.736	45.462.151	46.371.394
BELANJA MODAL	**282.968.969.861**	**297.104.650.054**	**311.946.858.891**	**327.530.917.696**	**343.893.913.759**	**361.074.788.628**
Belanja Modal Tanah	2.841.262.000	2.983.325.100	3.132.491.355	3.289.115.923	3.453.571.719	3.626.250.305
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.407.288.985	74.977.653.434	78.726.536.106	82.662.862.911	86.796.006.057	91.135.806.360

Uraian	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.802.782.132	32.342.921.239	33.960.067.301	35.658.070.666	37.440.974.199	39.313.022.909
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.492.026.744	186.366.628.081	195.684.959.485	205.469.207.460	215.742.667.832	226.529.801.224
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	425.610.000	434.122.200	442.804.644	451.660.737	460.693.952	469.907.831
BELANJA TIDAK TERDUGA	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
BELANJA TRANSFER	**466.082.318.220**	**476.996.434.131**	**488.208.455.838**	**499.728.322.629**	**511.566.371.641**	**523.733.355.761**
Belanja Bagi Hasil	9.734.373.020	10.221.091.671	10.732.146.255	11.268.753.567	11.832.191.246	12.423.800.808
Belanja Bantuan Keuangan	456.347.945.200	466.775.342.460	477.476.309.583	488.459.569.062	499.734.180.395	511.309.554.953
PEMBIAYAAN	**82.952.472.000**	**60.791.656.874**	**62.282.639.985**	**63.847.200.256**	**65.488.997.107**	**67.211.872.537**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**82.952.472.000**	**65.791.656.874**	**67.282.639.985**	**68.847.200.256**	**70.488.997.107**	**72.211.872.537**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.952.472.000	103.879.088.951,25	67.282.639.985	68.847.200.256	70.488.997.107	72.211.872.537
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**45.015.863.470**	**45.860.957.830**	**43.831.526.167**	**41.774.982.412**	**25.500.343.597**

Uraian	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyertaan Modal Daerah	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran Hutang Pihak ke-3		40.015.863.470	40.860.957.830	38.831.526.167	36774982412	20.500.343.597

7.2 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih untuk periode 2021-2024.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kabupaten Lampung Tengah juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	700.769.194.763	100	701.389.352.013	100	722.431.032.573	100	744.103.963.551	100	766.427.082.457	100	789.419.894.931	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	64,32	64,34	252.391.466.200	64,36	211.183.582.650	64,38	217.519.090.130	64,40	224.044.662.833	64,42	230.766.002.718	64,44	232.766.002.718	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan	SPM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	99,80	99,82		99,84		99,86		99,88		95,75		95,77		Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	24,70	60,00		65,00		70,00		72,00		74,00		76,00		Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan	
1.01.04	Program Pendidik dan tenaga pendidik	Presentase Guru yang besertifikasi	%	56,09	58	22.344.560.100	60	22.500.000.000	62	24.042.900.000	64,00	25.245.045.000	66,00	26.507.297.250	68,00	26.507.297.250	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	143.311.648.545	100	112.265.239.802	100	115.633.196.996	100	119.102.192.906	100	122.675.258.693	100	126.355.516.454	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesehatan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
1.02.02	Rogram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	rasio			133.009.397.077		178.141.120.615		183.485.354.233		188.989.914.860		194.659.612.306		198.552.804.552	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesehatan	SPM
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayu baru lahir	%		100		100		100		100		100		100			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan keseahatan sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		100		70		73		75		85		90			
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ODGJ berat yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%		100		100		100		100		100		100			
		Cakupan Kampung/Kelu-rahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%		100		100		100		100		100		100			
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	75	5	288.000.000	5	442.242.150	5	440.000.000	5	440.000.000	5	440.000.000	5	440.000.000	Perangkat Daerah Penanggun g-jawab Bidang Urusan Kesehatan	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Kefarmasi-an (Apotik dan toko obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar yang diawasi	%	85	90	714.792.050	95	523.826.000	100	775.000.000	100	775.000.000	100	775.000.000	100	775.000.000	Perangkat Daerah Penanggun g-jawab Bidang Urusan Kesehatan	
1.02.05	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Organisasi kemasyarajatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	%		100	330.881.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Perangkat Daerah Penanggun g-jawab Bidang Urusan Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dgn Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	32.257.528.601	100	29.697.528.801	100	30.588.454.665	100	31.506.108.305	100	32.451.291.554	100	33.424.830.301	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	61,5	63,50	161.020.164.958	65,50	161.020.164.958	67,50	161.020.164.958	69,50	161.020.164.958	71,50	141.020.164.958	73,50	150.505.910.242	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR	SPM
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memliki sertifikat kompetensi	%	0	44,44	957.946.000,00	77,78	957.946.000,00	88,89	957.946.000,00	93,33	957.946.000,00	96,67	957.946.000,00	97,78	957.946.000,00	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dikali 100%	%	26,09	26,09	37.596.168.290	26,19	37.806.152.059	26,28	20.578.425.207	26,38	21.607.346.467	26,47	22.687.713.791	26,56	23.822.099.480	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR	SPM
		Presentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik dibagi Jumlah total panjang jaringan irigasi primer dikali 100%	%	2,85	7,85		12,85		17,85		22,85		27,85		32,85			
		Presentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang jaringan irigasi sekunder dikali 100%	%	-	5		10		15		20		25		30			
		Presentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang jaringan irigasi tersier dikali 100%	%	4,76	9,76		14,76		19,76		24,76		29,76		34,76			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana	%	-	74	336.510.000	74	251.244.000	75	263.806.200	77	276.996.510	80	290.846.336	82	305.388.652	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PUPR	SPM
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan akses air minum	%	89,50	89,60	23.606.086.375	91,6	30.700.000.000	93,28	33.770.000.000	94,62	37.147.000.000	95,70	40.861.700.000	96,56	44.947.870.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPM
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	%	94,30	94,44	3.488.781.000	95,44	6.000.000.000	96,35	6.600.000.000	97,08	7.260.000.000	97,66	7.986.000.000	98,13	8.784.600.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPM
1.03.06	Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang drainase permukiman	%	52,33	54,86	1.750.000.000	61,86	3.500.000.000	69,49	3.850.000.000	75,59	4.235.000.000	80,47	4.658.500.000	84,38	5.124.350.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SPM
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung ber IMB dan memenuhi standar keslamatan	%	25,00	26,00	8.283.319.641	40	8.697.485.623	52	9.132.359.904	61,6	9.588.977.899	69,28	10.068.426.794	75,42	10.571.848.134	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkunganny a	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	%	25,00	38,00	163.760.500	40	175.000.000	52	192.500.000	61,6	211.750.000	69,28	232.925.000	75,42	256.217.500	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	10.501.171.033	100	10.062.955.133	100	10.364.843.787	100	10.675.789.101	100	10.996.062.774	100	11.325.944.657	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani	%	72,82	76,26	2.512.370.000	78,26	6.000.000.000	82,61	9.000.000.000	86,08	9.000.000.000	88,88	9.000.000.000	91,10	9.000.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai	%	18,75	19,00	7.295.835.200	35	8.500.000.000	48	9.350.000.000	58,4	10.285.000.000	66,72	11.313.500.000	73,38	12.444.850.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	20.869.794.749	100	22.824.915.386	100	23.509.662.848	100	24.214.952.733	100	24.941.401.315	100	25.689.643.354	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	94	91	1.380.700.500	92	2.954.372.400	94	2.705.980.000	95	3.160.900.000	96	3.287.500.000	98	3.464.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas	SPM
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) (%)	%	84	86		87		88		90		94		97			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	83	86		88		92		94		95		97			
		Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	%	40,2	64,3		76		86		90		96		100			
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	5.066.774.686	100	5.830.000.000	100	6.004.900.000	100	6.185.047.000	100	6.370.598.410	100	6.561.716.362	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	%			10.692.644.523		12.597.137.400		12.628.713.500		12.664.660.000		12.703.176.000		13.098.043.600	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase penyelasaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Penananganan Pra Bencana	%	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		0,12			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, & Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100.120.900	100	932.780.000	100	940.480.000	100	947.465.000	100	953.083.500	100	1.009.013.850	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Trantibum dan Linmas	
		Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase pembentukan relawan PMK di desa/kelurahan	%	3,95	3,95		3,95		3,95		3,95		3,95		3,95			
		Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	menit	15	15		15		15		15		15		15			
		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	0,00	0		0		7,14		7,14		10,71		10,71			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.987.667.044	100	3.770.875.594	100	3.884.001.862	100	4.000.521.918	100	4.120.537.575	100	4.244.153.702	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina;	%	N/A	75	1.534.450.400	75	861.142.900	80	1.147.257.190	85	1.261.982.909	90	1.388.181.200	95	1.526.999.320	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial	SPM
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		5	545.537.500	5	1.043.177.000	7	2.138.494.700	10	2.352.344.170	12	2.587.578.587	15	2.846.336.446	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial	SPM
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		40		40		50		60		70		80			
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		10		10		15		20		25		30			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		40		40		50		60		70		80			
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase (%) PMKS skala Kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi lainnya	%		100	1.156.125.600	100	1.406.738.160	100	1.547.411.976	100	1.702.153.174	100	1.872.368.491	100	1.770.160.893	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial	SPM
		Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase (%)Verivikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten	%		100		100		100		100		100		100			
		Verivikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana lam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%		100		100	789.726.000	100	898.698.600	100	988.568.460	100	1.087.425.306	100	1.196.167.837	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sosial	SPM
		Persentase TAGANA Aktif	%		100		100		100		100		100					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.849.784.799	100	3.849.785.199	100	3.965.278.755	100	4.084.237.118	100	4.206.764.231	100	4.332.967.158	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Tenaga Kerja	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	75	75	140.750.000	75	140.750.000	76	153.750.000	77	164.750.000	80	166.750.000	85	178.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Tenaga Kerja	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	30	40		50		60		70		75		80			
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	20	25		30		35		40		45		50			
		Persentase LPK yang terakreditasi	%	15,03	20		25		30		35		40		40			
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	90	91		92		93		94		95		96			
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	20	30		40		50		60		70		80			
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	perusahaan	N/A	5		5		5		5		5		5			
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	80	82	240.750.000	83	240.750.000	84	240.750.000	85	240.750.000	90	240.750.000	90	240.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Tenaga Kerja	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	85	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	85	140.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Tenaga Kerja	
		Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	20	21		24		26		26		26		26			
		Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%	70	72		74		74		76		78		78			
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketagakerjaan	%	82	82		84		84		86		86		88			
		Persentase penyelasaian hubungan industrial	%	100	100		100		100		100		100		100			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.078.539.142	100	3.121.346.872	100	3.214.987.278	100	3.311.436.897	100	3.410.780.003	100	3.513.103.404	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	100	100	170.550.000	100	762.372.130	100	785.243.294	100	808.800.593	100	852.512.155	100	937.763.370	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	%	100	100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	1	100	736.374.820	100	520.550.000	100	536.166.500	100	552.251.495	100	568.819.040	100	585.883.611	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA	
		Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100			
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun data terpilah	%		100	49.800.000		49.800.000	100	49.800.00	100	52.290.000	100	54.904.500	100	57.649.725	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase pemenuhan hak dasar anak	%		100	257.587.225	100	243.110.000	100	250.403.300	100	257.915.399	100	265.652.861	100	273.622.447	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA	
		Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kelurahan, TESA, PISA)	%		100		100		100		100		100		100			
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%		100	300.000.300	100	302.258.800	100	317.371.740	100	333.240.328	100	349.902.345	100	367.397.463	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP & PA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standar	%		100		100		100		100		100		100			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	4.186.986.414	100	4.167.259.517	100	4.292.277.303	100	4.421.045.622	100	4.553.676.990	100	4.690.287.300	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.09.02	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Dengan Kemandirian Pangan	rasio	30	40	870.258.000	45	896.365.740	47	923.256.712	50	950.954.414	55	979.483.046	60	1.008.867.537	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan	
		Persentase Kampung yang telah memiliki lumbung pangan masyarakat	%	33,00	34,00		41		50,00		60		70,00		82			
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	rasio	30	31	1.767.945.350	50	1.820.983.711	70	1.875.613.222	80	1.931.881.618	90	1.989.838.067	100	2.049.533.209	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan	
		Persentase ketersediaan pangan	%	30,00	31,00		50,00		70,00		80,00		90,00		100,00			
		Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Thn)	kg/ kapita/ thn	102,18	108,09		107,55		107,02		106,48		105,94		105,40			
		Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/Thn)	kg/ kapita/ thn	101,29	76,99		79,20		81,41		83,62		85,83		88,04			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/Thn)	kg/ kapita/ thn	58,73	50,38		51,14		51,90		52,66		53,42		54,17			
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Rawan Pangan	%	25	25	242.666.000	28	400.658.500	28	421.175.000	35,71	438.175.000	35,71	464.100.000	42,8	486.075.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%	85	90	191.500.000	90	885.705.000	95	788.600.000	95	831.600.000	100	892.375.000	100	962.900.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pangan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana	%	-	74	336.510.000	74	251.244.000	75	263.806.200	77	276.996.510	80	290.846.336	82	305.388.652	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanahan	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah Yang Difasilitasi	%	-	50	57.893.000	55	63.683.000	60	66.867.150	65	70.210.508	70	73.721.033	75	77.407.085	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanahan	
2.10.05	Program Penyelesaian ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase realisasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum	%				100	3.002.320.900									Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanahan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	7.653.217.204	100	7.827.162.070	100	8.061.976.932	100	8.303.836.240	100	8.552.951.327	100	8.809.539.867	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.11.03	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan LH	dok	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.11.04	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu	%	70	71	275.000.000	72	1.617.500.000	73	455.000.000	74	497.500.000	75	530.000.000	76	567.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	80	81		82		83		84		85		86			
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang Terpelihara	%	74,07	74,07	850.000.000	77,78	670.000.000	81,48	600.000.000	85,19	600.000.000	88,89	600.000.000	92,59	600.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan	%	10	15	30.000.000	20	25.000.000	25	25.000.000	30	25.000.000	35	25.000.000	40	25.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan terhadap izin ligkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	%	40	50	12.500.000	60	42.500.000	70	42.500.000	80	42.500.000	90	42.500.000	100	42.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Rasio pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kab. terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemkab	rasio				0,04		0,06		0,08		0,10		0,12			
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah MHA yg diakui pemerintah	kelompok	0	0	-	1	27.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lamteng yang didaftarkan ke provinsi/nasional	org	0	2	43.750.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk	%	50	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	50	14.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah	rasio	30	31,25	105.000.000	31,88	130.000.000	32,5	245.000.000	33,75	260.000.000	35	275.000.000	36,25	290000000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	30			31		32		33		34		35			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	5.250.077.470	100	8.132.319.970	100	8.376.289.569	100	8.627.578.256	100	8.886.405.604	100	9.152.997.772	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Adminduk capil	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-El		87,08	90	1.805.800	91,00	61.500.000	92	364.000.000	93,00	389.000.000	94	399.000.000	95,00	394.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Adminduk capil	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100,00	100	1.172.900	100	61.500.000	100	120.500.000	100	129.500.000	100	124.500.000	100	134.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Adminduk capil	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinanya dilaporkan			100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan			100		100		100		100		100		100			
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	N/A	7	1.633.600	9	2.650.000	11	60.900.000	13	49.900.000	15	68.400.000	17	51.900.000	PD Penanggung-jawab Bidang Urusan Adminduk capil	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase keterisian data profil kependudukan	%	100,00	100	2.059.200	100	6.000.000	100	12.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	PD Penanggung-jawab Bidang Urusan Adminduk capil	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	4.639.522.249	100	5.150.187.846	100	5.304.693.481	100	5.463.834.286	100	5.627.749.314	100	5.796.581.794	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
	Program Penataan Desa	Jumlah Kampung Tertib Administrasi		301	301		301	138.000.000	301	144.000.000	301	149.000.000	301	151.000.000	301	156.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan kerjasama antar Kampung	%	-	-	-	10	138.000.000	20	143.000.000	30	148.000.000	40	148.000.000	50	154.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahahan Desa	Persentase BUMKAM kategori berkembang	%	0	1,68	945.500.000	1160 %	7.051.502.700	21,60	1.671.000.000	31,50	1.685.000.000	41,50	8.800.000.000	51,40	1.714.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	%	100	100	510.000.000	100	849.200.000	100	1.046.000.000	100	1.105.000.000	100	1.148.000.000	100	1.193.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PMD	
		Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	nilai	7	11		16		20		24		29		33			
		Persentase peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	%	0	0		5		10		20		30		40	-		
		Persentase LPM Berprestasi	%	5	5		6		8		10		12		15	-		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%													-		
		Persentase Kampung yang menerapkan TTG	%	30	30		35		45		55		65		75	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.746.145.162	100	3.800.753.862	100	3.914.776.478	100	4.032.219.772	100	4.153.186.365	100	4.277.781.956	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP dan KB	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifik Fertility rate/ASFR 15-19)	%	24.16	24	84.865.300	21	67.612.100	20	105.000.000	18	111.000.000	16	117.000.000	14	123.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP dan KB	
		Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	%	20.9	21.0		21.0		21.0		21.0		21.0		21.0			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	27,78	41,66		55,55		69,44		83		97		100			
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	27,78	41,66		55,55		69,44		83		97		100			
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		60	60	7.823.445.500	70	7.931.303.000	75	8.036.409.320	80	8.059.413.320	85	8.075.418.000	90	6.986.423.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP dan KB	
		Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		43,67	53		63		73		83		87		93			
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		6,75	6,78		6,81		6,84		6,87		6,9		6,93			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		39,83	39,86		39,89		39,92		39,95		39,98		40,02			
		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		100	100		100		100		100		100		100			
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		91,14	91,17		91,20		91,23		91.26		91,29		91,32			
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah		70	75		80		83		85		87		88			
		Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI		0,35	0,38		0,42		0,46		0,51		0,56		0,61			
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		100	100	108.990.000	100	174.999.700	100	180.000.000	100	182.000.000	100	185.000.000	100	188.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan PP dan KB	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		98,25	98,28		98,25		98,34		98,37		98.40		98,43			
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		96,13	96,16		96,13		96,22		96,25		96,28		96,31			
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		98,19	98,21		98,19		98,27		98,30		98,33		98,36			
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		100	100		100		100		100		100		100			
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		92,21	92,24		92,21		92,31		92,34		92,37		92,40			
		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		92,16	92,19		92,16		92,25		92,28		92,31		92,34			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	5.748.891.727	100	5.653.472.260	100	5.823.076.428	100	5.997.768.721	100	6.177.701.782	100	6.363.032.836	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perhubungan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Type C	%	75	77	265.250.000	78	3.238.600.000	80	6.038.250.000	82	6.035.500.000	82	6.211.000.000	82	6.031.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perhubungan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau kota	%	75	80		85		85		90		90		95			
		Prosentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik (%)	%	80	80		85		85		87		87		87			
		Jumlah Izin Trayek	ken dara an	201	190		186		170		150		150		150			
		Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	%	62,01	60		58		55		52		52		52			
		Pemasangan Rambu-rambu	%	*18,41*	*20*		*22*		*25*		*28*		*28*		*28*			
		Presentase ketersediaan Lampu Jalan	%	*70,00*	*70*		*73*	3.058.013.050	*75*	3.149.753.442	*78*	3.244.246.045	*80*	3.341.573.426	*82*	3.441.820.629	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perhubungan	
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dokumen inventarasasi fasilitas keselamatan perkeretaapian	doku men	0		-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perhubungan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokume perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesua dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	4.630.162.699	100	4.473.356.828	100	4.607.557.533	100	4.745.784.259	100	4.888.157.787	100	5.034.802.520	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kominfo	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yan ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapa hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondis baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	%	50	60	6.142.000.000	70	6.172.000.000	80	6.172.000.000	90	6.190.000.000	95	6.195.000.000	100	6.135.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kominfo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	40	50		60		70		80		90		100			
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	50	55		60		65		70		75		80			
		Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	%	60	65		70		75		80		85		90			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten sesuai amanat UU No.14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	60	65		70		75		80		85		90			
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	50	56		62		67		73		76		80			
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	0	2.448.048.000	46	2.502.000.000	54	2.555.000.000	67	2.573.000.000	93	2.598.000.000	100	2.625.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	0		46		54		67		93		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	%	100	47		56		67		76		83		95			
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplemntasikan	%	50	47		56		67		76		83		95			
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	50	100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satu an	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	30	45		57		68		73		89		95			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%				35		55		67		78		89			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%				35		45		57		65		75			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%				35		46		65		79		89			
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%				45		56		68		79		93			
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	opd	1	2		3		10		13		13		13			
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	56	65		72		84		89		93		98			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang	%				34		45		67		82		93			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		mendukung smart city sesuai dengan Master Plan																
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	orang				2		7		10		13		15			
		Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	%	54	57		64		71		79		82		92			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	4.387.769.009	100	4.417.810.009	100	4.550.344.309	100	4.686.854.639	100	4.827.460.278	100	4.972.284.086	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi dan UKM	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		ditindaklanjuti																
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	6,05	6,05	308.420.000	12	259.400.000	18,15	285.339.000	24	313.872.000	30,26	345.258.000	36	379.783.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi dan UKM	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	6,05	6,05		12		18		24		30,26		36			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	0	8,17	68.807.000	20	174.950.000	32,38	192.444.000	44	211.687.000	56,58	232.855.000	69	256.140.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi dan UKM	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	7,56	15,43	55.150.000	24	84.450.000	31,77	142.895.000	40	152.184.000	48,11	162.402.000	56	173.642.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi dan UKM	
2.17.05	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	2,27	2,27	31.378.000	5	124.746.500	6,81	177.221.000	9	194.943.000	11,35	219.277.000	14	241.204.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi dan UKM	
		Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten	%															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	4,54	4,54	58.130.000	9,08	134.653.500	13,62	148.118.000	18,15	162.929.000	22,69	179.221.000	27,23	197.143.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi dan UKM	
		Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	4,54	4,54		9,08		13,62		18,15		22,69		27,23			
2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,62	1	52.455.000	1,24	284.120.000	2	407.851.000	2,48	448.634.000	3	493.430.000	3,72	535.245.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Koperasi dan UKM	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	4.293.932.489	100	5.084.374.889	100	5.236.906.136	100	5.394.013.320	100	5.555.833.719	100	5.722.508.731	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi	%	70	70	130.098.200	70	132.123.200	70	175.224.700	70	175.224.700	70	175.224.700	70	175.224.700	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	%	8,9	10	151.705.200	10	263.981.200	10	341.976.600	10	351.976.600	10	361.976.600	10	371.976.600	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	%	100	100	145.245.050	100	258.919.200	100	210.245.050	100	235.245.050	100	235.245.050	100	371.976.600	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	%	70	70	402.761.950	70	321.503.600	70	682.980.950	70	692.980.950	70	702.980.950	70	712.980.950	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	%	75	75	203.837.500	75	215.132.800	75	230.340.500	75	235.340.500	75	240.340.500	75	245.340.500	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Penanaman Modal	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	2.877.505.221	100	3.000.634.521	100	3.090.653.557	100	3.183.373.163	100	3.278.874.358	100	3.377.240.589	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,39	0,44	928.129.000	0,48	1.398.129.000	0,55	2.160.000.000	0,60	1.465.000.000	0,66	1.130.000.000	0,73	1.500.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,61	2,79		2,96		3,13		3,31		3,48		3,65			
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	%	17,86	17,86	1.292.887.500	21,4	1.685.118.000	25,00	2.035.118.000	28,57	2.444.618.000	32,14	2.504.618.000	32,14	2.529.618.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase kwartir ranting (kecamatan) pramuka yang aktif	%	N/A	71,43	350.000.000	78,57	350.000.000	85,71	350.000.000	89,29	350.000.000	96,43	350.000.000	100,0	350.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
2.16.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%				100	50.000.000	100	6.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Statistik	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%				100		100		100		100		100			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781		57.432.670	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Persandian	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif	%	70	72	707.115.500	72	898.500.000	74	944.425.000	76	991.646.250	78	1.040.305.000	80	1.092.320.250	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kebudayaan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase Situs budaya yang lestari	%	0,8	0,82	394.489.300	0,82	414.213.765	0,84	434.924.453	0,86	456.670.676	0,86	479.504.210	0,88	503.479.420	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kebudayaan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.757.941.253	100	3.859.879.453	100	3.975.675.837	100	4.094.946.112	100	4.217.794.495	100	4.344.328.330	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perpustakaan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	83,00	84,00	300.150.500	85,00	351.018.250	86,00	485.000.000	87,00	549.000.000	88,00	657.000.000	89,00	810.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perpustakaan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1,16	1,14		2,50		2,80		4,00		3,40		4,00			
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	rasio	0,03	0,03		0,03		0,04		0,04		0,08		0,10			
		Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	unit	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		0,01			
		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	5,00	5,00		5,00		7,00		7,00		8,00		10,00			
2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (%)	%				25,00	22.000.000	30,00	29.000.000	35,00	38.000.000	40,00	49.000.000	42,00	55.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perpustakaan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Pesentase PD yang melaksanakan pegnelolaan kearsipan dengan baik	%	45	50	63.460.283	55	73.592.817	60	90.000.000	65	100.000.000	70	130.000.000	75	300.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kearsipan	
2.24.02	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip statis yang diselamatkan oleh perangkat Daerah						61.392.817		70.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kearsipan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	4.598.390.981	100	5.043.140.561	100	5.194.434.778	100	5.350.267.821	100	5.510.775.856	100	5.676.099.131	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perikanan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan Tangkap (ton)	ton	5165	5.165	1.195.000.000	5.217	1.655.000.000	5.269	1.822.000.000	5.322	1.934.000.000	5.375	2.141.000.000	5.428	2.304.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perikanan	
		Jumlah POKMASWAS dan benih yang di restocking			1 kelompok, 95000 ekor		2 kelompok, 100000 ekor		2 kelompok, 150000 ekor		2 kelompok, 200000 ekor		2 kelompok, 200000 ekor		2 kelompok, 200000 ekor			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	ton	42329	3572,5	1.172.000.000	3625,8	1.266.838.500	3679,9	1.334.838.500	3734,7	1.418.060.000	3790,4	1.502.065.000	3847	1.586.065.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perikanan	
		Jumlah Pokdakan /UPR yang dibina			15		20		20		20		20		20			
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP		-	1 kelompok	50.000.000	2 kelompok	105.000.000	2 kelompok	130.000.000	2 kelompok	150.000.000	2 kelompok	155.000.000	2 kelompok	160.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perikanan	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan		-		440.000.000		850.000.000		825.000.000		885.000.000		1.050.000.000		965.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perikanan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.325.894.202	100	3.224.839.002	100	3.321.584.172	100	3.421.231.697	100	3.523.868.648	100	3.629.584.708	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pariwisata	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%tase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	N/A	3	4.689.796.000	3	1.630.527.000	3	4.971.039.000	3	3.821.372.000	3	4.265.457.000	3	4.148.828.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pariwisata	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	%	47,54	52,30		55,00		57,00		60,00		62,00		65			
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	52	55	1.442.883.000	57	1.928.083.000	60	2.055.000.000	62	2.190.000.000	65	2.350.000.000	67	2.475.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pariwisata	
3.26.04	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektuan	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang HKI nya terfasilitasi	%				10	1.705.000.000	15	1.830.000.000	20	1.985.000.000	25	2.125.000.000	30	26.435.000.000		
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%		0	160.000.000	100	1.625.000.000	100	1.700.000.000	100	1.815.000.000	100	1.955.000.000	100	2.085.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pariwisata	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Kreatif																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	21.752.874.506	100	24.436.667.715	100	25.169.767.746	100	25.924.860.779	100	26.702.606.602	100	27.503.684.800	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	%	2	4	582.574.500	6	871.200.550	8	965.409.245	%	1.070.456.538	12	1.187.709.833	12	1.187.709.833	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	%	95	99.96	4.978.180.000	99.96	6.873.918.000	99.96	7.437.297.300	99.96	7.953.933.550	99.96	8.592.647.175	99.96	8.592.647.175	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanganggulangan bencana	%		12,02	83.720.000	12,02	197.190.000	12,02	209.010.000	12,02	218.940.000	12,02	228.440.000	12,02	228.440.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh	%	3	4,1	3.520.749.200	4,5	3.618.809.200	4,5	550.700.000	4,5	605.700.000	4,5	666.400.000	4,5	666.400.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	11.290.810.554	100	11.293.493.154	100	11.632.297.949	100	11.981.266.887	100	12.340.704.894	100	12.710.926.041	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah populasi peternakan (sapi)	ekor	######	######	2.763.136.000	######	935.663.400	######	1.015.386.290	######	1.102.389.297	######	1.197.365.822	######	1.301.076.881	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
		Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha)	kelapa sawit 2,894 ton/ha, karet 0,920 ton/ha, kakao 0,747 ton/ha, tebu 6,649 ton/ha, lada 0,829 ton/ha, kelapa dalam		kelapa sawit 3,009 ton/ha, karet 0,938 ton/ha, kakao 0,769 ton/ha, tebu 6,848 ton/ha, lada 0,837 ton /ha, kelapa dalam 1,188 ton/ha		kelapa sawit 3,130 ton/ha, karet 0,957 to/ha, kakao 0,793 ton/ha, tebu 7,053 ton/ha, lada 0,845 ton/ha, kelapa dalam 1,212 ton/ha		kelapa sawit 3,255 ton/ha, karet 0,976 ton/ha, kakao 0,816 ton/ha, tebu 7,265 ton/ha, lada 0,84 ton/ha, kelapa dalam 1,236 ton/ha		kelapa sawit 3,385 ton/ha, karet 0,995 ton/ha, kakao 0,840 ton/ha, tebu 7,482 ton/ha, lada 0,862 ton/ha, kelapa dalam 1,261 ton/ha		kelapa sawit 3,520 ton/ha, karet 1,015 ton/ha, kakao 0,865 ton/ha, tebu 7,707 ton/ha, lada 0,871 ton/ha, kelapa dalam 1,286 ton/ha		kelapa sawit 3,661 ton/ha, karet 1,036 ton/ha, kakao 0,891 ton/ha, tebu 7,938 ton/ha, lada 0,880 ton/ha, kelapa dalam 1,311 ton/ha		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
			1,165 ton /ha															
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sarana dan rasarana peternakan dan perkebunan (0,1%)	%	10	10	257.123.000	11	457.123.000	12	498.154.300	13	543.054.680	14	592.199.346	15	646.000.437	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	81	81	335.955.500	81	408.004.160	82	448.804.576	83	493.685.034	84	543.053.537	85	597.358.891	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulang	Persentase Luas lahan perkebunan yang tertangani akibat	%	0,01	0,02	67.245.000	0,03	94.087.000	0,04	103.495.700	0,05	113.845.270	0,06	125.229.797	0,07	137.752.777	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	an Bencana Pertanian	bencana															Urusan Pertanian	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan sarana dan rasarana peternakan dan perkebunan (0,1%)	%	10	10	257.123.000	11	457.123.000	12	498.154.300	13	543.054.680	14	592.199.346	15	646.000.437	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pertanian	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	10.536.222.221	100	10.350.341.521	100	10.660.851.767	100	10.980.677.320	100	11.310.097.639	100	11.649.400.568	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	%	100	100	726.093.500	100	749.593.500	100	767.093.500	100	786.793.500	100	808.800.000	1000	829.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%		<9%	488.333.200	<9%	547.680.000	<9%	1.334.750.000	<9%	1.526.740.000	<9%	1.619.900.000	<9%	1.857.580.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%		57		60		63		66		69		71			
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%		33		44		55		66		88		90			
3.30.05	Program Pengembangan Ekaspor	Nilai Ekspor Non Migas tahun berkenaan	%	95	95,5		96	235.000.000	96.5	270.250.000	97	269.053.000	97.5	351.500.000	98	404.210.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapaanya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	%	72,14	75	410.000.000	80	430.000.000	85	440.000.000	90	456.500.000	95	458.500.000	100	461.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku UMKM yang dibina	%		30	133.694.000	40	200.000.000	40	196.380.000	50	231.096.000	60	271.700.000	70	326.040.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perdagangan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.858.032.054	100	3.711.708.454	100	3.823.059.708	100	3.937.751.499	100	4.055.884.044	100	4.177.560.565	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi	%		85		85		85		85		85		85			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		baik																
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Implentasi pelaksanaan RPIK	%	0,00	0	1.200.000.000	5	1.480.000.000	5	2.096.000.000	10	2.729.000.000	10	3.339.000.000	15	3.706.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan industry yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan terhadap industry yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan	%	0,00	60	162.349.000	60	195.000.000	65	205.000.000	65	215.000.000	70	226.000.000	70	237.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian	
3.31.04	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase peningkatan data perusahaan industri yang ada di dalam Siinas terhadap jumlah total perusahaan industri	%	0,00	1	351.590.000	1	720.000.000	1	850.000.000	2	945.000.000	2	1.040.000.000	2	1.160.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian	
3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan	%		86	45.000.000	89	192.500.000	92	211.750.000	95	239.512.000	98	269.063.000	100	230.950.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perindustrian	
		Persentase penerbitan TDG	%		100		100		100		100							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	%		1		1		1		0		0		0			
		Persentase penerbitan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) yang tepat waktu	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten	%		55		58		61		64		67		70			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																		
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	org	151	151	140.750.000	151	140.750.000	171	141.750.000	176	142.750.000	181	143.750.000	201	144.750.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Transmigrasi	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
SEKRETARIAT DAERAH																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	40.893.826.775	100	40.947.143.175	100	42.994.500.334	100	45.144.225.350	100	47.401.436.618	100	49.771.508.449	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat Daerah	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kinerja kecamatan dan kelurahan yang mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan	%	100	100	27.337.421.669	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	100	28.157.544.319	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat Daerah	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Realisasi Penerimaan PAD Sektor BUMD	%	100	100	2.093.277.100	100	2.302.604.810	100	2.532.865.291	100	2.993.386.253	100	3.292.724.878	100	3.621.997.365	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat Daerah	
		Persentase PD Yang Dokumen Adminstrasi Sesuai Dengan Standar	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan Secara Elektronik	%	100	100		100		100		100		100		100			
SEKRETARIAT DPRD																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	43.841.008.093	100	43.567.392.113	100	44.874.413.876	100	46.220.646.293	100	47.607.265.681	100	49.035.483.652	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat DPRD	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD	%		90	37.254.644.000	90	32.985.502.300	90	38.122.484.000	90	38.600.162.000	90	38.250.162.000	90	38.250.162.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Sekretariat DPRD	
		Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	%		90		90		90		90		90		90			
		Persentase pembahasan Raperda	%		90		90		90		90		90		90			
		Persentase pembahasan produk hukum non perkada	%		90		90		90		90		90		90			
		Persentase pembahasan kebijakan anggaran	%		90		90		90		90		90		90			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PERENCANAAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	7.767.200.686	100	7.646.815.407	100	7.876.219.869	100	8.112.506.465	100	8.355.881.659	100	8.606.558.109	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perencanaan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah tahunan (ke-n) dengan tingkat capaian outcome minimal 75%		75	75	1.819.618.100	76	1.856.010.462	77	1.893.130.671	78	1.930.993.285	79	1.969.613.150	80	2.009.005.413	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perencanaan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		75	75		76		77		78		79		80			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100	100		100		100		100		100		100			
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%		76	77	2.610.965.000	80	2.663.184.300	83	2.716.447.986	87	2.770.776.946	90	2.826.192.485	92	2.882.716.334	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Perencanaan	
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik			100		100		100		100		100		100			
		Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik			100		100		100		100		100		100			
KEUANGAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang	%		100	42.250.984.865	100	42.456.507.361	100	43.730.202.582	100	45.042.108.659	100	46.393.371.919	100	47.785.173.077	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		berlaku																
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	108,18	100	3.788.537.020	100	3.902.193.131	100	4.019.258.925	100	4.139.836.692	100	4.264.031.793	100	4.391.952.747	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	94,93	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	95	100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	42.256.419.440	100	41.660.816.540	100	42.910.641.036	100	44.197.960.267	100	45.523.899.075	100	46.889.616.048	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD	%	100	100	506.657.870.532	100	519.866.530.828	100	529.658.909.403	100	528.932.430.028	100	542.424.286.678	100	525.306.583.674	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	
		Prosentase ketepatan waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		dan ketepatan waktu																
		Prosentase jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	%	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	
		Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100		100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	
		Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		100			
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100,00	100	561.987.700,00	100	573.227.454,00	100	584.692.003	100	596.385.843	100	608.313.560	100	620.479.831	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Keuangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
KEPEGAWAIAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	6.994.934.853	100	7.706.238.928	100	7.937.426.096	100	8.175.548.879	100	8.420.815.345	100	8.673.439.805	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepegawaian	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase data kepegawaian yang akurat	%	95	100	2.854.972.975	100	3.100.883.300	100	4.039.781.000	100	4.194.136.000	100	4.350.295.500	100	4.543.997.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kepegawaian	
		Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	%	7,48	8,25		8,25		51,02		15,52		5,51		10,75			
		Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	%	0	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100			
		Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	%	0	81		90		90		95		95		95			
		Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	%	100	100	4.452.784.000	100	2.655.038.000	100	2.864.813.000	100	4.254.923.000	100	4.441.576.000	100	4.271.105.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	
		Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	%		100		100		100		100		100		100			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	3.948.613.856	100	3.578.692.399	100	3.686.053.171	100	3.796.634.766	100	3.910.533.809	100	4.027.849.823	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Litbang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	60	70	5.597.343.856	70	5.873.673.499	80	9.718.500.000	80	10.754.500.000	90	10.430.200.000	90	11.071.500.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Litbang	
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	60	70		70		80		80		90		90			
INSPEKTORAT DAERAH																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	12.555.054.141	100	14.185.599.800	100	14.611.167.794	100	15.049.502.828	100	15.500.987.913	100	15.966.017.550	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Inspektorat	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	75	80	4.802.588.600	85	5.042.718.030	90	5.294.853.932	95	5.559.596.628	100	5.837.576.459	100	6.129.455.282	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Inspektorat	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100	100	775.992.700	100	814.792.335	100	855.531.952	100	898.308.549	100	943.223.977	100	990.385.176	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Inspektorat	
KECAMATAN																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-	%		100	68.086.233.492	100	68.086.233.492	100	67.246.233.492	100	67.246.233.492	100	67.246.233.492	100	67.246.233.492	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kecamatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		undangan yang berlaku																
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		85		85		85		85		85		85			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	%						100	840.000.000	100	840.000.000	100	840.000.000	100	840.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kecamatan	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kampung/Kelurahan yang telah melakukan Musrenbang Kampung/Kelurahan sesuai	%	100	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	100	3.660.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kecamatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		dengan peraturan																
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi bidang ketertiban umum Yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	100	5.112.000.000	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kecamatan	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	%		100	4.021.882.563	100	3.860.885.423	100	3.976.711.986	100	4.096.013.345	100	4.218.893.746	100	4.345.460.558	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesbangpol	
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	%		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi	%		85		85		85		85		85		85			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
		baik																
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	88.846.000	100	297.923.500	100	312.819.675	100	328.460.659	100	344.883.692	100	362.127.876	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesbangpol	
8.01.03	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik	%				15	1.586.250.398	18,59	1.419.549.494	37,8	1.490.526.969	57,7	1.565.053.317	78,2	1.643.305.983		SPM
		Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	%				100		100		100		100		100			
8.01.04	Program pembendayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%			6.540.000.000	61	6.244.282.600	74	6.556.496.730	80	6.884.321.567	89	7.228.537.645	100	7.589.964.527		SPM
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pemuda dan Pelajar yang mendapatkan Pembinaan terhadap bahaya Narkoba	%			38.500.000	14,00	38.500.000	33,00	40.425.000	53,00	42.446.250	74,00	44.568.563	100	46.796.991	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesbangpol	SPM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pemba-ngunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	KET
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang terbahas dalam rakor	%		100	204.557.700	100	191.772.900	100	201.361.545	100	211.429.622	100	222.001.103	100	233.101.159	Perangkat Daerah Penanggung-jawab Bidang Urusan Kesbangpol	SPM
		Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	%		80		80		85		88		90		100			
TOTAL						**2.647.160.032.185**		**2.685.518.662.440**		**2.749.201.244.548**		**2.814.686.088.742**		**2.882.035.670.784**		**2.951.315.037.481**		

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritasditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tertuang pada tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat									
1	Indeks pembangunan gender (IPG)	indek	89,87	90,27	90,68	91,08	91,49	91,89	92,29
2	Rata-rata lama sekolah (MYS)	tahun	7,58	7,60	7,62	7,64	7,66	7,68	7,70
3	Lama harapan sekolah (EYS)	tahun	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,97	12,98
4	Usia harapan hidup	tahun	69,84	69,94	70,04	70,14	70,24	70,34	70,44
5	Prevalensi intervensi stunting	persen	13,34	12,7	12,06	11,42	10,78	10,14	9,50
6	Laju pertumbuhan penduduk	persen	0,71	0,66	0,61	0,56	0,51	0,46	0,41
7	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)		N/A	N/A	57	60	64	67	70
8	Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional (jenis)	persen	17,86	17,86	21,43	25,00	28,57	32,14	32,14
9	Indeks pembangunan literasi masyarakat	indek	N/A	N/A	13	14	15	16	17
Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa									
10	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	61,50	63,50	65,50	67,50	69,50	71,50	73,50
11	Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten	persen	86,36	88,36	89,36	90,36	91,36	92,36	93,36
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	82	83,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00
13	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	v/c	0,57	0,58	0,60	0,60	0,62	0,63	0,63
14	Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi	persen	91,87	92,79	93,72	94,65	9560	96,56	97,52
15	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Persen	93,02	94,2589	95,498	96,737	97,976	99,2152	99,2152
16	Jumlah Luas kawasan kumuh	ha	61,77	52,33	43,61	34,89	26,17	17,45	8,73
17	Rumah tidak layak huni	persen	27,18	23,74	21,74	17,40	13,92	11,13	8,91
18	Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	persen	89,50	89,60	91,60	93,28	94,62	95,70	96,56
19	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap	persen	94,30	94,44	95,44	96,35	97,08	97,67	98,13

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	sanitasi layak dan atau aman								
20	Indeks kualitas lingkungan air	ika	55	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,50
21	Indeks kualitas udara	iku	72	85	86	87	88	89	90
22	Indeks tutupan lahan	itl	30	31	32	33	34	35	36
23	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang	persen	78	78	80	82	84	86	88
Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan									
24	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan terhadap PDRB	persen	36,09	36,40	36,80	37,00	37,30	37,70	38,00
25	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	9,74	10	11	11,5	12	12,5	13
26	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB	persen	22,54	22,90	23,30	23,70	24,00	24,50	25,00
27	Skore PPH	score	85,20	86,10	86,70	87,20	88,00	88,50	89,00
28	Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	persen	18,04	20	20	20	20	20	20
29	Rasio kemandirian fiskal	persen	7,20	7,50	7,80	8,10	8,40	8,70	8,90
30	Persentase peningkatan investasi	persen	8,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
31	Indeks desa membangun	indek	0,69	0,71	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82
32	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	73,05	73,48	73,90	74,33	74,75	75,18	75,60
33	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	N/A	4	4	4	4	4	20
Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah									
34	Jumlah kejadian konflik sosial	kali	0	0	0	0	0	0	0
35	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran perda	persen	N/A	10	10	10	10	10	10
36	Indeks resiko bencana	indek	82,00	72,16	62,32	52,48	42,64	32,80	22,96
Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik									
37	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	Indeks SPBE	indek	N/A	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
39	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	B	BB	BB	A	A	A
40	Indek inovasi daerah	indek	1.705	1.725	1.745	1.765	1.785	1.800	1.820
41	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	nilai	85,01	85,01	86,72	88,81	89,47	90,10	90,50
42	Indeks profesionalitas ASN	indek	55	56	57	58	59	60	61

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah tertuang pada tabel 8.2.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR										
	BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	64,32	64,34	64,36	64,38	64,4	64,42	64,44	64,32	SPM
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	99,80	99,82	99,84	99,86	99,88	95,75	95,77	99,8	SPM
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,80	99,82	99,84	99,86	99,88	95,75	95,77	99,8	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	24,7	60	65	70	72	74	76	24,7	SPM
	BIDANG KESEHATAN									
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,11	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	
2	Presentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
4	Presentaseibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
7	Presentase anaka usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
8	Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Ppresentase warga negara usisa 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
10	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
12	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
13	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS kewenangan kabupaten	%	26,09	26,09	26,19	26,28	26,38	26,47	26,57	
2	Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Aplikasi	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	
3	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	89,54	89,60	91,60	93,28	94,62	95,70	96,56	
4	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	94,29	94,44	95,44	96,35	97,08	97,67	98,13	
5	Rasio kepatuhan IMB	%	80	80	85	85	90	90	95	
6	Tingkat kemantapan jalan	%	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat	%	0	44,44	77,78	88,89	93,33	96,67	97,78	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Aplikasi	100	100	100	100	100	100	100	
3	presentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	29,01	35	40	45	50	55	60	SPM
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH	%	7770	7000	7000	7000	7000	7000	7000	SPM
5	Jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0,16	0,21	0,26	0,31	0,36	0,41	0,46	SPM
	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Presentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Petugas	94	91	92	94	95	96	98	SPM
2	Presentase Perda dan perkada yang ditegakkan	%	83	86	88	92	94	95	97	SPM
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	N/A	10	20	30	40	50	60	SPM
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	N/A	80	85	90	95	95	100	SPM
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	N/A	80	85	90	95	95	100	SPM
6	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
7	Waktu tanggal (reponse) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
	BIDANG SOSIAL									
1	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti									
2	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	SPM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
	BIDANG TENAGA KERJA									
1	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	70	75	80	85	90	92	95	
3	Tingkat Produktifitas tenaga kerja	%	70	75	80	85	90	92	95	
4	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/OKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	57,97	60	63	66	70	73	75	
5	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	80	82	83	84	85	90	90	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLIDUNGAN ANAK									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,00056	0,00056	0,00056	0,00059	0,00061	0,00065	0,00070	
2	Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
	BIDANG PANGAN									
1	Presentase ketersediaan pangan	%	30	31	50	70	80	90	100	
	BIDANG PERTANAHAN									
1	Tersedianya tanah obyek *landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	kelebihan maksimum dan tanah absentee									
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	59,43	61,83	62,41	63	63,58	64,15	64,58	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah	%	30	31	32	33	34	35	36	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	N/A	0	60	70	80	90	100	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL									
1	Perekaman KTP Elektronik	%	90	90	91	92	93	94	95	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	5,99	9	10	11	12	13	14	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,71	97,72	97,73	97,74	97,75	97,76	97,77	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	5	7	9	11	13	15	17	
5	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN KAMPUNG									
1	Presentase pengentasan desa tertinggal	Poin	2,66	2,66	0,10	0	0	0	0	
2	Presentase peningkatan status desa mandiri	Unit	0,10	0,10	3,32	5,65	8,31	10,96	14,95	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	TFR (Angka kelahiran total)	%	2,23	2,15	2,12	2,09	2,06	2,03	2,00	
2	Presentase pemakaian kontrasepsi modern	%	71,51	71,89	72,27	72,65	73,03	73,41	73,79	
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	8.68	8.38	8.08	7.78	7.48	7.18	6.88	
	BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	%	82	83	85	85	86	86	86	
2	Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C	0,57	0,58	0,60	0,60	0,62	0,63	0,63	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Presentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	2,67	2,67	2,67	10	20	30	35	
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	34,21	34,21	34,21	47,37	57,89	68,42	79,95	
3	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran peyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	10	12	15	17	18	20	25	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	%	6,05	6,05	12,1	18,15	24,21	30,26	36,31	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	0,62	0,62	1,24	1,86	2,48	3,1	3,72	
	BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Presentase peningkatan investasi	%	10	10	10	10	10	10	10	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,39	0,44	0,48	0,55	0,6	0,66	0,73	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,61	2,79	2,96	3,13	3,31	3,48	3,65	
3	Peningkatan prestasi olah raga	%	17,86	17,86	21,43	25,00	28,57	32,14	32,14	
	BIDANG STATISTIK									
1	Presentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
	BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan data	%n	100	100	100	100	100	100	100	
	BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	29,78	34	39	44	49	54	58	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	54,17	56	58	60	63	66	70	
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indek	N/A	N/A	13	14	15	16	17	
	BIDANG KEARSIPAN									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	40	45	50	55	60	60	65	
URUSAN PILIHAN										
	BIDANG PERIKANAN									
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	47.493,3	48.799	50.140	51.521	52.941	54.402	55.908	
	BIDANG PARIWISATA									
1	Prosentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	3	3	3	3	3	3	3	
2	Presentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	47,54	52,30	55,00	57,00	60,00	62,00	65,00	
3	Tingkat hunian akomodasi		11,17	15	20	40	50	55	60	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		3,9	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3	3	3	3	3	3	3	
	BIDANG PERTANIAN									
1	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	Ha/Thn	522,85	550	570	590	610	630	650	
2	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	0	0	0	0	0	0	
	BIDANG PERDAGANGAN									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Desa	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase kinerja realisasi pupuk	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan annya bertanda tera yang sah berlaku	%	71,16	73	75	77	79	80	82	
	BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	-4,27	1	5	5	5	5	5	
2	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IU) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	%	100	100	100	100	100	100	100	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
1	Rasio belanja pengawai luar guru dan tenaga kesehatan	Jenis Aplikasi	31,65	32	33	34	35	36	37	
2	Rasio PAD	Persen	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	8,9	
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Persen	3,057	3,1	3,15	3,17	3,19	3,21	3,23	
4	Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)	Dokumen	2+	3	3	3	3	3	3	
5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Dokumen	27,99	30	31	32	33	34	35	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	KET
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	(dikurangi tranfer expenditures)									
6	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	KEPEGAWAIAN									
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (persen) (PNS)= tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Opini	114,5	120	125	130	135	140	145	
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	15,51	17	17	75	75	80	80	
3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	87,81	89	90	92	94	95	97	
	MANAGEMEN KEUANGAN									
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	14	13	12	11	10	9	8	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap angaran PAD dalam APBD	%	2	2	2	2	2	2	2	
3	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,20	3,13	2,26	2,27	2,27	2,27	2,28	

BAB IX
PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifatindikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan RPJMD di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

a. Bupati Lampung Tengah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban melakukan penyusunan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah yaitu **"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"** dapat tercapai.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD